PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERUBAHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

(P-RPJMD)

TAHUN
2019 - 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya terus disempurnakan; terakhir dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan paket peraturan perundangan lain terkait. Prinsip dasar desentralisasi adalah setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dengan tetap sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun kedepan dimana perencanan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dalam perumusannya, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi RPJP Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Selanjutnya, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam

penyusunan RPJMD kabupaten/kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun.

Selanjutnya, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2019, 2020, dan 2021 (tahun berjalan). Sampai dengan pelaksanaan RKPD tahun 2020 pelaksanaan kebijakan RPJMD dilakukan pengendalian dan evaluasi yang antara lain memberikan rekomendasi agar dilakukan perubahan atas RPJMD. Sebagaimana dipahami bersama, sesuai pasal 342 ayat 1 Permendagri No. 86 Tahum 2017, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor. *Pertama,* hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. *Kedua*, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. *Ketiga,* terjadi perubahan yang mendasar. Terjadinya perubahan mendasar dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konfllk sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan dokumen perencanaan adalah berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya juga menyangkut atau bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, hal mana belum tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan nasional lain adalah amanat untuk menjembatani konsistensi antara perencanaan dan keuangan daerah berupa perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan kaerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Mulai tahun anggaran 2021 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perubahan atau perbaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomeklatur yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun menyangkut krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 atau dalam kondisi terakhir ini adanya resesi global dan nasional berupa antara lain kemandegan aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara masif. Respons kebijakan (antisipatif) yang telah dilakukan secara nasional dan daerah telah

direkam dalam beberapa prioritas pembangunan pada RKPD 2020 dan 2021, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Respons dimaksud juga termasuk dilakukannya realokasi dan *refocussing* APBD Tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

Terakhir, hasil analisis kebijakan berdasarkan antara lain evaluasi hasil kebijakan jangka menengah sampai dengan tahun 2020 menyimpulkan bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan dampaknya pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 yang tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan beberapa indikator penting lain terdampak.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Perubahan RPJMD dilakukan dengan memetakan kebijakan tahunan yang telah atau sedang dilaksanakan yaitu pada tahapan RKPD tahun 2019 dan 2020 dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022 dan 2023 dengan memerhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyususnan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Tmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).

1.3. Hubungan Antardokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

3. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

4. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dan atau perubahan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota. Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini

Gambar 1.1

Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

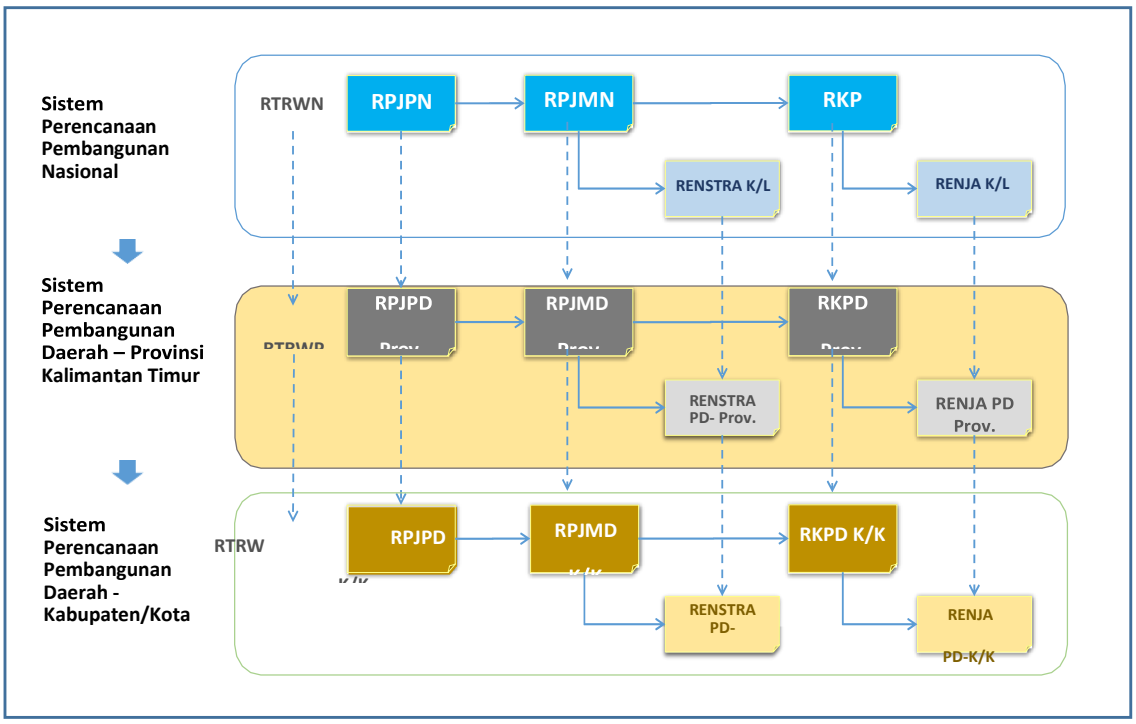

Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. RPJMD, RTRWP dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana di atur dalam RTRWP. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals, SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu; mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

Gambar 1.2
Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD

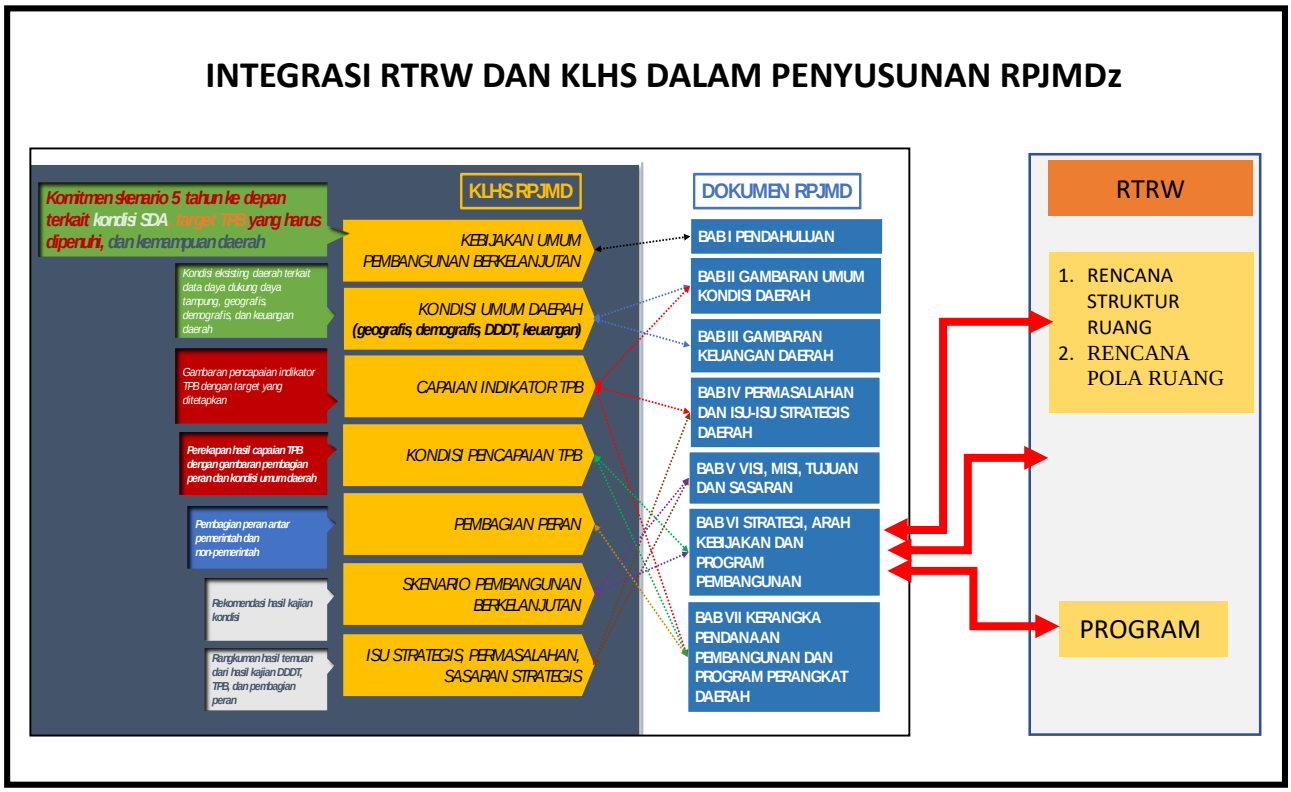

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan merekam ulang kebijakan pembangunan tahunan yang telah dilaksanakan/direncanakan sampai dengan tahun 2021 dan menyesuaikan/merevisi kebijakan pembangunan pada periode tersisa yaitu tahun 2022 dan 2023.

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur di sisa periode pembangunan yaitu pada RKPD 2022 dan RKPD 2023. Dalam menetapkan penyelarasan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program pembangunan daerah,

dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan dua tahun berjalan serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
2. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dalam menghadapi gejolak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
3. Menyediakan instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses pembangunan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadi perhatian besar mengingat sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* untuk menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian. Hal ini didasari dengan besarnya potensi keanekaragaman sumber daya alam, baik terbarukan maupun tak terbarukan. Sumber daya alam yang terkenal diantaranya sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi (SDA tak terbarukan). Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Maka, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2^0 33’ Lintang Utara (LU) dan 2^0 25’ Lintang Selatan (LS), 113^0 44’ Bujur Timur (BT) dan 119^0 00^0 Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam

yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

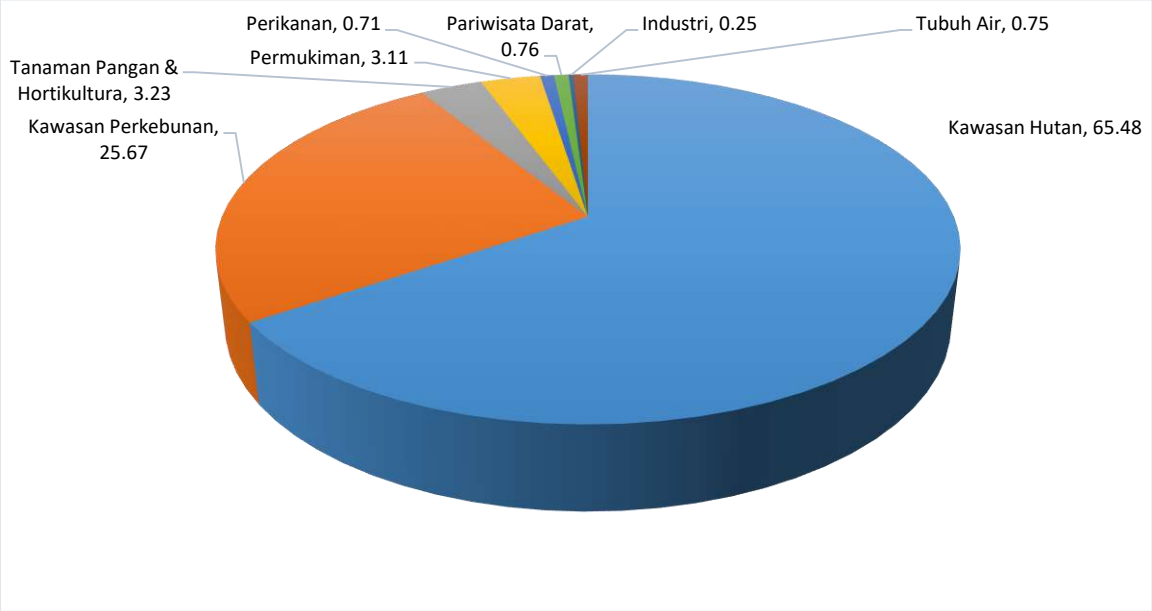

Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2035

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95,758 Ha (0,75%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang

termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).

Beberapa sungai yang ada diwilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyiur, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan.

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	141
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	**12.734.692**	**103**	**1.038**

Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017.
*Keterangan: *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif*

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa

kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel 2.2 berikut ini menunjukan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (^{0}C)			
	- Minimum	22,80	25,20	21,60
	- Maksimum	35	32	36,40
2	Kelembaban (%)	80	88	80
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012	1.011,8	1.012,4
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	5,00	7,00
5	Curah Hujan (mm)	1.970	3.674,20	2.437,9
6	Penyinaran Matahari (%)	50	51	54

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim (Sidata Kaltim)

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah.

Salah satu dasar perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan perhitungan baru akan menyusun dokumen kajian pada tahun 2020 dan rencana pada tahun 2021 sehingga belum bisa menyajikan data Indeks Risiko Bencana 5 tahun tahun terakhir. Adapun Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB Pusat adalah Indeks Risiko Bencana Tahun 2013 dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks 165 dengan kategori tinggi.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 3.630.765 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.769.073 jiwa pada tahun 2020.

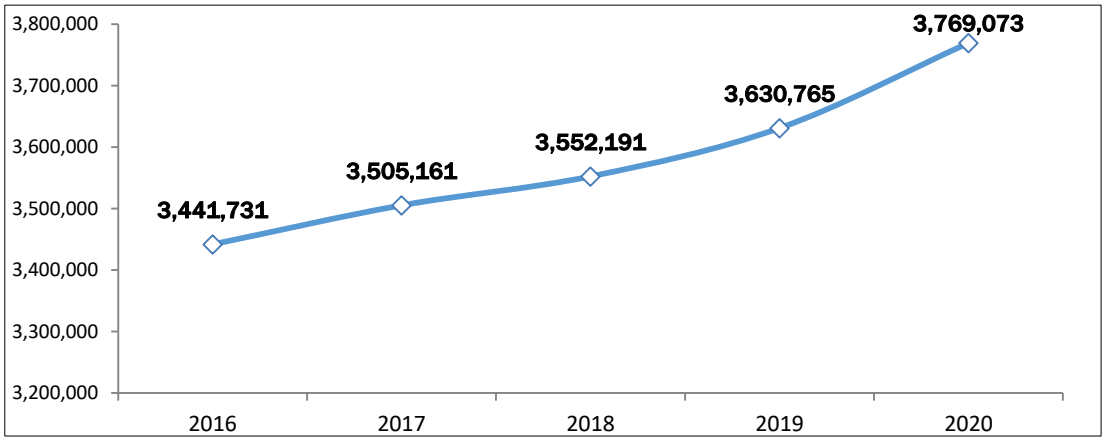

Sumber : Dinas Kependudukan Pemberdayaaan Perempuan dan Anak

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,70 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,90%) Kabupaten Penajam Paser Utara (4,80%), Kabupaten Kutai Barat (4,40%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,90%).

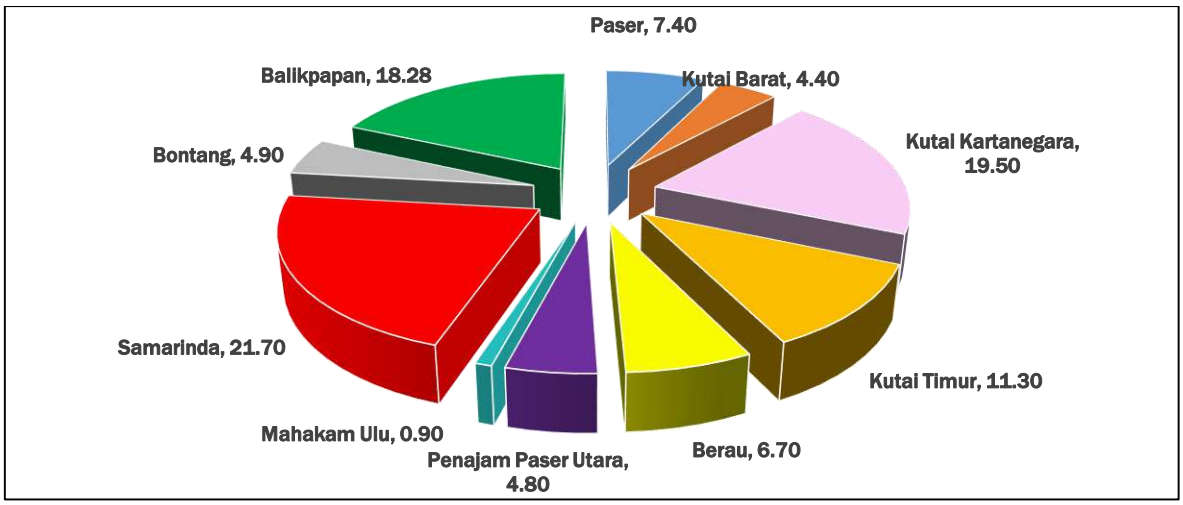

Sumber : Dinas Kependudukan Pemberdayaaan Perempuan dan Anak

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,83 persen selama lima tahun sejak tahun 2016 – 2020. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling laju pertumbuhan penduduk sebesar 7,50 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan tumbuh sebesar 0,42 persen.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2016-2020) (%)
1	Paser	248.037	255.648	259.417	265.148	277.401	2,26
2	Kutai Barat	158.085	160.000	162.200	164.048	165.938	2,35
3	Kutai Kartanegara	662.481	674.759	677.755	696.784	734.485	2,08
4	Kutai Timur	415.553	418.625	420.760	422.905	424.334	0,42
5	Berau	211.512	221.836	224.654	232.189	251.439	3,52
6	Penajam Paser Utara	166.055	168.012	170.475	173.671	181.349	1,78
7	Mahakam Ulu	24.381	26.938	28.833	30.321	35.010	7,50
8	Samarinda	763.729	769.632	778.883	793.576	817.254	1,36
9	Bontang	173.770	176.515	179.408	181.618	184.784	1,24
10	Balikpapan	618.128	633.196	649.806	670.505	697.079	2,43
Kalimantan Timur		**3.441.731**	**3.505.161**	**3.552.191**	**3.630.765**	**3.769.073**	**1,83**

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kaltim tahun 2021 data diolah

Rata-rata usia penduduk yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dibanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen pada usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun mengalami penurunan sebesar 0,88 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,95 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 pesen, dan untuk usia 19-24 tahun dimana katagori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan kemampuan sumberdaya manusia yang handal. Pada tahun 2020 katagori penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan sebesar 70,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76

persen, namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,56 persen. Rata rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun demikian angka tersebut masih dibawah rata rata target nasional.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun yang tidak bersekolah lagi Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki					
7-12	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03
13-15	2,08	0,54	1,52	1,43	1,34
16-18	18,32	17,49	19,94	17,84	19,17
19-24	70.16	68,80	67,55	71,64	69,98
7-24	**26,25**	**25,07**	**25,48**	**26,62**	**27,32**
Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7-12	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26
13-15	1,55	1,05	0,12	0,48	0,43
16-18	19,70	19,50	16,05	18,40	16,66
19-24	71,01	70,47	72,30	67,62	70,38
7-24	**25,11**	**24,23**	**24,96**	**24,19**	**25,10**
Laki-Laki + Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7-12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
13-15	1,82	0,78	0,86	0,98	0,88
16-18	18,95	18,50	18,07	18,10	17,95
19-24	70,56	69,55	69,78	69,76	70,17
7-24	**25,70**	**25,67**	**25,23**	**25,45**	**26,25**

Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2020

Tidak / Belum Pernah Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7-12	0,46	0,33	0,24	0,16	0,12
13-15	0,00	0,44	0,25	0,19	0,05
16-18	0,24	0,18	0,38	0,09	0,17
19-24	0,56	0,41	0,38	0,35	0,12
7-24	**0,38**	**0,35**	**0,31**	**0,21**	**0,12**
Masih Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7-12	99,54	99,67	99,67	99,68	99,73
13-15	98,18	98,79	98,89	98,83	99,07
16-18	80,81	81,32	81,55	81,81	81,88
19-24	28,88	30,04	29,84	29,89	29,71
7-24	**73,92**	**74,97**	**74,46**	**74,34**	**73,63**
Tidak Bersekolah Lagi					
Kelompok Usia Sekolah	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7-12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
13-15	1,82	0,78	0,86	0,98	0,88
16-18	18,95	18,50	18,07	18,10	17,95
19-24	70,56	69,55	69,78	69,76	70,17
7-24	**25,70**	**24,67**	**25,23**	**25,45**	**26,25**

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kaltim tahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 652,16 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 539,49 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 310,70 triliun. Pada tahun 2020, nilai PDRB migas menurun menjadi sebesar Rp 607,32 triliun, nilai PDRB non migas menjadi sebesar Rp 506,05 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara menigkat menjadi sebesar Rp 314,80 triliun.

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2016	508.880.236	400.847.613	243.496.746
2017	591.903.487	476.190.332	267.249.474
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.320.779	506.051.630	314.803.175

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Pada tahun 2019, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang turun tipis. Sementara itu Lapangan Usaha kontruksi dan lainnya mengalami peningkatan kontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sedangkan kontribusi yang lain mengalami peningkatan.

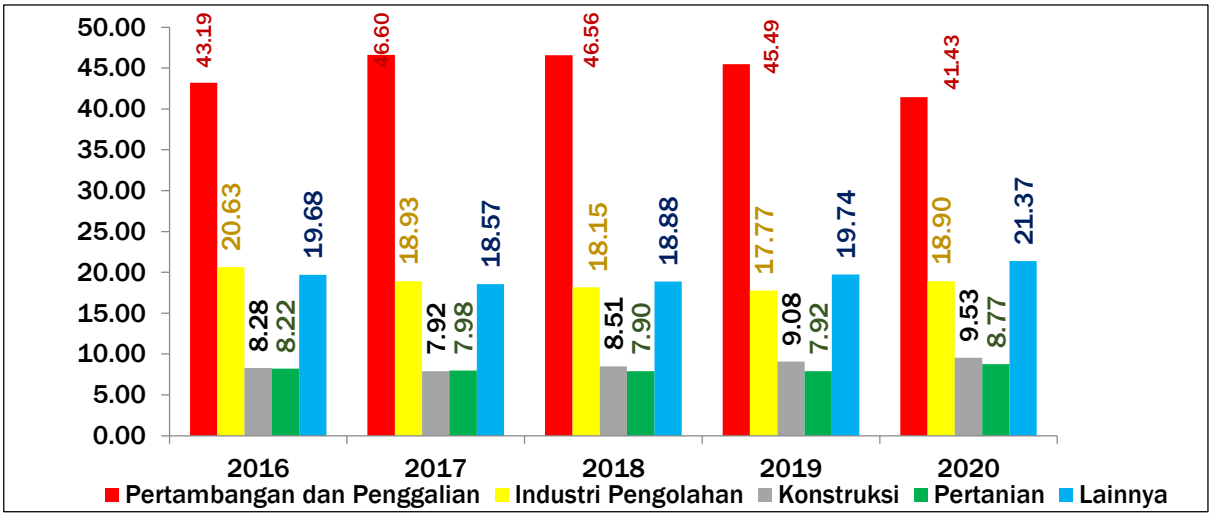

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.4
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 8,04 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara.

Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat

omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 6,46 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang pernah mengalami kontraksi hingga negatif 1,20 persen pada tahun 2015, perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 6 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur meningkat sebesar 4,77 persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas melesat cukup tajam hingga 7,20 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,35 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi -2,85 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha sehingga laju pertumbuhan ekonomi migas mengalami kontraksi sebesar 4,61 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen.

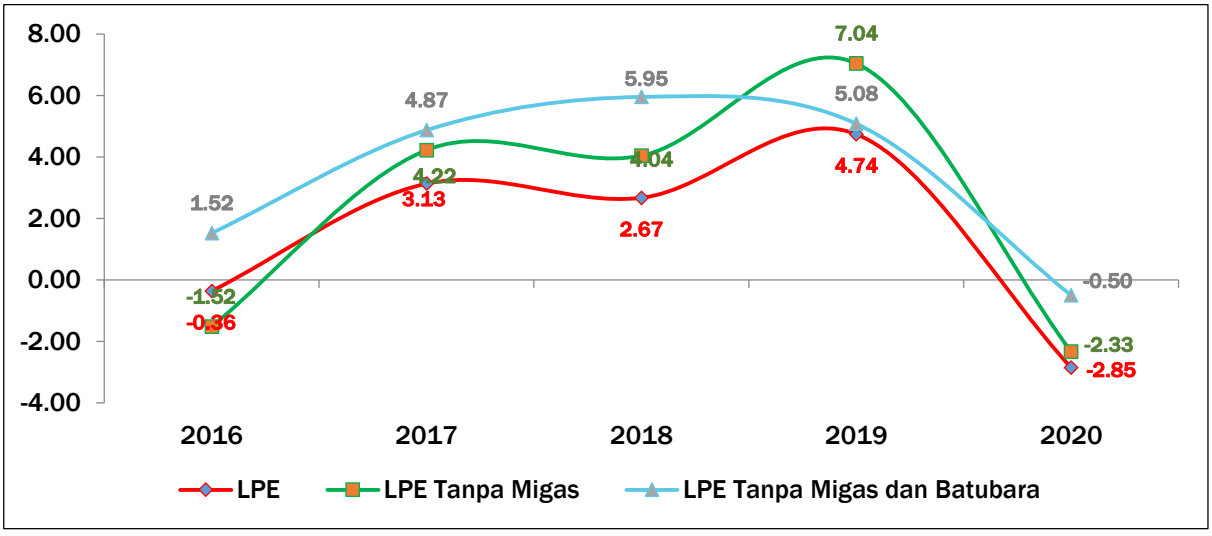

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,65 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,16 persen, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,99 persen, Lapangan Usaha Pertambangan

dan Penggalian sebesar 6,89 persen, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,86 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 6,12 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen. Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,67 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,96 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawahnya bahkan negatif.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,46	5,66	6,14	3,88	(1,12)
B	Pertambangan dan Penggalian	(3,52)	1,79	1,07	6,89	(4,58)
C	Industri Pengolahan	5,46	2,80	0,69	0,19	(2,77)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,32	6,78	9,76	8,65	11,59
E	Pengadaan Air	6,57	8,37	3,22	5,56	6,58
F	Konstruksi	(3,86)	5,76	7,91	5,62	(1,27)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,20	8,22	7,16	5,20	0,93
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	6,46	5,80	2,11	(5,59)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	8,37	8,70	6,12	(5,32)
J	Informasi dan Komunikasi	7,45	7,79	4,38	6,86	6,96
K	Jasa Keuangan	1,84	(0,72)	4,05	3,03	2,47
L	*Real Estate*	(0,83)	3,35	4,83	2,12	0,80
M,N	Jasa Perusahaan	(4,25)	3,54	4,96	1,43	(2,68)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(3,27)	(3,47)	3,11	4,25	(3,97)
P	Jasa Pendidikan	7,06	6,73	7,73	4,64	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,31	7,16	8,05	6,99	19,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,81	6,44	9,02	8,16	(3,07)
Laju Pertumbuhan Ekonomi		**(0,38)**	**3,13**	**2,67**	**4,77**	**(2,85)**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Beberapa hal yang menjadi catatan pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hampir pada seluruh sektor. Lapangan usaha dengan penurunan terbesar yaitu Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha Akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Jika dibandingkan secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 secara *y on y* menempatkan Kalimantan Utara dengan kontraksi pertumbuhan terendah dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 1,11 persen, lalu diikuti Kalimantan Tengah sebesar 1,40 persen, Kalimantan Selatan sebesar 1,81 persen, Kalimantan Barat sebesar 1,82 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,85 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.

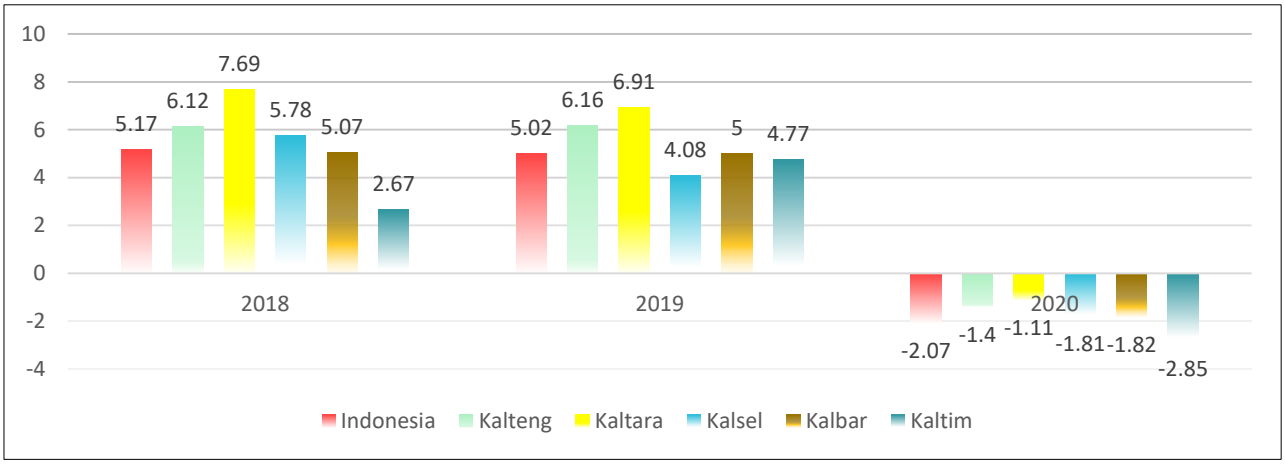

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	91.536,85	96.807,32	102.584,20	109.767,66	111.183,75
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.439,03	2.629,57	2.958,20	3.238,86	3.250,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.578,34	21.596,79	23.760,62	26.298,93	26.163,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	144.654,38	154.503,23	173.474,79	187.939,11	187.118,74
5	Perubahan Inventori	1.922,89	1.757,93	1.613,95	722,91	2.555,08
6	Net Ekspor Barang & Jasa	244.748,75	314.608,65	331.106,93	324.190,59	277.049,17
PDRB		**508.880,24**	**591.903,49**	**635.498,68**	**652.158,06**	**607.320,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2016-2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,99	16,36	16,26	16,79	18,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,48	0,44	0,47	0,50	0,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,63	3,65	3,73	4,03	4,31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,43	26,10	27,25	28,72	30,81
5	Perubahan Inventori	0,38	0,30	0,25	0,11	0,42
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	48,10	53,15	52,10	49,71	45,62

Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016-2020 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa.

PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (seperti batubara, minyak bumi dan gas alam).

Penurunan kontribusi pada tahun 2020 terjadi hampir pada seluruh Komponen Pengeluaran baik Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Komponen PMTB, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,56	2,58	3,14	3,15	(0,44)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(4,04)	4,89	8,57	6,77	(1,28)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(13,03)	(9,79)	7,91	7,70	(2,02)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6,04)	2,75	7,54	4,79	(1,54)
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	3,76	4,28	0,17	5,17	(4,60)
PDRB		**(0,38)**	**3,13**	**2,64**	**4,74**	**-2,85**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,85 persen. Dimana pertumbuhan terrendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,60 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -2,02 persen. Komponen Net Ekspor Antar Daerah selalu mencetak nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran. Pertumbuhannya juga terjaga di angka positif meskipun ekonomi Kaltim secara keseluruhan sempat terkoreksi negatif di tahun 2015 dan 2016. Adapun kondisi tahun 2020, melalui perhitungan sementara tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77 persen. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Komponen lain seperti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB tumbuh positif, sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi.

Tabel 2.11
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)

No	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	32.755,52	33.137,65	34.362,05	35.72,32	34.736,71
2	Kutai Barat	18.468,16	19.139,86	20.108,76	21.248,75	20.628,18
3	Kutai Kartanegara	117.035,58	118.943,99	121.509,48	126.160,17	120.556,60
4	Kutai Timur	83.771,69	86.520,25	88.582,49	95.660,74	92.585,57
5	Berau	25.461,37	26.227,29	26.769,40	28.270,78	27.322,32
6	Penajam Paser Utara	6.351,93	6.506,89	6.590,45	6.762,54	6.604,22
7	Mahakam Ulu	1.524,14	1.589,55	1.675,32	1.767,25	1.762,69
8	Balikpapan	73.221,46	76.032,08	79.807,11	83.678,77	83.097,89
9	Samarinda	39.744,72	41.274,97	43.323,57	45.485,74	45.000,47
10	Bontang	42.835,51	43.073,06	41.316,22	40.423,39	39.309,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

No	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	(4,98)	1,17	3,68	3,88	-4,67
2	Kutai Barat	(0,83)	3,64	5,04	5,58	-3,09
3	Kutai Kartanegara	(1,97)	1,63	2,12	3,77	-6,44
4	Kutai Timur	(1,08)	3,28	2,34	7,97	-6,9
5	Berau	(1,70)	3,01	2,05	5,55	-5,76
6	Penajam Paser Utara	(0,47)	2,44	1,24	2,52	-3,31
7	Mahakam Ulu	3,41	4,29	5,40	5,44	-0,67
8	Balikpapan	4,92	3,84	4,95	4,78	-2,04
9	Samarinda	0,56	3,85	4,94	4,97	-2,63
10	Bontang	(1,39)	0,55	-4,10	-2,18	-4,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Kemudian, jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 7,97 persen, disusul Kabupaten Kutai Barat dengan laju pertumbuhan 5,58 persen, Kabupaten Berau sebesar 5,55 persen, dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 5,44 persen. Disamping itu daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Sementara itu, Kota Bontang satu-satunya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 2,18 persen.

Namun pada tahun 2020 seluruh kabupaten kota mengalami kontraksi karena Pandemic COVID-19. Kabupaten Kutai Timur mengalami kontraksi terbesar yaitu -6,9% diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar -6,44%.

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,46 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 17 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen.

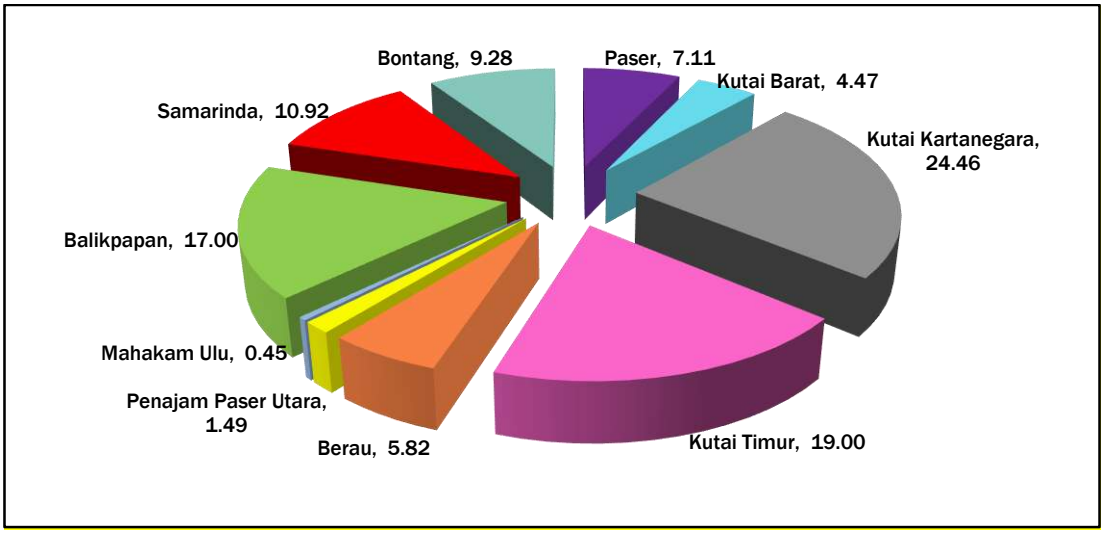

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2021

Gambar 2.7
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 77,74 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel 2.13
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	67,97	Pertanian	12,48	Industri	5,84
Kubar	Pertambangan	45,50	Pertanian	14,88	Konstruksi	12,11
Kukar	Pertambangan	59,81	Pertanian	14,92	Konstruksi	8,56
Kutim	Pertambangan	77,74	Pertanian	9,16	Industri	3,55
Berau	Pertambangan	56,43	Pertanian	11,64	Perdagangan	6,51
PPU	Pertambangan	25,83	Pertanian	21,96	Industri	16,46
Mahulu	Pertanian	75,18	Pertambangan	6,76	Konstruksi	6,48
Balikpapan	Industri	47,28	Konstruksi	16,53	Transportasi	9,85
Samarinda	Konstruksi	21,23	Perdagangan	17,09	Pertambangan	10,94
Bontang	Industri	79,60	Konstruksi	6,59	Perdagangan	3,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 73,41 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai

Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,91 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara.

Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian adalah Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.14
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	63,76	PMTB	19,49	K. Ruta	13,01
Kubar	Net Ekspor	38,61	PMTB	36,94	K. Ruta	16,04
Kukar	Net Ekspor	50,05	PMTB	35,22	K. Ruta	11,65
Kutim	Net Ekspor	75,29	PMTB	16,51	K. Ruta	6,07
Berau	Net Ekspor	61,70	PMTB	21,32	K. Ruta	12,38
Penajam PU	K. Ruta	42,68	PMTB	37,06	Net Ekspor	12,40
Mahulu	Net Ekspor	32,59	PMTB	29,06	K. Ruta	24,24
Balikpapan	PMTB	40,23	Net Ekspor	30,77	K. Ruta	25,19
Samarinda	K. Ruta	45,12	PMTB	41,34	K. Pemerintah	12,80
Bontang	Net Ekspor	74,79	PMTB	12,70	K. Ruta	10,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Berdasarkan kelompok pengeluaran pada PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten/kota didominasi oleh Komponen Net Ekspor antara lain Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Dua kabupaten/kota lainnya didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Kota Balikpapan didominasi oleh komponen pengeluaran PMTB.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada februari tahun 2021 hanya sebesar 0,39 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran.

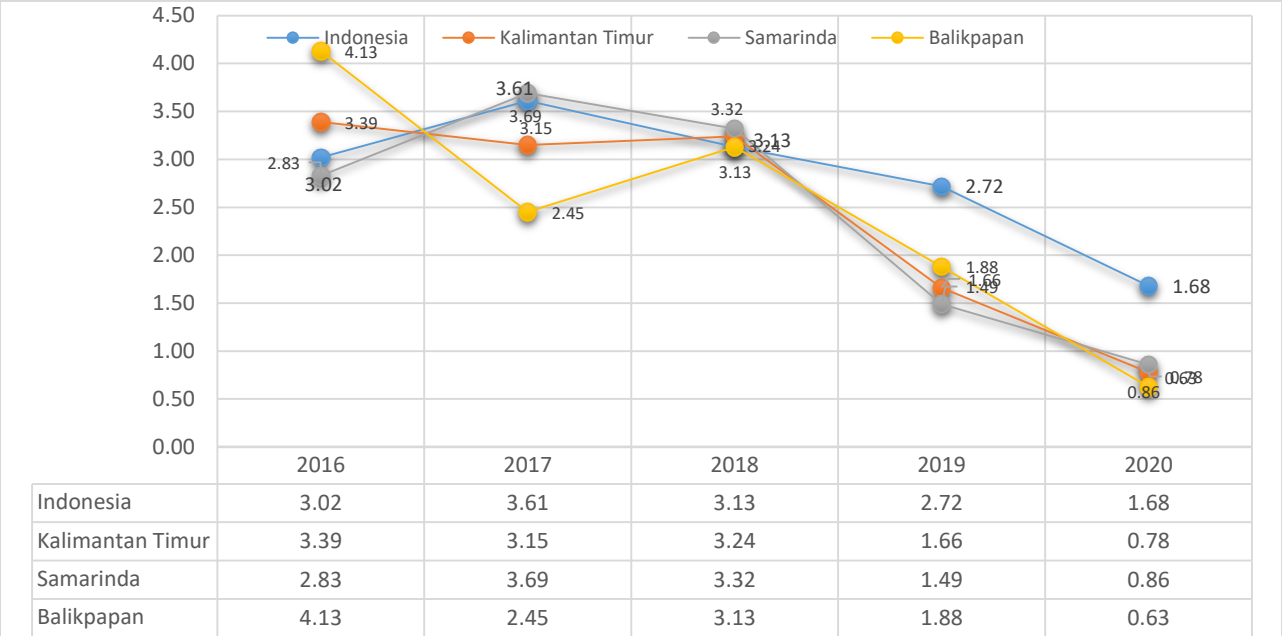

	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68
Kalimantan Timur	3.39	3.15	3.24	1.66	0.78
Samarinda	2.83	3.69	3.32	1.49	0.86
Balikpapan	4.13	2.45	3.13	1.88	0.63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.8
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan.

Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 0,63 persen, dan lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 0,86 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,78 persen.

C. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016-2019 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 175,65 juta menjadi Rp 160,11 juta.

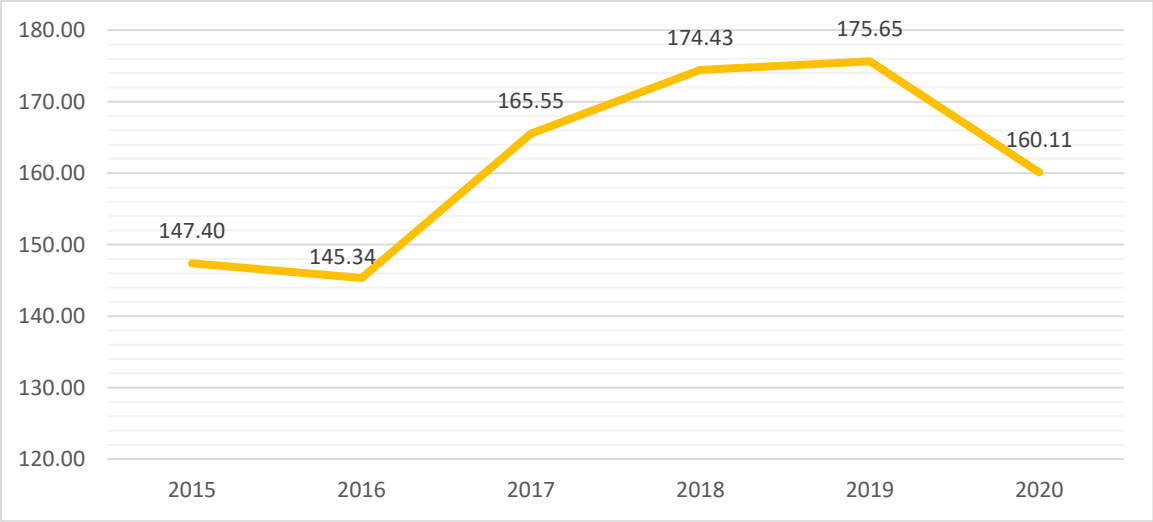

Sumber; Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Gambar 2.9
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2020 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 312,145 juta, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 296,16 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 185,649 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 55,699 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 75,036 juta.

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Rp Ribu)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	139.005,28	160.296,47	172.444,45	168.508,96	148.633
2	Kutai Barat	150.513,19	175.425,47	191.344,95	195.009,08	183.844
3	Kutai Kartanegara	173.968,11	198.406,84	210.484,44	207.015,42	185.649
4	Kutai Timur	285.338,32	346.117,42	353.304,35	355.546,83	296.160
5	Berau	143.437,25	161.633,70	166.166,98	168.113,83	148.897
6	Penajam Paser Utara	49.241,18	53.774,37	55.531,98	56.474,76	55.699
7	Mahakam Ulu	82.108,10	88.868,89	95.323,49	103.061,64	104.603
8	Balikpapan	128.124,63	137.916,47	148.758,73	156.276,67	155.977
9	Samarinda	63.560,52	69.291,63	74.489,27	78.566,95	75.036
10	Bontang	331.035,96	345.145,85	338.383,90	329.049,66	312.145

Sumber; Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2020 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 160,11 juta. Dengan demikian, PDRB per

Kapita Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan yang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.

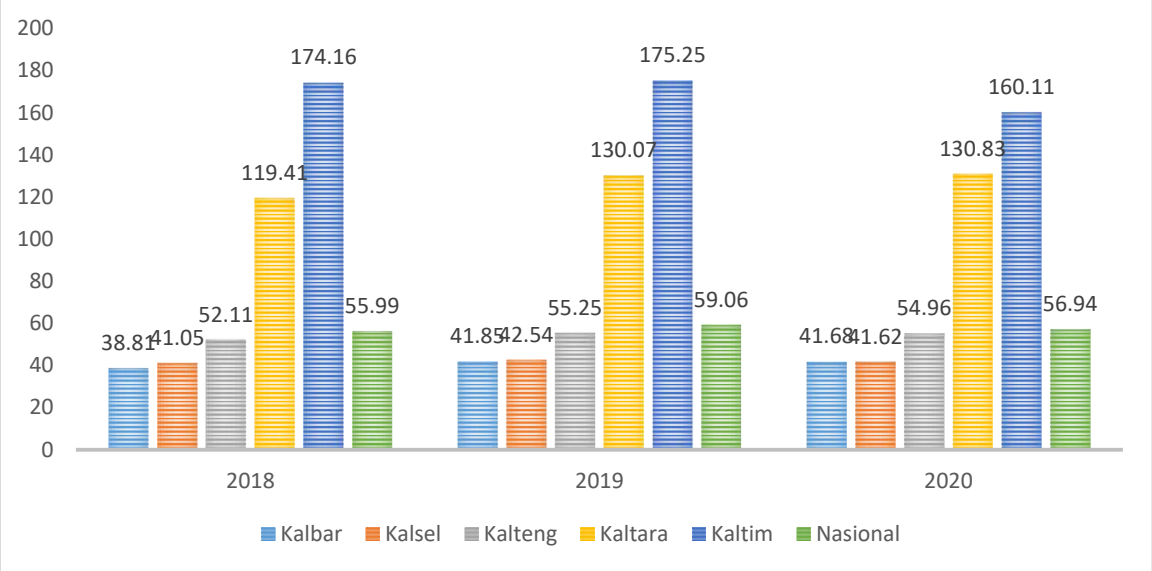

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2020

Gambar 2.10
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,10 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi sebanyak 230,26 ribu jiwa dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 219,92 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 662.302 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan.

Tabel 2.16
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230.260	6,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2020 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan dan daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel 2.17
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2020

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	24,06	Beras	24,82
2	Rokok Kretek Filter	17,96	Rokok Kretek Filter	22,13
3	Telur ayam ras	6,98	Telur ayam ras	6,54
4	Daging ayam ras	5,53	Gula Pasir	4,58
5	Mie Instan	4,20	Mie Instan	4,29
6	Gula Pasir	3,43	Daging Ayam Ras	3,70
7	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,26	Bawang merah	2,80
8	Kue basah	2,99	Kue Basah	2,39
9	Bawang Merah	2,72	Tempe	2,27
10	Tempe	2,36	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,44 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,57 persen

Pada tahun 2020 kenaikan tingkat kemiskinan hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, dimana penurunan terjadi di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.18
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	8,68	9,28	9,03	8,95	9,23
2	Kutai Barat	8,65	8,72	9,15	9,09	9,29
3	Kutai Kartanegara	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31
4	Kutai Timur	9,16	9,29	9,22	9,48	7,31
5	Berau	5,37	5,41	5,04	5,04	9,55
6	Penajam Paser Utara	7,49	7,63	7,40	7,18	5,19
7	Balikpapan	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57
8	Samarinda	4,72	4,77	4,59	4,59	4,76
9	Bontang	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38
10	Mahakam Ulu	10,65	11,29	11,62	11,25	11,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Barat menurun sebanyak 0,25 poin, sementara Kalimantan Timur meningkat sebanyak 0,50 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 10,19 persen.

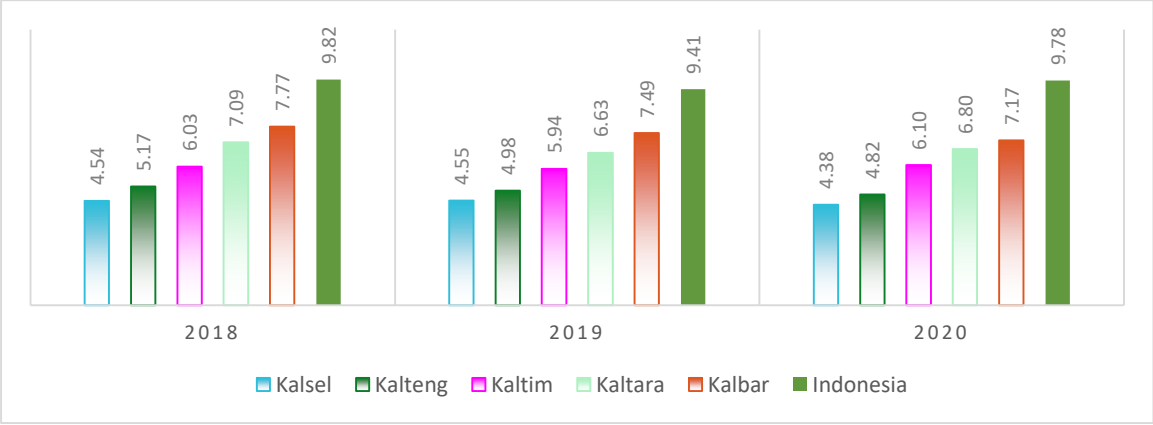

Sumber : BPS

Gambar 2.11
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 58.420 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.920 jiwa, Kabupaten Kutai

Timur sebanyak 36.980 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh belahan dunia, termasuk Kalimantan Timur memberikan dampak peningkatan kemiskinan di Kalimantan Timur. Secara global diprediksi bahwa 420 – 580 juta orang akan menjadi miskin, sedangkan secara Nasional diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat menjadi 9,39%. Angka kemiskinan di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan akibat pelemahan ekonomi disektor pariwisata, transportasi, perdagangan dan beberapa sektor terdampak Covid 19 lainnya. Berkenaan dengan ini maka upaya untuk menumbuhkan perekonomian pasca Covid 19 perlu untuk mendapatkan perhatian serius.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (jiwa)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	23.170	25.300	25.140	25.450	26.770
2	Kutai Barat	12.650	12.800	13.490	13.450	13.780
3	Kutai Kartanegara	55.820	56.570	56.560	56.340	58.420
4	Kutai Timur	30.170	31.950	33.020	35.310	36.980
5	Berau	11.470	11.860	11.330	11.620	12.300
6	Penajam Paser Utara	11.660	12.000	11.760	11.520	11.930
7	Balikpapan	17.550	17.860	17.010	15.780	17.020
8	Samarinda	38.950	40.010	39.230	39.800	41.920
9	Bontang	8.600	8.750	8.100	7.470	7.910
10	Mahakam Ulu	2.880	3.070	3.250	3.190	3.260

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode September 2019 – Maret 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,991 pada keadaan September 2019 menjadi 1,015 pada keadaan Maret 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,242 menjadi 0,240 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2020, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,664 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,743. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,157

sementara di daerah perdesaan mencapai 0,412. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Tabel 2.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, September 2019 – Maret 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2019	0,612	1,778	0,991
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2019	0,127	0,482	0,242
Maret 2020	0,157	0,412	0,240

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Indeks gini untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 masuk dalam kategori sedang, hanya ada satu kabupaten yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser dengan capaian 0,299. Artinya ketimpangan pengeluaran masyarakat Kabupaten Paser relatif rendah, jika dibandingkan ketimpangan di kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,376, artinya jarak antara si kaya dan si miskin di Kota Bontang lebih lebar dibanding kabupaten/kota lainnya.

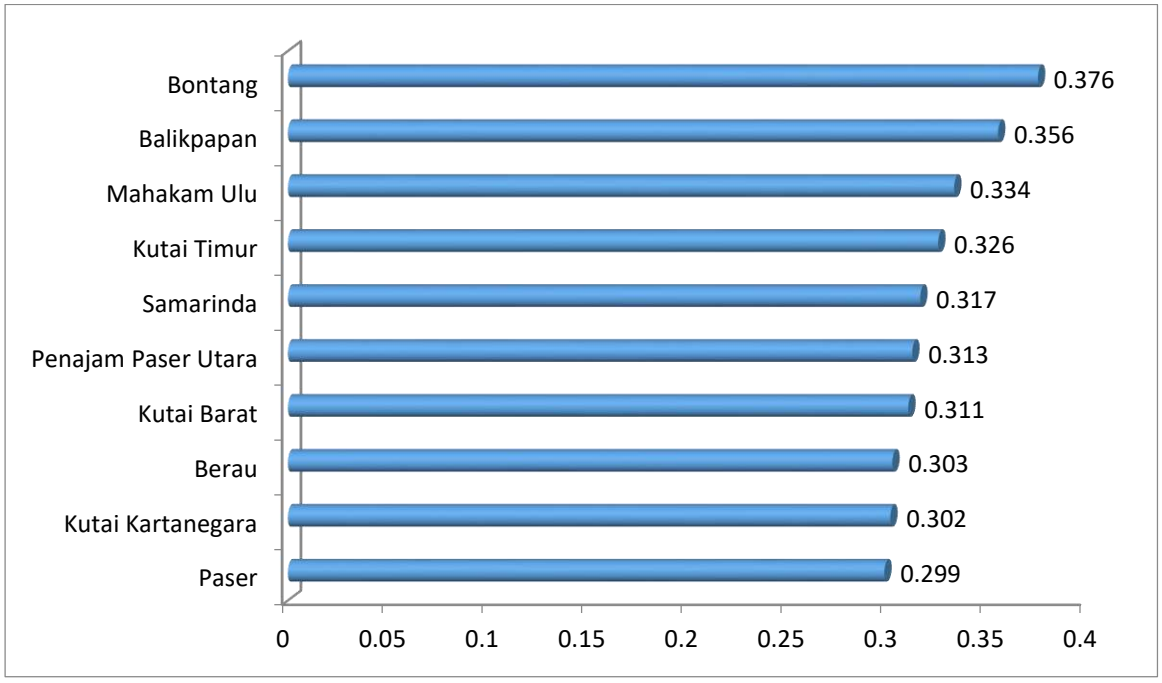

Sumber : Buku Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.12
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan angka ketimpangan menjadi 0,328. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,330. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,300. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,32-0,35. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,381 pada tahun 2020.

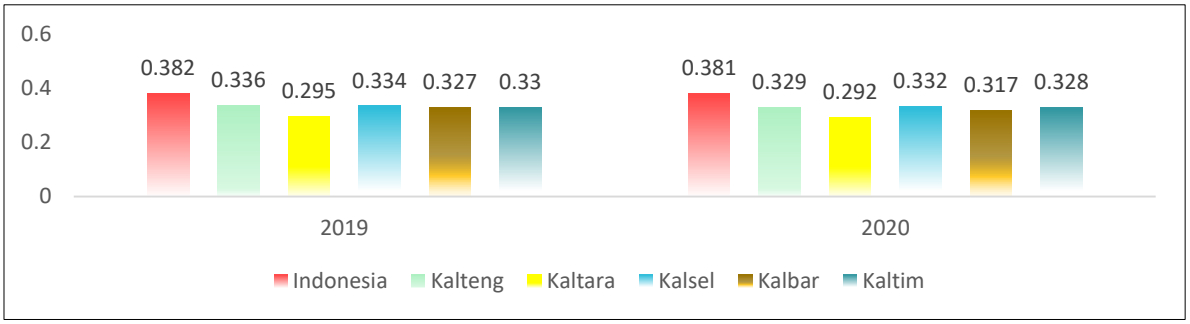

Sumber : BPS

Gambar 2.13
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2019-2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Gender dan Indek Desa Membangun.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja pembangunan manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan, yang ditandai dengan adanya perubahan besaran nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama periode 2010-2019, angka IPM Kalimantan Timur secara konsisten

mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019.

Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus "tinggi" dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta meskipun pada tahun 2020 ini harus mengalami penurunan.

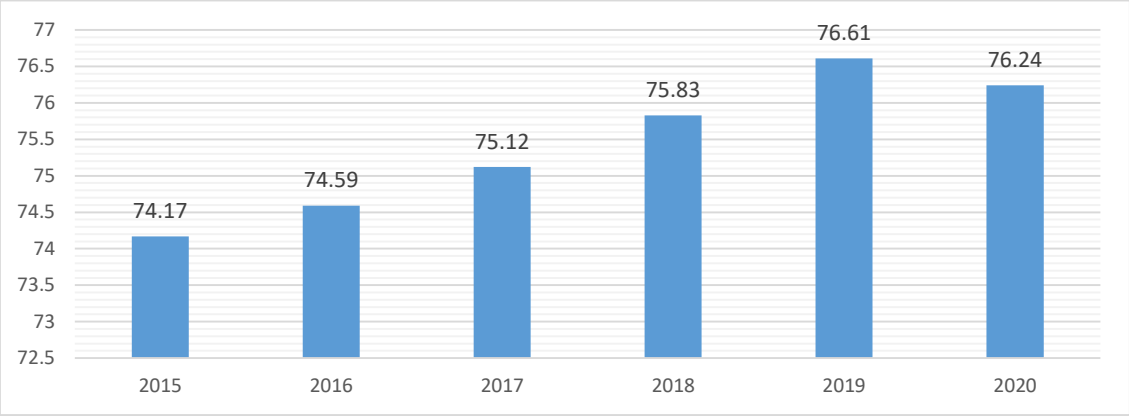

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Penurunan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi turun. Kabupaten/Kota yang mengalami kecepatan penurunan terbesar adalah Kabupaten Mahakam Ulu, sebesar 0,73 persen atau turun 0,49 poin dari 67,58 di tahun 2019 menjadi 67,09 di tahun 2020. Selain Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur juga mengalami penurunan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 0,49 poin dari 73,49 di tahun 2019 menjadi 73,00 di tahun 2020.

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2020

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	70,30	71,00	71,16	71,61	72,29	72,04
2	Kutai Barat	69,34	69,99	70,18	70,69	71,63	71,19
3	Kutai Kartanegara	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
4	Kutai Timur	70,76	71,10	71,91	72,56	73,49	73,00
5	Berau	72,72	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71
6	Penajam Paser Utara	69,26	69,96	70,59	71,13	71,64	71,41
7	Mahakam Ulu	64,89	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09
8	Balikpapan	78,18	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Samarinda	78,69	78,91	79,46	79,93	80,20	80,11
10	Bontang	78,78	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 67,66 – 71,94.

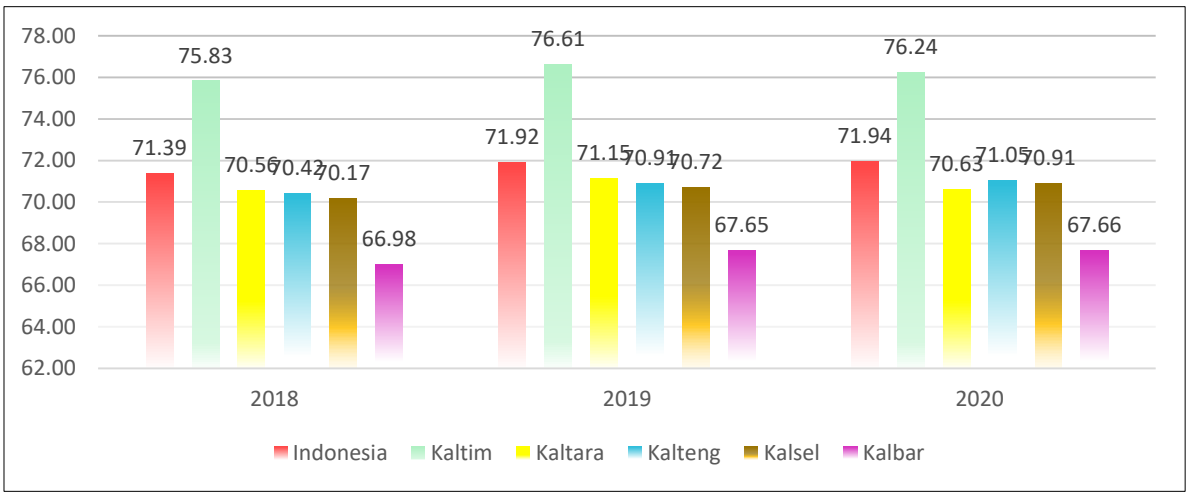

Sumber : BPS

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2020 mencapai 9,77 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2020 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.

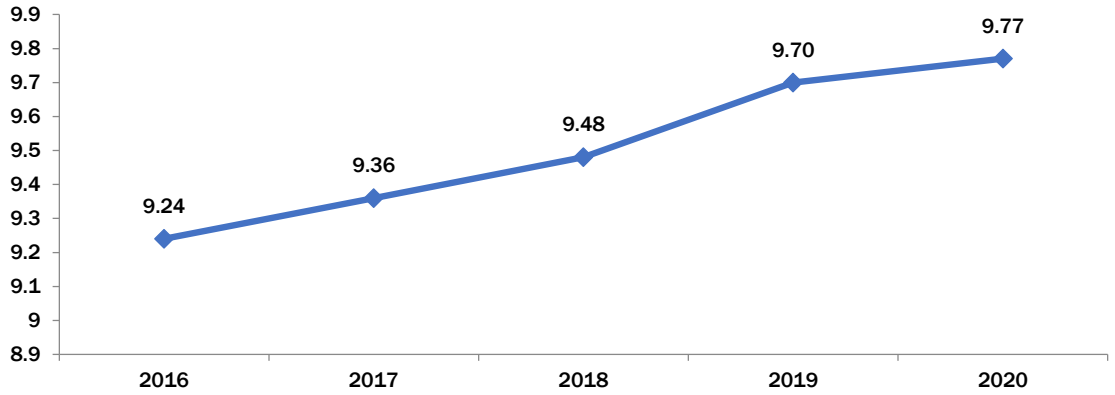

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.16
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Tahun)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Bontang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,79 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 7,97 tahun pada tahun 2020 Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III).

Tabel 2.22
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	8,19	8,2	8,22	8,54	8,55
2	Kutai Barat	8,03	8,06	8,07	8,34	8,47
3	Kutai Kartanegara	8,71	8,83	8,84	9,10	9,22
4	Kutai Timur	8,72	9,06	9,08	9,18	9,19

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
5	Berau	8,78	8,96	8,98	9,25	9,52
6	Penajam Paser Utara	7,6	7,95	8,03	8,16	8,28
7	Mahakam Ulu	7,37	7,68	7,69	7,89	7,97
8	Balikpapan	10,54	10,55	10,65	10,67	10,68
9	Samarinda	10,33	10,34	10,46	10,47	10,48
10	Bontang	10,39	10,7	10,72	10,73	10,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,77 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,48 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,00 tahun dan 8,59 tahun.

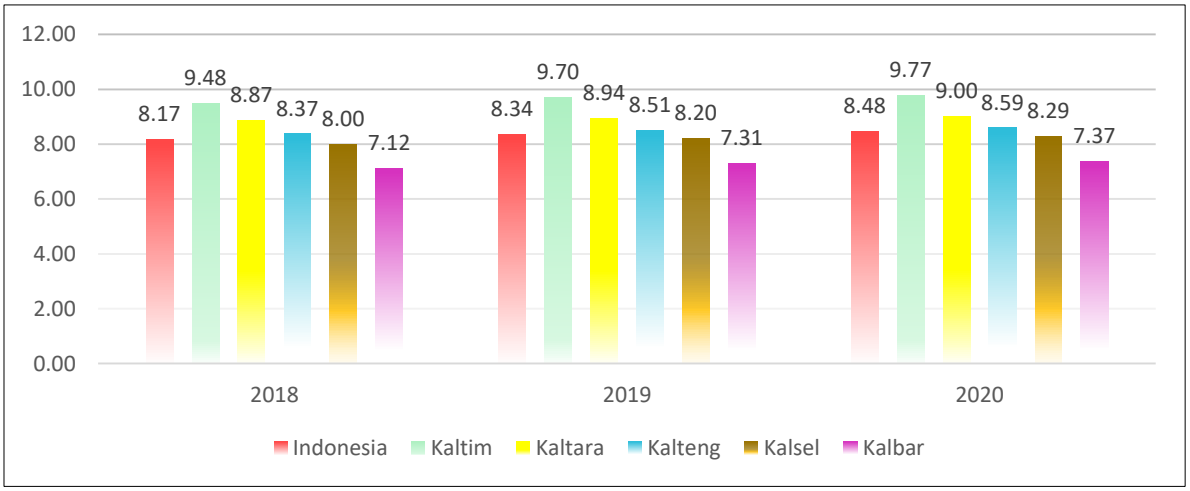

Sumber : BPS

Gambar 2.17
Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,72 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

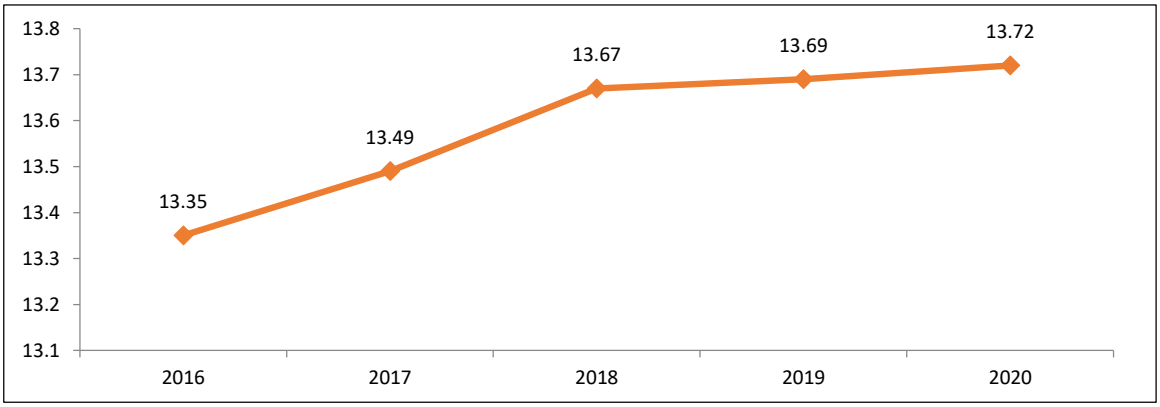

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.18
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Tahun)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 14,89 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,51 tahun pada tahun 2020 merupakan capaian harapan lama sekolah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.23
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	12,65	12,96	12,98	12,99	13,00	13,10
2	Kutai Barat	12,3	12,75	12,82	12,88	12,89	12,90
3	Kutai Kartanegara	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
4	Kutai Timur	12,43	12,44	12,48	12,65	12,78	12,89
5	Berau	13,17	13,18	13,29	13,3	13,31	13,32
6	Penajam Paser Utara	12,02	12,46	12,53	12,54	12,55	12,56
7	Mahakam Ulu	12,03	12,42	12,47	12,48	12,50	12,51
8	Balikpapan	13,46	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14
9	Samarinda	14,17	14,23	14,64	14,66	14,70	14,89
10	Bontang	12,77	12,79	12,88	12,89	12,90	13,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun trend laju pertumbuhan komponen ini (2015-2020) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi,

namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

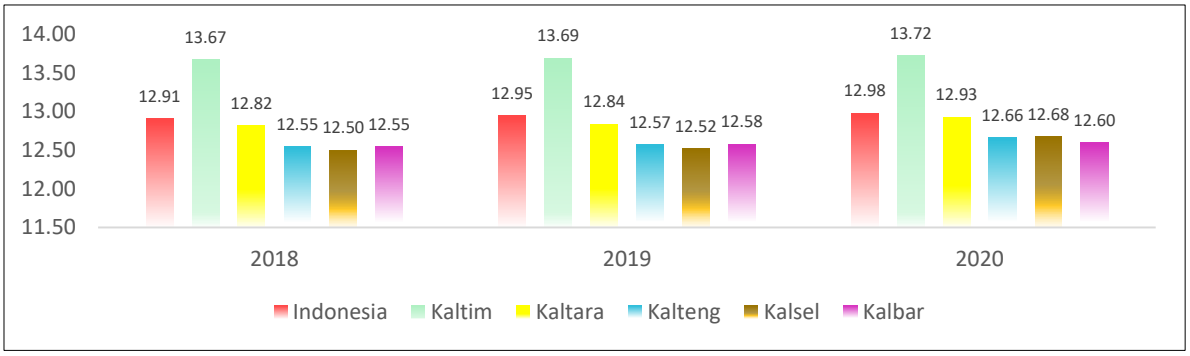

Sumber : BPS

Gambar 2.19
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang kesehatan :

1) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 74,22 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,33 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 73,72 tahun.

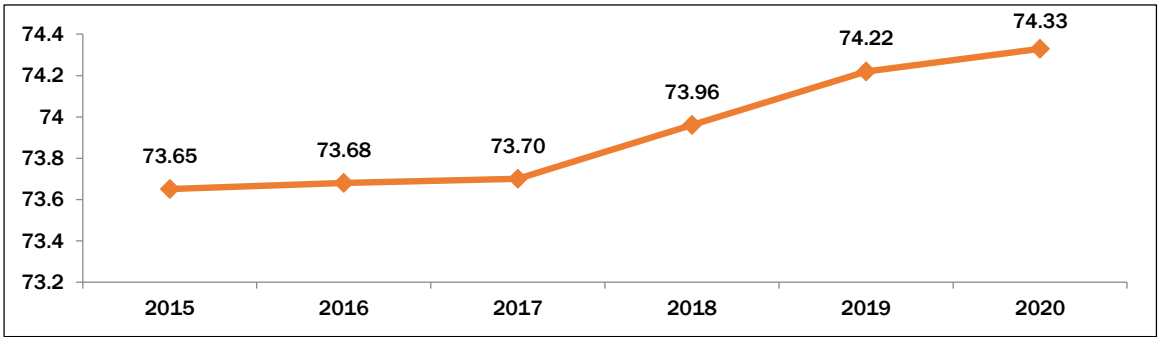

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.20
Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020 (Tahun)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup mencapai 74,49 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,41 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

Tabel 2.24
Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	71,98	72,02	72,05	72,28	72,52	72,62
2	Kutai Barat	72,19	72,28	72,37	72,57	72,79	72,86
3	Kutai Kartanegara	71,6	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
4	Kutai Timur	72,39	72,45	72,51	72,76	73,03	73,16
5	Berau	71,31	71,37	71,44	71,68	71,94	72,06
6	Penajam Paser Utara	70,53	70,8	70,82	71,05	71,30	71,41
7	Mahakam Ulu	71,13	71,19	71,25	71,56	71,90	72,10
8	Balikpapan	73,95	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49
9	Samarinda	73,65	73,68	73,71	73,93	74,17	74,27
10	Bontang	73,69	73,71	73,72	73,94	74,18	74,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi. Namun laju pertumbuhan tertinggi lima tahun

terakhir terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan capaian Kalimantan Timur masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,34 tahun.

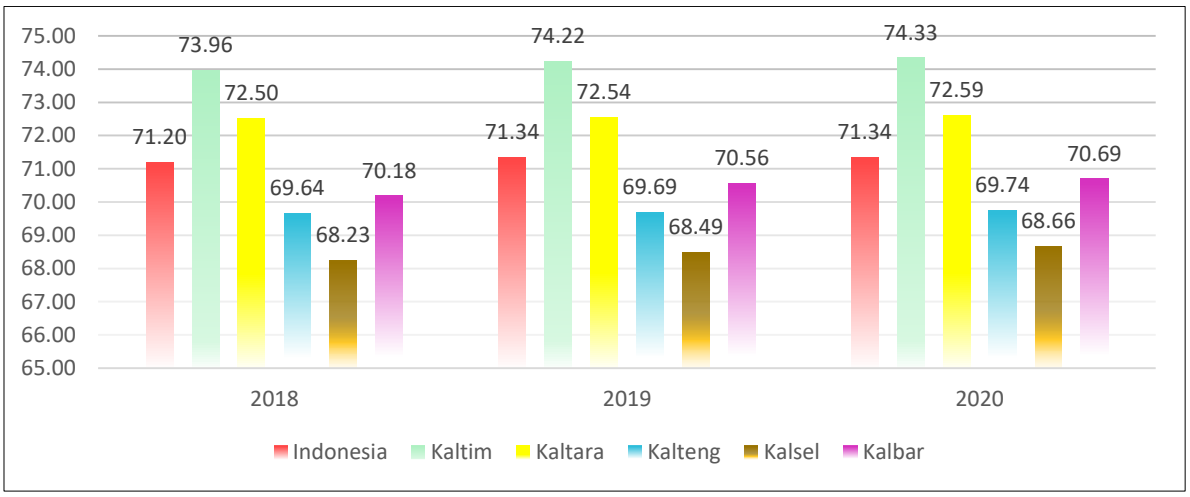

Sumber : BPS

Gambar 2.21
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia (Tahun)

2) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017 – 2018 sudah terjadi penurunan, namum pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0 – 11) bulan sudah mengalami penurunan.

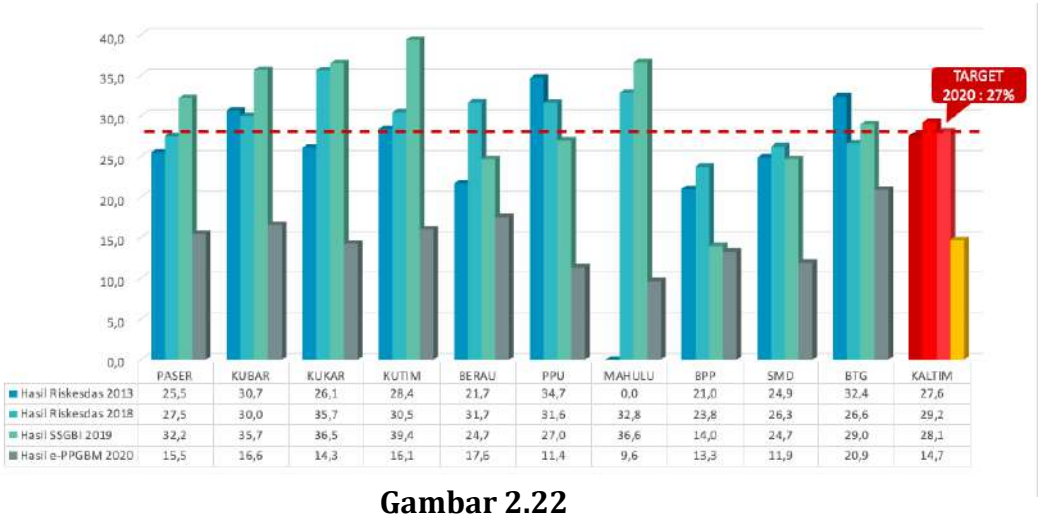

Gambar 2.22
Tren Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013, 2018-2020

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan kalua dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kota Balikpapan sudah mencapai 14 persen.

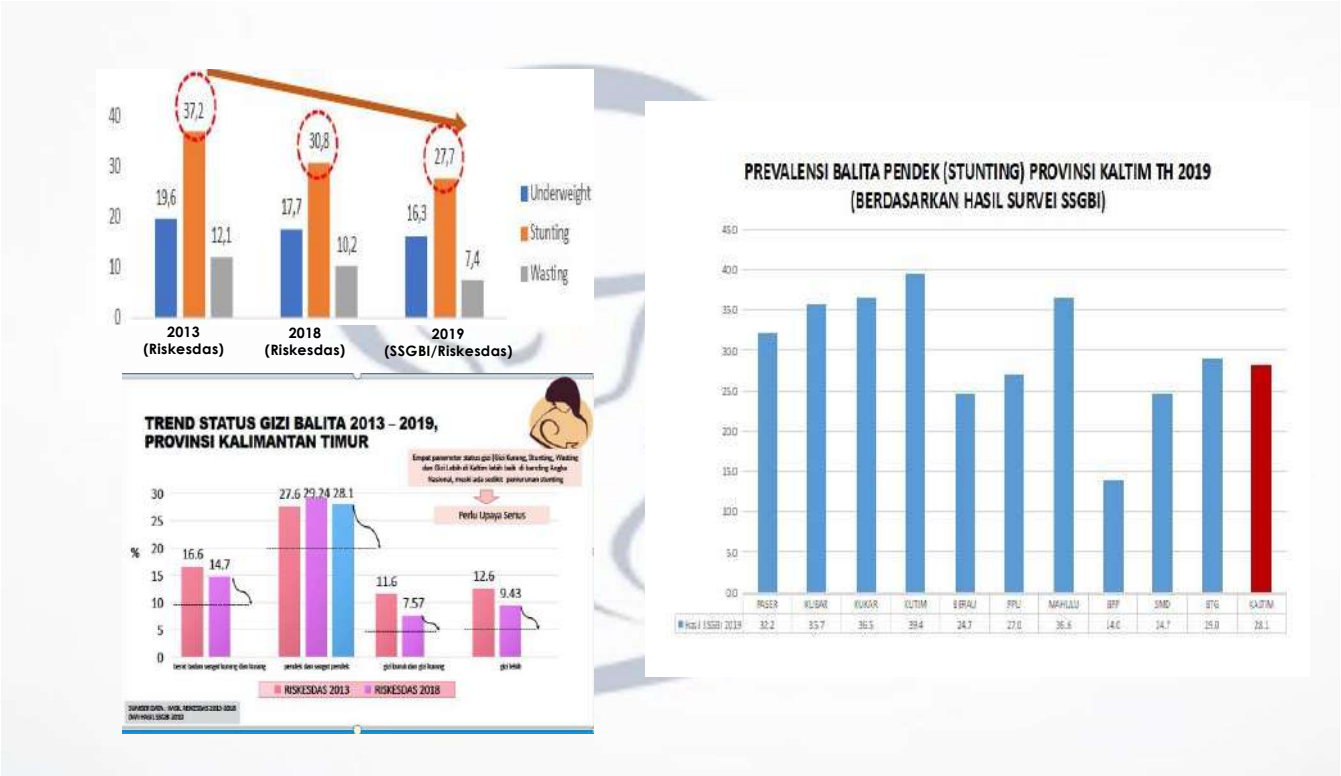

Gambar 2.23
Hasil Riskesdas Stunting, Trend Status Gizi Balita 2013-2019 dan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur

Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan Major Project sedangkan Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun 2021 bertambah 2 locus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan pada Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerar lokus stunting. Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70 persen dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60

persen dan dari ePPGBM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar OPD terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2020, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai 11,73 juta rupiah per tahun, atau berkurang 631 ribu rupiah dibandingkan tahun 2019. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun.

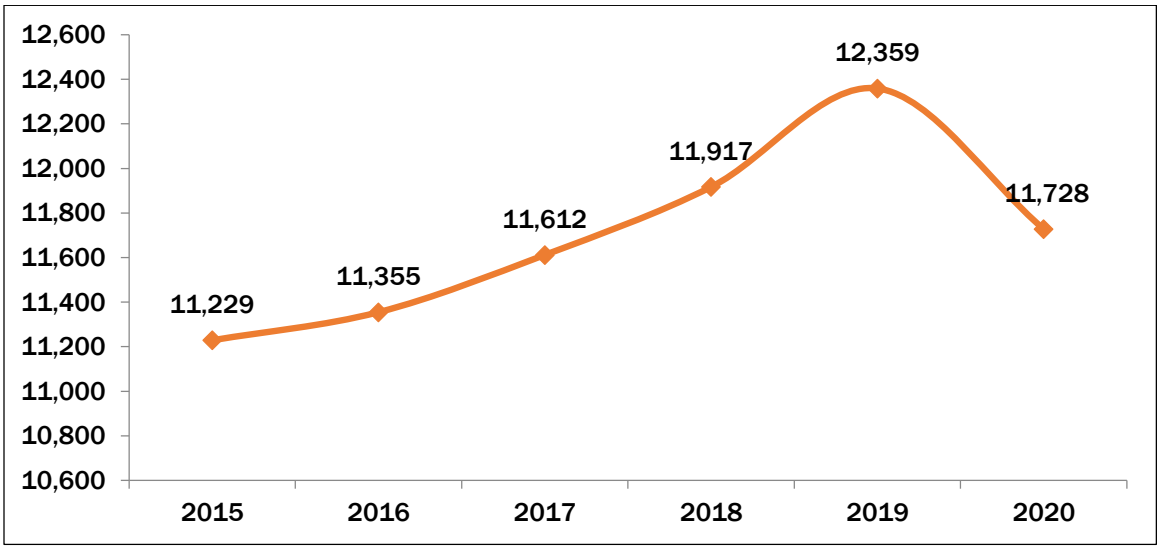

Sumber : BPS

Gambar 2.24
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2020 (Ribu Rp)

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2020, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional.

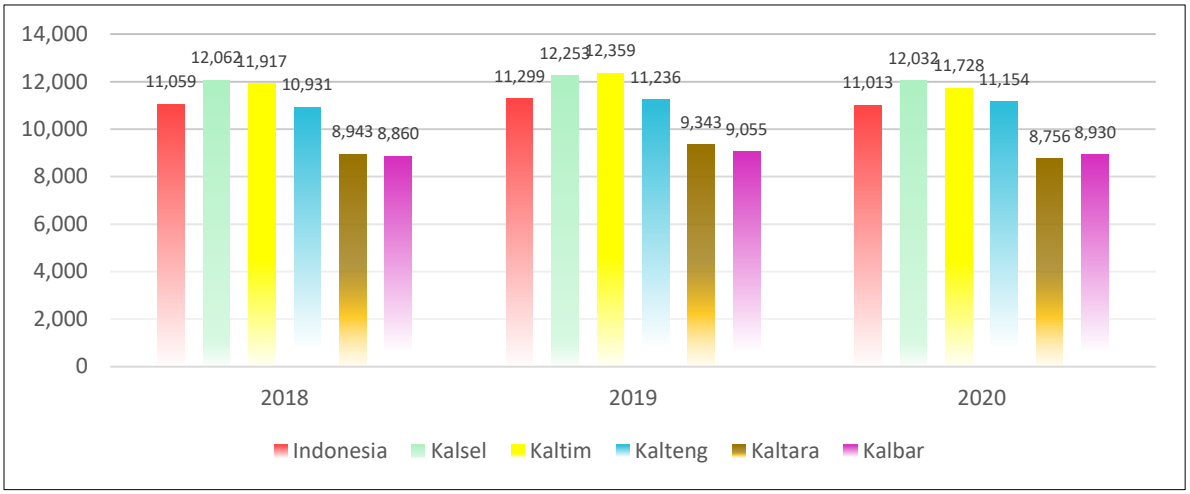

Sumber : BPS

Gambar 2.25
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)

E. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, UNDP merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

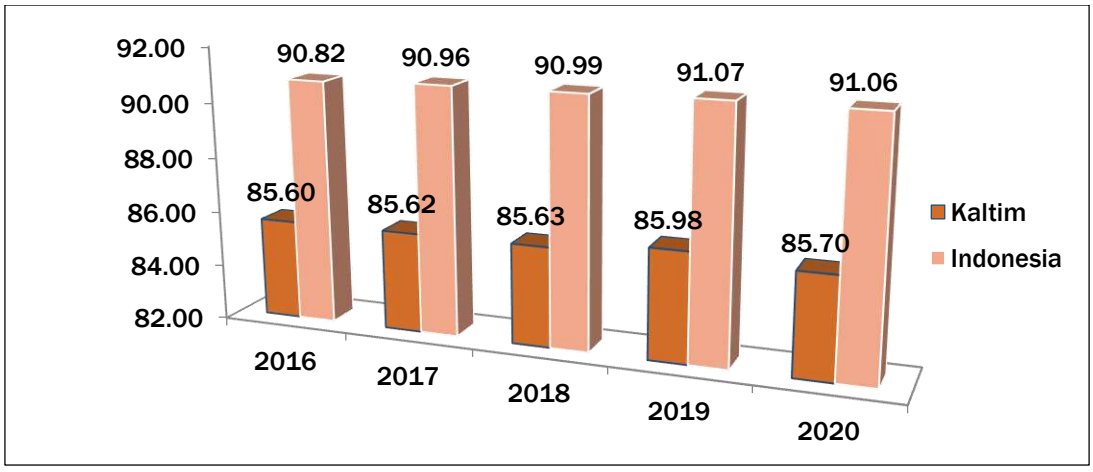

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (tahun)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 85,60 menjadi 85,98 di tahun 2019. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 85,70.

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-	69,78	70,64	71,41	71,15
2	Kutai Barat	-	83,30	83,52	83,84	83,87
3	Kutai Kartanegara	-	78,54	78,83	79,14	78,90
4	Kutai Timur	-	75,48	76,03	76,51	76,26
5	Berau	-	87,77	87,92	87,93	87,61
6	Penajam Paser Utara	-	86,31	86,34	86,22	86,39
7	Mahakam Ulu	-	79,82	80,18	80,89	80,98
8	Balikpapan	-	89,74	89,76	89,71	89,65
9	Samarinda	-	89,26	89,42	89,41	89,27
10	Bontang	-	86,44	86,61	86,72	86,87
Provinsi Kalimantan Timur		85,60	85,96	85,63	85,98	85,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,65 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 71,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur

persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel 2.26
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-	62,07	62,76	66,20	-
2	Kutai Barat	-	62,63	63,68	61,14	-
3	Kutai Kartanegara	-	55,07	56,44	63,74	-
4	Kutai Timur	-	53,71	55,72	56,35	-
5	Berau	-	49,85	50,55	57,66	-
6	Penajam Paser Utara	-	50,30	50,02	50,36	-
7	Mahakam Ulu	-	74,12	76,04	80,61	-
8	Balikpapan	-	65,52	66,33	69,11	-
9	Samarinda	-	70,84	69,61	66,29	-
10	Bontang	-	45,44	46,36	51,99	-
Provinsi Kalimantan Timur		56,93	56,64	57,53	65,65	56,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 56,71.

Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 80,61 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 50,36 yang artinya bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

G. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri (IDM > 0.8155), Desa Maju (0.7072 < IDM ≤ 0.8155), Desa Berkembang (0.5989 < IDM ≤ 0.7072), Desa Tertinggal (0.4907 < IDM ≤ 0.5989) dan Desa Sangat Tertinggal (IDM ≤ 0.4907). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Pada tahun 2020, dari 1.038 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur, 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur masih terdapat 4 Desa sangat tertinggal yaitu 2 desa d Kutai Barat dan 2 Desa di Mahakam Ulu dan 129 desa tertinggal, hanya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memiliki Desa Tertinggal.

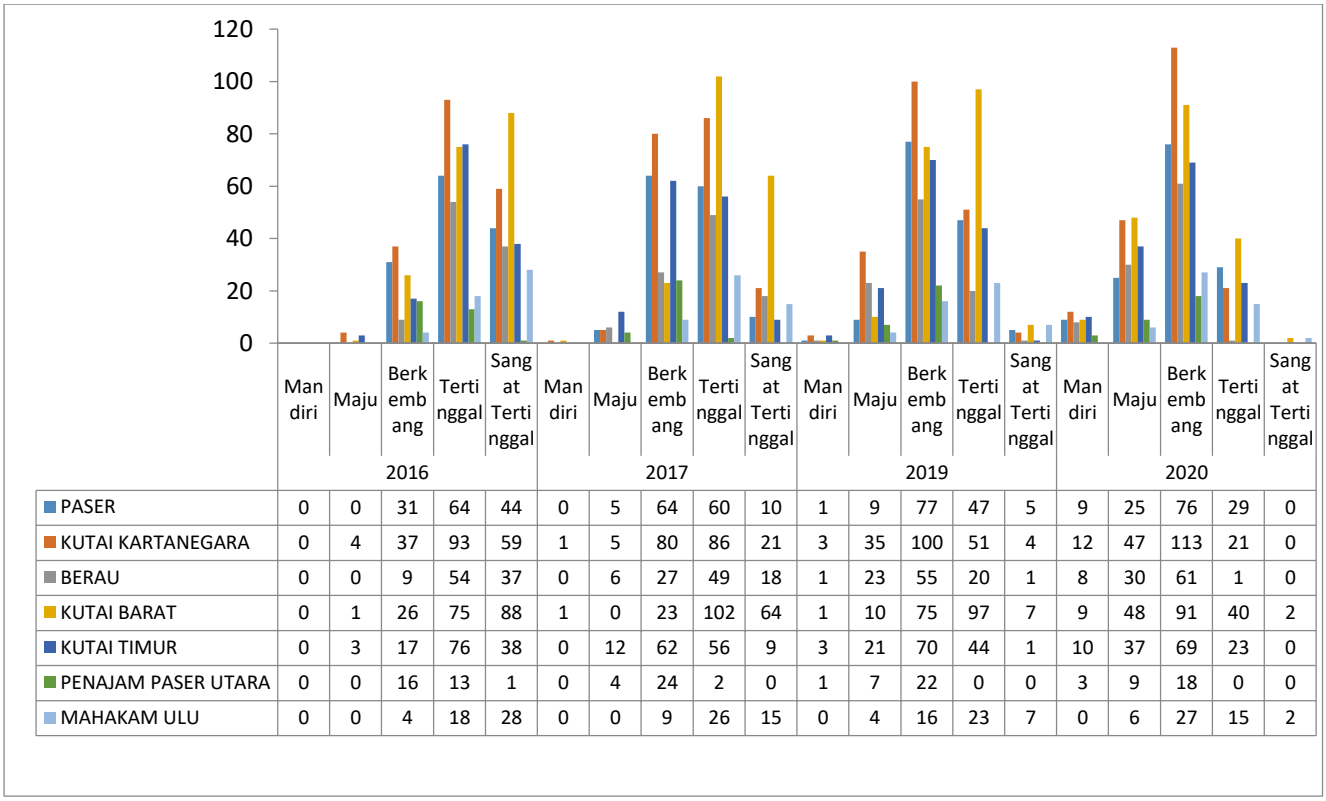

	2016					2017					2019					2020				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
PASER	0	0	31	64	44	0	5	64	60	10	1	9	77	47	5	9	25	76	29	0
KUTAI KARTANEGARA	0	4	37	93	59	1	5	80	86	21	3	35	100	51	4	12	47	113	21	0
BERAU	0	0	9	54	37	0	6	27	49	18	1	23	55	20	1	8	30	61	1	0
KUTAI BARAT	0	1	26	75	88	1	0	23	102	64	1	10	75	97	7	9	48	91	40	2
KUTAI TIMUR	0	3	17	76	38	0	12	62	56	9	3	21	70	44	1	10	37	69	23	0
PENAJAM PASER UTARA	0	0	16	13	1	0	4	24	2	0	1	7	22	0	0	3	9	18	0	0
MAHAKAM ULU	0	0	4	18	28	0	0	9	26	15	0	4	16	23	7	0	6	27	15	2

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Gambar 2.27
Perkembangan Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan disetiap tahunnya dengan indeks 0,5250 pada tahun 2016 status tertinggal menjadi status berkembang pada tahun 2020 dengan indeks mencapai 0,6752. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur menempati Peringkat ke 9 dibawah Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta yang menempati peringkat Pertama dan Kedua dengan Status IDM Maju. Sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya Provinsi dengan status IDM Sangat Tertinggal.

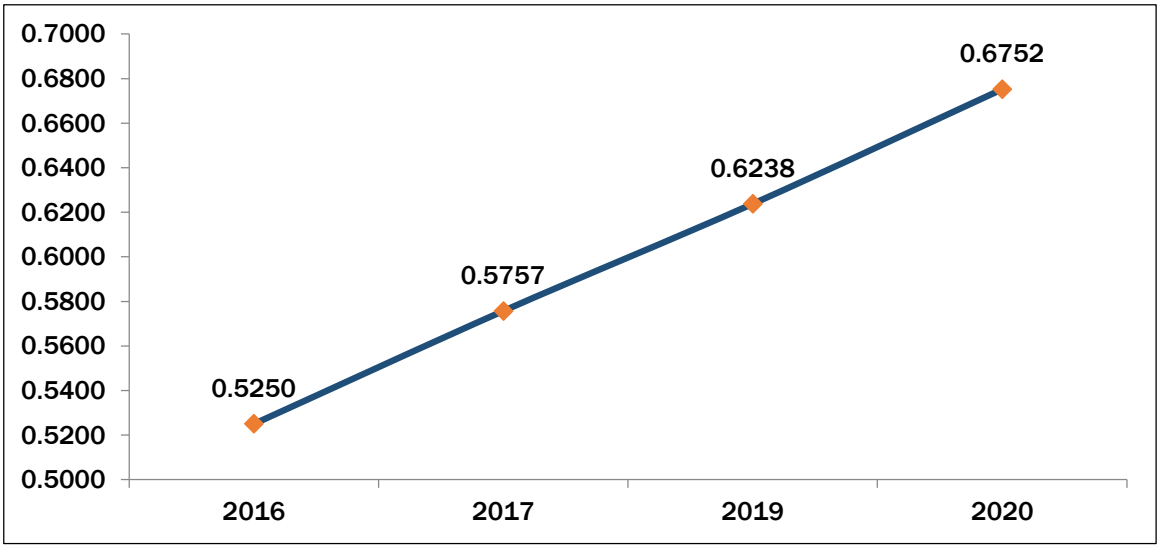

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Gambar 2.28
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

Indeks Desa Membangun 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 mencapai Indeks Desa Membangun 0,6181 dengan status Berkembang, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Status Maju dengan indeks sebesar 0,7085.

Tabel 2.27
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2019	2020
1	Paser	0,5368	0,5856	0,6092	0,6664
2	Kutai Barat	0,5018	0,5233	0,5900	0,6660
3	Kutai Kartanegara	0,5337	0,5815	0,6415	0,6846
4	Kutai Timur	0,5349	0,6037	0,6378	0,6782
5	Berau	0,5130	0,6097	0,6539	0,6999

No	Kab/Kota	2016	2017	2019	2020
6	Penajam Paser Utara	0,6045	0,6505	0,6905	0,7085
7	Mahakam Ulu	0,4969	0,5352	0,5862	0,6181
Provinsi Kalimantan Timur		0,5250	0,5757	0,6238	0,6752

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

2.2.3.Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Kalimanan Timur memprioritaskan pada program pengembangan nilai – nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain.

Tabel 2.28
Karya Budaya di Provinsi Kalimantan Timur
yang Telah Dipatenkan Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Karya Budaya
1.	Kutai Barat	Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Geniknng
2.	Kutai Kertanegara	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Suliikng Dewa
3.	Paser	Tari Ngarang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.030 Cagar Budaya, 7 (tujuh) Museum, dan 6 (enam) Komunitas Budaya.

Tabel 2.29
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya		
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya
1.	Kabupaten Paser	29	1	0
2.	Kabupaten Kutai Barat	7	1	0
3.	Kabupaten Kertanegara	371	2	3
4.	Kabupaten Kutai Timur	85	0	0
5.	Kabupaten Berau	58	2	0
6.	Kabupaten Paser Utara	12	0	0
7.	Kabupaten Mahakam Ulu	0	0	0
8.	Kota Balikpapan	101	1	1
9.	Kota Samarinda	297	0	2
10	Kota Bontang	70	0	0
Provinsi Kalimantan Timur		**1.030**	**7**	**5**

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, Kemendikbud

Dalam hal pengembangan budaya dan seni di Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 52,78. Namun capaian IPK ini masih dibawah capaiam IPK Nasional yaitu sebesar 53,74.

Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan dengan nilai 73,85, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai (76,82) dan dimensi budaya literasi dengan nilai 66,13.

Tabel 2.30
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	26,60	30,55
Pendidikan	73,85	69,67
Ketahanan Sosial Budaya	76,82	72,84
Warisan Budaya	29,96	41,11

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekspresi Budaya	33,86	36,57
Budaya Literasi	66,13	55,03
Gender	49,99	54,97
IPK	**52,78**	**53,74**

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, Kemendikbud

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka diperlukan sinergitas antar lembaga terkait di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

B. Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumberdaya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur terus dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang.

Untuk mengukur kapasitas pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2018 IPP Propinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 52,17 pada tahun 2015 menjadi 54,83 pada tahun 2018. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 8 secara nasional menurun dari peringkat tahuh 2015 yang menduduki peringkat 6. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja dari dibawah 1 persen di tahun 2015 menjadi hamper 8 persen ditahun 2018.

Tabel 2.31
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Domain : Pendidikan	**70,00**	**73,33**	**73,33**	**73,33**
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,70	10,81	10,92	10,72
2. APK Sekolah Menengah	94,55	95,32	95,52	94,35
3. APK PT	28,44	31,60	35,58	35,64

Uraian	2015	2016	2017	2018
Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan	**77,50**	**70,00**	**67,50**	**72,50**
1. Angka Kesakitan Pemuda	5,81	4,83	6,15	5,37
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	0,47	0,97	1,37	0,93
3. Pemuda Merokok	22,09	22,59	20,80	20,80
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	0,80	4,82	7,99	7,99
Domain : Lapangan dan Kesempatan Kerja	**30,00**	**65,00**	**40,00**	**35,00**
1. Pemuda Berwirausaha	0,24	1,41	0,40	0,24
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	17,05	16,29	15,78	15,21
Domain : Partisipasi dan Kepemimpinan	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**43,33**
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	77,25	77,25	70,55
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	3,63	3,63	4,87
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	6,21	6,21	5,12
Domain : Gender dan Diskriminasi	**43,33**	**43,33**	**46,67**	**50,00**
1. Angka Perkawinan Usia Anak	14,78	14,85	13,90	11,54
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	42,28	40,35	44,83	44,39
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	23,99	23,82	24,21	25,29
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	**52,17**	**58,33**	**53,50**	**54,83**
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	**48,67**	**50,83**	**49,33**	**51,50**

Sumber : Indeks Pembangunan Pemuda Manusia, Bappenas 2021

Sedangkan dalam pembangunan keolahragaan, setelah sukses meraih peringkat lima besar pada PON XIX Tahun 2016, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Tabel 2.32
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020, BPS Kaltim

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,5	4,6	4,7	15,07	4,5
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	0,92	0,96	1,03	1,06
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20,63	18,93	18,14	17,82	18,90
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,53	0,55	0,56	0,63
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,43	4,50	4,34	4,33	4,94
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,54	1,45	1,48	1,52	1,67
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,34	1,16	1,17	1,12	1,13
2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,5	9,6	9,7	9,7	9,77
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	14,34	14,73	13,69	13,72
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,74	73,76	73,78	74,22	74,33
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal (%)	150	233	233	77	
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	35	40	55	10	

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh, oleh karenanya masyarakat harus mengakses pelayanan pendidikan lebih baik. Dengan demikian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun terus mengalami kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat. Sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Angka Partisipasi Sekolah							
Usia Sekolah	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7-12	97,60	99,63	99,54	99,67	99,76	99,68	99,73
13-15	89,00	97,92	98,18	98,79	98,89	98,21	99,07
16-18	74,24	80,68	80,81	81,32	81,55	82,07	81,88
Angka Partisipasi Kasar							
Jenjang Pendidikan	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
SD	111,04	112,61	110,04	108,07	108,02	106,84	105,75
SLTP	91,49	97,90	95,28	91,46	92,57	91,03	92,17
SLTA	85,54	90,31	95,38	99,51	96,08	94,96	95,23
Angka Partisipasi Murni							
Jenjang Pendidikan	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
SD	96,45	97,00	97,13	97,43	98,40	98,41	98,44
SLTP	77,53	79,06	79,20	79,58	79,68	80,42	81,28
SLTA	59,35	67,78	67,92	68,23	68,43	68,55	69,00

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni

sebesar 105,75, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,75 persen penduduk yang bukan dari golongan umur 7-12 tahun bersekolah di tingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dari tabel 2.29 diatas terlihat bahwa, APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 - 2020 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah mengambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.35
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.653	355.154	23.076	15,39	214,85
Swasta	242	62.752	3.476	18,05	259,31
MI	133	28.103	1.633	17,21	211,30
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Negeri	442	127.805	8.603	14,86	289,15
Swasta	215	33.088	2.366	13,98	153,90
MTs	164	29.745	2.286	13,01	181,37
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	142	65.424	3.907	16,75	460,73
Swasta	80	12.593	957	13,16	157,41
MA	66	10.119	861	11,75	153,32
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	51.872	3.184	16,29	596,23
Swasta	129	29.263	1.935	15,12	226,84

Sumber: Kaltim Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2020, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 2.36
Jumlah Sekolah Yang Tersebar di 10 Kabupaten/Kota Negeri dan Swasta pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2020

No.	Kab / Kota	Sekolah Menengah atas (SMA)			Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Sekolah Luar Biasa (SLB)		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kab. Paser	17	13	4	12	4	8	1	1	0
2	Kab. Kutai Barat	22	17	5	14	7	7	1	1	0
3	Kab. Kutai Kartanegara	51	35	16	43	17	26	5	1	4
4	Kab. Kutai Timur	22	21	1	25	13	12	3	1	2
5	Kab. Berau	19	15	4	14	8	6	1	1	0
6	Kab. Penajam Paser Utara	10	7	3	10	6	4	1	1	0
7	Kab. Mahakam Ulu	7	4	3	2	0	2	1	1	0
8	Kota Samarinda	42	18	24	52	22	30	13	1	12
9	Kota Balikpapan	25	9	16	33	6	27	4	1	3

No.	Kab / Kota	Sekolah Menengah atas (SMA)			Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Sekolah Luar Biasa (SLB)		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
10	Kota Bontang	11	3	8	14	4	10	6	1	5
	Total	**226**	**142**	**84**	**219**	**87**	**132**	**36**	**10**	**26**

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id tahun 2020/2021

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.108 pada tahun 2020 di semua jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), sudah cukup rendah, walaupun untuk jenjang Pendidikan menengah atas/kejuruan di tahun 2017 dan 2018 sempat berada di atas 1 persen, namun pada tahun 2019 angka putus sekolah di jenjang ini kembali turun menjadi 0,59%. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah sebesar 0,59 persen pada tahun 2019 antaralain disebabkan karena pada wilayah tertentu (wilayah terpencil) di beberapa Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi standar untuk dibangun unit sekolah baru. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat usia sekolah yang lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah.

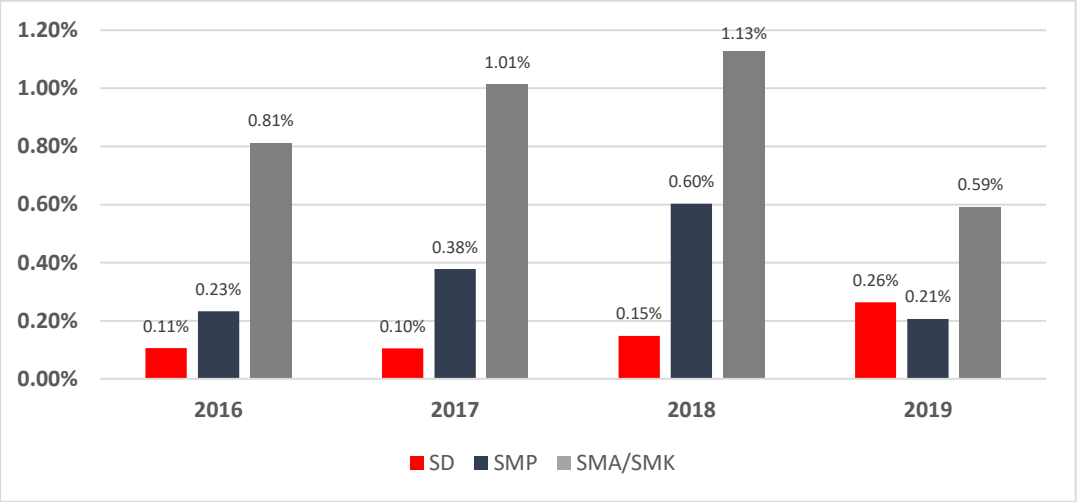

Sumber : Statistik Kemendikbud

Gambar 2.29
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2020, jumlah mahsiswa mencapai 92.857 dengan jumlah dosen sebanyak 4.122 orang.

Tabel 2.37
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Mahasiswa
Negeri	5	1.809	40.398
Swasta	49	2.313	52.459
Jumlah	**54**	**4.122**	**92.857**

Sumber: Kaltim Dalam Angka Tahun 2021

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunya tugas dan beban paling berat dalam menangani dampak akibat pandemi Covid-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak Covid-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca Covid-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

Tabel 2.38
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No.	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	44	44	54	53	57
2	Rumah Sakit Swasta	16	16	19	19	22
3	Dokter Umum	1.035	1.114	1.010	1.024	1.106
4	Dokter Gigi	323	320	309	314	320
5	Dokter Spesialis	583	678	503	597	649
6	Perawat	7.178	6.662	7.823	6.524	7.510
7	RS Bersalin	10	10	15	9	7
8	Puskesmas	180	186	186	187	187
9	Puskesmas Pembantu	669	714	716	716	730
10	Pedagang Besar Farmasi	47	47	48	49	52
11	Apotek	524	524	637	704	759
12	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	90,12	88,2	96,34	96,39	97,46

Sumber: Dinas Kesehatan, Sidata

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayaan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.

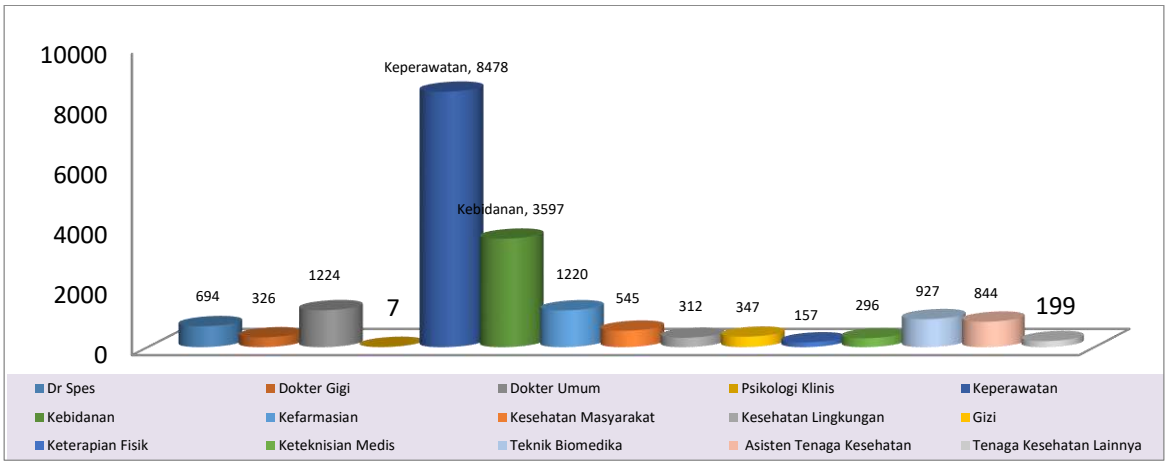

Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2.30
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter kususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masuh ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menetukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesma 9 jenis tenaga kesehtan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan. Perwat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 62% puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatanya.

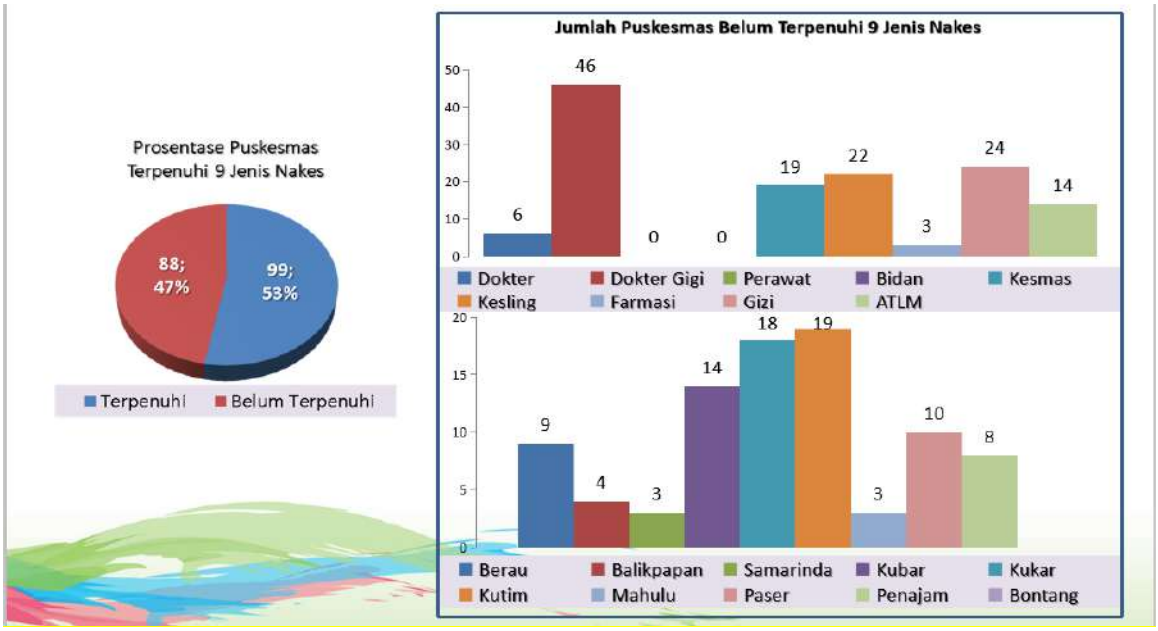

Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2.31
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

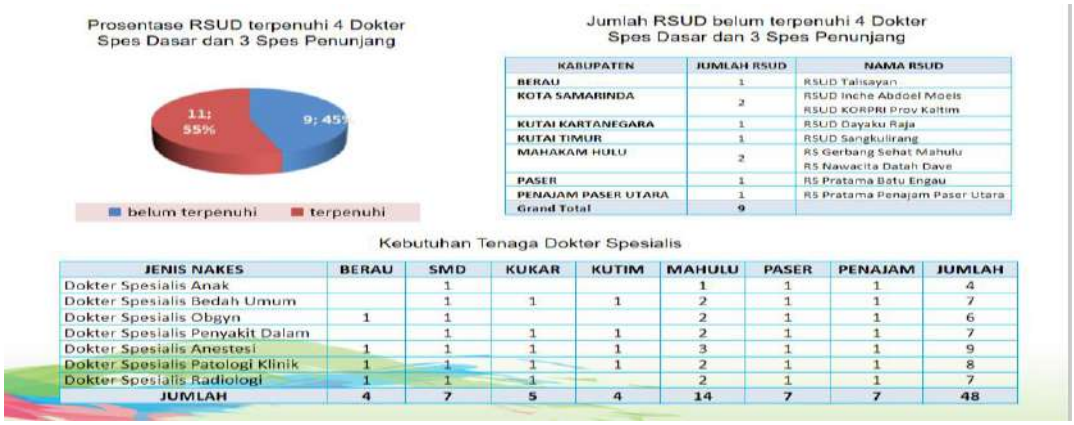

Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2.32
Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis Dasar dan Spesialis Penunjang Di Provinsi Kalimantan Timur

C. Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitative) dan pengembangan (promotive) bagi PMKS dan PSKS.

Tabel 2.39
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

Jumlah PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	Orang	247.167	243.459	n/a	251.234	251.234
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	n/a	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	0,01	0,01	0	0,01	0,01
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	78.690	76.000	78.387	78.387	81.247
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Orang	43.018	75,696	n/a	1.052	1.143
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	54,67	99,6	0	1,34	1,4

Jumlah PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	n/a	46.510	46.510
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	28.539	38.187	n/a	100	100

Sumber: Dinas Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 243.459 orang menjadi 251.234 orang pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebanyak 7.775 orang, salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah PMKS adalah pandemic Covid-19. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.40
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BALIKPAPAN		KUTAI KARTANEGARA		SAMARINDA		PENAJAM PASER UTARA		KUTAI BARAT		PASER	
		JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1,841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	379	-	679	-	2,981	-	95	-	164	-	489	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	192	-	1,017	-	608	-	240	-	54	-	851	-
9	Penyandang Disabilitas	673	-	947	-	1,294	-	281	-	1,824	-	696	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BALIKPAPAN		KUTAI KARTANEGARA		SAMARINDA		PENAJAM PASER UTARA		KUTAI BARAT		PASER	
		JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,091	-	180	-	1,990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2,807	591	169	43	5,950	1,267	981	214	47,301	9,748	1,211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2,477	412	3,288	612	781	192	25,304	5,941	1,011	214
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14,704	3,114	20,114	3,193	14,248	3,101	12,047	3,012	12,678	2,870	13,647	3,291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1,697	378
JUMLAH		22.572	3.876	27,082	3,648	35,452	4,980	15,015	3,418	88,571	18,586	20,530	4,170

Tabel 2.40 Lanjutan

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTAI TIMUR		BONTANG		MAHAKAM ULU	
		KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
1	Anak Balita Terlantar	-	77	-	128	-	78	-	-
2	Anak Terlantar	-	193	-	1,471	-	193	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-	172	-	442	-	43	-	18
4	Anak Jalanan	-	16	-	-	-	51	-	-

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTAI TIMUR		BONTANG		MAHAKAM ULU	
		KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	-	35	-	872	-	43	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	139	-	187	-	56	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	147	-	587	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	71	-	756	-	178	-	-
9	Penyandang Disabilitas	-	469	-	1,326	-	383	-	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	75	-	19	-	17	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	-	4	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	44	-	-	-	-	-	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	31	-	159	-	160	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	-	2	-	4	-	4	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	-	52	-	-	-	34	-	-
21	Korban Bencana Alam	287	-	-	712	154	869	196	-
22	Korban Bencana Sosial	214	422	106	392	98	377	95	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	27	-	29	-	48
24	Fakir Miskin	3,193	14,248	3,101	12,047	3,012	12,678	2,870	13,647
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	337	-	-	-	581	-	11
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	72	27	1,697
JUMLAH		12.969	2.624	19.631	3.357	7.077	1.338	2.335	513

Sumber: Dinas Sosial

Kabupaten Kutai Barat Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 243.459 orang menjadi 251.234 orang pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebanyak 7.775 orang, salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah PMKS adalah pandemic Covid-19. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah dari sektor pekerjaan umum salah satunya adalah terkait dengan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas.

Mengacu pada Target Nasional dalam RPJMN 2020-2024, target capaian akses air minum layak di tahun 2024 adalah 100%, yang terdiri didalamnya persentase akses air minum aman sebesar 15%. Permasalahan dalam pencapaian target tersebut dirasakan ketika capaian daerah aktual saat ini masih rendah, terutama terkait capaian pelayanan air minum perpipaan.

Tabel 2.41
Fasilitas dan Pelayanan Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan

NO	KABUPATEN/ KOTA	Sambungan Rumah (SR)					Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PASER	18.743	19.050	19.050	21.551	23.599	24,21	38,29	38,29	37,16	43,79
2	PENAJAM PASER UTARA	5.339	5.470	5.470	7.845	10.399	14,19	15,87	15,87	34,79	30,13
3	SAMARINDA	137.135	146.225	146.225	158.901	158.900	90,96	95,46	95,46	99,29	85,28
4	BALIKPAPAN	95.781	97.243	97.243	100.927	100.163	76,50	76,98	76,98	79,05	77,79
5	KUTAI KERTANEGARA	69.942	68.035	68.035	73.203	67.017	63,25	63,39	63,39	58,68	49,52
6	KUTAI BARAT	9.987	10.012	10.012	11.009	9.565	34,25	34,35	34,35	34,24	28,84
7	KUTAI TIMUR	20.656	15.945	15.945	20.122	30.335	31,67	33,13	33,13	15,43	38,08
8	BERAU	16.120	16.517	16.517	23.738	18.101	44,34	44,70	44,70	81,59	54,87
9	BONTANG	22.970	23.999	23.999	22.953	28.464	84,37	87,05	87,05	51,10	97,96
10	MAHAKAM ULU	n/a	n/a	n/a	1.554	1.656	n/a	n/a	n/a	12,00	22,49
JUMLAH		**360.996**	**396.673**	**402.496**	**441.803**	**448.199**	**51,7**	**51,5**	**54,3**	**54,59**	**62,64**

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana sejak tahun 2017 sebesar 51,5% sampai pada tahun 2019 hanya mengalami peningkatan sebesar ± 3% menjadi 54,59% dan di tahun 2020 meningkat tajam menjadi 62,64%. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya program/kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, pemerintah provinsi dan juga oleh kabupaten/kota (melalui APBD II). Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai menjadikan sektor penyediaan air minum menjadi salah satu program prioritas daerah dan nasional.

Namun dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas,kuantitas dan ekandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air)

Melihat permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan capaian akses air minum untuk seluruh masyarakat, maka kedepan akan diperlukan upaya untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (digambarkan dalam Tabel 2.34), dan akan potensial direalisasikan dengan skema kerjasama daerah, melalui Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tabel 2.42
Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

NO	POTENSI SPAM REGIONAL	KAB/KOTA YG TERLIBAT	KEBUTUHAN	SUMBER AIR BAKU	
			KAPASITAS L/DET	NAMA	KAPASITAS
1	KUKAR-BONTANG	KAB. KUTAI KARTANEGARA, KOTA BONTANG	450	BENDUNG MARANGKAYU	450 L/DET
2	KUTIM–BONTANG	KAB. KUTAI TIMUR, KOTA BONTANG	150	WADUK EX TAMBANG INDOMINCO	> 100 L/DET (MASIH DALAM KAJIAN)
3	PPU – BALIKPAPAN	KAB. PENAJAM PASER UTARA, KOTA BALIKPAPAN	- (MASIH DALAM KAJIAN)	WADUK SEPAKU SEMOI, WADUK SEPAKU	> 2.000 L/DET
4	KUKAR – BALIKPAPAN	KAB. KUTAI KARTANEGARA, KOTA BALIKPAPAN	- (MASIH DALAM KAJIAN)	WADUK BATU LEPEK	5.000 L/DET
5	PASER – BALIKPAPAN	KAB. PASER, KOTA BALIKPAPAN	- (MASIH DALAM KAJIAN)	WADUK LAMBAKAN	12.000 L/DET

Sumber: Data Sektoral Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat,2020

Kehilangan Air (Non Revenue Water (NRW) Distribusi)

Untuk Provinsi Kalimantan Tmur, rata-rata kehilangan air (NRW) Distribusi) berdasarkan data Audit BPKP Tahun Buku 2019 yaitu sebesar 22,70%. Dengan kapasitas produksi rata-rata sebesar 7.347,79 l/dt, kapasitas distribusi sebesar 6.805,98 l/dt dan kapasitas terjual 4.821,59 l/dt.

Tabel 2.43
Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-Rata Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Kap Terpasang (L/dt)	Kap Produksi (L/dt)	Kap Distribusi (L/dt)	Kap Terjual (L/dt)	Idle Capacity (L/dt)	Kehilangan Air (%)
1	Paser	8	360	307,00	290,43	179,57	59,00	22,16
2	Penajam Paser Utara	5	340	134,00	134,00	124,00	206,00	25,76
3	Samarinda	13	2.425	2.587,00	2.404,17	1.534,56	80,00	33,55
4	Balikpapan	10	1.490	1.252,00	1.169,25	852,84	211,00	34,38
5	Kutai Kartanegara	33	1.667	1.532,00	1.376,00	923,00	135,00	33,00

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Kap Terpasang (L/dt)	Kap Produksi (L/dt)	Kap Distribusi (L/dt)	Kap Terjual (L/dt)	Idle Capacity (L/dt)	Kehilangan Air (%)
6	Kutai Barat	12	298	212,00	189,00	151,90	90,00	12,73
7	Kutai Timur	17	640	427,60	421,30	322,10	212,40	12,29
8	Berau	18	548	442,50	374,00	344,00	130,00	17,54
9	Bontang	4	470	406,69	400,74	341,62	63,31	12,93
10	Mahakam Ulu	12	157	47,00	47,00	47,00	110,00	-
Kalimantan Timur		132	8.395	7.347,79	6.805,98	4.821,59	1.296,71	22,70

Sumber: Laporan Audit BPKP Tahun Buku 2020

Kehilangan air tertinggi terdapat di PDAM Kota Samarinda sebanyak 33,55% dan di Kota Balikpapan sebanyak 34,38% sedangkan kehilangan air terendah terdapat di PDAM Kota Bontang sekitar 12,93% dan PDAM Kabupaten Berau sebesar 17,54%.

Penyebab kehilangan air pada umumnya disebabkan oleh adanya kebocoran pipa jaringan distribusi yang telah tua, dan belum akuratnya pencatatan meter water pelanggan, masih banyaknya water meter pelanggan yang rusak dan belum dilakukan peneraan water meter pelanggan. Pada umumnya PDAM telah berupaya untuk menurunkan NRW distribusi dengan melakukan penggantian water meter pelanggan yang rusak secara bertahap.

E. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Kualitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari kelompok umur dan tingkat pendidikan. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, berimbas pada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut umur. Program wajib belajar 9 tahun telah menggeser angkatan kerja usia muda lebih banyak yang bersekolah, dampaknya mengurangi proporsi tenaga kerja usia muda.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai tambah sebagai imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Tabel 2.44
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2016 - 2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SMP ke Bawah	278.802 (17,63)	680.447 (15,38)	720.069 (44,50)	744.471 (43,67)	761.610 (44,99)
2	SMA/SMK	600.455 (37,97)	593.161 (38,50)	622.507 (38,47)	676.189 (38,13)	643.105 (37,99)
3	Diploma/Universitas	231.374 (14,63)	267.067 (17,33)	275.709 (17,04)	284.148 (16,67)	288.081 (17,02)
Kalimantan Timur		1.581.239 (100,00)	1.540.675 (100,00)	1.618.285 (100,00)	1.704.808 (100,00)	1.692.796 (100,00)

Sumber : BPS Prov Kaltim

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMP ke Bawah dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma/Universitas. Masih tingginya proporsi penduduk pada kelompok tamatan SMP ke bawah untuk usia bekerja perlu menjadi perhatian serius oleh Provinsi Kalimantan Timur, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah ini. Pada tahun 2020 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SMP ke bawah tercatat 44,99% meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 43,67%. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma/Universitas sekitar 17,02% meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 16,67%. Adapun penduduk yang bekerja dengan modal ijazah SMA dan sederajat berkisar 37,99% ditahun 2020 menurun dari tahun 2019 yang mencapai 38,13%.

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tinggi berdasar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2017-2019

No	Kab/Kota	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Paser	34.244	35.740	39.940	15.981	16.325	14.888
		29,67	27,69	30,38	13,85	12,65	11,32
2	Kutai Barat	18.598	19.590	22.592	6.070	7.601	8.553
		28,31	26,97	32,80	9,24	10,46	12,42
3	Kutai Kartanegara	121.146	119.976	128.560	38.307	44.946	43.730
		37,76	35,60	36,18	11,94	13,34	12,31
4	Kutai Timur	56.497	60.335	70.942	22.272	20.426	21.588

No	Kab/Kota	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
		35,70	35,52	39,91	14,07	12,02	12,15
5	Berau	34.925	36.398	40.825	11.843	11.184	13.557
		36,45	35,50	38,76	12,36	10,91	12,87
6	Penajam Paser Utara	19.086	20.372	20.077	6.661	7.691	5.585
		29,20	28,81	28,57	10,19	10,88	7,95
7	Balikpapan	123.119	131.097	146.838	71.439	70.634	60.319
		46,01	46,77	48,79	26,70	25,20	20,04
8	Samarinda	160.685	157.910	165.736	80.294	79.300	98.779
		43,37	42,80	41,10	21,67	21,49	24,50
9	Bontang	20.689	36.718	37.090	12.678	15.905	16.102
		30,34	50,27	47,00	18,59	21,78	20,41
10	Mahakam Ulu	4.172	4.371	3.589	1.522	1.697	1.047
		32,18	30,89	28,22	11,74	11,99	8,23

Sumber : BPS Prov Kaltim

Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Balikpapan memiliki lebih banyak Pekerja yang lulusan SMA/SMK dan Diploma/Perguruan Tinggi yang dimana pada tahun 2019 mencapai 48,79% di Kota Balikpapan, 41,10% di Kota Samarinda dan 47% di Kota Bontang lulusan SMA/SMK. Dengan tingginya pekerja lulusan SMA/SMK di Kota tersebut diharapkan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 64,99 persen pada tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kalimantan Timur mengalami penurunan di tahun 2020, sebelumnya pada tahun 2019 TPAK Kalimantan Timur sebesar 65,96 persen, mengalami penurunan sebesar 0,46 persen di tahun 2020 menjadi 65,50 persen.

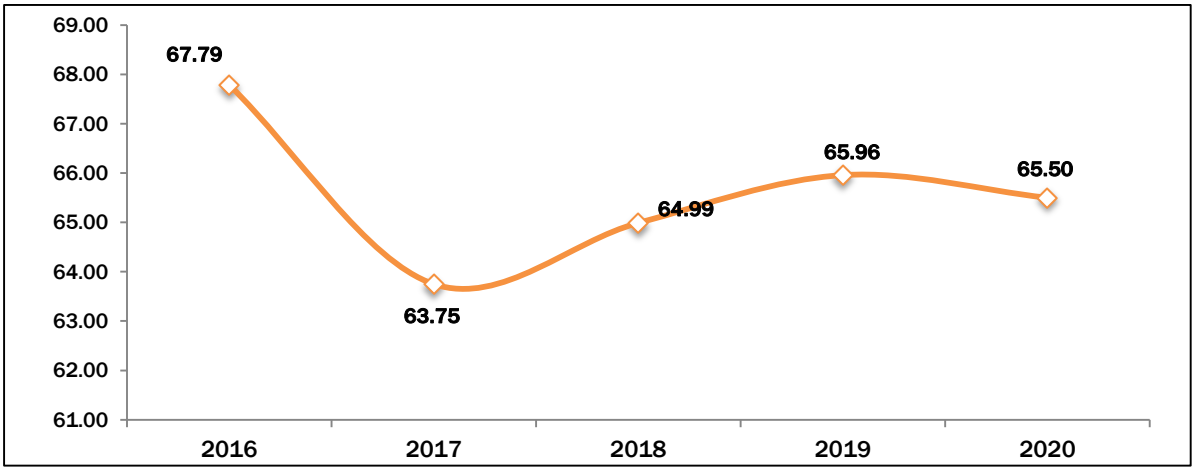

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

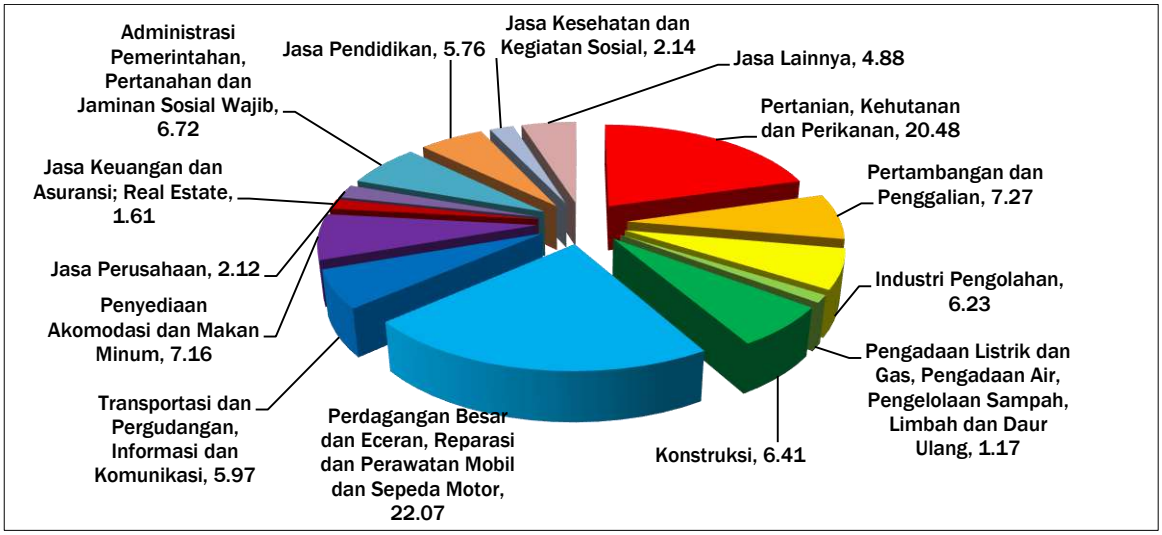

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.34
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Tahun 2020, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 22,07 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,48 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengeloaan sampah, limbah dan daur ulang mencapai 1,17 persen.

Seperti yang tergambar diatas bahwa Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan & Jasa merupakan sektor yang menyerap jumlah kerja terbanyak untuk itu perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja yang merupakan sasaran paling strategis karena mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi lainnya seperti modal, bahan baku, energi dan lainnya.

Tabel 2.45
Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Perdagangan & Jasa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)		Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Perdagangan & Jasa (Juta Rp)
	Sektor Pertanian	Sektor Perdagangan & Jasa	Sektor Pertanian	Sektor Perdagangan & Jasa	(d+e)/(b+c)
a	b	c	d	e	f
2016	345.522	824.476	28.639.398	43.869.020	61,97
2017	328.448	590.465	30.261.400	46.507.456	83,54
2018	347.901	597.666	32.118.725	49.622.537	86,45
2019	319.764	640.269	33.364.448	51.976.061	88,89
2020	346.768	653.131	33.020.515	48.648.392	81,68

Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari rasio antara PDRB Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan & Jasa berdasarkan harga konstan dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor tersebut. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan & Jasa Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan di tahun 2016 dan meningkat drastis pada tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 88,89 Juta Rupiah pada tahun 2019. Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor perdagangan & jasa makin efisien dan produktif karena tenaga kerja yang terlibat mampu menghasilkan nilai tambah atau output yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa mencapai 81,68 Juta Rupiah.

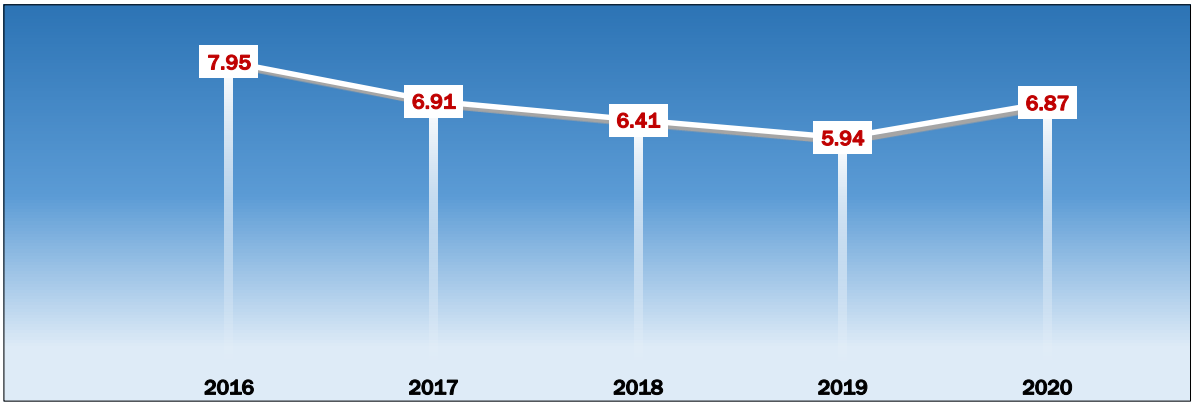

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (persen)

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi Covid 19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate dan jasa perusahaan.

Tabel 2.46
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020 (persen)

No	Kab/Kota	2015	2017	2018	2019	2020
1	Paser	9,06	5,54	5,00	4,55	4,52
2	Kutai Barat	11,7	5,87	4,86	5,08	4,97
3	Kutai Kartanegara	10,22	5,72	5,96	5,98	5,70
4	Kutai Timur	5,14	4,61	5,93	5,53	5,45
5	Berau	5,72	6,45	5,62	5,08	5,08
6	Penajam Paser Utara	7,28	4,75	4,76	6,26	6,22
7	Balikpapan	5,95	10,39	9,52	7,29	9,00
8	Samarinda	5,61	6,19	6,16	5,87	8,26
9	Bontang	12,07	12,44	9,61	9,19	9,46
10	Mahakam Ulu	4,75	9,05	4,17	3,69	3,49

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 9,46

persen, Kota Balikpapan sebesar 9,00 persen, dan Kota Samarinda sebesar 8,26 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah kembali ditorehkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,49 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2020 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 6,87 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.

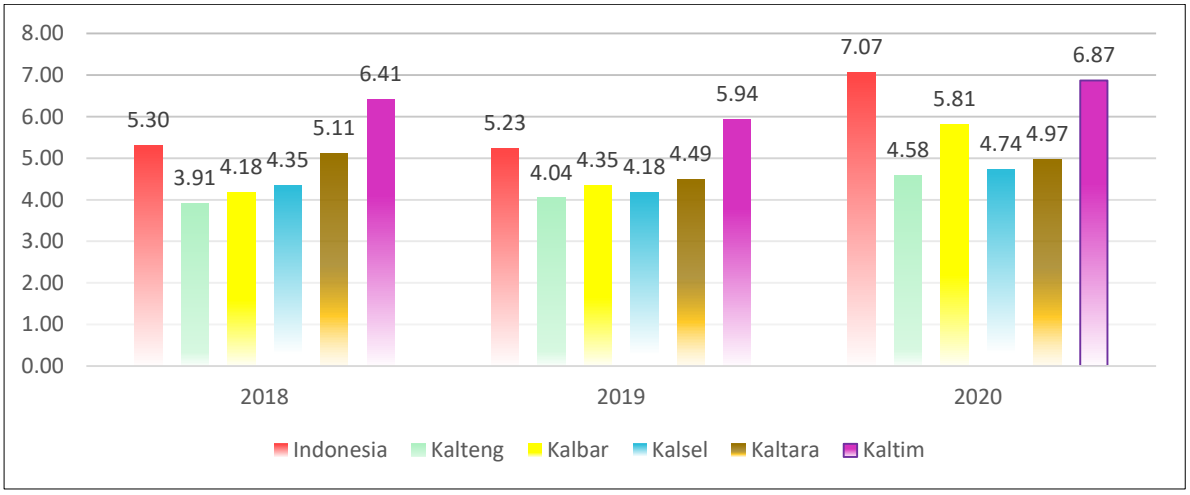

Sumber : BPS

Gambar 2.36
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia

Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu aspek yang paling terdampak akibat Pandemi Covid 19. Pada tingkat global diperkirakan sekitar 195 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Tingkat pengangguran Terbuka di Indonesia pada Februari tahun 2020 sebesar 4,99% diperkirakan akan meningkat menjadi 8,3% di tahun 2020. Peningkatan jumlah pengangguran di tahun 2020 juga diperkirakan akan dialami oleh Kalimantan Timur. Upaya mengatasi pengangguran melalui peningkatan kapasitas masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang dapat bertahan dan bahkan berkembang ditengah Pandemi Covid 19 perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu Penganggur, Bukan Angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020, Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Komponen ketiga dan keempat merupakan dampak pandemic Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih

bekerja, sedangkan komponen pertama dan kedua merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 2.47
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020 Provinsi Kalimantan Timur

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
Pengangguran2 Karena Covid-19	17.712	13.273	27.547	3.438	30.985
Bukan Angkatan Kerja (BAK) 3 Karena Covid-19	4.772	9.567	11.792	2.547	14.339
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	15.496	5.706	17.078	4.124	21.202
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	220.306	124.525	245.182	99.669	344.851
Total	258.306	153.071	301.599	109.778	411.377
Persentase terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK)	17,81	11,55	16,18	12,04	14,82

Sumber : BPS Prov. Kaltim
Keterangan :
1. Penghitungan dengan menggunakan pembimbing hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguranyang berhenti bekerja keras Covid-19 selama bulan Februari 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan Angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,78 juta, terdapat 411 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 14,82 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar 1,6 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,18 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,04 persen.

Tabel 2.48
Data Pekerja Dampak Pandemik COVID-19 Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pekerja Ter-PHK		Pekerja Yang Dirumahkan (Unpaid Leave)		Total
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
1	Samarinda	12	420	21	892	1.312
2	Balikpapan	19	1.091	60	5.698	6.789
3	Bontang	73	101	125	243	344
4	Kutai Kartanegara	4	314	6	1.517	1.831
5	Kutai Timur	0	0	1	54	54
6	Kutai Barat	8	13	0	0	13
7	Paser	2	4	4	29	33
8	Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0
9	Berau	0	0	3	71	71
10	Mahakam Ulu	0	0	0	0	0
Jumlah		118	1.943	220	8.504	10.447

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim

Jumlah tenaga kerja yang yang di PHK pada tahun 2020 sebanyak 1.943 orang dengan jumlah perusahaan 118 yang melakukan PHK terhadap pekerjanya dan Kota Balikpapan adalah dengan jumlah pekerja ter-phk tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Jumlah pekerja yang dirumahkan pada tahun 2020 sebanyak 8.504 pekerja dari 220 perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan Kota Balikpapan dengan jumlah pekerja yang dirumahkan tertinggi sebanyak 5.698 pekerja

Salah satu cara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan mendata para pencari kerja ke dalam database Disnaker caranya para pencari kerja membuat Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning yang didalamnya tercantum nomor pencari kerja, nomor kartu identitas atau KTP dan legalisasi dari Disnaker setempat. Lamaran kerja serta berkas yang diserahkan pencari kerja ke Disnaker akan dimasukkan kedalam database pencari kerja. Database ini nantinya akan dikelompokkan

menurut pendidikan dan keahlian. Perusahaan yang mencari pekerja ke Disnaker akan diberikan data pencari kerja sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja juga memiliki pusat informasi lowongan pekerjaan serta perusahaan mana saja yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja melalui database kartu kuning masih rendah yaitu dibawah 30%, namun cenderung mengalami peningkatan hanya pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 20,03% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 22, 12%. Pada tahun 2020, persentase penempatan tenaga kerja mengalami penurunan hingga mencapai 18,03% dibanding tahun 2019 yang mencapai 29,41%. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah hanya sebagian pencari kerja yang melaporkan kembali apabila telah diterima bekerja dan sebagian lagi tidak melapor.

Tabel 2.49
Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	29.863	45.834	49.552	26.148	30.719
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	5.982	10.365	11.266	7.690	5.538
3	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan (orang)	19.515	31.879	26.969	36.158	22.819
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	20,03	22,61	22,74	29,41	18,03

Sumber: SiData Kaltim

Kota Samarinda mencapai 31,48 persen persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2020, capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 23,21 persen dan Kabupaten Kutai Timur dengan persentase penempatan tenaga kerja tahun 2020 mencapai 21,02%.

Tabel 2.50
Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Kab/Kota	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	1.908	65	3,41
2	Kutai Barat	2.244	183	8,16
3	Kutai Kartanegara	4.812	578	12,01

No	Kab/Kota	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
4	Kutai Timur	1.161	244	21,02
5	Berau	4.249	699	16,45
6	Penajam Paser Utara	1.185	275	23,21
7	Balikpapan	2.898	498	17,18
8	Samarinda	5.563	1.751	31,48
9	Bontang	6.699	1.245	18,58
10	Mahakam Ulu	-	-	-

Sumber: Kaltim dalam angka 2020

F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

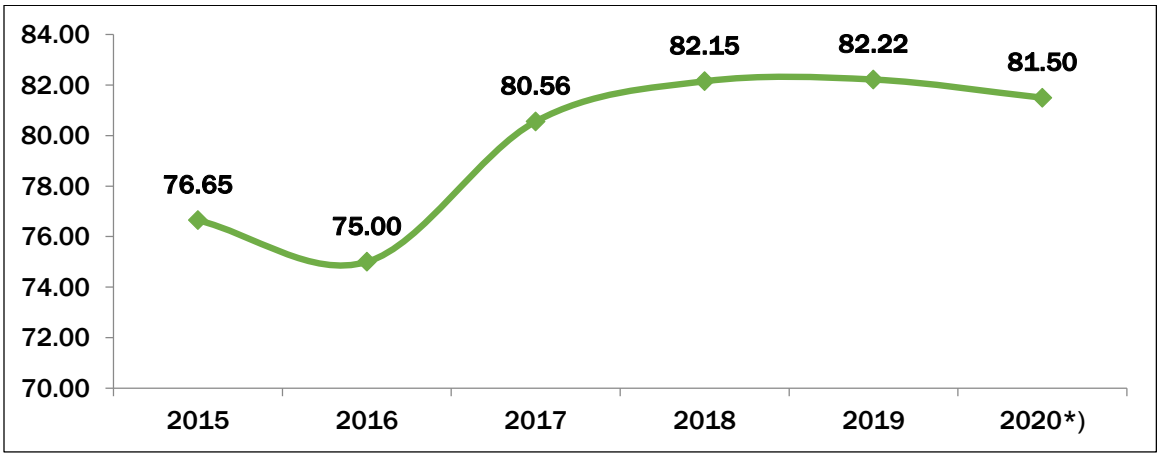

*) Angka Sementara; Sumber: Biro Organisasi

Gambar 2.37
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Survei Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur pada tahun 2020 menurun di angka sementara 81,50 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,22.

2) Keuangan Daerah

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiscal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020 adalah 52,99 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel 2.51
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2016	4.031.514.706,41	7.987.877.780,77	50,47
2017	4.588.752.896,23	8.154.749.005,92	56,27
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
Rata-rata	5.018.592.816,33	9.470.146.587,54	52,99

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan pada Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya, setelah sebelumnya opini WTP diraih pada tahun 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK pada tahun 2013, hal ini menjadi "pekerjaan rumah" bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

3) Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai 2017. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mendapat predikat BB dengan skor 77,49. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

Tugas dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPK adalah pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Untuk mengetahui kematangan penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah perlu adanya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah. Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pratik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

G. Lingkungan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.

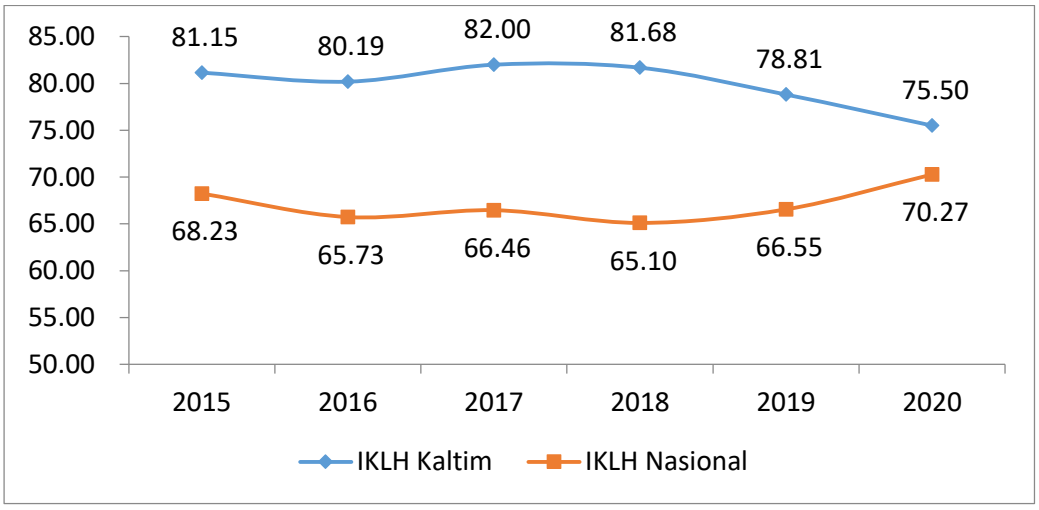

Gambar 2.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2020

IKLH Kaltim mengalami peningkatan cukup signifikan dari predikat baik (70 < IKLH ≤ 80) 75,65 pada tahun 2017 menjadi predikat sangat baik (IKLH > 80) 85,9 di tahun 2018. Peningkatan IKLH Kaltim dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang meningkat pada tahun 2018. Pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 78,81 dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 75,50. Menurunnya IKLH tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF Carbon Fund dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel 2.52
Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41

H. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang dan jasa di suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan.

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 Orang Penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 Orang Penumpang sehingga menjadi 3.570.750 Orang Penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 Ton,

sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 Ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan karena beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah Wabah Pandemi Covid 19 masuk ke negara tersebut di akhir tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2020 bahkan diperkirakan sampai dengan tahun 2021.

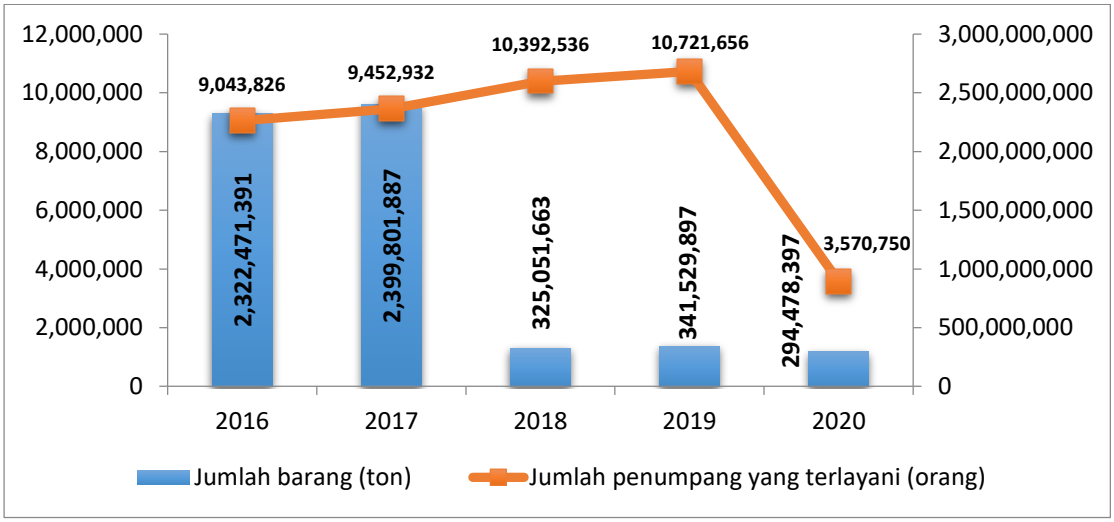

*) Data Sementara; Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

Gambar 2.39
Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2016-2020

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah

penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% selama periode 2013-2017, dan jumlah barang yang dibongkar muat meningkat lebih dari 10%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan pada periode 2013-2017.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) **Pertanian Tanaman Pangan**

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum Produksi Padi Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019. Secara umum Produksi Padi Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019. Hal ini sejalan pula dengan peningkatan Luas Panen pada Tahun 2020 sebesar 3.861 Ha dari Tahun 2019. Peningkatan produksi padi salah satunya didorong oleh pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Dari sisi produktivitas, Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata produktivitas nasional yakni 5,11 ton/ha

Tabel 2.53
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2015	99.209	408.782	4,12

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	80.343	305.337	3,80
2017	94.394	400.102	4,24
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020, kontribusi pertanian mencapai 8,77 persen meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 7,91 persen.

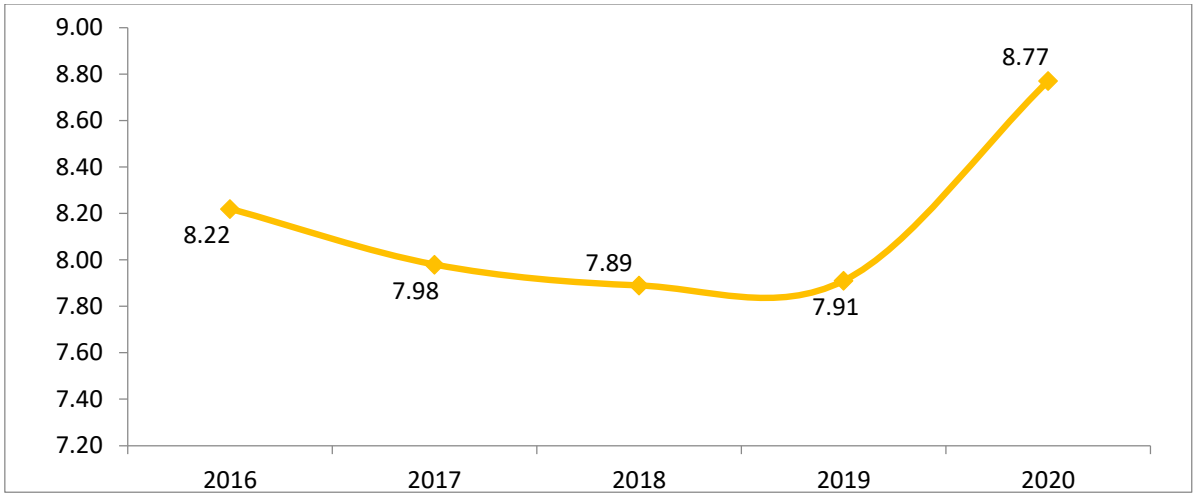

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.40
Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan di periode tahun 2016-2018 dan terus mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 3,91 persen dan kontraksi 1,12 persen.

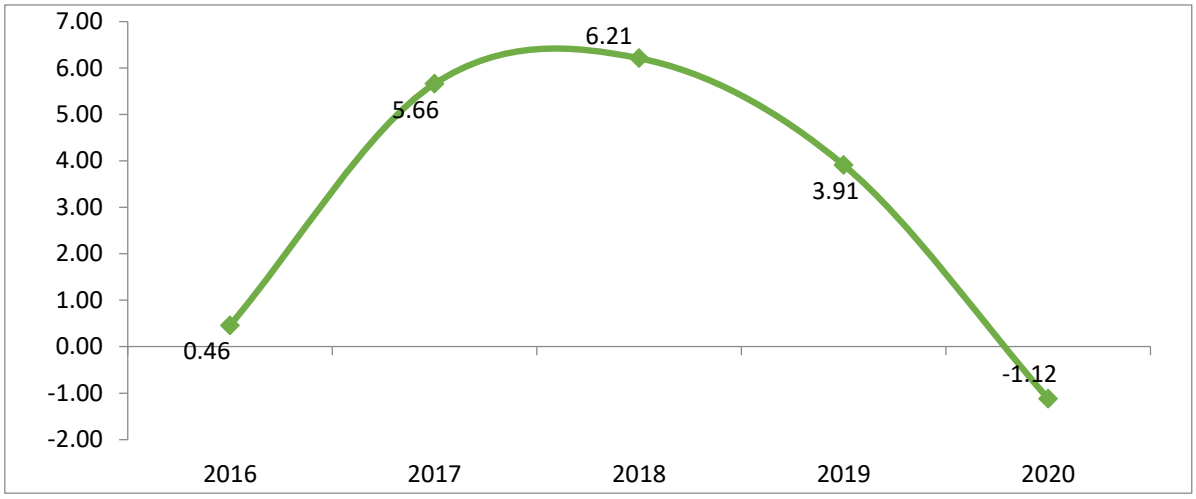

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.41
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

2) **Perkebunan**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,19 juta ha dan memiliki produksi mencapai 15,25 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 55,97 ribu ton pada tahun 2020. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.54
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020*)

No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	121.869	55.979	1,07
2.	Kelapa	20.711	11.280	0,68
3.	Kopi	2.306	212	0,24
4.	Lada	8.337	3.362	0,57
5.	Kakao	6.886	2.536	0,61
6.	Kelapa Sawit	1.194.849	15.259.383	17,59

*) angka sementara, Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2021

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dan Kabupaten Kutai Timur memiliki produksi terbanyak dengan jumlah produksi sebanyak 6,27 juta ton pada tahun 2020, Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet sebesar

27,9 Ribu Ton, sedangkan Kab Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan produksi Kelapa dan lada terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi masing-masing komoditi sebesar 2.609 ton dan 1.690 ton.

Tabel 2.55
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2020*)

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	1.987.340	1.019	7.399	110	3	12
2	Kutai Barat	888.486	202	27.922	27	19	5
3	Kutai Kartanegara	3.136.905	2.609	13.135	9	30	1.690
4	Kutai Timur	6.274.515	1.055	956	47	1.410	123
5	Berau	2.415.122	3.483	135	14	226	174
6	Penajam Paser Utara	497.390	2.053	3.194	2	-	611
7	Mahakam Ulu	48.214	5	-	-	282	-
8	Balikpapan	469	479	2.813	3	1	910
9	Samarinda	10.644	364	425	-	3	13
10	Bontang	298	11	-	-	-	-

Sumber: Disbun Provinsi Kaltim, 2021 (*Angka Sementara)*

3) **Kehutanan**

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur mencapai 8,3 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu terus mengalami peningkatan dari 4,3 juta m^3 pada tahun 2017 menjadi 5,2 juta m^3 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 4,8 juta m^3. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 6,9 ton menjadi 1.428,65 ton di tahun 2019 dan menurun menjadi 864,9 ton di tahun 2020.

Walaupun demikian, masih banyak ditemui lahan kritis di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2020 lahan kritis di Kalimantan Timur adalah sebesar 113.015 hektar dan lahan sangat kritis seluas 79.900 hektar. Oleh karena itu, upaya penurunan lahan kritis masih terus ditingkatkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel 2.56
Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Fungsi Kawasan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
HPK	536,18	2.242,30	50.847,26	37.748,15	29.333,72	120.707,61
HPT	2.536,14	7.338,38	2.076.115,67	540.395,72	197.048,22	2.823.434,13
HP	72.494,93	60.437,52	1.668.892,82	800.749,59	416.283,11	3.018.857,98
HL	2.566,30	11.785,67	1.266.122,80	382.467,60	109.383,93	1.772.326,30
KSA	1.767,01	31.211,76	137.432,09	200.894,32	65.687,88	436.993,06
TOTAL	**79.900,55**	**113.015,64**	**5.199.410,65**	**1.962.255,39**	**817.736,85**	**8.172.319,08**

Sumber : Kanwil Kaltim Badan Pertanahan Nasional

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2020, perkembangan perhutanan sosial mencapai 74 unit dengan luas sebesar 189.974,75 hektar.

4) Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir berfluktuatif namun cenderung trend meningkat. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah yakni masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya Sapras Pangkalan Pendaratan Ikan, dan sistem Pemasaran.

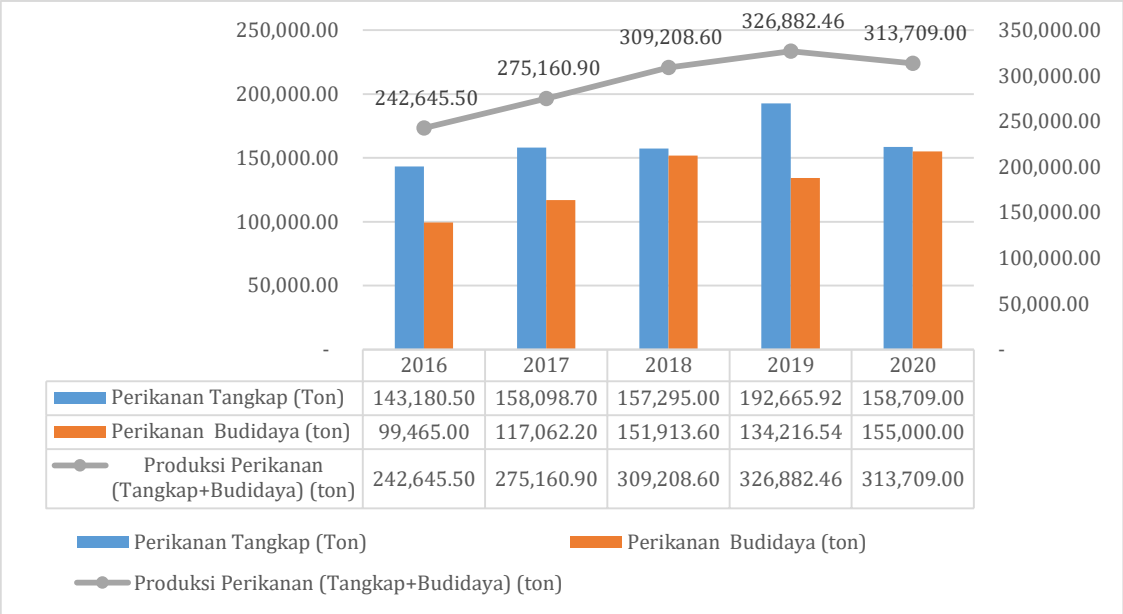

	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap (Ton)	143,180.50	158,098.70	157,295.00	192,665.92	158,709.00
Perikanan Budidaya (ton)	99,465.00	117,062.20	151,913.60	134,216.54	155,000.00
Produksi Perikanan (Tangkap+Budidaya) (ton)	242,645.50	275,160.90	309,208.60	326,882.46	313,709.00

Sumber : Dinas Kelautan Provinsi Kaltim, 2020 (diolah)

Gambar 2.42
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

5) **Peternakan**

Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 71,28 juta ekor, ayam kampung 4.59 juta ekor dan ayam ras petelur 896,38 ribu ekor. Disamping itu, terdapat populasi sapi potong sebanyak 123,07 ribu ekor dan babi sebanyak 85,02 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel 2.57
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), Tahun 2016-2020

No	Hewan	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Sapi Potong	118.712	119.123	117.504	119.485	123.069
2	Sapi Perah	97	107	110	91	92
3	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929
4	Domba	320	281	439	590	596
5	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	85.022
6	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.255
7	Kuda	101	91	97	102	103
8	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.859	9.302
9	Ayam Kampung	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.591.035
10	Ayam Ras Pedaging	60.747.455	66.268.201	66.672.445	67.886.566	71.280.894
11	Ayam Ras Petelur	842.176	822.533	1.055.432	853.693	896.378

No	Hewan	2016	2017	2018	2019	2020*)
12	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	267.418

**) Data Sementara; Sumber : Sidata Kaltim*

Program pengembangan populasi sapi potong yang efisien dan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kebutuhan daging sapi dalam daerah dan menjadi lumbung ternak sapi nasional. Untuk mendukung dan mencapai upaya tersebut diperlukan suatu program yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengembangan peternakan berbasis Mini Ranch. Mini Ranch adalah sebuah model pengelolaan budidaya sapi pedaging/potong yang dilakukan di lahan pengembalaan yang telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui berbagai perlakuan ilmiah. Pola ini mereduksi biaya produksi sehingga produknya memiliki keunggulan komperatif. Sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Dengan program Mini Ranch ini diharapkan dapat membuat produksi dari sektor peternakan menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membuat lahan-lahan bekas tambang menjadi lebih bermanfaat lagi. Adapun daftar Mini Ranch yang tersebar di Kabupaten tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Jumlah Miniranch di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten / Kota	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (METER)	Luas Kandang (METER2)	Tahun
				Betina	Jantan			
1	Kutai Barat	KT. Benteng Perjuangan	Cornelius Untaq	57	36	4800	180	2019
2	Kutai Timur	KT. Sumber Mulyo	Sudaryanto	50	10	800	30	2019
3	Kutai Timur	KT. Sumber Rejeki	Rustamaji	24	14	800	30	2019
4	Penajam Paser Utara	KT. Sumber Rejeki	Sakka	49	5	4800	180	2019
5	Paser	KT. Gawi Bersama	Jumarang	130	130	5200	180	2019
6	Paser	KT. Meta Bolum	Abdul Syukur	29	11	800	67,5	2020
7	Paser	KT. Petani Pinang Tunggal	Arpansyah	87	26	800	67,5	2020
8	Berau	KT. Rawa Makmur	Jumadi	48	12	800	67,5	2020

No	Kabupaten / Kota	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (METER)	Luas Kandang (METER2)	Tahun
				Betina	Jantan			
9	Kutai Barat	KT. Bumi Prana Jaya	Rusmadi Yatin	8	2	800	67,5	2020
10	Kutai Barat	KT. Sapi Jaya	Yonatan	8	2	800	67,5	2020
11	Kutai Kartanegara	KT. Rukun Abadi	H. Sayuti	45	15	800	67,5	2020
12	Kutai Kartanegara	KT. Pelita	M. Saleng	100	300	800	67,5	2020
13	Kutai Kartanegara	KT. Karya Mulya	Abdiansyah	-	-	800	67,5	2020
14	Mahakam Ulu	KT. Danum Paroy	Rudin	6	2	400	33	2020
15	Mahakam Ulu	KT. Harapan Masa	Rahmani	5	4	400	33	2020
16	Penajam Paser Utara	KT. Sinar Abadi	Suriansyah	35	7	800	67,5	2020
17	Penajam Paser Utara	KT. Semoga Jaya	M. Rifai	17	7	800	67,5	2020

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2021

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Dari total 1,2 juta KK di Kalimantan Timur, 82,6% keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 7,64% keluarga yang mendapatkan akses listrik non PLN. Sampai dengan tahun 2020 masih terdapat 119.890 KK yang belum berlistrik. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 88,93% pada tahun 2019 menjadi sebesar 90,21%.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020, kontribusinya turun menjadi sebesar 41,43 persen dari tahun sebelumnya sebesar 45,60 persen. Meski demikian, kontribusi tersebut masih belum bisa disusul oleh lapangan usaha lainnya.

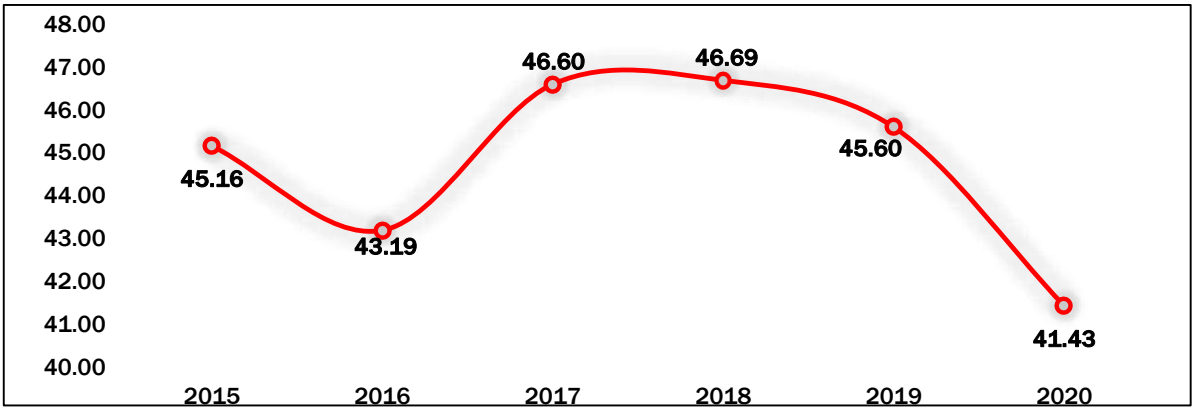

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.43
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020 (persen)

Produksi batubara tahun 2020 adalah sebesar 187 juta ton, yang menunjukkan penurunan sebesar 22,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

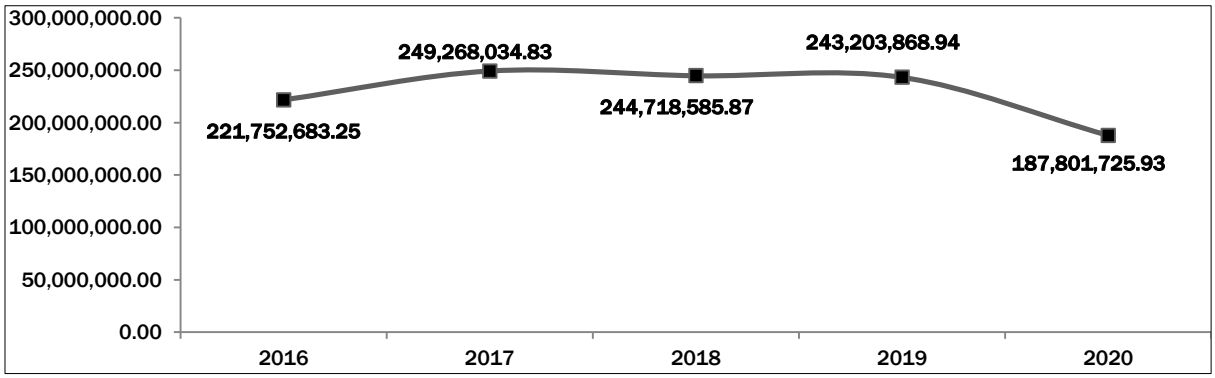

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Gambar 2.44
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Ton)

Pada tahun 2020 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi.

Tabel 2.59
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2016	221.752.683,25	34.323,80	568.588,50
2017	249,268,034.83	29.754,98	449.579,20
2018	244,718,585.87	23.717,95	296.832,49
2019	243,203,868.94	20.829,80	240.828,16
2020	187,801,725.93	14.381,23	156.294,54

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

C. Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan "angin segar" bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.60
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	PMDN	PMA	Total
2015	143	420	563
2016	243	471	714
2017	357	566	923
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur

Dilihat dari jumlah proyek, secara total terdapat peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah proyek di Kalimantan Timur sebanyak 4.702, meningkat jika dibandingkan jumlah proyek pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 3.130 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 1.707 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 390 proyek.

D. Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 22,67 triliun menjadi sebesar Rp 25,93 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi asing mengalami penurunan menjadi 378,03 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi Kalimantan Timur sangat berfluktuasi.

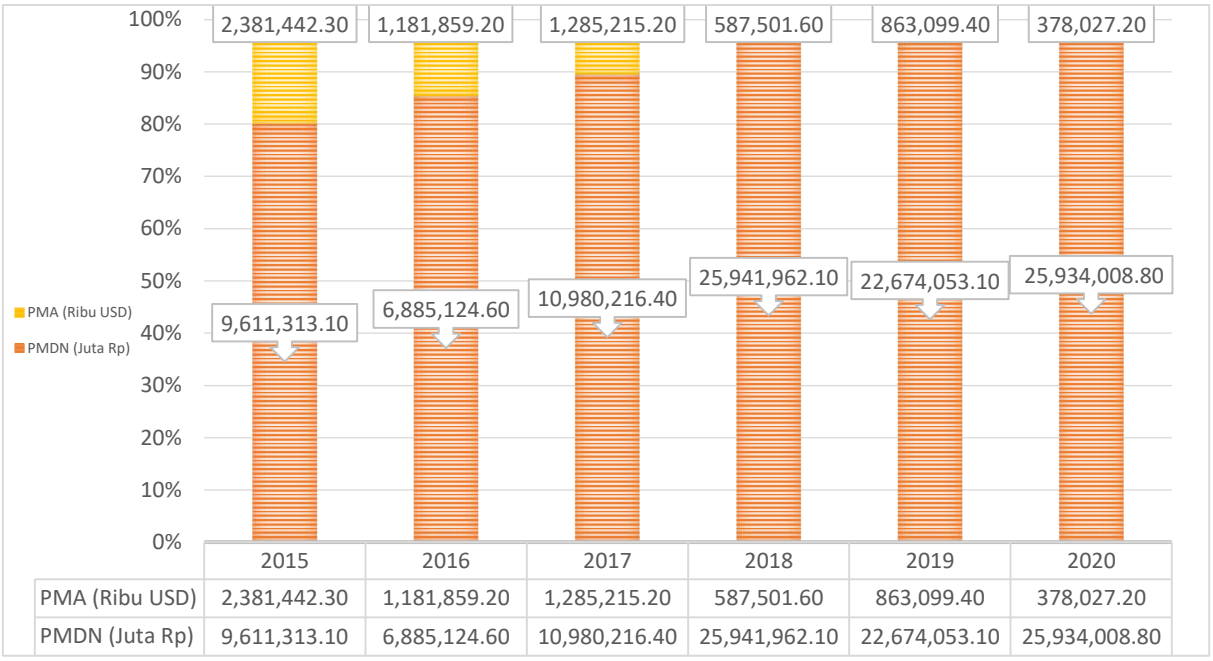

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PMA (Ribu USD)	2,381,442.30	1,181,859.20	1,285,215.20	587,501.60	863,099.40	378,027.20
PMDN (Juta Rp)	9,611,313.10	6,885,124.60	10,980,216.40	25,941,962.10	22,674,053.10	25,934,008.80

Sumber: DPMPTSP Kalimantan Timur

Gambar 2.45
Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 senilai Rp 31,38 triliun.

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

PMDN							
No	**Uraian**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	24.825	29.023	9.236	12.935	20.837	19.952
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	143	243	357	520	2.227	3.924
3	Rasio daya serap tenaga kerja	173,60	119,44	25,87	24,88	9,36	5,08
PMA							
No	**Uraian**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	66.230	22.204	15.508	12.500	15.166	5.868
2	Jumlah proyek seluruh PMA	420	471	566	513	903	778
3	Rasio daya serap tenaga kerja	157,69	47,14	27,40	24,37	16,80	7,54

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan sektor usahanya, tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2020 paling banyak diserap oleh sektor perdagangan sebesar 22,07 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 20,48 persen. Adapun lapangan usaha yang menciptakan nilai tambah terbesar untuk PDRB Kalimantan Timur yaitu Pertambangan dan Penggalian hanya mampu menyerap 7,27 persen tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6,23 persen.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 – 2020

No	**Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**	**Capaian Kinerja Setiap Tahun**					
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	-	-	-	-	25	
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	-	-	-	-	25	
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	67,78	67,92	68,23	68,43	68,55	69,00
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	-	-	-	-	75	
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	-	-	-	-	1.700	
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	-	-	-	-	6.952	
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	-	-	-	-	25	
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	-	-	-	-	20	
2	Kesehatan						
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)					45	55
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)					80	85
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	-	-	-	4,80	23,50	23,50

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)				87,50	87,50	90
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	8.322	8.622	7.922	7.922	7.922
3.2	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	62,23	65,23	67,23	60,23	54,59*	62,64
3.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	46.722	41.722	36.722	51.722	63.728	63.128*
3.4	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	-	-	-	63,19	64,87	70,11
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat						
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	-	-	-	-	66,27	50
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	-	50	55	60	60	61,33
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	-	-	-	-	75	80
5	Sosial						
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	-	-	-	300	385	405
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	22,12	20,03	22,61	22,74	33,64	18,03
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang	-	-	-	80	80	80

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Terserap di pasar kerja (%)						
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	30,98	45,31	30			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	55,96	56,93	56,64	57,53	65,65	56,71
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)				70	76	82
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)				34	48	62
2.4	Rasio KDRT (%)	0,7	7,01	27,11	0,066	18,16	27,2
2.5	Kampung KB	154	160	175	180	185	190
3	Lingkungan Hidup						
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	550	600	640	670	592	679
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	3,101 (Cemar Ringan)	3,027 (Cemar Ringan)	2,700 (Cemar Ringan)	9,304 (Cemar Sedang)	5,299 (Cemar Sedang)	6,509 (Cemar Sedang)
3.3	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)					6,60	
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)		688	518	518	503	478
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	119	207	275	302	20	25
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	140	140	140	289	20	25
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	10	30	35	63	10	30

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.5	Jumlah kampung/desa Iklim +	-	-	-	28	20	22
5	Perhubungan						
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	8.216.086	9.043.826	9.452.932	10.392.536	10.721.656	3.570.750
5.2	Jumlah barang (ton)	2.432.833.106	2.322.471.391	2.399.801.887	325.051.663	341.529.897	294.478.397
5.3	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	81	82	82	83	83	84
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	736	705	1.193	846	570	448
6	Komunikasi dan Informatika						
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	2,49	3,04	
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	-	-	-	-	200	250
8	Kepemudaan dan Olahraga						
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	56,74	57,23	57,82	56,33		
9	Kebudayaan						
10	Perpustakaan						
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	-	-	-	137.841	145.731	77.884
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan						
1	Pariwisata						
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi				3	3	3

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)						
2	Pertanian						
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	408.782	305.337	356.680	359.905	359.905	262.856
2.2	Jumlah Miniranch yang beroperasi (unit)	-	-	-	-	4	10
2.3	Angka Kelahiran Sapi (%)	-	-	-	-	17	20
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	-	-	-	258.565	126.986	
2.5	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	10.902.776	11.499.594	13.250.778	13.478.263	18.343.852	13.450.350
3	Kehutanan						
3.1	Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar)	-	-	-	219,63	172,14	109,00
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	-	-	-	-	0,77	1,75
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	-	-	-	-	5,66	13,98
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	-	-	-	31.368	28.620
4	Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	-	-	-	-	4,40	4,80
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	-	817.343	905.821	957.727	1.011.485	1.105.227
5	Perdagangan						
5.1	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)						
5.2	Jumlah Produk Perkebunan yang	-	-	-	-	9	

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	bersertifikat SNI (Produk)						
6	Perindustrian						
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	2,66	5,46	3,47	0,52	0,19	-2,77
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)					2	1
7	Kelautan dan Perikanan						
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	117.889	107.027	173.622	199.691	215.925	190.495
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	145.180	143.287	159.345	152.024	192.666	158.709
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (Miliar ekor)	6,7	6,99	7,28	7,64	2,5	2,54
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	2	2	2	2	1	2
d	Fokus : Urusan Penunjang						
1	Perencanaan						
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)					89,42	
2	Keuangan						
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	-	-	-	-	2	2
3	Pengawasan						
3.1	Hasil Penilaian Integritas	-	-	-	63	66,67	66,67
3.2	Level kapasitas APIP	-	2	2	2	3	3

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Umum/Sekretariat						
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)		71	71	71	74	78,38
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	-	-	-	84	87	87
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)						
6.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)				52,63	60,53	60,53

*) : Perubahan Asumsi rumusan perhitungan (cakupan layanan air minum teknis) menjadi perhitungan capaian akses air minum layak administratif

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.754.195,- per bulan.

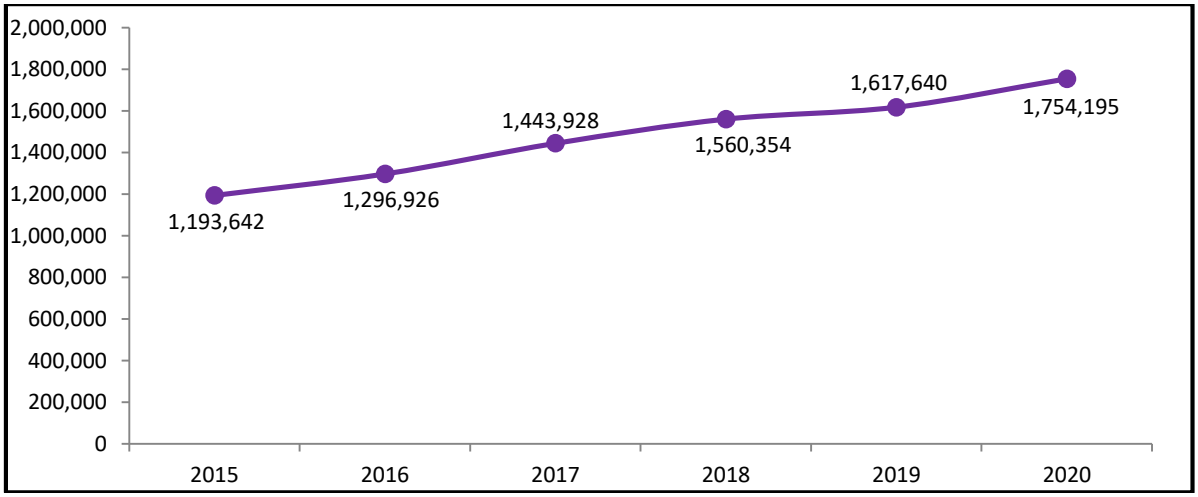

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.46
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020 (Rupiah)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.63
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	644.291	709.006	780.443	857.449	893.217	963.725

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.193.642	1.296.926	1.443.928	1.560.354	1.617.640	1.754.195
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	53,98	54,67	54,05	54,95	55,22	54,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

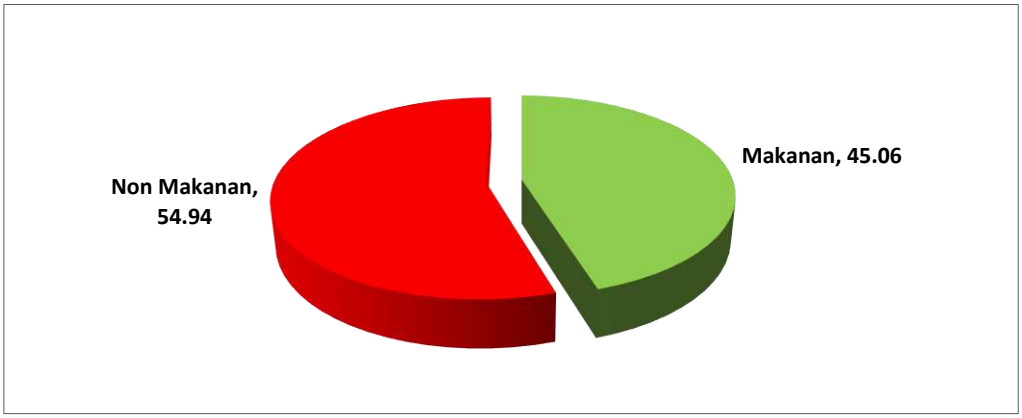

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.47
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.64
Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2020 (2012=100)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117,00	120,03	121,96	123,77	107,91	116,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	118,66	122,31	125,54	128,75	102,41	104,76

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,62	98,14	97,15	96,14	105,38	111,65

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Peningkatan rata-rata NTP tahun 2020 disebabkan meningkatnya rata-rata NTP pada hampir seluruh subsector hanya subsector tanaman pangan yang mengalami sedikit penurunan. Rata-rata NTP pada subsektor tanaman pangan sedikit menurun 0,97 persen terhadap tahun 2019, sedangkan rata-rata NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan drastis sebesar 11,00 persen terhadap rata-rata NTP pada tahun 2019. Selanjutnya, ada tiga subsektor yang mengalami peningkatan rata-rata NTP, yaitu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Tabel 2.65
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2019-2020 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2019	2020	
NTP Gabungan		**105,38**	**111,65**	**5,62**
1.	Tanaman Pangan	102,16	101,18	-0,97
2.	Hortikultura	104,59	105,27	0,65
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	110,45	124,10	11,00
4.	Peternakan	100,56	101,70	1,12
5.	Perikanan	100,90	102,69	1,74

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Rata-rata Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan memiliki fenomena yang sama. Seluruh provinsi pada regional Kalimantan memiliki rata-rata Nilai Tukar Petani berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 101,65. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi sebesar 111,65, disusul Kalimantan Barat sebesar 108,46.

Tabel 2.66
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
Menurut Subsektor Tahun 2020 (2012=100)

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
NTP Gabungan		**111,65**	**108,46**	**103,55**	**101,85**	**102,75**	**101,65**
1.	Tanaman Pangan	101,18	96,91	99,08	101,85	100,09	101,28
2.	Hortikultura	105,27	99,04	98,88	97,73	95,43	101,28
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	124,10	114,67	106,18	100,64	114,38	104,32
4.	Peternakan	101,70	97,55	103,31	99,98	102,84	100,22
5.	Perikanan	102,69	102,23	101,91	99,86	102,61	100,35

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.67
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
J u m l a h		**2.234.602**	**3.982.325**	**56,11**

Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 624,48 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 403,38 km, kondisi sedang mencapai 216,10 km, kondisi rusak ringan mencapai 101,48 km, dan kondisi rusak berat mencapai 169,13 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 1.490,5 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 251,16 Km,

kondisi sedang 1.144,83 Km, kondisi rusak ringan mencapai 249,72 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 65,19 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km^2 (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km^2) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km^2. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan.
3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal.
6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor

Tabel 2.68
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	STATUS	PANJANG (KM)	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.710,90	1.490,50	0,00	4,31	216,10
2	Provinsi	895,09	529,65	132,49	28,42	204,53

Sumber : Sidata Kalimantan Timur, 2021

Tabel 2.69
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	251,16	1.144,83	249,72	65,19
2	Provinsi	408,38	216,10	101,48	169,13
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		**7.514,24**	**3.626,06**	**2.387,09**	**2.589,81**

Sumber : Sidata Kalimantan Timur, 2021

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektifitas dan pola distribusi nasional yang handal (reliable) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan hirearki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional, dan tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.70
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							
	Kabupaten/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				Keterangan
				2017	2022	2027	2037	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU	*
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR	
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP	*
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP	*/TK
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP	*/TK
309	Kutai Kertanegara	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP	*/TK
310	Kutai Kertanegara	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP	*/TK
311	Kutai Timur	8	Maloy	PP	PP	PP	PP	
312	Kutai Timur	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP	*/TL/TK
313	Kutai Timur	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR	*
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP	*/TK
315	Penajam Pasir Utara	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP	
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP	*

Sumber : Lampiran KP 432 Tahun 2017
*Keterangan : PU (Pelabuhan Utama); PP (Pelabuhan Pengumpul); PR (Pelabuhan Regional)

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang serta 7 Terminal Type B yang tersebat di 7 Kabupaten/Kota. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 72.881 unit, mengalami kenaikan sebanyak 10.195 unit dari tahun sebelumnya. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah. Selain itu, penambahan jumlah RTLH disebabkan karena di updating data RTLH serta penambahan nilai susut bangunan di tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.71
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Paser	9.676	Database DPKPP Kab. Paser, BPS 2020
2	Kutai Barat	0	DISPERKIM Kab. Kubar 2019
3	Kutai Kartanegara	22.780	e-RTLH Kab. Kukar Th. 2020
4	Kutai Timur	8.531	DISPERKIM Verifikasi Disdukcapil Kab. Kutai Timur 2020
5	Berau	2.103	Database DISPERKIM Kab. Berau 2020
6	Penajam Paser Utara	2.091	BDT & PEMDA Kab. PPU
7	Mahakam Ulu	1.603	FORM 1B Kab. Mahulu 2020
8	Balikpapan	382	FORM 1B Kota Balikpapan 2020
9	Samarinda	23.989	FORM 1B Kota Samarinda 2020
10	Bontang	1.726	e-RTLH Kota Bontang
Kalimantan Timur		**72.881**	

Sumber: Laporan Akhir Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian PUPR, 2020

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur terindentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.

Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan SK Bupati/Walikota, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur adalah seluas 1.331,61 ha yang tersebar di 9 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.72
Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Balikpapan	153,3	No. 188.45-326/2020
2	Samarinda	70,52	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
3	Kutai Timur	120,63	No. 050/K.661/2015
4	Bontang	73,56	No. 188.45/509/DPKP2/2020
5	Kutai Kartanegara	168,12	No. 454/SK-BUP/HK/2019
6	Berau	28,26	No. 30 Tahun 2020
7	Penajam Paser Utara	49,07	No. 593.33/270/2017
8	Paser	179,56	No. 653/KEP-332/2020
9	Kutai Barat	488,59	No. 413.2/K.719/2018
Kalimantan Timur		**1.331,61**	

Sumber: SK Kumuh Bupati/Walikota Tahun 2015-2020

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 787 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 242 Desa. Sehingga rasio desa berlistrik mengalami peningkatkan dari tahun 2018 sebesar 98,94 persen menjadi 99,13 persen di tahun 2019. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 88,93 persen pada tahun 2019 menjadi 90,21 persen pada tahun 2020.

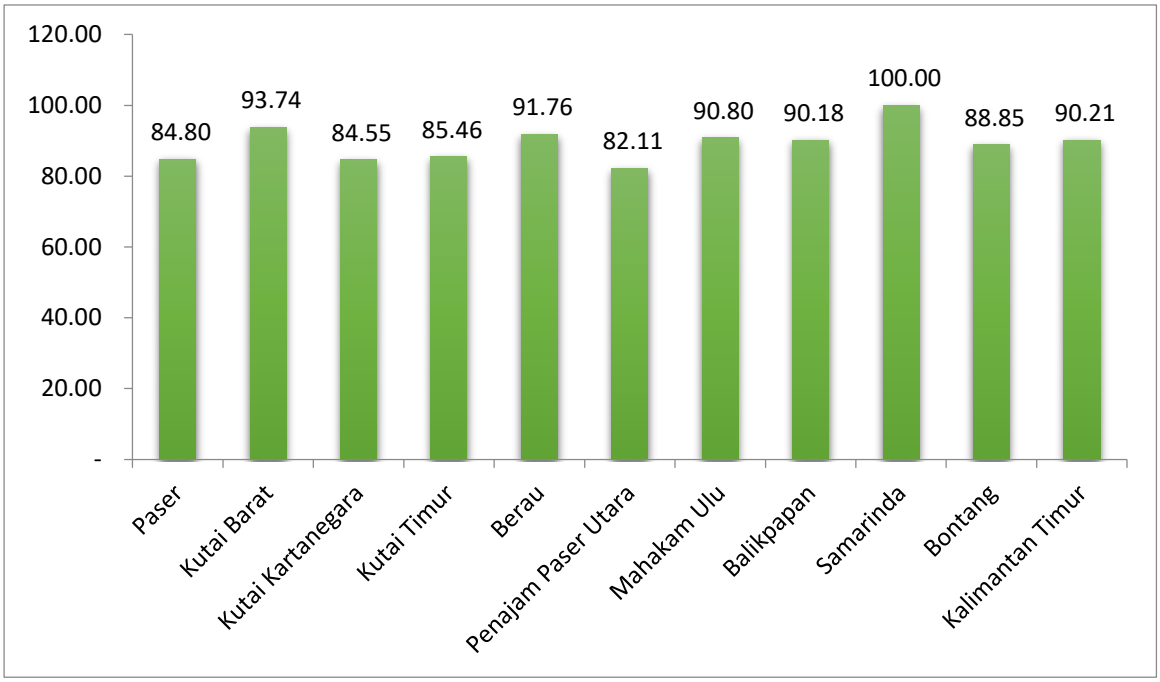

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.48
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Tabel 2.73
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.156.967
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.801.719.937	1.748.943.749	2.213.445.295	2.213.445.295	

Sumber*: PT. PLN Wilayah Kaltimra*

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2020, sawah yang mendapat layanan irigasi mencapai 61,37% atau sekitar 24.231,80 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.74

Luas Lahan Pertanian Yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KABUPATEN/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
1	Paser	545,79	5.999,92	27,33	-	2,99	6.576,03
2	Kutai Barat	935,89	1.267,92	-	2,88	-	2.206,69
3	Kutai Kartanegara	158,60	11.247,27	-	442,73	3.456,56	15.305,16
4	Kutai Timur	411,21	1.020,42	-	975,11	378,07	2.784,81
5	Berau	33,51	940,90	-	447,35	507,32	1.929,08
6	Penajam Paser Utara	16,09	1.042,03	-	164,54	8.011,21	9.233,87
7	Mahakam Ulu	-	79,42	-	-	-	79,42
8	Balikpapan	-	34,71	-	-	-	34,71
9	Samarinda	0,03	458,57	-	306,08	558,20	1.322,88
10	Bontang	-	12,18	-	-	-	12,18
TOTAL		**2.101,12**	**22.103,35**	**27,33**	**2.338,69**	**12.914,35**	**39.484,84**

Sumber : Kanwil BPN Kaltim

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batu bara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, pengendali banjir dan sumber air minum. Selain permasalahan jaringan atau distribusi, masalah ketersediaan layanan air minum juga diakibatkan oleh kurangnya pasokan air baku, berikut tabel defisit kebutuhan air baku.

Tabel 2.75
Defisit Kebutuhan Air Baku

No	KABUPATEN/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m^3/Tahun)	
		2018	2023
1	Kabupaten Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	Kabupaten Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	Kabupaten Kutai Barat	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)

No	KABUPATEN/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m^3/Tahun)	
		2018	2023
5	Kabupaten Kutai Timur	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	Kota Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)
8	Kota Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Kota Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Kabupaten Mahakam Ulu	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)

Sumber : Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel 2.76
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sungai Tunan	20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam sektor air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih/air minum. Saat ini, terdapat 9 perusahaan daerah air minum tersebar di 9 kabupaten/kota dengan kapasitas desain produksi total terpasang pada tahun 2020 sebesar 8.395 l/dt dengan kapasitas sumber air yang diolah saat ini hanya mampu memproduksi air sebesar 87,51 persen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Kalimantan Timur saat ini.

Tabel 2.77
Indikator Kinerja Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2020

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	9	9	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial (ltr/detik)	6.985	7.185	7.354	7.583	8.018	8.395
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	6.420	6.445	6.743	6.919	7.201	7.347
4.	Efektivitas Produksi (%)	91,91	89,70	91,69	91,24	89,81	87,51

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim, 2020

Efektifitas produksi Instalasi Pengolahan Air yang masih < 100% menyebabkan timbulnya idle capacity yang seringkali menjadi tantangan untuk penyelenggara air minum dalam pemanfaatannya. Idle capacity yang besar bila tidak dimanfaatkan segera, akan menyebabkan perluasan layanan SPAM menjadi terhambat. Belum lagi permasalahan tingkat kebocoran/NRW di SPAM yang setiap tahun meningkat, tanpa adanya upaya dalam penangananya akan menyebabkan penyelenggaraan SPAM menjadi tidak efektif dan efisien. Semua itu kemudian berdampak pada hambatan dalam pemenuhan layanan air minum.

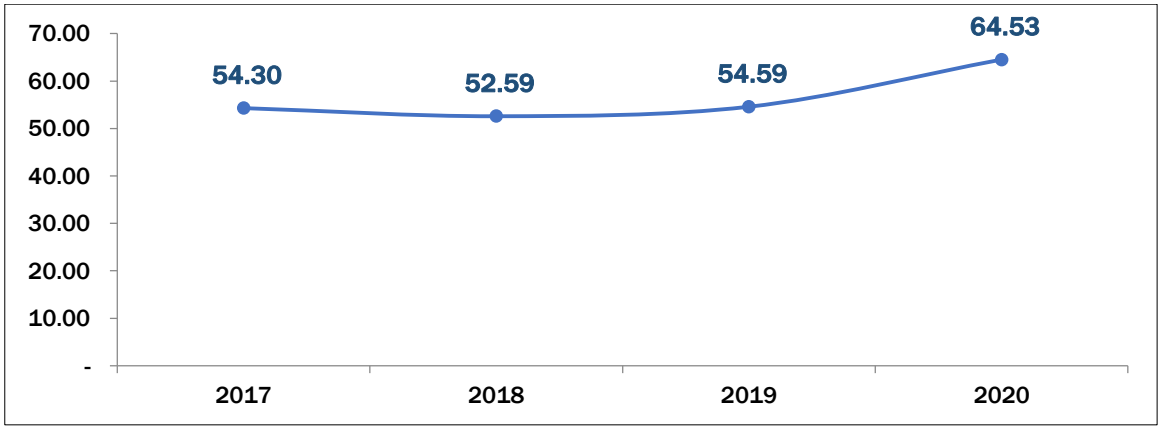

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.49
Rata-Rata Penduduk Terlayani Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020

Tabel 2.78
Penduduk Terlayani Air Minum Layak Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Yang Terlayani Air Bersih (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	Paser	38,29	45,45	37,16	48,56
2	Penajam Paser Utara	15,87	16,98	34,79	32,14
3	Samarinda	95,46	83,95	99,29	87,28
4	Balikpapan	76,98	81,72	79,05	79,79
5	Kutai Kertanegara	63,39	45,07	58,68	51,54
6	Kutai Barat	34,35	22,01	34,24	31,04
7	Kutai Timur	33,13	42,76	15,43	40,11
8	Berau	44,70	45,46	81,59	56,87
9	Bontang	87,05	89,06	51,10	99,96
10	Mahakam Ulu	-	-	-	24,51
Rata-Rata		**54,3**	**52,59**	**54,59**	**64,53**

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim 2020 (Dokumen RISPAM Prov. Kaltim 2020)

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari trend update capaian pertahun masing-masing Kabupaten/Kota, maka terlihat inkonsistensi data capaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dan konsep perhitungan capaian air minum oleh masing-masing daerah dan Provinsi. Untuk capaian air minum yang terukur dengan baik, maka kedepan diperlukan penyamaan persepsi baseline data perhitungan capaian air minum, seperti penyepakatan jumlah jiwa dalam satuan Sambungan Rumah, keikutsertaan data sektor komersil dalam perhitungan capaian air minum, dan lain-lain sebagainya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 karena sudah memasuki masa 5 tahun pertama sehingga bisa diajukan Revisi, bersamaan dengan Bantuan Teknis dari Kementerian ATR/BPN berupa penyusunan Materi Teknis Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, dan pada tahun 2021 dilanjutkan proses Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Revisi ini diselaraskan dengan Program Prioritas Gubernur untuk Sinkronisasi dan Harmonisasi Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan

kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 87,25 persen, sedangkan pada tahun 2018 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,71 persen. Pada tahun 2020 persentase tindak kejahatan yang diselesaikan baru mancapai 38,83 persen dengan posisi data masih bersifat sementara ditahun 2020.

Tabel 2.79
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2015	12.632	4.447	8.186	64,80	37,21
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	36,67
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	38,83	6,01

*) Data Sementara; Sumber: SIDATA Kalimantan Timur, 2021

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2020, jumlah demonstrasi secara keseluruhan

berjumlah 155 demonstrasi dimana sebanyak 29,17 persen (42 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 69,44 persen (100 demonstrasi) terkait sosial dan 1,39 persen (2 demonstrasi) terkait politik.

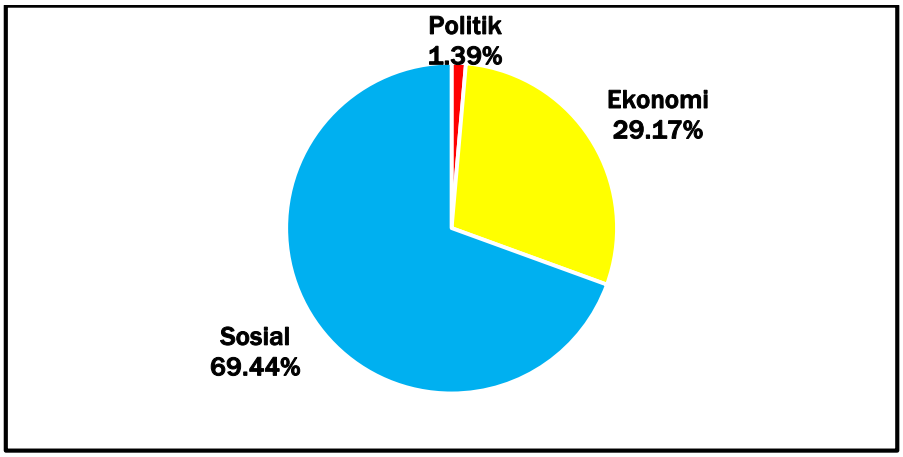

Sumber: Kaltim Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.50
Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (jumlah)

Tabel 2.80
Jumlah Demontrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	
2015	14	141	95	352
2016	4	112	187	303
2017	12	121	201	334
2018	15	129	221	365
2019	57	83	185	325
2020	2	42	100	144

Sumber: Kaltim Dalam Angka Tahun 2021

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 77,67% pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur saat ini masih berada pada kategori “sedang”. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini. Namun pada tahun 2020 posisi data sementara Indeks Demokrasi Indonesia baru mencapai 50%.

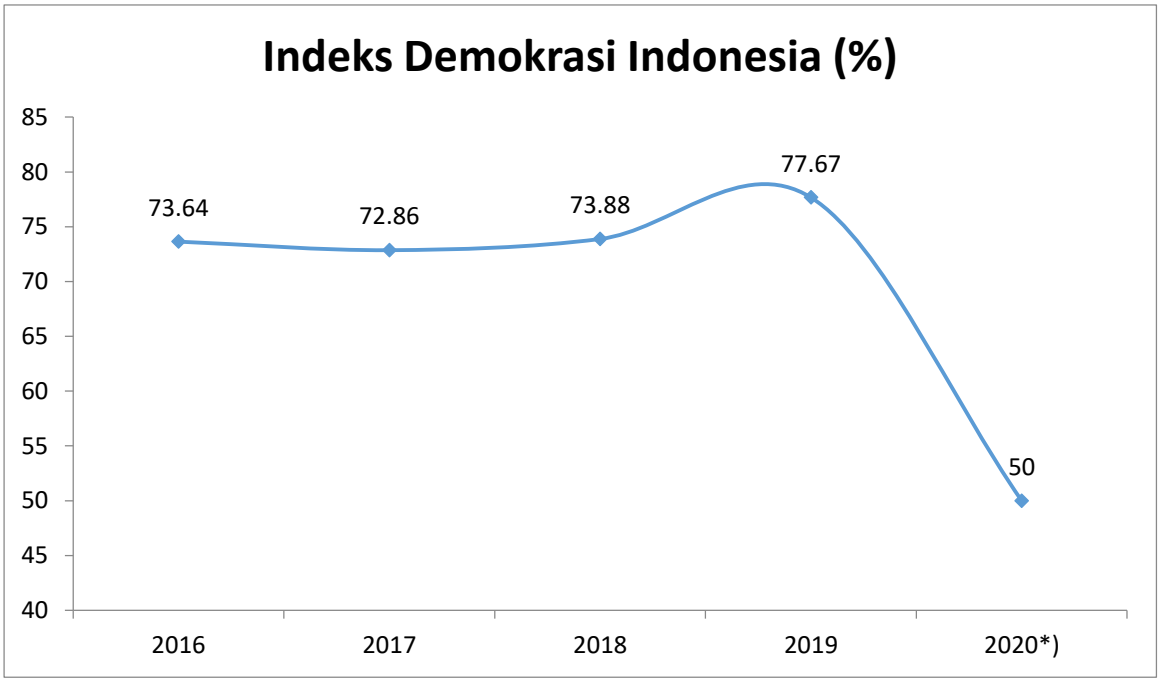

*) Data Sementara; Sumber: SIDATA Kalimantan Timur 2021

Gambar 2.51
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

D. Iklim Investasi Daerah

Pada tahun sebelumnya sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, tahun 2020 ini sektor usaha dengan nilai investasi terbesar adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi mencapai 7.965,22 miliar rupiah meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 444,15 miliar rupiah diikuti sektor konstruksi dengan nilai investasi PMDN yang mencapai 5.777,78 miliar rupiah dan sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai 4.738,08 miliar rupiah sedangkan sektor Pertambangan mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel 2.81
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
I.	**Sektor Primer**					
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	2.496.175	2.886.876,90	3.747.269,70	4.278.114,90	4.738.083,60
2.	Peternakan	.	.	.	33,40	-
3.	Kehutanan	8.050,10	25.144,20	602.835,40	283.625	125.549,60
4.	Perikanan	.	.	.	.	3,00
5.	Pertambangan	599.560,60	4.714.508,50	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
II.	**Sektor Sekunder**					
1.	Industri Makanan	1.847.135,70	551.959,10	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40
2.	Industri Tekstil	.	.	.	.	0
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	.	0
4.	Industri Kayu	382.004,20	316.482	264.104,30	350.224	97.509,90
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	.	0
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	466.848,70	9.351,90	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	.	9.000	70,80
8.	Industri Mineral Non-Logam	8.893,30	748,30	17.919,90	292.133,10	95,00
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	27.566	.	.	5.000
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	.	.	0
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	5.900	.	7.620	151.706,50	3.626,30
12.	Industri lainnya	78.643,40	248	.	509,50	70.348,60
III.	**Sektor Tersier**					
1.	Listrik, Gas, dan Air	324.544,20	2.297.726,20	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70
2.	Konstruksi	.	375,30	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90
3.	Perdagangan dan Reparasi	69.294,60	136.787,70	82.557,40	341.327,60	218.379,90
4.	Hotel dan Restoran	.	530	480	1.086.261,80	25.127
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	183.970,50	4.322,20	165.403,80	940.606,30	459.299,20
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	6.560,20	2.850	26.874,40	345.944,10	53.687,40
7.	Jasa Lainnya	407.544,10	4.740,10	1.015.135	1.623.524,70	419.150
Total		**6.885.124,60**	**10.980.216,40**	**25.941.962,10**	**22.674.053,10**	**25.934.008,80**

Sumber : DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

Sektor usaha pertambangan yang mengalami peranan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai investasi PMA yang mencapai 167,86 Ribu U$ dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 306,46 Ribu US$ sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi yang mencapai 32.861,60 Ribu US$ dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60

Ribu US$ diikuti sektor industri makanan, sektor industri mineral Non Logam, Industri instrumen kedokteran, presesi, optic dan jam.

Tabel 2.82
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (US$)

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
I.	**Sektor Primer**					
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	344.588.200	159.353.800	63.157.800	185.796.300	67.781.500
2.	Peternakan	3.900	1.214.000	956.300	.	
3.	Kehutanan	9.304.600	82.734.000	657.100	2.751.700	2.071.400
4.	Perikanan	.	.	135.500	.	-
5.	Pertambangan	449.980	900.503.500	188.763.000	306.457.800	167.858.400
II.	**Sektor Sekunder**					
1.	Industri Makanan	207.862.100	72.145.900	118.386.600	14.264.600	41.235.500
2.	Industri Tekstil	.	.	.	.	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	.	-
4.	Industri Kayu	7.906.900	.	6.600	33.300	-
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	.	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10.313.800	9.552.500	760.700	60.000	32.861.600
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	39.000	9.494.000	256.700	561.100	986.400
8.	Industri Mineral Non-Logam	27.487.300	16.586.100	.	15.809.600	24.840.000
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	75.719.600	3.607.700	22.600	1.879.400	276.400
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	253.200	1.533.400	3.550.700
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	128.800	58.500	.	43.800	-
12.	Industri lainnya	555.900	.	526.100	134.600	-
III.	**Sektor Tersier**					
1.	Listrik, Gas, dan Air	26.542.700	21.413.400	53.012.000	280.607.900	278.800
2.	Konstruksi	.	.	5.093.100	.	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	6.121.500	13.289.100	3.738.700	4.258.100	5.618.500
4.	Hotel dan Restoran	1.592.600	704.800	2.245.800	1.297.000	791.000
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	10.125.300	67.399.200	86.566.000	14.847.700	29.415.000

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	1.674.700	1.115.400	301.200	146.900	221.300
7.	Jasa Lainnya	1.911.800	503.900	62.662.600	32.616.200	240.700
Total		**1.181.859.200**	**1.285.215.200**	**587.501.600**	**863.099.400**	**378.027.200**

Sumber : DPMPTSP

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur pernah mengalami penurunan pada tahun 2017 yang mencapai 11,42 triliun rupiah dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai 25,14 triliun rupiah pada tahun 2020.

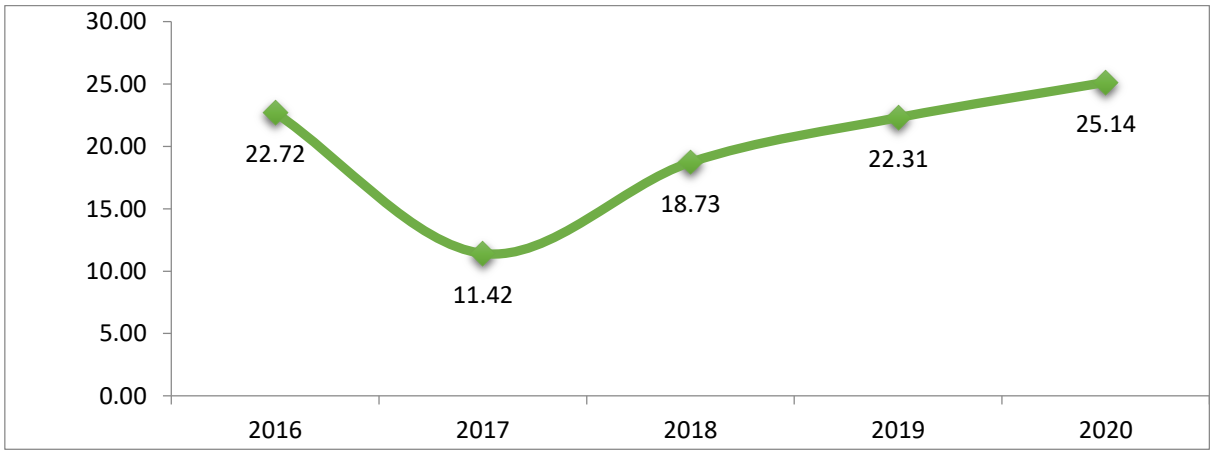

Sumber: DPMPTSP

Gambar 2.52
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Triliun Rp)

E. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2016-2020, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

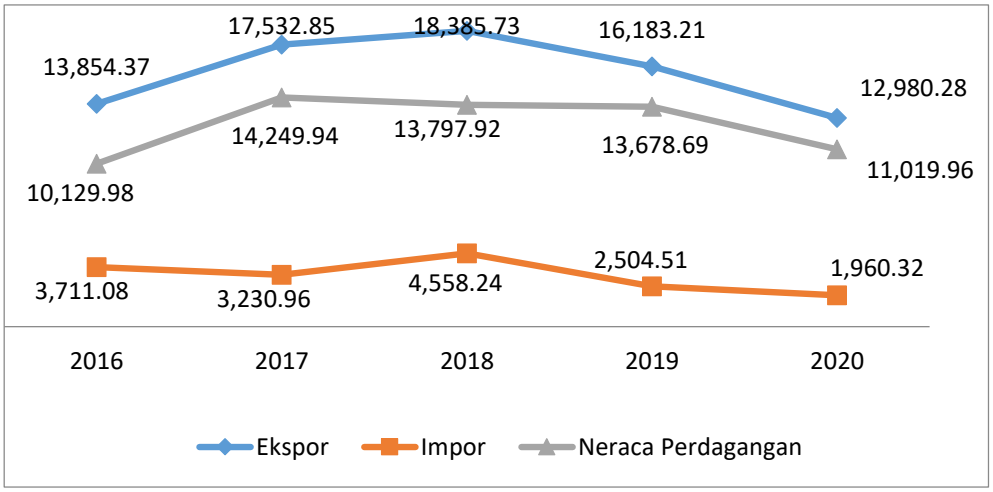

Gambar 2.53
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,79 persen disbanding tahun 2019 yaitu dari 16,18 miliar US$ menjadi 12,98 miliar US$. Penurunan ekspor tahun 2020 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor barang migas maupun non migas, hanya komoditas hasil industri yang mengalami kenaikan. Ekspor barang migas tahun 2020 mencapai 1,15 miliar US$ turun sebesar 39,59 persen disbanding tahun 2019. Sementara ekspor barang non migas mencapai 11,83 miliar US$ turun sebesar 17,16 persen disbanding tahun 2019.

Tabel 2.83
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur,
Tahun 2016 – 2020 (Juta US$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
Migas		**3.781,67**	**4.302,83**	**3.356,38**	**2.068,20**	**1.148,29**
1	Minyak Mentah	861,45	922,56	334,70	12,63	7,27
2	Hasil Minyak	138,23	188,97	12,97	224,05	108,64
3	Gas	2.781,99	3.140,97	2.977,57	1.831,52	1,032,38
Non Migas		**10.072,71**	**13.230,03**	**15.029,36**	**14.113,59**	**11.831,99**
1	Hasil Tambang	8.813,17	11.957,04	13.580,80	12.408	9.600,36
2	Hasil Industri	1.241,48	1.266,53	1.445,92	1.696,72	2.222,52
3	Hasil Pertanian	4,75	4,82	4,21	8,87	9,11
Total Ekspor		**13.854,37**	**17.532,85**	**18.385,73**	**16.183,21**	**12.980,28**

Produk Mineral adalah golongan barang yang paling dominan diekspor dari Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 produk mineral nilai ekspornya mencapai 10,75 miliar US$ atau sebesar 82,81 persen dari total nilai ekspor Kalimantan Timur menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 14,14 miliar US$. Golongan barang dengan nilai ekspor terbesar berikutnya adalah Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani sebesar 1,3 miliar US$ (10%) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,89 Juta US$.

Tabel 2.84
Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Menurut Golongan Barang Utama, Tahun 2016 – 2020 (Juta US$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Mineral	12.608,75	16.261,60	16.933,08	14.135,08	10.748,65
2	Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani	266,59	584,81	640,79	887,42	1.298,27
3	Produk Industri Kimia	620,61	479,71	672,22	746,82	692,61
4	Mesin, Perlengkapan Listrik, Elektronika	303,61	190,10	123,04	232,13	28,27
5	Binatang Hidup, Produk Hewani	29,28	5,67	7,71	83,13	60,24
6	Lainnya	25,55	10,96	8,89	98,63	61,99
Total		**13.854,37**	**17.532,85**	**18.385,73**	**16.183,21**	**12.980,28**

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 akan tetapi di pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai ekspor yang mencapai 11,83 miliar US$ turun sebesar 17,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14,28 miliar US$.

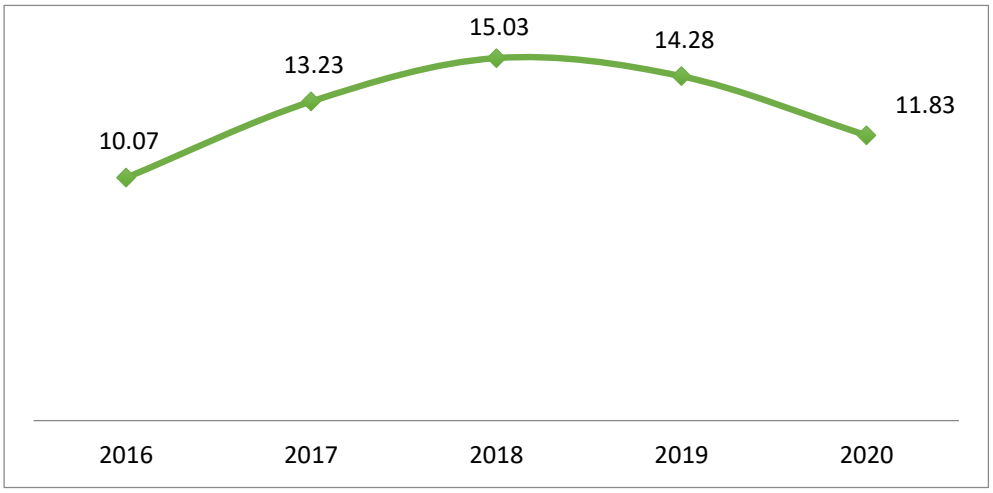

Gambar 2.54
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Miliar US$)

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan dimana tahun 2019 tumbuh tinggi hingga mencapai 7,79 persen akan tetapi pada tahun 2020 Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan batubara mengalami perlambatan yang cukup curam mencapai -1,45 persen.

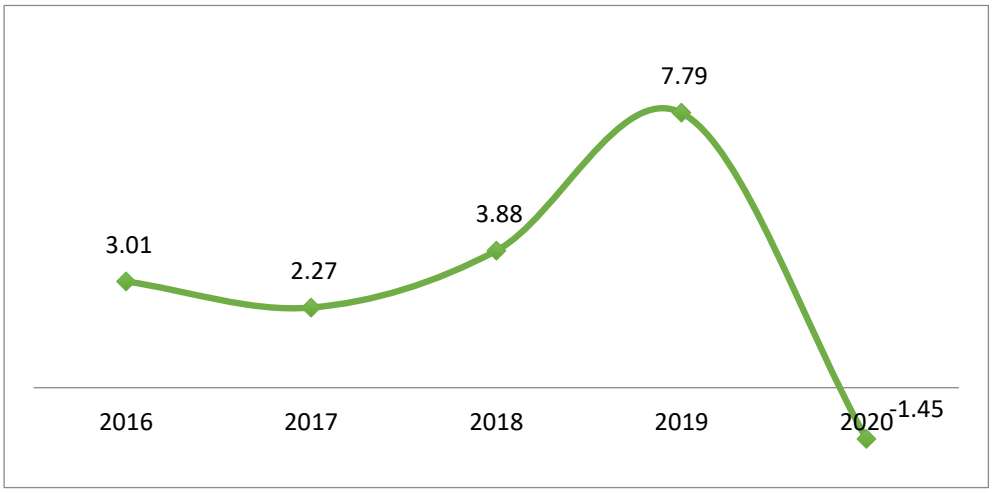

Gambar 2.55
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non poduktif

juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2020 hanya sebesar 7,06 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,53 persen), SLTP/MTs (13,39 persen) dan SD/MI (17,12 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 37,90 persen, persentase ini meningkat dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

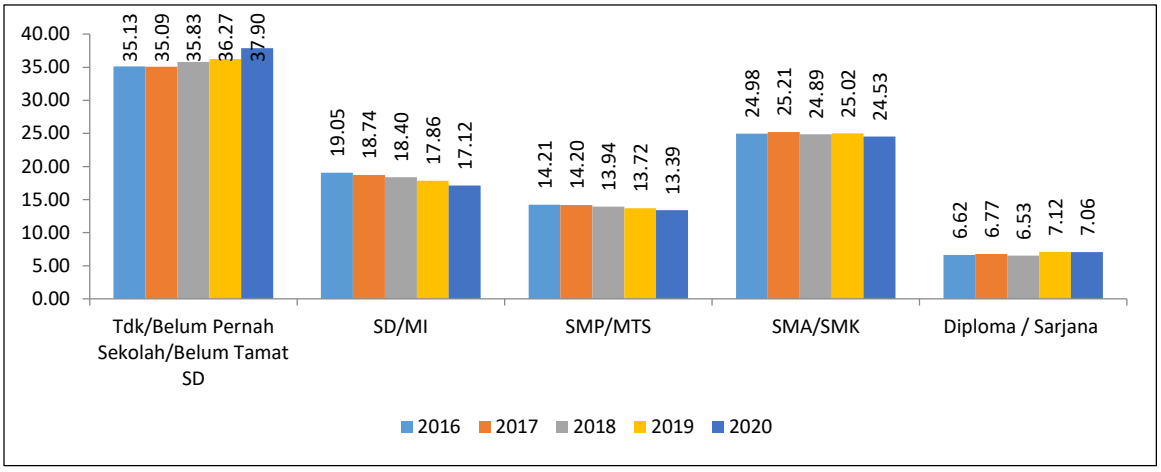

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambar 2.56
Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,97, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44-45 orang penduduk usia non produktif.

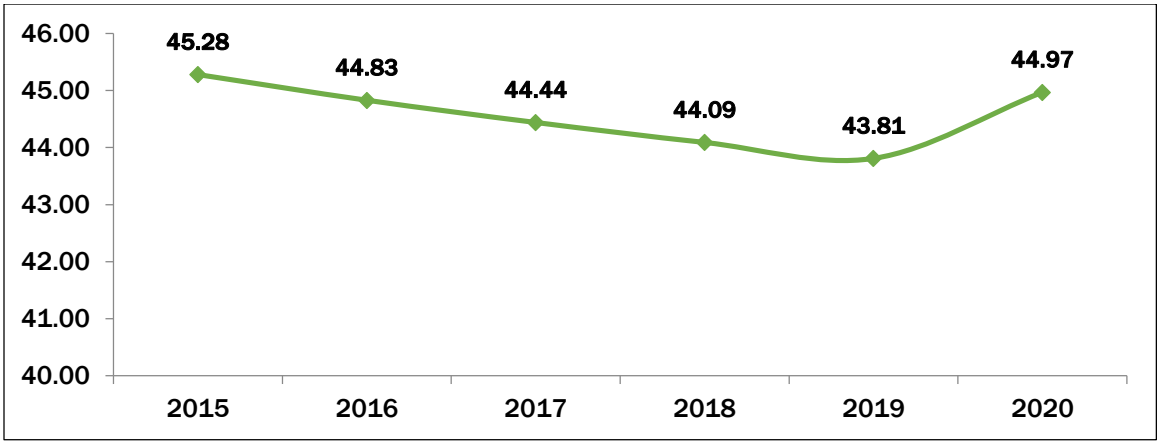

Sumber: SIDATA Kalimantan Timur, 2021

Gambar 2.57
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 – 2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	54,3	58,88	63,46	52,85	61,45	69,77
1.2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	3	3	2	2	2
1.3	Capaian akses air minum layak (%)	73,33	75	77	71,83	56,84*	64,53*
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.008,50	14.808,50	15.558,50	13.618,50	13.874,11	14.242,6
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)				730	664	499
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	620,06	533,56	459,59	673,42	1.485,89*	1.248,22*
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,68	69,01	75,09	63,19	64,87	70,11
1.10	Rasio elektrifikasi (%)	78,76	79,52	84,07	84,21	88,93	90,21
2	Fokus iklim berinvestasi						
2.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	31,5	33,08	34,73	25,53	35,62	31,38
2.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)						2,38
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	14	13	12	15	14	12
2.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26.3	26.89	27.75	7.2	25,18	
2.5	Indeks Resiko Bencana	145	165	165	165	155,49	155,49
2.6	Indeks Demokrasi Indonesia	73,5	73,64	72,86	73,88	77,67	50
3	Fokus Sumber Daya Manusia						
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,5	71	71	71	74	78,38

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.2	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	80	81,56	82,15	81,37	81,37
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

**): Perubahan Asumsi rumusan perhitungan (cakupan layanan air minum teknis) menjadi perhitungan capaian akses air minum layak administratif; Perubahan baseline luas kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh baru serta penanganan yang telah dilaksanakan oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota*

Tabel 2.86
Hasil Evaluasi SDG's

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS, Dinas Sosial, BKKBN	%	6,03	6	5,94	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan	%	87,98%	98% (Capaian 89% Sept 19) UHC (Universal Health Coverage)	89%	▼
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenaga-kerjaan	Formal (%)	520,496 (Angka Absolut)	587,12	538,998	▼
			Informal (%)	69,922	103,189	41,592	▼
1.3.1.(c)	Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	BPS, Dinsos, BPJS Kesehatan	Orang	877	350	350	●
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan	Dinsos, Susenas	KPM	50 (APBD)	50 (APBD)	36 (APBD)	

	bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.			65.419 (APBN)	66.229 (APBN)	66.229 (APBN)	●
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS, Dinkes	%	81,34* (2017)	100	84,21	▶
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS, Dinkes	%	44,84* (2017)	80	53,1	▶
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	71,71 (2017)	-	73,24	▶
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	72,83*	-	83,11	●
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	-	-	6,07	●
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DISDIK	%	96,61* (2017)	96,81	98,76	●
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	81,70*	81,90	79,45	▼
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Susenas BPS	%	63,17*	63,37	66,16	●

	(kelompok penduduk 40% terbawah)						
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, e-infoduk DKP3A	%	92,22	-	89,37	▼
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	DESDM, TNP2K	%	91,97	-	98,88	●
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD Kaltim	Jiwa	740	31	-	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD Kaltim	Lokasi	24	0	12	●
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa		1,518	1,687	●
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa	-	35	-	tidak ada kegiatan di dinsos
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas P&K, Kemenag, BPBD, Podes	Daerah	-	-	-	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD Kaltim	Indeks Resiko Bencana	0	145	-	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD Kaltim	Rupiah	3.665. 574.000	0	-	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD Kaltim	Doku-men	1	0	-	

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Rupiah			-	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	Miliar Rupiah, Fungsi Pendidi-kan	2.269,58 -21,27%	2.695,81 -21,93	-	
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinkes, Susenas BPS	%	29,4	28,9	21,3 Dinkes 28,1 RAD-PG 30 BPS	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif.	Dinkes, BPS	%	70,7	50	78,53 Dinkes 71,08 BPS	
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Pertanian	Skor	84,6	84,7	85, 8	
		Dinas Kelautan	Kg/Kapita/Tahun	48	50	53,09	
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama							

terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.

2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Pertanian, (DISNAK, DKP, DISBUN), BPS	Juta Rupiah/ tenaga kerja	118.241,5 -2016	-	161,983 (ASEM)	

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. (Nasional)	Dinas Peterna-kan	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	80.248.3	82.811,60	NA	
			Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumate-ra)	50	100	105	
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Peterna-kan	Hewan Ternak	3000	10 (Hewan yg divaksin)	7,3	

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							

2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Dinkes, BPS		% (wasting)	7,5	7	9,09	▼
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes, BPS	%	15,16	14	18,91	▼
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)	Dinas Pertanian, Susenas BPS	%	-	-	7,02	●
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan, Susenas BPS	%	14,7	14,2	14,71 (dinkes) 11,5 (BPS)	●
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.	Susenas BPS, dinas Pertanian	%	420	418	NA	
2.2.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	dinas pertanian, Susenas BPS (dihitung BPS)	%	-	-	13,17	●
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinkes	%	29,4	28,9	21,3% Dinkes 28,1 RAD-PG 30% BPS	●

2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinkes, BPS	%	-	-	18,20 % (pendek)/BPS 11,80 % (sangat pendek)/BPS	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinkes, BPS	% (wasting)	7,5	7	9,09	
			% (obesitas)	-	-	9,4	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes, BPS	%	15,16	14	18,91	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif.	Dinkes, BPS	%	70,7	50	78,53 (DINKES) 71,08 (BPS)	
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Pertanian	Skor	84,6	84,7	85, 8	
		Dinas Kelautan	Kg/Kapita/Tahun	48	50	53,09	
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Pertanian, (DISNAK, DKP, DISBUN), BPS	Rupiah/ tenaga kerja	118.241,5 -2016	-	161.983. 118,80 (ASEM)	
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. (Nasional)	Dinas Peterna-kan	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	80.248.3	82.811,60	NA	

			Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumate-ra)	50	100	105	
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Peterna-kan	Hewan Ternak	3000	10 (Hewan yg divaksin)	7,3	

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, SENSUS PENDU-DUK, SUTAS	Jumlah kemati-an ibu	74	90	79	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS, Dinkes	%	96,44 (bps 2017)	100	96,39	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS, Dinkes, BKKBN	%	87,37 (bps 2017)	100	87,34	

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							

3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jumlah Kematian Balita	54	77	61	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	498	473		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	608	581	529	
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes	%	90	80		

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	11,8* (2017)	11,42		
	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	%	66,5*	59,5		
	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN	%	20,7	21,7	23,3	
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKP3A, BKKBN	Kelahiran per 1000 perem-puan 15-19 tahun	19	18,11	16,7	
	Total Fertility Rate (TFR)	DKP3A, BKKBN	Jumlah anak per	2,7* (2017)	2,4	2,47	

			WUS (15-49 tahun)				
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, SENSUS PENDU-DUK, SUTAS	Jumlah kemati-an ibu	74	90	79	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS, Dinkes	%	96,44 (bps 2017)	100	96,39	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS, Dinkes, BKKBN	%	87,37 (bps 2017)	100	87,34	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jumlah Kematian Balita	54	77	61	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	498	473		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	608	581	529	
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes	%	90	80		
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinkes, Komisi Penanggula ngan Aids	%	1,72	-		

3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes	%	46,08	-		
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes	API per 1000 penduduk	0,44 (bps 2017)	<1	0,49	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes	Kabupa-ten/ Kota	0 8 (bps 2017)	0		
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinkes	%	10 7 (bps 2017)	10		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	Juta Orang (Filariasis)	-	-		
			Orang (Kusta)	-	-		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinkes	Provinsi	10	10		
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinkes	Kab/ Kota	1	0		
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinkes	%	25,9	24		
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes	%	39,3	35		
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes	%	28,7	15,4		
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinkes	Kematian per 100.000 penduduk	-	-		
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinkes	Kab/ Kota	10	10		

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNN	orang	1083	250		
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN	orang	89	120		
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial	orang	38	45	38	
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.	BNN	Lembaga	2	2		
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN	%	1,77	2,15		
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas BPS, POLDA	liter per kapita	-	-		
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	11,8* (2017)	11,42		
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	%	66,5* -2017	59,5		
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN	%	20,7	21,7	23,3	

3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKP3A, BKKBN	Kelahiran per 1000 perem-puan 15-19 tahun	19	18,11	16,7	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DKP3A, BKKBN	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,7* (2017)	2,4	2,47	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS, Dinkes	%	4,18* (2017)	-	3,85	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPJS Keseha-tan, Kemenkeu	Juta Penduduk	2.680.011 (2017)	3.487.807		
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS Kesehatan	%	87,19	98		
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.							
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan. (Nasional)	Sistem Registrasi Sampel	%	-		-	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS, Dinas Kesehatan	%	24,69* (BPS 2017)	100	24,52	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinkes	%	98,82	100		
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Dinkes	dokter spesialis per 1.000 penduduk	13,89	11		

	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Dinkes	dokter umum per 1.000 penduduk	28,17	45		
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Dinkes	dokter gigi per 1.000 penduduk	8,41	13		
	Kepadatan dan distribusi perawat	Dinkes	perawat per 1.000 penduduk	218,34	180		
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Dinkes	perawat gigi per 1.000 penduduk	4,49	18		
	Kepadatan dan distribusi bidan	Dinkes	bidan per 1.000 penduduk	94,88	120		
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Dinkes	tenaga gizi per 1.000 penduduk	9,67	14		
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinkes	tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	7,56	18		
	Kepadatan dan distribusi tenaga ketarapian fisik	Dinkes	tenaga ketera-pian fisik per 1.000 penduduk	0	5		
	Kepadatan dan distribusi keteknisan medis	Dinkes	tenaga kesehatan masya-rakat per 1.000 penduduk	0	16		
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinkes	tenaga ketek-nisian fisik per 1.000 penduduk	10,72	12		

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	Disdik	%	0	67,39	63,4	
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Disdik	%	0	44,09		
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	82,1	82,8	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	78	77,5	
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	64,45	73,4	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Disdik	%	105,39 108,07 (bps 2017)	104,69	101,39	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Disdik	%	105,59 91,46 (bps 2017)	104,26	88,13	
4.1.1.(f) `	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Disdik	%	90,75 99,51 (bps 2017)	92,56	90,21	
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Disdik	Tahun	9,48	9,52	9,63	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							

4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Disdik	%	58,26	60,21	32,86	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Disdik	%	90,75	92,56	90,21	
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Disdik	%	27,4	27,8	37,78	
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	-	-	-	-		
4.4.1*	Proporsi remaja (15-24) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% remaja (15-24)	76,99 (bps 2017)	-	88,87	
4.4.1*	Proporsi dewasa (15-59) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% dewasa (15-59)	50,56 (bps 2017)	-	69,44	
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				74,87		
4.5.1*	Rasio APM SD/MI/sederajat	Disdik	%	105,59 99,8 (bps 2017)	104,26	100,57	
4.5.1*	Rasio APM SMP/MTs/sederajat	Disdik	%	90,75	92,56	98,1	

				100,3 (bps 2017)			
4.5.1*	Rasio APK SMA/SMK/MA/sederajat	Disdik	%	27,4 96,6 (bps 2017)	27,8	100,85	
4.5.1*	Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Disdik	%	-	-	120,37	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Susenas, BPS	%	98,96	-	99,03	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	%	99,92 (bps 2017)	-		
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Susenas, BPS	%	100 99,7 (bps 2017)	-	100	
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	%	-	-	99,76	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	-	-	-	-		
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Disdik	%	-	-		

	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Disdik	%		52,1		
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Disdik	%	SD 0	SD 23,41		
				SMP 0	SMP 30,75		
				SMA/ SMK 0	SMA/SMK 26,46		
				SLB 0	SLB 11,11		
				Kaltim 0	Kaltim 22,93		
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Disdik	%	-	-		
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Disdik	%	-	-		
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Disdik	%	-	-		
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Disdik	%	-	-		
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik.	Disdik	%		78,17		
	Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		31,34		
	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		87,54	87,79	
	Persentase guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		94,45	94,29	
	Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		88,76		

	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		88,76		
	Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		31,34		
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		68,67	72,81	
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		88,87		
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	86,81	86,81	88,84	
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	94,58	94,58	95,76	
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		95,05		
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	97,58	97,58	98,32	
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	95,05	95,05	95,48	
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKP3A	kelahiran per 1000 perem-puan umur 15-19 tahun	53 (bps 2017)	19	16,7	
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*		DKP3A	%				

	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		% (pusat)	17,32	20,5	20,87	
			% (parle-men)	7	9	16,88	
			% (daerah)	6.722			
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS, Diskomin-fo	%	74,3 (bps 2017)	-	76,88	
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DKP3A	Doku-men	3	1	1	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, DKP3A	%	0,023	-		
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	BPS, DKP3A	%	0,034	-		
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain	BPS, DKP3A	%	0,008	-		

	pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DKP3A	%	116,55	75		
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DKP3A	% (sebe-lum umur 15 tahun)	1,8 (bps 2017)	-		
		DKP3A	% (sebe-lum umur 18 tahun)	28,05 (bps 2017)	-		
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DKP3A	Tahun	21,7 (bps 2017)	-	44,51	
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKP3A	kelahiran per 1000 perem-puan umur 15-19 tahun	53 (bps 2017)	19	16,7	
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik	%	90,75 99,51 (bps 2017)	92, 56		
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DKP3A	%				
			% (pusat)	17,32	20,5	20,87	
			% (parle-men)	7	9	16,88	
			% (daerah)	6.722			
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DKP3A	%	27	28		

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DKP3A	%	-	-		
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN	%	10,2 (bps 2017)	9,29		
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	100 (bps 2017)	100		
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	DKP3A	Doku-men	2	-		
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS, Diskomin-fo	%	74,3 (bps 2017)	-	76,88	
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	82,75 (bps 2017)	81,75	70,71 (DPUPR) 81,26 (BPS)	

6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PUPR	m3/dt		7.922	NA	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%		71,33	50,28	▼
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	69,02 (bps 2017)	-	75,84	●
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	72,36 (bps 2017)	-	80,89 (DPUPR) 89,22 (BPS)	●
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPMPD, Dinkes	desa/ke-lurahan		-	NA	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPMPD dan Dinkes	desa/ke-lurahan		1038		
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PUPR	Kabupa-ten/Kota (Skala Kota)	0	0	1	●
			Kabupa-ten/Kota (Skala Kawa-san)	0	0	20	●
			Kabupa-ten/Kota (Skala Komu-nal)	0	0	154	●
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	3,84	●

Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PUPR	Kab/ Kota		6	7	
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	0,17	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas PUPR	Danau prioritas		3	3	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas PUPR	Sungai		1	2	
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	dinas LH	PM	-	-	NA	
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	dinas LH	PM	-	-	NA	
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas PUPR	RPDAST		1	4	
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	PUPR, BMKG	stasiun		50	31	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR	wilayah sungai		1	2	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk	Dinas Kehuta-nan	Ha	100	-	NA	

	pemulihan kawasan DAS.						
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas PUPR	Wilayah sungai		2	2	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR	lembaga		6	7	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas PUPR	DAS		0	2	
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas PUPR	DAS		2	2	
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau							
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas PUPR	Danau		3	3	
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas PUPR	Danau		3	3	
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas PUPR	Danau		3	3	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dishut	Ha	3,07	2,226		
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas PUPR	DAS Prioritas		2	2	
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM	%	85,75	85,5	88,93	

7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Dinas ESDM	kWh	-	-	1.011,92	
7.1.2(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	Dinas ESDM	SR	49.062	54.062	39,67	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Dinas ESDM	%	43.951	46.799	NA	
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM	%	1,86	3,38	4,48	
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Dinas ESDM	SBM (Setara Barrel Minyak	-	-	NA	
TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	0,6* (BPS 2018)		2,72	
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	%	174,882 *(BPS 2018)		175.654	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS, Disnaker	%		1,69	-0,55	
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (sakernas), Disnaker	%	32,17	30,5	33,95	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (sakernas), Disnaker	%	59,91	62,9	59,18	

8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (sakernas), Disnaker	%	69,02	68,32	70,60	
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	BI, BPS, Perindag-kop	%	21,31	22,51		Data tdk di bps
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (sakernas), Disnaker	Rupiah		31,88	21,579	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (sakernas), Disnaker	%	6,6	6,2	6,09	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (sakernas), Disnaker	%	4,22	3,7	4,82	
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (sakernas), Disnaker	%	23,5	21,1	19,44	
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnaker-trans		68	78		
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	0,93	0,95	1,02	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Juta Orang	28	55,5	76,003	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Juta Orang	1.300.000	5.500.000	7.085.381	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, BPS (statistik pariwisa-ta)	Triliun Rupiah	4.962	5	Blum ada data	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS (Nespar-na), Dispar	%	5,01	5,2	Blum ada data	

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit	PAK ANDI			
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit	PAK ANDI		108	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (podes), BI	Km	-	-		
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	BI (data UMKM), Disperin-dagkop	%	26,71	-	19,07	
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	PUPR	%	52,85	54,3	61,45	
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	PUPR	Km	0	99,02	99,02	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	PUPR	Km	-	-	-	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	DISHUB	unit	9	9	9	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DISHUB	unit	6	6	6	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	lokasi	14	14	14	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Dispe-rindag-kop	%	7,23	7,5	1,42	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	4,06	4,1	-40,7	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	7,94	7,89	7,66	
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							

9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Perindag-kop	%	100	12	0,99	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Komite Kebijakan KUR	Rp (juta)				
			Persen	21,31	22,51		
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Perindag-kop	%	52,02	51		
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	DLH	%	7,2	26,3		
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BALIT-BANGDA)	%	0,0000059 (Berda-sarkan PDRB ADHB 2018)	0,0000074		
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskomin-fo	%	90,91	92		
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskomin-fo	%	77,14	80		
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Diskomin-fo	%	59,43	60		
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,342 (Sep-tember)	0,33	0,33	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS, Dinsos	%	6,03	-	5,94	
			(Rp/	574,704			

	provinsi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		kapita/ bulan)				
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMPD	Kab	4	4	2	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	DPMPD	desa	518	503	503	
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	DPMPD	desa	2	10	11	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, Bappeda	%	3,5 ± 1	3,5 ± 1	5,44	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, BAPPEDA	%	11,62	9,8	11,25	
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Susenas BPS, BAPPEDA	%	-	-	-	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kesbang-pol	indeks	73,88	-	77,67	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kemen-kumham	Kebija-kan/ Doku-men	-	387	390	
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
1.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah pusat.	BAPPEDA	5	-	-	-	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETE-NAGA-KERJAAN	Formal	520,496	587,12		
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status

Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang dan baru	3	3	3	
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PUPR	Kota Pusaka	1	1	1	
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.1.(a).	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	PUPR	Kawasan per-kotaan metro-politas/ kota sedang	3	3	3	
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD, (Pusat) INARIS	Indeks	155,49	155,49	155,49	
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	sistem peringa-tan dini	7	7	7	
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	10	20	20	
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	PUPR (Koordi-nasi dengan Pusat)	%	98,11 (BPS 2017)	-		
11.1.1.(b).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR (Belum masuk Metropo-litan	Kawasan perkotaan metropoli tan	-	-		
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang dan baru	3	3	3	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	%	75,9	78,5		
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DISHUB	Kota besar	0	0	0	
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1.(a).	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	PUPR (Pusat)	Kota sedang	-	-		

11.3.1.(b).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	PUPR (Pusat)	Metro-politan Baru	-	-		
11.3.2.(a).	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	PM	1	2		
11.3.2.(b).	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	PUPR (Koordi-nasi SATKER)	PM	-	-		
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PUPR	Kota Pusaka	1	1	1	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	0,03	0	0	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD, (Pusat) INARIS	Indeks	155,49	155,49	155,49	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD, INARIS, BMKG	Kota Tang-guh	1	1		
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	sistem peringa-tan dini	7	7	7	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	-	-		
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	%	60,85	61	65,33	
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							

11.7.1.(a).	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	PUPR	Kawasan per-kotaan metro-politas/ kota sedang	3	3	3	
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	10	20	20	
11.b.2*.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Doku-men	1	3		
TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	peserta proper	196	180	205 (emas, hijau, biru)	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	juta ton	3.867,47	11		
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Juta ton	10	11		
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	produk ramah ling-kungan	-	-		
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Fasilitas Publik	-	-		

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Doku-men	10	10	2	▼
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	1	0,03	0	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Doku-men	1	1	1	●
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP	regulasi/ kebija-kan	4	3	2	
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/Kabupa-ten dengan pe-ningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	DKP	lokasi	8	9	9	
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	orang	876	3,3	3,561	
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjut an untuk menghinda ri dampak buruk yang signifikan,							

termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	DKP	Dokumen (PP)	-	-	1	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	DKP	WPP	2	2	2	●
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DKP	% (target dibagi msy)	80	80	35	●
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP	HA	322.948,17	290.387,38	288,766	▶
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	%	33,6	34,27	80	●
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP	regulasi/ kebijakan	4	3	2	▶
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/Kabupaten dengan peningkatan	DKP	lokasi	8	9	9	●

	akses pendanaan usaha nelayan.						
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	orang	876	3,3	3,561	
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksana-an UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	DKP	Pergub	0	0	1	
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	%	51,06	50,56	54,90	
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(a).	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	BKSDA, BNKT		9000	10000		
15.2.1.(b).	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	dishut	Ha	86,45	86,45	86,45	
15.2.1.(c).	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dishut/ BKSDA Kaltim	unit	2	3	3	
15.2.1.(d).	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	dishut	Unit	8 + 1	20 + 1	20	
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	Ha		0,3	0,00524	
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara illegal							

15.7.1.(b).	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	BKSDA	spesies	-	2		
Target 15.9 Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran.							
15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dishut, BKSDA	Dokumen	1	1		
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda, Kesbang-pol	kasus	23	0	12	merah
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda, Kesbang-pol	Kematian/ 100.000 penduduk	0	0	0	biru
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polda, Kesbang-pol	%	1,39 (BPS, 2017)	0	0,07	kuning
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	statistik kriminal (BPS)	%	55,42	100		
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	statistik kriminal (BPS)	%	0	0		
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DKP3A	%	0,046	0,040		
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DKP3A, BPS	%	0,009	-		

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	DKP3A, BPS	%	11,07	15		
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	indeks	-	-		
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD, Bappeda	%	92			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	BPKAD, Inspektorat	%	90	90	90	hijau
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro pemerin-tahan	%	74,89	77,5	76,55	kuning
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Administrasi Pembangunan	%	63	64,95		
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro Organisasi	%	68,02	69,5	68,6	kuning
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro pemerin-tahan	%	-	-		
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							

16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DKP3A	%		9,09	18,18	hijau
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	18%	18%	12,7%	merah
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS, kesbang-pol	indeks	68,72	72,22	82,17	hijau
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS, Kesbang-pol	indeks	83,33	90,99	88,5	Biru
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS, kesbang-pol	indeks	67,18	61,38	66,27	merah
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS), DKP3A	%	93.552	95	84,83 bps Dkp3a 100,46	merah
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS), DKP3A	%	90,3	95	92,69 bps 100,46 dkp3a	biru
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo	%	50 % (KIP Kaltim)	60%	75%	hijau
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Kominfo	%	94 % (KIP Kaltim)	95%	99%	hijau
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana	Kominfo	PPID	1	1	1	hijau

	diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil Hukum dan HAM	Kebija-kan/ Doku-men	387	390		
A. TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda	%	0,91	0,83	1,00	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,74%	0,67	0,76	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda	%	75,49%	41,90%	76,82	
Target 17.6. Meningkatkan kerjasama utara-selatan, selatan-selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasarkan kesepakatan timbal balik.							
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Diskomin-fo	%	60	65		
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskomin-fo	%	50,09	51		
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskomin-fo	%	90,91	92		
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							

17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskomin-fo	%	42,14	60		
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Diskomin-fo	%	30	35		
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	90	90	100	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	82	82	99,02	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Meta-data	0	5	2	
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	-	-		
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DKP3A	data regis-trasi	1	1		
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengun-jung	52	52000		
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	85	85	100	

BAB 3
Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah periode sebelumnya.

Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengindentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan terutama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, komponen pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2016-2020, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan.

Tabel 3.1.
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2016	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
2017	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%
2018	9.591.235.184.518	10.671.715.200.487	111,24%
2019	11.137.939.446.363	11.775.086.836.200	78,74%
2020	8,584,526,835,525	9.987.385.879.199	123,81%

Sumber: Bapenda 2021

a. Pendapatan Asli Derah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 107,45 persen. Meskipun demikan, nilai absolut pendapatan pajak daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 15 persen per tahun.

Komponen terbesar penyumbang pajak daerah berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun demikian terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat dan penggunaan bahan bakar akibat penurunan produksi batubara.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari Dana Perimbangan dan transfer lainnya setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. DAK mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2014. Demikian pula dengan DAU mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakir sebesar 65 perser. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, penerimaan ini bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana Insentif Daerah.

2. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisisen dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2013-2017 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%
2017	8.223.730.774.720	8.101.145.367.965	98,51%
2018	10,128,810,000,000	9,345,057,063,691	92.26%
2019	12,900,000,000,000	7,397,629,233,306	57.35%
2020	10,683,921,000,000		-

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas.

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan belanja bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	URAIAN PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN NETTO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1.	2016	226.684.544.888,84	-	226.684.544.888,84
2.	2017	611.118.124.746,55	-	611.118.124.746,55
3.	2018	541,264,815,481.88	3,690,000,000.00	537,574,815,481.88
4.	2019	1,862,060,553,637.08	100,000,000,000.00	1,762,060,553,637.08
5.	2020	2,249,394,164,474.82	150,000,000,000.00	2,099,394,164,474.82

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pada tahun 2016 – 2020, pembiayaan penerimaan daerah hanya bergantung pada SiLPA. SiLPA terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 226,68 Milyar sedangkan SiLPA tertinggi yakni sebesar Rp 2,09 Trilyun dialami pada tahun 2020.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	7,985,727,918,251	8,158,103,650,157	10,671,715,200,487	11,775,086,836,200.40	9,987,385,879,199.02	39.51
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	4,029,364,843,886	4,558,751,727,469	5,802,442,683,947	6,555,853,195,408.37	5,143,521,676,422.02	48.02
1.1.1.	Pajak daerah	3,127,250,928,433	3,505,578,072,171	4,716,694,876,324	4,984,520,517,158.50	3,900,431,414,628.53	46.89
1.1.2.	Retribusi daerah	19,435,790,560	16,659,010,037	21,128,021,966	26,492,587,129.92	10,123,187,098.84	22.48
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	167,385,377,651	208,807,497,552	199,302,498,965	392,379,951,610.19	110,988,636,348.20	99.14
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	715,292,747,243	857,707,147,709	865,317,286,691	1,152,460,139,509.76	1,121,978,438,346.45	53.32
1.2.	**Dana Perimbangan**	3,941,626,961,365	3,533,009,585,813	4,829,780,659,372	5,176,264,298,792	4,759,526,731,777	31.50
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	2,844,821,387,413	1,710,695,086,821	2,991,231,124,961	3,207,168,795,642	3,544,638,973,637	44.84
1.2.2.	Dana alokasi umum	80,402,179,000	714,906,576,000	767,682,423,000	815,693,641,000	831,404,756,000	803.28
1.2.3.	Dana alokasi khusus	1,016,403,394,952	1,107,407,922,992	1,070,867,111,411	1,153,401,862,150	383,483,002,140	-3.33
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	14,736,113,000	36,342,417,167	39,491,857,169	42,969,342,000	84,337,471,000	188.16
1.3.1	Hibah	9,736,113,000	13,793,749,000	15,510,730,094	14,922,090,000	11,998,645,000	45.43
1.3.2	Dana darurat						#DIV/0!
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						#DIV/0!
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	5,000,000,000	7,500,000,000	0	9,883,392,000	72,338,826,000	#DIV/0!
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	100,000,000	23,981,127,075	18,163,860,000	0	#DIV/0!
2	**BELANJA**	7,989,359,000,000.00	8,834,897,375,000.00	10,128,810,000,000	12,900,000,000,000	10,683,921,000,000.00	-0.03

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	4,197,167,944,503.67	5,570,709,846,709.00	5,902,699,907,001	7,918,967,622,124	6,171,964,627,233.82	0.00
2.1.1	Belanja Pegawai	991,505,508,003.67	1,698,837,530,019.00	1,707,144,345,924	1,959,480,650,977	1,922,832,701,353.82	0.20
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-		
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
2.1.4	Belanja Hibah	849,120,600,000.00	1,035,431,514,000.00	1,077,644,430,400	815,124,182,734	223,050,003,062.00	-0.17
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,870,100,000.00	5,010,000,000.00	5,809,250,000	9,774,550,000	16,070,550,000.00	0.21
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1,478,522,500,000.00	2,104,010,195,500.00	2,411,414,151,000	3,087,791,772,893	1,911,308,336,000.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	861,149,236,500.00	721,120,607,190.00	694,353,829,677	2,021,796,465,521	1,598,703,036,818.00	0.10
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	13,000,000,000.00	6,300,000,000.00	6,333,900,000	25,000,000,000	500,000,000,000.00	3.07
2.2	**Belanja Langsung**	3,792,191,055,496.33	3,264,187,528,291.00	4,226,110,092,999	4,981,032,377,876	4,511,956,372,766	-0.05
2.2.1	Belanja Pegawai	450,048,961,767.00	243,801,648,092.00	249,150,290,586	316,812,099,029	323,879,356,195	-0.06
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,695,886,958,784.33	2,001,134,625,074.00	1,905,863,134,023	2,839,199,050,718	2,870,659,107,195	0.03
2.2.3	Belanja Modal	1,646,255,134,945.00	1,019,251,255,125.00	2,071,096,668,390	1,825,021,228,128	1,317,417,909,377	-0.08
3	**PEMBIAYAAN**	226,684,544,887.84	611,166,600,279.55	537,574,815,481.88	1,762,060,553,637.08	2,099,394,164,475	0.37
3.1	Penerimaan Pembiayaan	226,684,544,887.84	611,166,600,279.55	541,264,815,482	1,862,060,553,637	2,249,394,164,475	0.39
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	3,690,000,000	100,000,000,000	150,000,000,000	

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca pemerintah daerah berasal dari perolehan sejak Pemerintah Daerah tersebut berdiri. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan neraca pertama kali, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya. Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal akan menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi berikutnya. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjulan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan.

Pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata perumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41 persen.

Tabel 3.5.
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (RP)	2014 (RP)	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)	PERTUMBUHAN (%)
1	Aset						
1.1.	Aset lancer	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
1.2.	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
1.3.	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
1.4.	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
2	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
3	Ekuitas dana	27,012,640,462,523.70	29,175,908,927,637.40	22,959,811,800,431.10	22,397,025,432,041.10	27,190,804,766,923.90	1.41
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber : Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.6
Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828	1,997,096,484,129	2,057,431,888,726	2,204,883,737,445	2,513,224,064,671	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Tabel 3.7
Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.9 Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Piutang	709,122,636,012	883,288,619,506	671,448,413,308	755,022,737,028	634,847,129,148	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.10 Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28,14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336,57 atau hampir selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 mengambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk

meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2019 adalah 53,16 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel 3.11
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2016	4.029.364.843.886,11	7.985.727.918.251,11	50.46%
2017	4.588.751.727.469,47	8.158.103.650.157,47	56.25%
2018	5.802.442.683.946,67	10.671.715.200.487,20	54.37%
2019	6.555.853.195.408,37	11.775.086.836.200,40	55.68%
2020	5.143.521.676.422,02	9.987.385.879.199,02	51.50%
Rata-rata	5.223.986.825.426,53	9.715.603.896.859,04	53.77%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020:

Tabel 3.12.
Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a) / (b) x 100%
		(a)	(b)	
1	2016	1.441.554.469.770.67	7,989,359,000,000.00	18.04%
2	2017	1.695.886.958.784.33	8,834,897,375,000.00	19.20%
3	2018	1.646.255.134.945.00	10,870,432,071,874.00	15.14%
4	2019		7,397,629,233,306.00	
5	2020			

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali

pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020:

1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	9.464.926.705.876	7.985.727.918.251	8.158.103.650.157	10.669.542.801.846	8.769.807.042.689
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	10.205.338.696.735	7.601.242.338.859	8.227.956.959.422	9.345.057.063.691	7.397.629.233.306
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000	-	-	3.690.000.000	-
A	Defisit riil	(790.411.990.859)	384.485.579.392	(69.853.309.265)	1.320.795.738.155	1.372.177.809.383
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1.036.628.546.594	226.681.020.888	611.166.600.280	541.264.815.482	1.862.060.553.637
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.036.628.546.594	226.681.020.888	611.118.124.747	541.264.815.482	1.862.060.553.637
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	246.216.555.735	611.166.600.280	541.264.815.482	1.862.060.553.637	3.234.238.363.020

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2015, sampai dengan tahun 2019 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016, 2018 dan 2019 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2015-2019 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasikan dua hal yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	226.681.020.888	100,00%	611.166.600.280	100,00%	541.264.815.482	100,00%	1.862.060.553.637	100,00%	3.234.238.363.020	100,00%
1	Pelampauan penerimaan PAD	-144.985.366.695	-63,96%	107.999.975.809	17,67%	421.162.210.390	77,81%	670.979.471.530	36,03%	-1.217.551.959.562	-37,65%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-894.874.751.295	-394,77%	128.499.421.929	21,03%	-491.637.254.661	-90,83%	404.858.194.972	21,74%	-1.127.851.619.360	-34,87%
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	7.155.370.460	3,16%	-13.445.934.600	-2,20%	4.847.919.708	0,90%	2.469.950.826	0,13%	-22.728.824.752	-0,70%
4	Sisa pengehematan belanja atau akibat lainnya	1.259.385.768.418	555,58%	388.116.661.142	63,50%	606.891.940.045	112,12%	783.752.936.309	42,09%	5.502.370.766.694	170,13%
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	-3.524.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100.000.000.000	3,09%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pernbangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberpa komponen tersebut.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam lima tahun kedepan sumber pendanaan pembangunan Kalimantan Timur masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 3,84 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD. Rasio PAD terhadap pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a. Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
   - Optimalisasi pengelolaan aset kawasan ekonomi sebagai aset daerah.
   - Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah.
   - Peninjauan kembali terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan.

- Meningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
- Melakukan pendataan atas potensi pajak dan retribusi daerah guna mengukur kapasitas pajak dan retribusi daerah sebagai dasar dalam menetapkan target pendapatan.
- Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, PD teknis penghasil, dan kecamatan.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan PD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sumberdaya kawasan ekonomi yang belum diatur dalam peraturan perundangan.

b. Meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD dengan melakukan penataan manajemen yang mendorong BUMD dikelola secara profesional.

c. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
   - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.
   - Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
   - Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

d. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
   - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
   - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesu

Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (dalam juta)

KODE REK	KOMPONEN PENERIMAAN	Realisasi		Rencana 2021	Proyeksi	
		2019	2020		2022	2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**11,775,086**	**9,987,385**	**9,590,400**	**11,001,164**	**12,136,620**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**6,555,853**	**5,143,521**	**5,396,943**	**5,986,212**	**7,037,701**
4.1.01	PAJAK DAERAH	4,984,520	3,900,431	4,260,000	5,042,645	6,015,000
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	26,493	10,123	17,841	20,961	23,514
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	392,380	110,989	243,641	149,178	174,328
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1,152,460	1,121,978	875,461	773,427	824,859
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5,176,264**	**4,831,865**	**4,180,730**	**5,002,354**	**5,086,179**
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5,176,264	4,831,865	4,180,730	5,002,354	5,086,179
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	**5,176,263**	**4,831,865**	**4,180,730**	**5,002,354**	**5,086,179**
4.2.01.01.01	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	3,207,169	3,544,639	2,620,456	3,479,534	3,525,905
4.2.01.01.02	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	815,693	831,404	856,333	856,333	856,333
4.2.01.01.03	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	1,153,401	212,148	318,457	318,457	318,457
4.2.01.01.04	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	-	171336	348,030	348,030	348,030
4.2.01.02	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	-	72338	37,454	-	37,454
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**42,969**	**11,999**	**12,727**	**12,598**	**12,740**
01.03.01	Hibah	14,922	11,999	12,727	12,598	12,740
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	9,884	0	0	0	0
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	18,163	0	0	0	0

B. Rencana Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD. Disamping itu alokasi belanja daerah disusun dengan strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
2	**BELANJA**	**10.669.670.000.000**	**10.683.921.000.000,00**
2.01	**Belanja Tidak Langsung**	**6.526.656.978.075**	**6.171.964.627.233,82**
2.01.01	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	1.922.832.701.353,82
2.01.04	Belanja Hibah	765.270.838.400	223.050.003.062,00
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	16.070.550.000,00
2.01.06	Belanja Bagi Hasil	2.579.253.034.454	1.911.308.336.000,00
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	1.372.559.387.938	1.598.703.036.818,00
2.01.08	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	500.000.000.000,00
2.02	**Belanja Langsung**	**4.143.013.021.925**	**4.511.956.372.766**
2.02.01	Belanja Pegawai	292.637.422.329	323.879.356.195
2.02.02	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	2.870.659.107.195
2.02.03	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.317.417.909.377
3	**PEMBIAYAAN**	**120.045.986.750,00**	**2.099.394.164.475**
3.01	Penerimaan Pembiayaan	220.045.986.750	2.249.394.164.475
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	150.000.000.000

Dengan terbitnya Peraturarn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhitung tahun 2021 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Klasifikasi ini tentu berbeda dengan klasifikasi belanja yang telah disusun pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang masih menggunakan klasifikasi belanja daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyajian Tabel Belanja Daerah di pisah menjadi 2 bagian, dimana tahun 2019-2020 menggunakan Klasfikasi sesuai PP Nomor 58 tahun 2006, sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan klasifikasi belanja sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 berikut ini.

Tabel 3.18 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

KODE REK	URAIAN	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp
5	**BELANJA**	**11.616.186.000.000**	**11.001.164.310.745**	**12.136.620.129.156**
5.01	**BELANJA OPERASI**	**5.435.615.961.300**	**7.358.998.119.147**	**7.706.077.725.603**
5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962.318.109	2.762.530.737.773	2.829.981.334.745
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.706.329.353	3.924.881.432.184	4.482.654.720.299
5.01.05	Belanja Hibah	274.429.463.838	661.811.399.190	383.667.120.559
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.517.850.000	9.774.550.000	9.774.550.000
5.02	**BELANJA MODAL**	**1.984.395.175.358**	**2.320.052.686.483**	**2.649.760.331.897**
5.02.01	Belanja Modal Tanah	38.955.999.999		
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268.114.492		
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717.085.019		
5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	757.752.039.798		
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050		
5.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**251.933.363.342**	**251.933.363.342**	**200.000.000.000**
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342	251.933.363.342	200.000.000.000
5.04	**BELANJA TRANSFER**	**3.944.241.500.000**	**3.907.751.500.000**	**4.107.500.000.000**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.607.751.500.000	3.107.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000	1.300.000.000.000	1.000.000.000.000

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam hal tersebut pemerintah melakukan perhitungan rencana Belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.15 Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
A	**BELANJA OPERASI**	**5.729.400.964.884**	**5.529.265.228.406**	**8.859.499.554.655**	**8.774.742.690.470**	**9.346.136.798.187**
1	Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan TTP)	1.964.758.191.991	2.001.875.319.326	1.940.716.624.687	1.940.716.624.687	2.037.752.455.921
2	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	23.802.600.000	24.513.262.080	59.966.551.103	59.966.551.103	62.964.878.658
3	Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000	2.240.000.000.000	2.607.571.500.000	3.107.500.000.000
4	Operasional Wajib Kantor			83.922.193.786	83.922.193.786	88.118.303.475
5	Insentif pemungut Pajak			129.632.250.000	147.852.217.000	155.244.827.850
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	653.048.400.000	623.341.242.000	666.487.302.000	666.487.302.000	666.487.302.000
7	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)		162.729.921.000	171.536.608.000	196.941.606.585	202.945.387.865
8	Dana Insentif Daerah (DID)		62.010.148.000	37.454.311.000	0	37.454.311.000
9	Belanja pajak rokok		47.187.000.000	60.000.000.000	69.643.500.000	75.000.000.000
10	BLUD		696.300.000.000	700.150.000.000	651.500.000.000	703.500.000.000
11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik (Kesbangpol)			2.381.863.838	2.381.863.838	2.381.863.838
12	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			1.661.741.500.000	1.300.000.000.000	1.000.000.000.000
13	Bantuan keuangan Ke Desa			42.500.000.000	42.500.000.000	42.500.000.000
14	Belanja Tidak Terduga			251.933.363.342	251.933.363.342	200.000.000.000
15	Belanja Fungsi Pendidikan			638.508.829.668	657.704.338.668	870.162.741.733
16	Belanja Fungsi Kesehatan			120.678.514.191	53.675.260.421	52.327.469.854
17	Belanja untuk Pengawasan			21.838.214.268	21.691.480.268	21.826.054.281
18	Belanja untuk Peningkatan SDM ASN			30.051.428.772	20.254.888.772	19.971.201.711
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		**150.000.000.000**	**249.856.920.000**	**249.856.920.000**	**249.856.920.000**
1	Pembayaran Pokok Utang	-	-	0	0	0
2	Penyertaan modal	-	150.000.000.000	249.856.920.000	249.856.920.000	249.856.920.000
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		**5.729.400.964.884**	**5.679.265.228.406**	**9.109.356.474.655**	**9.024.599.610.470**	**9.595.993.718.187**

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2019-2023 seperti tabel berikut:

Tabel 3.19 Proyeksi Kapasitas Riil Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	**Pendapatan**	**8.769.807.042.689**	**8.584.526.835.525**	**9.590.400.000.000**	**11.001.164.310.745**	**12.136.620.129.156**
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1.862.060.553.637	2.249.394.164.475	2.275.642.920.000	-	-
	Total Penerimaan	**10.631.867.596.326**	**10.833.921.000.000**	**11.866.042.920.000**	**11.001.164.310.745**	**12.136.620.129.156**
Dikurangi						
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	5.729.400.964.884	5.679.265.228.406	9.109.356.474.655	9.024.599.610.470	9.595.993.718.187
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**5.518.720.811.513**	**5.154.655.771.594**	**2.756.686.445.345**	**1.976.564.700.275**	**2.540.626.410.969**

Tabel 3.20
Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	5.518.720.811.513	5.154.655.771.594	2.756.686.445.345	1.976.564.700.275	2.540.626.410.969
Prioritas I	3.164.887.203.975	2.856.336.371.658	1.473.939.482.031	1.062.633.947.300	1.296.802.084.483
Prioritas II	1.127.049.249.020	1.599.014.862.459	958.921.670.696	752.305.793.437	1.068.962.473.422
Prioritas III	1.226.784.358.518	699.304.537.477	323.825.292.617	161.624.959.538	174.861.853.065

a. Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

   Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, sebagaian besar belanja wajib dan mengikat untuk pemenuhan pelayanan dasar telah dialokasian pada belanja wajib dan mengikat seperti teruang pada tabel Tabel 3.15 Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2019-2023.

b. Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
c. Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan yaitu penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun. Strategi lainnya adalah kerjasama pembiayaan pembangunan secara komplemeter dan terpadu baik melalui Pinjaman *(Loan),* APBN, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya terutama untuk pelaksanaan program prioritas daerah.

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi kebijakan yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Dalam Perubahan RPJMD ini dilakukan perbaikan atau tambahan permasalahan dan isu strategis paling mutakhir yang memengaruhi kebijakan pembangunan Kalimantan Timur sampai dengan akhir periode RPJMD tersisa.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi permasalahan tingkat daerah dan per-urusan pemerintahan. Permasalahan tingkat daerah terkait dengan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan. Sedangkan permasalahan per-urusan adalah persoalan yang dihadapi oleh satu atau beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi yang menggambarkan keselarasannya dengan permasalahan kabupaten/kota.

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan

tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab 2 dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yakni: "Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur".

Berdasarkan hasil analisis permasalahan utama pembangunan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1) Tingginya ketimpangan daya saing SDM;
2) Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata;
3) Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
4) Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar;
5) Meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup; dan
6) Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat

Keenam permasalahan pokok tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

a. Tingginya ketimpangan daya saing SDM

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Provinsi Kalimatan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kalimantan Timur dari sisi SDM tentunya masih menyisakan tantangan yang harus segera diatasi. Aspek daya saing seringkali diukur dengan menggunakan

indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kalimantan Timur sudah lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal.

Secara umum, IPM Provinsi Kalimantan Timur periode 2015 hingga dengan 2019 selalu meningkat dan selalu berada di atas IPM Nasional dan jauh di atas provinsi lain di Pulau Kalimantan. Meski demikian, IPM Kaltim pada tahun 2020 menurun ke angka 76,24 dari angka 76.61 di tahun 2020. Angka ini tidak linier dengan perkembangan IPM Nasional yang cenderung menanjak di tahun yang sama walau sedikit. IPM Secara detail perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun bisa dilihat pada tabel 4.1. berikut,

Tabel 4.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020

Provinsi	IPM					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	65.59	65.88	66.26	66.98	67.65	67.66
Kalimantan Tengah	68.53	69.13	69.79	70.42	70.91	71.05
Kalimantan Selatan	68.38	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91
Kalimantan Utara	68.76	69.20	69.84	70.56	71.15	70.63
Kalimantan Timur	**74.17**	**74.59**	**75.12**	**75.83**	**76.61**	**76.24**
Nasional	**69.55**	**70.18**	**70.81**	**71.39**	**71.92**	**71.94**

Ketimpangan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur sangat terlihat dari nilai IPM setiap kabupaten/kota. Jangkauan nilai IPM yang sebesar 13,02 poin terlihat dari nilai IPM tertinggi yakni IPM Samarinda sebesar 80,11 dan IPM terendah yakni IPM Makaham Ulu sebesar 67,09. Terlihat pula dari nilai peringkat IPM secara nasional dimana IPM tertinggi si-Kalimantan Timur yakni IPM Kota Samarinda berada pada peringkat ke-33 secara nasional disusul IPM Kota Bontang dan IPM Kota

Balikpapan berada pada peringkat ke-34 dan peringkat ke-36. Sedangkan kabupaten lain berada pada kisaran peringkat ke-94 yang diduduki oleh Berau dan terakhir peringkat ke-358 oleh IPM Mahakam Ulu. Perbedaan nilai IPM yang cukup signifikan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur ini tentu saja menunjukkan bagaimana ketimpangan kualitas sumber daya manusia begitu lebar terasa.

Gambar 4.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

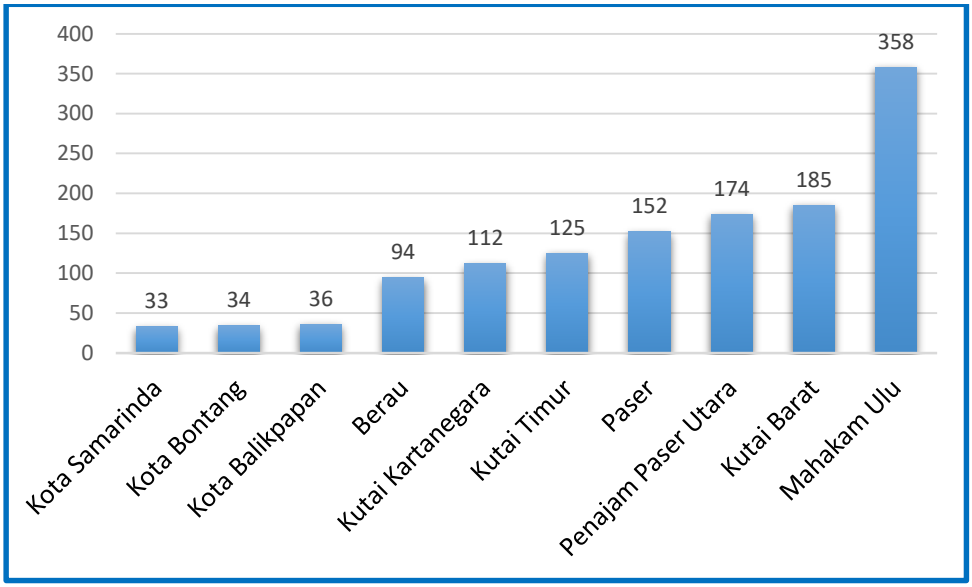

Sumber: BPS RI, 2020 (data diolah)

Timpangnya kualitas dan daya saing SDM Kalimantan Timur di atas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok tingginya ketimpangan daya saing SDM disebabkan oleh masalah-masalah berikut ini,

1) Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan;
2) Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah;
3) Akses pelayanan kesehatan masyarakat belum merata, terutama pada daerah 3T;
4) Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender.

b. Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata

Permasalahan pokok berikutnya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah masih belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlihat masih tingginya disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau taraf hidup pra-sejahtera. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan harus semakin diefektifkan.

Permasalahan lain berdasarkan identifikasi pilar sosial TPB/SDGs adalah belum maksimalnta penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan di mana program-program masih terpusat pada wilayah perkotaan. Ketidakmerataan juga ditujukkan dengan meningkatknya koefisien gini (*gini ratio*) dari 0.316 (2015) menjadi 0,33 (2020)

Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan dan peningkatan lulusan yang berdaya saing di dunia kerja juga masih terjadi dan perlu memperoleh perhatian lebih. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja

terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Pemerintah mengkondisikan penciptakan pasar kerja yang sesuai dengan tuntutan global. Analisis mengenai persoalan ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi
Pulau Kalimantan Tahun 2015 - 2020

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu
Kalimantan Barat	4.78	5.15	4.58	4.23	4.22	4.36	4.15	4.26	4.14	4.45	4.56	5.81
Kalimantan Tengah	3.14	4.54	3.67	4.82	3.13	4.23	3.18	4.01	3.33	4.10	3.39	4,58
Kalimantan Selatan	4.83	4.92	3.63	5.45	3.53	4.77	3.86	4.50	3.50	4.31	3.80	4.74
Kalimantan Utara	5.79	5.68	3.92	5.23	5.17	5.54	4.68	5.22	5.80	4.40	5,65	4.97
Kalimantan Timur	**7.17**	**7.50**	**8.86**	**7.95**	**8.55**	**6.91**	**6.90**	**6.60**	**6.66**	**6.09**	6.88	6.87
Nasional	5.81	6.18	5.50	5.61	5.33	5.50	5.13	5.34	5.01	5.28	4.99	7.07

Sebagai tambahan, permasalahan di atas juga merupakan hasil evaluasi dari perbandingan persentase penduduk miskin antar Kaltim dan Nasional, dan Kaltim dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini,

Tabel 4.3
Persentase Penduduk Miskin Provinsi
Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
Kalimantan Barat	8.03	8.44	7.87	8.00	7.88	7.86	7.77	7.37	7.49	7.28	7.17	7,24
Kalimantan Tengah	5.94	5.91	5.66	5.36	5.37	5.26	5.17	5.10	4.98	4.81	4.62	4.92
Kalimantan Selatan	4.99	4.72	4.85	4.52	4.73	4.70	4.54	4.65	4.55	4.47	4.38	4.83
Kalimantan Utara	6.24	6.32	6.23	6.99	7.22	6.96	7.09	6.86	6.63	6.49	6.80	7.41

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
Kalimantan Timur	**6.23**	**6.10**	**6.11**	**6.00**	**6.19**	**6.08**	**6.03**	**6.06**	**5.94**	**5.91**	**6,10**	**6.64**
Nasional	11.22	11.13	10.86	10.70	10.64	10.12	9.82	9.66	9.41	9.22	9.78	10.19

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata disebabkan oleh masalah-masalah berikut ini,

1) Desa dan Masyarakat belum optimal diberdayakan
2) Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan angkatan kerja

c. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Hingga saat ini, perekonomian Kalimantan Timur ditopang oleh aktivitas perekonomian yang memiliki dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dimana kegiatan perekonomian tersebut harus ditransformasi menjadi perekonomian yang berwawasan kelanjutan lingkungan hidup. Salah satu potensi perekonomian yang mampu menyelaraskan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan kontinyu serta mampu menyeimbangkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan membangun ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan, khususnya sumber daya terbaharukan.

Berdasarkan pada analisis capaian TPB/SDGs, perlindungan pencadangan kawasan sumber pangan dan diversifikasi bahan makanan pokok masih belum maksimal. Pola konsumsi yang lebih variarif diharapkan dapat menumbuhkan kebutuhan terhadap bahan pangan yang lebih beragam, yang perlu diikuti dengan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta sumber pangan lainnya, seperti perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang lebih beragam.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan berbasis sektor unggulan yang dimaksud masih belum dapat diimplementasikan dan belum sesuai harapan. Beberapa kondisi permasalahan yang perlu menjadi perhatian

untuk diselesaikan secara berjenjang seperti masih kurangnya SDM yang mampu mengelola potensi wilayah sebagai optimalisasi sektor agrobisnis serta peningkatan ekonomi kreatif, masih belum optimalnya kondusivitas investasi UMKM di Kalimantan Timur menjadi salah satu alasan kuat minimnya penanaman modal yang ditanamkan di daerah, ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang penawaran investor menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya investor dan perusahaan yang berupaya membangun usaha ekonomi kerakyatan, dan belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan industri, disamping permasalahan-permasalahan lain yang memiliki andil belum tercapainya keinginan tersebut.

Pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan kepada pertumbuhan produk yang dihasilan oleh sebuah provinsi. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara Laju PDRB antara Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lain di Pulau kalimanta tahin 2015-2019.

Tabel 4.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur (ADHK)
Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	5.20	5.17	5.07	5.09	-1.82
Kalimantan Tengah	6.35	6.73	5.61	6.12	-1.40
Kalimantan Selatan	4.40	5.28	5.08	4.08	-1.81
Kalimantan Utara	3.55	6.80	5.38	6.90	-1.11
Kalimantan Timur	**-0.38**	**3.13**	**2.64**	**4.74**	**-2.85**
Pulau Kalimantan	**2.00**	**4.34**	**3.84**	**4.99**	**-2.27**
Nasional	**5.03**	**5.07**	**5.17**	**5.02**	**-2.01**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur berada secara konsisten pada urutan terendah selama 4 tahun jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2019, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. LPE Kalimantan

Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batubara) akibat terjadinya penurunan harga dan permintaan batu bara di level internasional.

Secara umum, saat ini nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 653,68 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 542,15 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 313,17 triliun.

Tabel 4.5
PDRB Per Kapita
Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020 (%)

Provinsi	PDRB Per Kapita					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	3.28	3.63	3.66	3.62	3.69	-3.08
Kalimantan Tengah	4.64	4.05	4.47	3.46	4.02	-3.33
Kalimantan Selatan	2.08	2.71	3.64	3.54	2.57	-3.17
Kalimantan Utara	-0.43	-024	2.98	2.30	3.19	-4.49
Kalimantan Timur	**-3.37**	**-2.50**	**0.99**	**0.58**	**2.70**	**-4.68**
Nasional	**3.52**	**3.72**	**3.79**	**3.93**	**3.82**	**-13.15**

Selain itu, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur juga mengisi tempat paling rendah di antara provinsi-provinsi pulau Kalimantan dalam rentang waktu 2015 -2018. Pada tahuan 2019, PDRB Per Kapita Kaliantan Timur berhasil naik menjadi nomor 2 terendah, akan tetapi hanya terpaut 0,15 % dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, PDRB Per Kapita Kalimantan Timur tetap tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produktivitas

kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Sektor Kehutanan masih belum mengoptimalkan produktivitas kawasan yang telah diperuntukan untuk hutan produksi. Pada produksi hutan alam, produktivitas setiap tahun berada pada angka 30 m^3/hektar/tahun dengan total produksi 2,0-2,6 juta meter kubik per tahun. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta hektare peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin perkebunan yang diterbitkan 2,76 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,35 juta hektare, termasuk 1,1 juta hektare kelapa sawit. Masih terdapat 1.41 juta hektar areal ijin perkebunan yang belum ditanami. Demikian pula di sektor pertambangan batubara dan mineral lainnya, luas areal yang terdapat perijinan seluas 4,8 juta hektar, namun yang dieksploitasi hanya seluas ± 130 ribu hektar atau hanya 2,7% dari total luas IUP yang diberikan.

Industri hilir pertanian dalam arti luas juga belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi *crude palm* oil (CPO), walaupun untuk *Palm Kernel Oil (PKO)* masih belum optimal diproduksi. Dapat disimpulkan bahwa lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan meliputi masalah-masalah berikut ini,

1) Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pendanaan pembangunan;
2) Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk primer (migas dan batubara);
3) Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim;
4) Masih rendahnya produksi padi tanaman pangan dan hortikultura dalam pemenuhan pangan lokal;
5) Masih rendahnya produksi pangan asal ternak;
6) Produktivitas perkembangan perkebunan rakyat masih rendah ;
7) Rendahnya produksi perikanan;
8) Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan;
9) Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan;
10) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah;
11) Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah

d. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas yang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi. Hal ini disebabkan karena rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenaga listrikan.

Dilihat dari kondisi jalan, tahun 2018 kondisi mantap jalan Provinsi hanya mencapai 52,85%. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan layanan transportasi dalam mendukung mobilitas orang, barang dan jasa. Demikian pula pada transportasi darat yang masih memiliki fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang minim sehingga menyebabkan fatalitas kecelakan semakin meningkat.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Masih terdapat 6 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikian dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya. Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai. Pada tahun 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 88,93%.

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota dan belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan baik dari sisi degradasi lingkungan maupun dalam infrastruktur tata kota. Untuk mendapatkan sudut pandang yang komperhensif data perbandingan

antara Indeks Gini pada Provinsi Kaltim dengan Provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan diperlukan dan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini,

Tabel 4.9
Indeks Gini Provinsi
Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020

Provinsi	Indeks Gini											
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
Kalimantan Barat	0.334	0.330	0.341	0.331	0.327	0.329	0.339	0.325	0.330	0.318	0.317	0.325
Kalimantan Tengah	0.326	0.300	0.330	0.347	0.343	0.327	0.342	0.344	0.340	0.335	0.329	0.320
Kalimantan Selatan	0.353	0.334	0.332	0.351	0.347	0.347	0.344	0.340	0.330	0.334	0.332	0.351
Kalimantan Utara	0.294	0.314	0.300	0.305	0.308	0.313	0.303	0.304	0.300	0.292	0.292	0.300
Kalimantan Timur	0.316	0.315	0.315	0.328	0.330	0.333	0.342	0.342	0.330	0.335	0.328	0.335
Nasional	0.408	0.402	0.397	0.394	0.393	0.391	0.389	0.384	0.380	0.380	0.381	0.385

Dalam menjawab tantangan global ke depan, pemerataan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika masih perlu dioptimalkan. Penerapan industri 4.0 yang telah mulai dicanangkan di Indonesia, membutuhkan kapasitas teknologi komunikasi dan informatika yang baik. Belum meratanya infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika, disertai dengan masih rendahnya kualitas jaringan yang dimiliki, membutuhkan upaya lebih agar Kalimantan Timur mampu berjalan menuju industri 4.0.

Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur merupakan pokok permasalahan yang membutuhkan perhatian cukup besar. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok ini disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut ini:

1) Rendahnya Konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung ekonomi Kawasan;
2) Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air ;
3) Penanganan terhadap kawasan kumuh belum optimal;

4) Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang);
5) Belum optimalnya layanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok.

e. **Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup**

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.

Gambar 4.2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2020

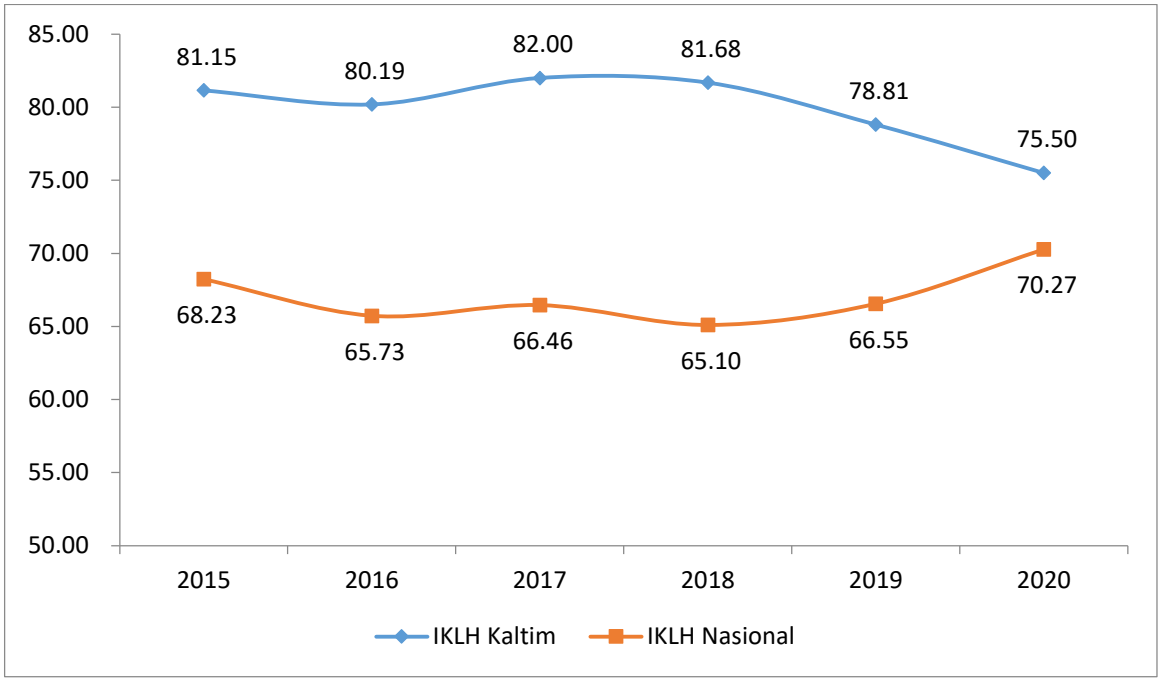

IKLH Kaltim dari tahun 2015 – 2018 mendapat predikat sangat baik (IKLH > 80) namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan cukup signifikan mendapat predikat baik (70 < IKLH ≤ 80. Peningkatan IKLH Kaltim dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang meningkat pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019, IKLH Kaltim mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 78,81 dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 75,50. Menurunnya IKLH tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF Carbon Fund dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel 4.10

Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41

Berdasarkan analisis permasalahan TPB/SDGs, kebijakan terkait energi baru dan terbaharukan masih diperlukan, termasuk untuk mendorong industri biodiesel yang diharapkan dapat menyediakan sumber energi yang lebih rendah emisi di masa datang bagi Kalimantan Timur. Pemenuhan ketersediaan air bersih, yang memerlukan kualitas baku air dari sungai dan perairan lainnya, disertai dengan perbaikan sistem pengelolaa limbha, juga akan menuju pada perbaikan indeks kualitas air. Upaya pemulihan ekosistem daratan serta penanganan sampah dan polusi, masih menjadi isu prioritas dalam TPB/SDGs. Perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lalutan masih perlu dilakukan lebih optimal.

Secara umum, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan. Selain itu, Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batubara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman. Berikut adalah perbandingan IKLH antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana.

Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Tabel 4.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020

Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	75,88	72,24	74,17	73,09	65,92	70,07
Kalimantan Tengah	75,09	74,71	71,47	75,71	74,20	-
Kalimantan Selatan	57,47	59,07	69,38	68,78	61,94	-
Kalimantan Utara	0	0	81,87	86,88	78,98	-
Kalimantan Timur	81,15	80,19	82,00	81,68	78,81	75,50
Nasional	**68,23**	**65,73**	**66,46**	**71,67**	**66,55**	**-**

Secara potensial, permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur memiliki harapan yang cerah, Meskipun demikian, aspek-aspek yang menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah acuan penurunan resiko lingkungan, pada dasarnya juga adalah permasalahan-permasalahan utama yang mesti disikapi dengan baik, Jika diambil kesimpulan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu,

1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah

f. Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat

Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima, Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indeks kesetaraan gender yang belum optimal masih perlu

pengarusutamaan dan edukasi gender ke dalam proses pembangunan dan masyarakat luas,

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah, Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas,

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah, Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2018 adalah "BB", sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status "Sangat Tinggi", Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020, Meskipun demikian, masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang,

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat, Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,38 pada tahun 2019, Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal, Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi, Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi "B" pada tahun 2019 dengan nilai 68,93,

Dari sisi pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kalimantan Timur telah memperoleh predikat baik (3,14) di tahun 2020, Namun masih perlu

dilakukan peningkatan indeks SPBE pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, serta meningkatkan indeks SPBE Kalimantan Timur itu sendiri,

Pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah diharapkan semakin terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan, Gagasan One Map One Data serta Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan bagian yang perlu diperkuat, Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah, Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi public, Capaian indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017, Adapun indeks persepsi korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017, Standar layanan informasi publik perlu semakin dikuatkan, agar interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin bisa didekatkan,

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah, Capaian pembangunan pada prinsip partisipasi dapat dilihat dari indeks demokrasi, Indek yang bersifat komposit tersebut menilai capaian kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi, Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,88 pada 2018, Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan wawasan demokrasi masyarakat sehingga mampu menjadi wilayah yang memiliki ketahanan demokrasi, Idneks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur terlihat cukup baik meksipun masih berada pada operingkat 3 dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan sebagaimana yang bia dilihat di tabel 4,11 berikut,

Tabel 4,12
Indeks Demokrasi Indonesi Provinsi
Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	76,40	75,28	79,13	76,14	77,66
Kalimantan Tengah	73,46	74,77	76,12	71,27	81,16
Kalimantan Selatan	74,76	73,43	76,25	79,92	79,47
Kalimantan Utara	80,16	76,98	81,06	81,07	83,45
Kalimantan Timur	**81,24**	**73,64**	**72,86**	**73,88**	**77,67**
Nasional	72,82	70,09	72,11	72,39	74,92

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan, Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparatur pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah daerah, Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan meliputi tiga permasalahan berikut,

1) Birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan prima;
2) Birokrasi belum menghasilkan kebijakan yang unggul dan kinerja yang menopang visi dan misi daerah;
3) Sistem pengawasan dan pengendalian intern pemerintah belum diselenggarakan secara efektif dan terintegrasi; dan
4) Belum optimalnya penggunaan IT dalam pengelolaan kinerja pemerintahan,

Tabel 4,12
Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan	Akar Masalah
Permasalahan Pokok 1: Tingginya ketimpangan Daya Saing SDM	
Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan	Belum optimalnya kompetensi layanan pendidikan vokasi/kejuruan untuk masyarakat siap kerja

Permasalahan	Akar Masalah
	Belum efektifnya pemerataan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan
	Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam pemanfaatan IT
	Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan
	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran jarak jauh
	Belum optimalnya pengembangan perpustakaan yang mendukung sistem pendidikan
Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
	Belum optimalnya pembudayaan olahraga dan pengembangan bibit-bibit olahragawan daerah
Akses pelayanan kesehatan belum merata, terutama pada daerah 3T	Belum meratanya tenaga kesehatan berkualitas
	Ketimpangan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas di daerah terpencil
	Sistem kesehatan belum optimal dalam menjalankan SPM Kesehatan
	Belum optimalnya penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan COVID-19
	Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender	Belum optimalnya kinerja lembaga pemberdayaan perempuan daerah
Permasalahan Pokok 2: Kesejahteraan belum Terwujud Secara Adil dan Merata	
Desa dan Masyarakat belum optimal diberdayakan	Minimnya pembinaan dan pengembangan desa menuju kemandirian daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan pemerintahan desa dan aparaturnya
Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan angkatan kerja	Minimnya ketersediaan pusat-pusat pengembangan keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian
	Pengembangan keterampilan angkatan kerja belum optimal dilakukan
Permasalahan Pokok 3: Lambannya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan	
Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pendanaan pembangunan	Belum optimalnya PAD dari hasil pengelolaan SDA
	Belum optimalnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak sesuai perundangan yang berlaku
Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk Primer (Migas dan Batubara)	Gejolak perekonomian kerakyatan khususnya UMKM semasa pandemi COVID-19
	Belum optimalnya pembinaan UKM dalam meningkatkan jangkauan pemasaran

Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya ekspor barang olahan sektor unggulan non migas dan batubara
Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim	Belum optimalnya progress pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
	Minimnya produk industri turunan sektor pertanian
	Minimnya pembinaan pengembangan wirausaha industri kecil mikro
Masih rendahnya produksi padi tanaman pangan dan holtikultura dalam pemenuhan pangan lokal	Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
	Minimnya kualitas prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
	Belum optimalnya kinerja kelembagaan dalam mendukung produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
Masih rendahnya produksi pangan asal ternak	Masih rendahnya produksi bibit dan benih ternak/pakan ternak berkualitas
	Minimnya kawasan peternakan di Kalimantan Timur
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal
Produktivitas perkembangan perkebunan rakyat masih rendah	Belum optimalnya produktivitas komoditi perkebunan unggulan
	Belum optimalnya pengembangan kualitas kebun rakyat
	Belum optimalnya nilai tambah produksi petani swadaya
	Belum optimalnya nilai tambah dan fluktuasi harga di tingkat petani
	Belum efektifnya pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
Rendahnya produksi perikanan	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha bidang perikanan
	Belum optimalnya ketersediaan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
	Tingginya potensi pencemaran lingkungan, khususnya ekosistem perikanan
Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan yang baik
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan sebagai nilai tambah produk unggulan
	Lambatnya penanganan kerusakan hutan

Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan	Belum optimalnya kondusivitas investasi industri non migas dan non batubara
	Belum optimalnya pelayanan terpadu dalam perizinan penanaman modal daerah
	Belum optimalnya komitmen perizinan
	Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi dan UKM
	Masih minimnya pelaku UKM dalam mengaplikasikan IT
	Penurunan aktivitas ekonomi UKM semasa Pandemi COVID-19
	Minimnya permodalan UKM dalam menjalankan usahanya
Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Minimnya kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata
	Belum optimalnya ketersediaan fasilitas penunjang kepariwisataan daerah
	Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi kreatif di Kaltim
Permasalahan Pokok 4: Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	
Rendahnya konektivitas antar wilayah dalam mendukung ekonomi kawasan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan
	Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi
	Tingginya kerusakan fasilitas Jalan Provinsi
Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air	Terbatasnya kapasitas air baku daerah
	Belum optimalnya distribusi air bersih ke masyarakat
	Belum optimalnya peningkatan kualitas DAS dan subsistemnya
	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas listrik
Penanganan terhadap kawasan kumuh belum optimal	Masih banyaknya penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni
Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan,	Belum Selarasnya RTRWN, RTRWP, RTRWK dan Belum Optimalnya RDTR yang mendukung IKN
	Rencana Tata Ruang Belum menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

Permasalahan	Akar Masalah
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang)	Belum Optimalnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Belum optimalnya layanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas listrik
Permasalahan Pokok 5: Meningkatnya resiko penurunan kualitas Lingkungan Hidup	
Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tingginya potensi kerusakan hutan akibat aktivitas perekonomian
	Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah	Minimnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan memperkecil risiko bencana
	Minimnya kesiapan wilayah dalam menghadapi bencana
Permasalahan Pokok 6: Tata Pemerintahan belum menghasilkan Layanan dan Kebijakan Publik yang Berorientasi pada Kedaulatan Masyarakat	
Birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan pelayanan prima	Pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai SPM
Birokrasi belum menghasilkan kebijakan yang unggul dan kinerja yang menopang visi dan misi daerah	Belum optimalnya kapasitas dan manajemen aparatur di pemerintahan
	Minimnya pemanfaatan teknologi informasi & Komunikasi untuk manajemen pemerintahan
	Perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah belum didukung oleh data dan informasi pembangunan
Sistem pengawasan dan pengendalian intern pemerintah belum diselenggarakan secara efektif dan terintegrasi	Masih rendahnya komitmen perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pembangunan secara transparan dan akuntabel
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh aparatur pengawas/APIP
Belum optimalnya penggunaan IT dalam pengelolaan kinerja pemerintahan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
	Belum optimalnya penggunaan IT dalam integrasi pelaksanaan pembangunan

2. Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka Provinsi Kalimantan Timur berupaya merumuskan perencanaan pembangunan berlandaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pelaksanaan pembangunan berada pada koridor berkelanjutan,

Berbagai rumusan dari KLHS yang disusun merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup, Kesadaran ini tentu saja dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan berbasis alam yang sudah cukup banyak digaungkan oleh penggiat pendidikan sehingga kedepan mampu untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan,

Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dengan tetap memerhatikan kehidupan lingkungan hidup generasi mendatang, Namun dalam perjalanannya, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian TPB dimana beberapa kondisi perlu adanya akselerasi atau percepatan pencapaian target agar mampu menyelaraskan dengan target TPB Nasional, Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan upaya dalam mencapai TPB dimana permasalahan tersebut dapat dilihat pada penjabaran berikut:

a. **Pelayanan dan jaminan kesehatan kelompok masyarakat rentan**

   Pelayanan dan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat maupun mempertahankan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Tidak dipungkiri kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian, sehingga tentu saja kesehatan akan berdampak signifikan pada implementasi pembangunan daerah, Selain itu, ketahanan kesehatan masyarakat melalui penjaminan kesehatan menjadi perlu dikarenakan masyarakat yang terkena penyakit kronis akan mengeluarkan uang yang cukup banyak jika tidak memiliki jaminan kesehatan, Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan untuk pemerataan jaminan kesehatan agar masyarakat tidak memiliki risiko tinggi (kerentanan) turun ke bawah garis kemiskinan karena suatu penyakit yang dideritanya,

   Terlihat dari data yang dihimpun menyiratkan belum optimalnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, Hal ini sangat terlihat dari masih belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan dimana sebanyak 89,00 persen peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kalimantan Timur, Dari angka ini

terlihat bahwa capaian proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan masih belum memenuhi target nasional meskipun sudah diupayakan pelaksanaannya,

Belum optimalnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah, Salah satunya dengan melakukan upaya tambahan dalam mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut dengan inovasi dan program prioritas yang lebih aplikatif dan mampu menyeluruh,

b. Penguatan sistem penanggulangan bencana alam dan sosial

Upaya dalam meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mempersiapkan diri pada kondisi kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana menjadi salah satu fokus pemerintah pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Terlihat bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur masih cukup tinggi yang mencapai 155,49 pada tahun 2020, Meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya, namun capaian ini masih harus diturunkan lagi,

Tahun 2020 merupakan tahun special bagi penanganan kebencanaan daerah dikarenakan terjadi suatu bencana sosial Pandemi Covid-19 saat ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini, Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur, Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh daerah serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, Mengingat pentingnya perhatian pemerintah terhadap pandemi ini, maka pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional,

Di Kalimantan Timur, Covid-19 cukup merebak pesat di daerah perkotaan, khususnya Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang, Tentu saja hal

ini menyebabkan tingginya masyarakat yang menjadi korban positif Covid-19 bahkan sampai meninggal dunia, Jika diakumulasikan dengan berbagai bencana lainnya seperti kebakaran dan sebagainya, maka jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana pada tahun 2020 sebanyak 2,052 jiwa per 100,000 orang,

Dalam melakukan penanggulangan dan penanganan dampak Pandemi Covid-19 di Kalimantan Timur, perlu adanya upaya lebih bagi pemerintah daerah baik dari segi pendanaan maupun secara teknis untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Adanya vaksinasi yang telah resmi dikeluarkan memberikan cukup harapan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kondisi pembangunan masih berada pada koridor perencanaan pembangunan regional maupun nasional,

c. Perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan gizi

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan kualitas pangannya sehingga mampu memiliki pola konsumsi yang baik dan pemenuhan gizi yang cukup, Untuk memberikan energi pada setiap aktivitas masyarakat, maka perlu pemenuhan konsumsi berupa kalori minimal minimal 1,400 kkal/kapita/hari, Namun di Indonesia, masih terdapat cukup tinggi masyarakat yang belum mengkonsumsi asupan kalori minimum tersebut, Terlihat dari data bahwa proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari memang memiliki tren menurun, namun hingga tahun 2019 masih terdapat 13,17 persen penduduk yang memiliki asupan kalori di bawah asupan kalori minimum,

Dari sisi pola konsumsi, maka kualitas konsumsi pangan Provinsi Kalimantan Timur masih perlu perbaikan, Hal ini terlihat dari skor pola harapan yang merupakan skor untuk melihat konsumsi pangan masyarakat dibandingkan dengan pola konsumsi pangan ideal, Tingginya konsumsi padi-padian dan belum optimalnya capaian tingkat konsumsi pangan hewani maupun sayur dan buah menjadi salah satu “kambing hitam” masih belum tercapainya target nasional, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 85,8 dimana diharapkan pada tahun 2023 akan mencapai 93,4 sehingga memerlukan upaya lebih dalam mencapai target tersebut,

d. Penanggulangan kerawanan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan

Narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan, Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat, Kemudahan mendapatkan bahan berbahaya ini menyebabkan penggunanya semakin meningkat dengan berbagai karakteristik pengguna baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dan semua kalangan usia,

Dari sisi kerawanan narkoba yang menjadi kekhawatiran masyarakat, kondisi belum ideal yang dialami Kalimantan Timur terkait pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan, Terlihat dari data bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 mencapai 0,6 dan masih belum mencapai target nasional,

Selain kerawanan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan masih perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Terlihat dari data bahwa masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak terkait tindak kekerasan baik dalam rumah tangga maupun luar rumah tangga, Terjadi penurunan menjadi sebesar 63,5 persen korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dan terjadi pula penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan hingga mencapai 0,040, Kedua data yang cukup fulktuatif series di setiap tahunnya mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana hanya beberapa kasus yang muncul di tahun tertentu, Pembinaan dan sosialisasi penting dilakukan disini dengan struktur yang baik agar mampu tersampaikan ke seluruh masyarakat,

e. Peningkatan layanan pendidikan, kompetensi dan SDM

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, beberapa poin terkait pelayanan pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya pelayanan pendidikan menengah atas atau sederajat yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Belum optimalnya pelayanan pendidikan tersebut terlihat dari masih belum tercapainya target pembangunan nasional terkait angka partisipasi murni SMA/MA/sederajat dimana angka Kalimantan Timur sebesar

73,00 pada tahun 2020, Meskipun mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun diharapkan di Kalimantan Timur mampu mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun sehingga masyarakat mampu mengenyam pendidikan hingga SMA/MA/Sederajat,

Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, terdapat 79,02 persen SMA/MA/Sederajat yang berakreditasi minimal B, Upaya lebih harus dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan mutu sarana prasarana pendidikan di tingkat sekolah menengah atas menjadi hal yang perlu diutamakan demi tercapainya SDM berkualitas,

f. Sosialisasi dan akomodasi peran perempuan dalam pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, peran serta seluruh elemen masyarakat diperlukan demi tercapainya visi pembangunan daerah, Hal tersebut menjadikan tidak ada diskriminasi dalam setiap tahapan pembangunan sehingga akan terbangun suatu kesetaraan demi kemajuan bersama, Pada poin yang lebih mengerucut, terkait perempuan, maka dalam pelaksanaan pembangunan menegaskan adanya kesetaraan gender dalam partisipasi pembangunan seluruh masyarakat, Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan dalam memberdayakan perempuan agar memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengambil peran serta pembangunan Kalimantan Timur,

Dari sisi pemberdayaan perempuan, pada tahun 2019 sebanyak 18,19 persen perempuan duduk di parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Angka ini tentu masih jauh dari yang disyaratkan yakni sebanyak 30 persen perempuan yang duduk sebagai anggota dewan, Selain itu, terjadi penurunan pada keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) yakni sebanyak 18 persen pada tahun 2018 menjadi 12,8 persen pada tahun 2020, Hal ini tentu saja menjadi catatan negatif dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kalimantan Timur, Oleh karena itu, perlu adanya upaya tambahan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan baik dari sektor formal maupun non formal,

g. Perbaikan tata kelola untuk peningkatan rasio pajak terhadap PDRB

Belum optimalnya kinerja pajak Provinsi Kalimantan Timur terlihat dari minimnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 0,64 pada tahun 2020, padahal target dari Peraturan Presiden mencapai lebih dari 12 persen, Angka tersebut mengindikasikan kondisi perpajakan dan kapasitas sistem perpajakan daerah perlu ditingkatkan kinerjanya, Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait permasalahan ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, komitmen dan koordinasi antar lembaga Negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas Negara,

h. Peningkatan kinerja industri dan UMKM

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil oang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu, Secara nasional, UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian nasional dimana lebih dari 99 persen unit pelaku usaha adalah UMKM, Hal ini tentu saja menjadikan UMKM berpotensi dalam mewujudkan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat, Namun di Provinsi Kalimantan Timur, UMKM khususnya usaha industri manufaktur memiliki kecenderungan mengalami penurunan, Hal ini terlihat dari nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita serta pertumbuhan PDRB pada kategori industri pengolahan (secara umum) dimana penurunan kontribusi industri pengolahan pada PDRB menjadi 18,90 persen pada tahun 2020 dan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di setiap tahunnya hingga 0,03 persen pada tahun 2019 dan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -2,77 persen pada tahun 2020 yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19,

Adapun terkait permodalan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sempat mencapai 27,33 persen dan menurun hingga mencapai 18,90 persen pada tahun 2020, Hal ini tentu saja memerlukan upaya lebih dalam mewujudkan peningkatan kinerja industri dan UMKM di Kalimantan Timur,

i. Pengelolaan sampah domestik dan limbah B3

Salah satu harapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah

lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, Selain itu juga pada tahun yang sama secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, Namun kedua harapan itu masih cukup jauh pencapaiannya mengingat jumlah timbulan sampah yang didaur ulang hanya kisaran 0,0583 juta ton dan selisihnya cukup jauh dari target nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, Selain itu, jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) juga masih belum optimal dimana capaian pada tahun 2020 mencapai 57,945,

Belum optimalnya pengelolaan sampah domestik dan limbah B3 di Kalimantan Timur memang perlu menjadi perhatian mengingat tingginya volume sampah baik sampah rumah tangga maupun limbah industri, Oleh karena itu, untuk meminimalisir degradasi kualitas lingkungan hidup sekaligus memberdayakan masyarakat, maka perlu adanya kemitraan dalam hal pengelolaan sampah dan limbah B3 tersebut agar berdaya guna bagi perekonomian daerah,

j. Penanganan lahan kritis, perubahan iklim dan mitigasi

Tingginya aktivitas perekonomian yang "mengorbankan" ekosistem lingkungan hidup menyebabkan pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab dalam memulihkan kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik, Salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi lahan kritis yang timbul akibat aktivitas perekonomian, khususnya pembukaan lahan maupun karena pertambangan dan penggalian, Terlihat dari data bahwa luas lahan kritis yang direhabilitas mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga tahun 2019 hanya mencapai 524 ha,

Kondisi ini tentu saja memerlukan perhatian khusus bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana lahan kritis yang terus bermunculan seyogyanya menjadi fokus utama pemerintah dan swasta dalam memperbaiki dan merehabilitas setiap dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perekonomian perusahaan,

k. Penyediaan air bersih

Sebagai sumber kehidupan, air bersih menjadi komoditas utama dalam hal penyediaannya kepada masyarakat secara merata, Perhatian terhadap distribusi air bersih dan layak kepada masyarakat secara otomatis akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Namun dari data terlihat bahwa terjadi penurunan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan hingga mencapai persentase 64,53 persen rumah tangga, Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sempat mencapai 73,31 persen, Kondisi ini tentu saja seiring dengan penurunan pada indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan dimana masing-masing sebesar 64,53 persen dan 47,40 persen, Penurunan capaian ini tentu menjadi "pekerjaan rumah" bersama, khususnya dalam membangun pemerataan infrastruktur dasar masyarakat,

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan, Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan, Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan,

1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional, Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional, Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur,

a. Kelesuan Perekonomian Global

Dalam beberapa tahun terakhir, IMF memperkirakan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi global, Sesuai laporan Bank Indonesia (2020), ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara; yang mengakibatkan volume perdagangan dunia terus terkontraksi dalam 1-2 tahun terakhir; terendah sejak krisis finansial global, Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang,

Tren penurunan ekonomi global antara lain diakibatkan oleh dampak negatif dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok juga menyangkut sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia, Namun demikian, berdasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan beberapa negara berkembang, pertumbuhan ekonomi global pada beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan mengalami peningkatan, Namun, proyeksi tersebut tersebut mengalami koreksi (lagi) sehubungan dengan beberapa sentimen negatif di awal tahun 2020 antara lain keputusan sejumlah bank sentral dunia yang tetap mempertahankan kebijakan akomodatif, merebaknya wabah virus corona, serta pemangkasan prospek ekonomi dunia oleh IMF,

Pandemi Covid-19 merupakan isu strategis yang paling mengoreksi optimisme ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan, Rendahnya produktivitas global akibat pandemi Covid-19 didukung fakta makin banyak negara yang melaporkan terjadinya resesi saat bersamaan kasus covid-19 kian meningkat, antara lain karena vaksin belum tersedia sampai kini, Di tingkat global, data terakhir menunjukkan bahwa Covid-19 telah mewabah hingga 216 negara, menginveksi 29,377,093 penduduk dengan kematian berjumlah 931,163,

b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri, Dengan ketersediaan teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat, Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk mendukung partisipasi, akuntablitasi, dan transparansi pembangunan daerah, Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi,

c. **Pembangunan Ekonomi Hijau *(Green Economy)***

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis, Ekonomi hijau mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan ekologi dan sosial-budaya masyarakat, Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi hijau tersebut menjadi pedoman perubahan paradigma pembangunan, Pertumbuhan ekonomi harus didukung keberlanjutan ekologi, Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya,

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis, Misalnya pada sektor perkebunan, dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan, Pada sektor perikanan dilakukan dengan mendorong budidaya perikanan darat yang tidak membuka seluas-luasnya Kawasan berhutan, namun dilakukan dengan integrase perikanan dan hutan (aquasilviculture), serta menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan bagi perbenihan biota air di alam (*reservat*),

d. Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (*Paris Agreement*)

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri, 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius,
2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan,
3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim,
4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim,
5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan,

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim), Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "Katowice Climate Package" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris, Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, Hal tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur,

2. Isu Nasional

Perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa dipisahkan dari perkembangan isu strategis di tingkat nasional, Hal ini pada dasarnya merupakan kondisi yang bersifat struktural di dalam sebuah wilayah negara, Sebagai provinsi,

Kalimantan Timur harus mendasarkan perencanaan pembangunan berdasarla isu-isu yang menyimpan potensi pengaruh secara nasional, Berikut ini adalah isu-isu strategis nasional yang berkorealasi dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Timur,

a. RPJMN 2020-2024

Pembangunan nasional Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir, Kemajua ini terjadi di tengah-tengah ketidapastian kondisi global, Indikator yang paling berpengaruh adalah terjaganya kestabilan ekonomi, menurun drastisnya angka kemiskinan, begitu juga menurunnya tingkat pengangguran secara signifikan, Pencapaian ini pada saat yang sama menunjukkan bahwa Nawa Cita jilid satu telah berhasil dilaksanakan hingga tahun 2019 yang lalu,

Perencanaan pembangunan selanjutnya yang dirumuskan di dalam RPJMN 2020-2024 didasarkan kepada kebijakan periode terakhir RPJPN 2005-2025, Dengan kata lain, RPJMN tahun 2020-2024 adalah perencanaan penentu dalam upaya pencapaian target pembanguan yang tersurat di dalam RPJPN, Target dari RPJPN berkaitan langsung dengan upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing,

Sebagai paya lanjutan dari Nawa Cita jilid 1, Presiden terpilih untuk tahun 2020-2014 menyusun visi dan misi berdasarkan RPJPN tahun 2005-2025, Visi misi yang kemudian ditetapkan sebagai visi dan misi RPJMN 2020-2024 ini bebrunyi, ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***, Visi ini akan dijabarkan kembali melalui 9 (sembilan) misi yang disebut Nawacita jilid kedua, sebagaimana yang bisa dilihat dalam gabar di bawah ini,

Gambar 4.3
Misi RPJMN 2020-2024

Sumber: Perpres No,18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

Melalui misi Presiden di atas, kemudian ditetapkanlah 5 (lima) arahan utama pembangunan nasional 2020-2024, Kelima arahan tersebut meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, Berdasarkan 5 (lima) arahan utama tersebut, kemudian ditetapkanlah 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini,

Gambar 4.4

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

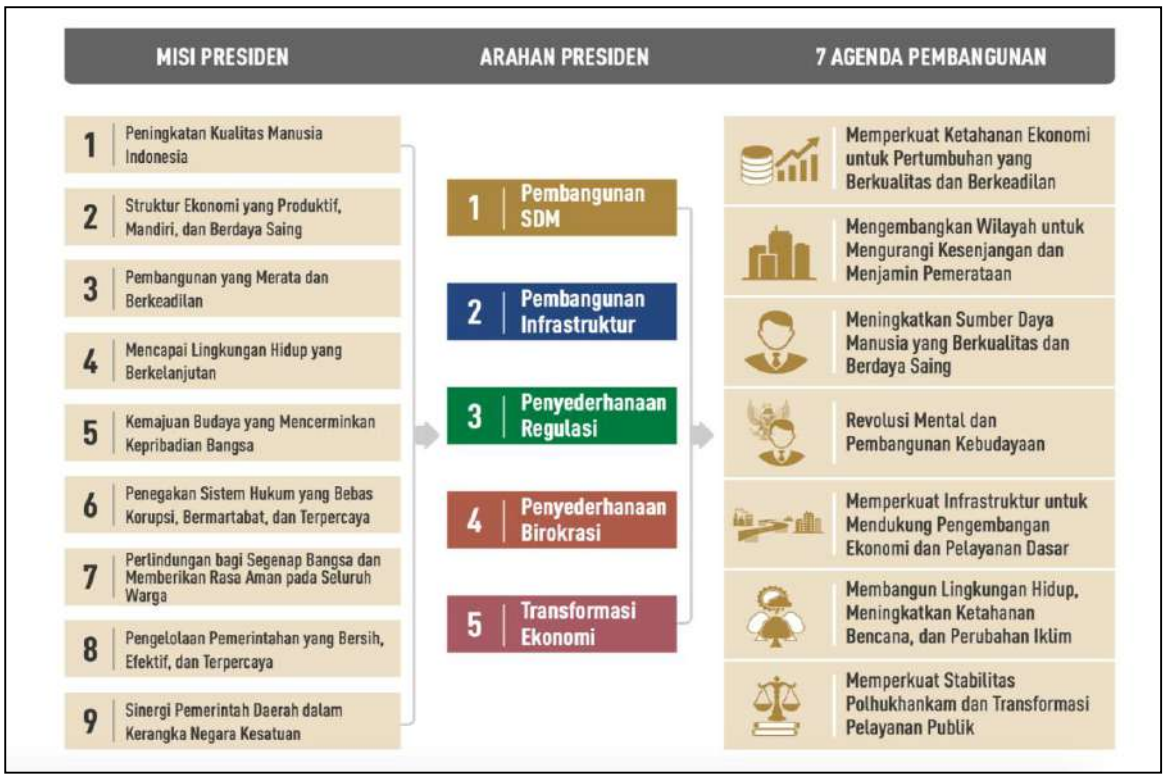

Sumber: Perpres No, 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

Berdasarkan misi dan arahan presiden, ditetapkanlah 7 (tujuh) prioritas dari agenda pembangunan nasional yang akan dijalankan dalam kurun 5 (lima) tahun (RKP), sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;

b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital,

2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, melalui:

a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;

c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta

e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata,

3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f) Pengentasan kemiskinan; dan

g) Peningkatan produktivitas dan daya saing,

4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, melalui:

a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;

b) Memajukan kebudayaan;

c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;

d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta

e) Meningkatkan budaya literasi,

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui:

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta

e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur,

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, melalui:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta

c) Pembangunan Rendah Karbon,

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;

c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri,

Beberapa poin penting untuk diperhatikan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD Tahun 2020-2024 terkait pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pembangunan dan pengambangan kilang minyak: Kilang RDMP Balikapan, pembangunan kilang baru (Grass root) Bontang;
3. Pipa gas bumi trans Kalimantan: Pipa transmisi Kaltim-Kalsel (Bontang-Banjarmasin);
4. Industri 4,0 di 5 sub sektor prioritas makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi;
5. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah);
6. Pembangkut listrik 27,000 MW, transmisi 19,000 KMS dan Gardu induk 38,000 MVA,

b. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu isu yang selalu muncul di dalam perencanaan pembangunan nasional adalah pemerataan populasi, Secara langsung persoalan populasi berkaitan dengan kesiapan wilayah sebagai penampung populasi tersebut, Perencanaan pembangunan nasional juga mendapatkan dampak dari persoalan populasi dan kaitannya dengan kebutuhan wilayah, Hal ini bisa dilihat dari keselarasan antara percepatan pembangunan di Jakarta dengan terus naiknya angka populasi, Isu ini mengindikasikan beberapa pilihan yang potensial untuk diambil, Dengan beragam pertimbagan, khususnya sebagai upaya untuk menciptakan peluang-peluang di masa depan, maka Presiden menetapkan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),

Penetapan rencana pemindahan IKN ini harus diikuti oleh beberapa kondisi dasar yang dibutuhkan, Salah satunya adalah telah adanya kandidat wilayah atau daerah potensial baru untuk lokasi IKN, Keputusan Presiden mengenai lokasi kemudian jatuh ke wilayah yang berada di Kalimantan Timur, Penetapan wilayah ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

1) Minimnya resiko bencana alam;
2) Lokasi yang strategis secara nasional;
3) Lokasi-lokasi yang cukup dekat dengan kota-kota yang telah berkembang;
4) Kelengkapan infrastruktur

IKN akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Provinsi Kalimantan Timur, Dari segi pembangunan, akan terjadi pengembangan pembangunan yang bersifat massif, Dengan asumsi bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tidak hanya terfokus pada wilayah IKN saja, namun juga wilayah-wilayah yang ada di sekitarna, Sektor-sektor potensial yang akan akan dikembangkan di antaranya adalah sektor pelayanan, pendidikan tinggi, industri digital dan inovasi,

Isu ekonomi hijau yang dicanangkan oleh Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan *Masterplan* Pembangunan IKN yang akan segera disusun, *Master plan* ini akan menerapkan prinsip inklusif, lestari, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia, Dengan demikian IKN baru bukan hanya sebagai pusat pemerintahan namun juga bisa berpotensi menjadi klaster perekonomian dunia,

Lokasi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Wilayah ini memiliki luas 256,142,72 Ha yang meliputi 56, 181 Ha sebagai Kawasan Ibu Kota Negara dan 6,116,14 Ha sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, IKN diarahkan agar dapat mempengaruhi perkembangan di wilayah tengah dan timur, Penyusunan RTR KSN direncanakan secara matang agar tidak mengganggu kawasan lindung, fungsi kawasan gambut, hutan mangrove serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perhitungan yang baik agar tidak terjadi bencana, baik persoalan kerentanan maupun potensi penyebab juga dilakukan, Dari perhitungan ini diperkirakan lebih dari 50 % kota baru IKN akan berfungsi sebagai kawasan lindung dan penyangga perkotaan (ZPK 4 & ZPK 3),

Sebagai dukungan dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur, maka perlu penyesuaian dalam penataan ruang wilayah, Penyesuaian ini dilakukan pada dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur (Perda no, 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036), RTRW Kabupaten Penajam Utara (Perda no, 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2034), dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara (Perda no, 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033), Selain hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun serta menetapkan RDTR sebagai antisipasi tindaklanjut pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang akibat penetapan IKN, yaitu RDTR Kecamatan Loa Janan, RDTR Kecamatan Samboja, RDTR Kecamatan Loa Kulu dan RDTR Kecamatan Muara Jawa,

Dalam rangka penyesuian Struktur Perkotaan di Kalimantan Timur setelah ditetapkan IKN serta menyesuaikan dengan timeline penyusunan regulasi dan kebijakan rencana tata ruang bahwa saat ini telah disusun Materi Teknis Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Timur dan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam paser Utara, Pada Tahun 2021 berdasarkan pentahapan, telah memasuki proses pengajuan persetujuan substansi ke kementerian Agraria Tata Ruang / BPN sehingga diharapkan dapat ditetapkan di tahun 2022 menjadi peraturan daerah,

Sesuai dengan amanat UU No, 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya adalah penyederhanaan produk RTR mengamanatkan agar RZWP3K diintegrasikan kedalam RTRWP, saat ini telah dilakukan tahapan integrasi sambil menunggu petunjuk pelaksanaan integrasi melalui peraturan menteri (permen) untuk menjadi acuan dalam integrasi, mengingat kedua produk rencana tersebut terdapat perbedaan subtasnsi dan skala peta,

3. Isu Strategis Kewilayahan

Isu-isu strategis yang bersifat kewilayahan penting karena berpengaruh secara langsung dengan peluang dan persoalan potensial di masa depan, Provinsi Kalimantan Timur, menargetkan akhir dari pembangunan jangka panjangnya dalam skema pembangunan berkelanjutan, Sementara itu melalui visinya, Kalimantan Timur menyadari bahwa ada pekerjaan besar dalam hal kedilan dan kesejahteraan, Keadilan dan kesejahteraan menjadi persoalan mendasar dan sekaligus isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur,

Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dimana kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata antara wilayah satu dengan wilayah lain, Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya, sementara sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur,

Isu strategis kewilayahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah, antara lain :

a. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tingkat keberhasilan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Kalimantan Timur masih rendah, hanya 2 KSP yang berkembang

dengan pesat dari 7 KSP yang ada, yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda, Infrastruktur pendukung konektifitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal, terutama terkait dengan jaringan air bersih, telekomunikasi dan transportasi,

Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daaerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektifitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan, Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektifitas antar kawasan,

b. Peningkatan Daya Saing Daerah

Kebutuhan akan peningkatan daya saing daerah dilatarbelakangi oleh pengalaman perekonomian Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan cukup berat, dimana pada periode tahun 2015-2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang sangat tajam, Rendahnya kondisi daya saing daerah disebabkan oleh pengaruh eksternal buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga,

Disamping itu, pengaruh internal terhadap rendahnya daya saing daerah antara lain :

- Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya kordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya,
- Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional,

- Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan,

Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless), Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat, Keunggulan, inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi, Keunggulan berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, serta antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai timing-nya,

Peningkatan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis, Peningkatan daya saing dilakukan melalui upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki, meliputi :

- Memperkuat kelembagaan dan tatakelola pemerintahan daerah meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan inovasi pemerintahan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah baru dan pengembangan investasi, penataan pola hubungan kerja sama antara Pusat-daerah dan antar daerah, serta kolaborasi multipihak swasta,
- Meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal,

c. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, Pemanfaatan tata ruang dalam pembangunan wilayah berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah dan menyelaraskan keseimbangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah dapat tumbuh bersama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki,

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa di Provinsi Kalimantan Timur dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah,

Daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan, Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan,

Optimasi pemanfaatan ruang dan peningkatan produktivitas di dalam ruang menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, Tersedianya mekanisme pemanfaatan ruang untuk masyarakat pada kawasan hutan melalui perhutanan sosial masih belum optimal dilakukan, Sistem kemitraan perkebunan melalui skema inti-plasma, merupakan peluang untuk mengurangi konflik antara perijinan dengan masyarakat,

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar, dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas, Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut, Sementara dilain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal

melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur melalui dana desa pada kawasan-kawasan tersebut, Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti banjir dan tanah longsor,

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan Sumber Daya Alam melalui pengendalian perijinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah,

Dengan adanya investasi pemanfaatan ruang yang mampu mengolah sumber daya alam secara lestari, maka ekonomi daerah akan berputar, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, ada profit, ada pajak dan ada *multiplier effect* untuk daerah, yang selanjutnya diharapkan akan mampu mempersempit ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan masyarakat, Harmonisasi Peraturan Perundangan terkait pemanfaatan ruang merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah,

Dalam pengembangan isu strategis pemanfaatan ruang ini tentu harus menilik pula pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Sebagai suatu kajian yang penting bagi perencanaan pembangunan, KLHS menjadi tanggung jawab berbagai pihak seperti pemerintahd aerah, pelaku usaha, mitra pembangunan, akademisi dan masyarakat, Selain itu, lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama, lintas sektor dan perhubungan dengan personal maupun kelembagaan, Hal ini berdampak pada pentingnya koordinasi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, khususnya perangkat daerah terkait dalam mengintegrasikan kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah, Merangkum hal tersebut, maka dalam melakukan pemanfaatan ruang untuk pencapaian pembangunan perlu adanya penyesuaian dengan berbagai rekomendasi yang diarahkan pada KLHS agar tetap mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan,

Selain KLHS, hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pemanfaatan ruang Kalimantan Timur terlihat dari Peraturan Presiden 109 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan Peraturan Presiden nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kedua Perpres tersebut menyebutkan bahwa Kalimantan Timur memiliki proyek strategis nasional yang harus didukung dalam perwujudannya yakni:

a. Pada sektor energi, beberapa proyek strategis nasional di Kaltim seperti kilang minyak Bontang, upgrading kilang-kilang eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP), pengembangan lapangan Gendalo, Mahe, Gandang, Gehem dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD), pembangunan fasilitas Coal to Methanol di Kutai Timur,
b. Jalan tol Balikpapan-Samarinda
c. Pembangunan halan tol Samarinda-Bontang
d. Kilang minyak Bontang
e. Pelabuhan KEK Maloy
f. Bendungan Marangkayu
g. Bendungan Sepaku Semoi
h. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerag Irigasi Rawa Telake
i. Kawasan Ekonomi Khusus Batuta Trans Kalimantan

d. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan, Tak terkecuali pada perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 ini, implementasi KLHS dalam melihat perjalanan pembangunan yang telah dilewati harus mampu memotret dan memberikan masukan sebagai penyempurna

dalam merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan demi akselerasi pencapaian visi pembangunan daerah,

4.3. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa permasalahan utama pembangunan yang mengemuka berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan masalah per-urusan pemerintahan,

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sinergitas target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Target pembangunan nasional, isu internasional, dan kesepakakan regional-global,

Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan, Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik, Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing,

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing,

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan, Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia, Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang,

2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur, Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industry hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan, Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah,

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur, Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur,

dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak,

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur, Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau,

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur,

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur, Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya, Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produkvitas hasil pertanian, Namun dilain sisi, isu kerusakan lingkungan akibat penambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, Meskipun kedua sektor tersebut merupakan kewenangan pusat, namun dampak yang timbul perlu diantisipasi dengan langkah strategis penanggulangannya,

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbaharukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK,

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini,

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan, Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial,

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah, Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi,

Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan,

6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018,

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan social, Berdasarkan capaian Pembangunan Kalimantan Timur, masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya, Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM,

Sementara di daerah, Kalimantan Timur juga menghadapi masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM sebagai berikut :

a. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;

b. Kapasitas Daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada permasalahan lemahnya pemahaman aparatur daerah;

c. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

d. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi terkait pencapaian indikator-indikator kinerja SPM,

7. Pembangunan IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur, Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh, Selain itu, aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat massif, Jika dirunutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas, Selanjutnya, secara impelementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya,

Persoalan perubahan lingkungan hidup akan langsung menjadi sorotan, Terutama jika mengingat bahwa Kalimantan merupakan lokasi strategis bagi seluruh proyek paru-paru dunia, Pertambahan secara masif jumlah bangunan dan infrastruktur yang akan dibangun membutuhkan suplai yang sangat banyak dari alam, Sehingga secara alamiah, daya tampung lingkungan hidup secara mendadak akan bertambah beberapa kali lipat, Selain hal-hal alamiah ini, persoalan legal lingkungan hidup juga memiliki potensi yang cukup besar seperti eksekusi lahan yang memiliki HGU, izin usaha perkebunan, izin pertambangan, atau lahan-lahan yang telah dipersiapkan sebagai wilayah konservasi, Selain memberikan dampak yang cukup problematis, pemindahan IKN juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai upaya

kampanye Ibukota hijau, Pengembangan IKN yang bisa dikatakan dari non, memungkinkan seluruh proyek pembangunan diarahkan kepada pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau, Rangkain pembangunan atau petumbuhan ekonomi hijau ini secara gradual akan memberikan efek yang sangat positif bagi Kalimantan Timur secara regional, Indonesia secara nasional, dan menjadi isu internsional,

Persoalan besar yang kedua dari pemindahana IKN adalah bertambahnya jumlah penduduk secara drastis, Persoalan kependudukan ini dan persoalan lingkungan pada dasarnya saling terkait, terutama dalam pembahasan suplai yang akan diberikan oleh alam, Efek langsung yang akan muncul dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah jumlah dan model hunian yang akan dibangun, Insfrastuktur-infrastruktur dasar yang akan dibangun secara massal ini memutlakkan penggunaan Sumber Daya Alam yang terus menerus dalam jangka panjang dan dengan bobot yang besar, Seperti halnya para persoalan lingkungan di atas, problem kependudukan juga sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi sumber peluang dengan mempersiapkan peta pembangunan yang dapat disesuaikan dan terlokalisir dengan baik,

Problem ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian Ibu Kota Baru, Beberapa pembangunan yang telah dilakukan baik di wilayah Kalimantan Timur maupun di provinsi-provinsi tetangga mengandaikan bahwa pemindahan IKN berpotensi surplus, Akan tetapi, pemindahan aparatur negara tentu tidak akan bisa dilakukan secara bersamaan dalam satau atau dua gelombang, Asumsi bahwa keuntungn ekonomis, tidak bisa disimpulkan secara cepat, Terutama jika mengingat akan adanya evaluasi bertahap dan berlapis mengenai hal ini, Perubahan-perubahan rencana sangat memungkinkan untuk terjadi dan dilakukan dalam tahapan yang besar juga,

Problem besar terakhir adalah kesiapan masyarakat dan budaya lokal dalam menerima pemindahan IKN, irisan paling strategis dari isu pemindahan IKN adalah bertambahnya marwah Negara dan Bangsa Indonesia di wilayah Internasional terutama pada bagian utara NKRI, Sebagaimana yang telah diketahui, potesi-potensi masalah kebanyakan berasal dari wilayah perbatasan sebelah Utara dan Selatan NKRI, Ditambah dengan jumlah negara dan wilayah dagang potensial yang berada di bagian utara, maka pemindagan IKN ke bagian Utara NKRI adalah langkah yang sangat

signifikan dengan kedaulatan Negara ke luar, Meski demikian, perubahan yang akan terjadi secara tiba-tiba dengan problem-problem yang tidak sedikit perlu untuk disikapi agar bisa menjadi peluang, Salah satu persoalan paling klasik dari masyarakat dan budaya di wilayah Kalimantan adalah persoalan huniah dan ekploitasi SDA, Secara postulatif, seluruh rangkaian pemindahan IKN ini memiliki kandungan-kadungan persoalan pada dua hal besar tersebut,

Bagian paling menguntungkan dari pemindaan IKN adalah akan adanya penyeimbangan di berbagai sektor dan secara langsung akan mendukung desentralisasi atau otonomi daerah secara menyeluruh, Pemindaan IKN juga merupakan tantangan yang sangat positif bagi pemerintah pusat dan sekaligus daerah dalam membuat peta dan membentuk desain baru dari seluruh skema pengembangan yang akan dilaksanakan, Bagi Kalimantan Timur secara khusus, dan pulau Kalimantan secara umum, tantangan yang paling besar adalah upaya merebut seluruh peluang yang telah dimulai melalui upaya-upaya pengaruutamaan pembangunan ekonomi hijau,

8. Kaltim Sehat dalam Ketahanan Pangan, Perencanaan Rehabilitasi Sosial, dan Pelayanan Publik dengan Tatanan Budaya *New Normal*

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang bersifat global dan memengaruhi seluruh struktur juga secara global, Dengan demikian, bisa dipastikan seluruh sektor yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah, sedang, dan akan terdampak, Sehingga, secara bertahap penurunan produktivitas di dalam struktur masyarakat akan mengarah pada kemunculan kerentanan sosial, Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika tertentu terutama pada sektor ketenagakerjaan, perindustrian, dan perdagangan terntu saja merasakan dampak yang cukup besar dan luas, Hal-hal yag paling urgen untuk ditindak lanjuti adalah persoalan retribusi dan pajak, altenatif bagi tenaga kerja yang di-PHK, dan kesulitan dalam pasokan bahan baku industri,

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sektor industri, ketenagakerjaan, dan perdagangan di atas mengimbasi seluruh sektor lainnya, Berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja membuat distribusi pangan tidak bisa tersalurkan dengan baik, Selain itu, urgensitas untuk bekerja dari rumah juga menghambat tetap berjalannya produktivitas di bidang pangan yang ditandai oleh banyaknya terjadi gagal

panen, Selain sektor pangan, industri-industri kecil juga mendapatkan penurunan pendapatan sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan menciptakan kelesuan daya saing,

Peluang yang sangat berpotensi muncul dari bencana pandemi Covid-19 ini adalah pada reformasi birokrasi secara regional, Kunci utama dari terjadinya reformasi industri tahap baru ini bisa dimulai dari kesepakatan global masyarakat dunia mengenai perlawana terhadap Covid-19, Secara mendasar adanya konsensus nasional dan bahkan internasional in akan memudahkan untuk melakukan *reshaping* aturan dan regulasi serta sistem pelayanan birokratis, sehingga penangan problm di seluruh sektor bisa dilakukan, Persoalan-persoalan yang muncul di dalam bidang industri yang melibatkan pasokan bahan baku dari luar negeri akan digantikan dengan pengaturan baru mengenai impor dan ekspor bahan baku terkait, Persoalan ketahanan pangan akan membuka kolaborasi regulatif dari beberapa daerah yang berdekatan untuk saling mengisi pasokan-pasokan pangan yang ada di dalam negeri,

Begitu juga peluang untuk memangkas pengeluaran bagi anggaran secara hibrid akan bisa dicapai melalui pelayanan yang tak lagi mutlak dilaksanakan secara fisis, Persiapan pada infrasruktur yang sebelumnya bisa saja masih dinilai tidak efektif akan berubah secara pragmatis dikarenakan kebutuhan bersama yang memutlakkan adanya adaptasi sosial, Hal yang mencengangkan juga terjadi di dunia pendidikan dengan mulai tidak kagoknya masyarakat dalam memanfaatkan media-media daring untuk kegiatan KBM, Struktur penghubung mengenai seluruh hal ini tentu harus diregulasikan agar bersifat mengikat seluruh kalangan,

Bagian paling menakjubkan dari peluang yang mungkin muncul dari bencana pandemi Covid-19 adalah cara pandang masyarakat Indonesia, umumnya dan masyarakat Kalimanta Timur mengenai protokol mendasar kesehatan, Selain itu kesadaran bahwa keberadaan setiap person sebagai unsur masyarakat melalui pemberdayaan kesehatan, pendidikan, dan sosial-budaya akan meningkat dengan tajam, Peluang-peluang yang akan muncul ini, secara kualitatif akan mampu mengimbangi *cost* yang dikeluarkan dalam bentuk belanja selama menghadapi dan masa pemulihan Covid-19 kelak,

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 "Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan" dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada periode 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

5.1. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023 yaitu:

> “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Berani,

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur akan diwujudkan dalam pemerintahan yang memiliki keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk menyejahterakan masyarakat.

2. Kalimantan Timur yang Berdaulat,

Pokok dari pernyataan visi “Kalimantan Timur yang Berdaulat” terdapat pada kata “Berdaulat”. Istilah berdaulat yang dimaksud akan dijabarkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

a. Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik;
b. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
d. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing.**

5.2. Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

Misi pertama berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka dibutuhkan berbagai upaya strategik guna mewujudkan pemerataan taraf pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh

tujuan pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang berhubungan kualitas SDM melalui keberdayaan masyarakat desa dan daya saing angkatan kerja.

Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Misi kedua merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan di bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan daerah untuk pendanaan pembangunan Kalimantan Timur yang selama ini masih rendah dibanding potensinya. Sumber ekonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu ekonomi berbasis ekspor yang didukung oleh sektor industri dan ekonomi berbasis kerakyatan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian diharapkan dapat menopang dua basis ekonomi di atas. Untuk itu, diharapkan, upaya untuk mendatangkan investasi pada sektor-sektor unggulan, khususnya pada hilirisasi menjadi salah satu sasaran penting misi kedua. Di luar itu, sektor UKM dan pariwisata menjadi andalan ekonomi Kalimantan Timur berikutnya. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah dan kerakyatan, Kalimantan Timur menyandarkan kepada kekuatan daerah dengan menciptakan persaingan yang adil dalam kepastian berusaha melalui dukungan modal, teknologi, usaha pertanian rakyat, BUMDES dan koperasi.

Misi 3: Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

Misi ketiga merupakan kebijakan untuk mencapai kedaulatan di bidang insfrastruktur kewilayahan dengan tujuan utama mencapai keseimbangan antara konektivitas dan kebutuhan infrastruktur wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang daerahnya tertinggal guna mendukung pengurangan ketimpangan pembangunan. Dalam kerangka itu, disamping untuk meningkatkan jumlah arus barang dan penumpang dari dan ke Kalimantan Timur dan pengembangan kawasan ekonomi, dukungan infrastruktur prioritas juga diwujudkan pada ketersediaan air minum layak, dukungan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penurunan kawasan kumuh, pengurangan dampak banjir, kebutuhan listrik masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan tata ruang.

Misi 4: Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Misi keempat merupakan amanat penting dari pilar lingkungan hidup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan rendah karbon,

agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan ekonomi tetap dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah menjaga emisi GRK yang rendah, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan ketangguhan menghadapi bencana pada umumnya. Misi keempat ini juga menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi-misi yang lain tetap dalam koridor membangun pilar-pilar keberlanjutan (*sustainability*) secara keseluruhan melalui aspek pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan hidup yang menuju pertumbuhan hijau.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Misi kelima ini merupakan kebijakan pemungkin bagi keberhasilan misi-misi yang lain pada umumnya berupa hadirnya pemerintahan yang berdaulat; yaitu birokrasi yang bersih, jujur, mandiri, berwibawa, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebijakan publik yang mendukung daya saing daerah serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, perlu diwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kinerja dengan citra birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tak kalah penting, dalam dinamika dan tuntutan layanan milenial hadirnya system pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik tak bisa ditawar-tawar lagi.

Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selama masa jabatan berlangsung. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangun yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batubara, Indeks Gini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator makro ini merupakan penunjuk atas impact pembangunan lokal, regional, dan nasional. Dengan hubungan, bahwa tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator

Makro pembangunan jangan menengah Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat pada tabel 5.1 berikut ini,

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		2018	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,83	77,75
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	6,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,60	6,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3,00
5.	PDRB Per Kapita (juta Rp)	174,43	175
6.	LPE Non Migas dan Batubara (%)	5,95	2,5
7.	Nilai Tukar Petani	96,15	105
8.	Indeks Gini	0,342	0,308
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85,90	76,15
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,60)	B (72,00)

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian visi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Tujuan RPJMD juga juga menggambarkan capaian visi dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Indikator dan target pembangunan per tahun akan diletakkan beriringan dengan setiap tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun 6 (enam) tujuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia;

2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keenam tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka kebijakan **Pembangunan Hijau**. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2

Keselarasan RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs)

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Kehidupan sehat dan Sejahtera		Pendidikan Berkualitas
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tanpa Kemiskinan		Kesetaraan Gender
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Tanpa Kelaparan		Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
			Konsumsi & Produksi yang Bertanggung jawab		Kemitraan untuk mencapai Tujuan
4	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Energi Bersih dan terjangkau		Industri, Inovasi dan Infrastuktur

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
			Berkurangnya Kesenjangan		
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Air Bersih dan Sanitasi Layak		Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
			Penanganan Perubahan Iklim		Ekosistem Lautan
			Ekosistem Daratan		
6	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh		

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SGDs di atas, menunjukkan komprehensivitas tujuan pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan di dalam sasaran-sasaran, dengan *cascading* indikator sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5.1
Cascading Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

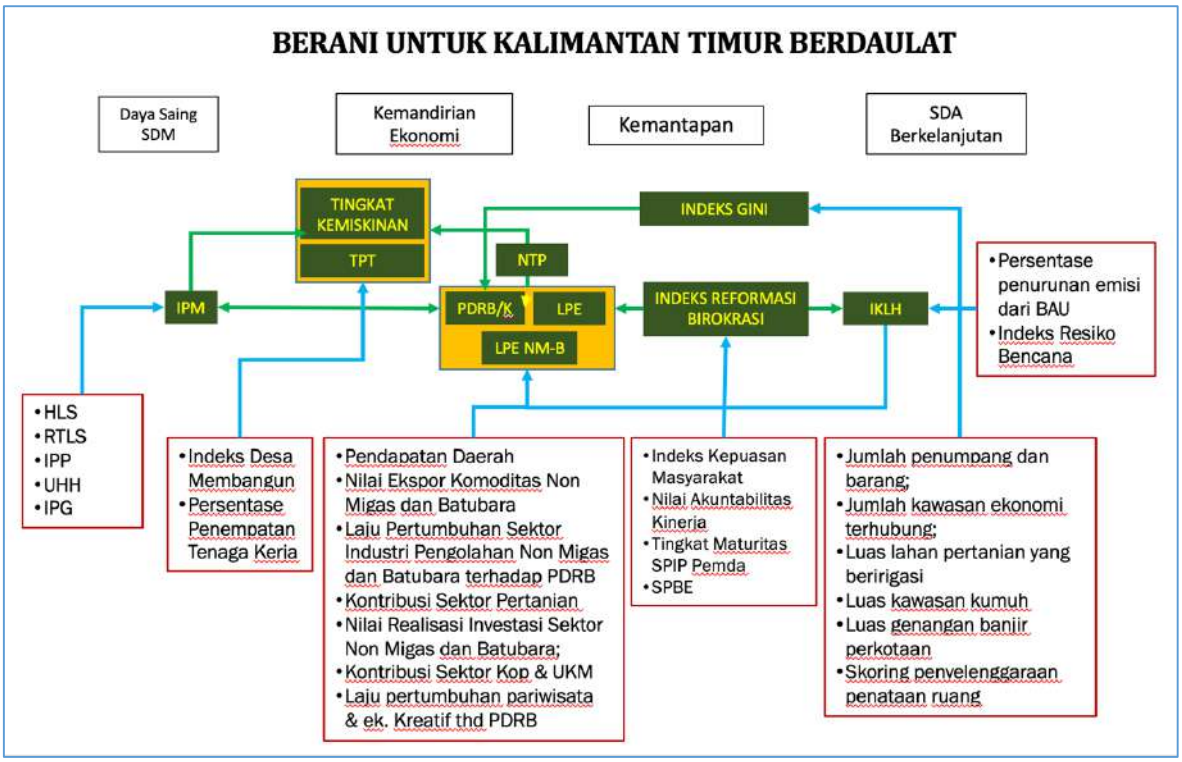

Di dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan *refocusing* Tujuan dan Sasaran Pembangunan diantaranya perubahan jumlah Tujuan dari 7 tujuan menjadi 6 tujuan, dan perubahan Sasaran dari 28 Sasaran menjadi 19 Sasaran. Penyesuaian ini juga diikuti dengan perbaikan terhadap indikator yang digunakan, Daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3

Tujuan dan Sasaran
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**76.61**	**76.24**	**76.75**	**77.25**	**77.75**
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.69	13.72	13.91	14.02	14.13
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.7	9.77	9.91	10.04	10.17
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	-	0.61	0.85	1.09
Sasaran 3 : Meningkatnya peerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74.22	74.33	74.45	74.60	74.75
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	85.98	56.71	85.86	85.88	85.91
	Tingkat Kemiskinan (%)	**6.1**	**7.09**	**6.05**	**6.00**	**5.90**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**6.09**	**6.88**	**6.81**	**6.75**	**6.50**
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0.62	0.68	0,6670	0.6825	0.690
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	29.41	68.61	53.00	54.00	55.00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN						
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**4.74**	**-2.85**	**-1.00**	**3,5±1**	**3,5±1**
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	**175.25**	**160.11**	**167.5**	**170**	**175**
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	**5.35**	**-1.56**	**1.5**	**2**	**2.5**
	Nilai Tukar Petani	**105.38**	**111.65**	**112**	**113**	**114**
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.775	10.132	9.590	11.001	12.122
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	11.760	12.877	1.7	1.72	1.89
Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7.46	8.24	9.44	9.64	9.86

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0.56	0.63	0.64	0.65	0.65
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0.33	0.36	0.36	0.37	0.37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,33	4,94	5	5,2	5,3
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,67	1,68	1,7	1,72
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1.12	1,13	1,06	1,07	1,08
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	22.31	24.77	32.53	35	35.67
Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15.07	4.5	12.92	13.00	13.50
Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,02	1,06	9,52	9,67	9,91
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	14,93	15,23	15,68

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN						
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	**Indeks Gini**	**0.33**	**0.328**	**0.313**	**0.313**	**0.308**
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	10.721.656	3.570.750	4,500,000	6,000,000	8,100,000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	341.529.897	294478.397	307,000,000	337,000,000	370,000,000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	2 Kawasan	2	4	5	7
	Capaian akses air minum layak (%)	54.59	64.53	68.53	68.53	70.53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13,874.11	14,808.50	15,558.50	16,258.50	16,925.50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.485,89	1.248,22	1.198,22	1.148,22	1.098
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	664.2	477	477	477	477
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66.46	66.46	66.46	66.46	66.46
	Rasio elektrifikasi (%)	88.93	90.21	91.50	93.00	95.00
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN						

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**78.81**	**75.50**	**75.95**	**76.05**	**76.15**
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	25.18	50.72	27.75	28.50	29.33
Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	154.49	153.49	152.49	151.49	150.49
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK						
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B (70,00)**	**B (70,50)**	**B (71,00)**	**B (71,50)**	**B (72,00)**
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	82	82,3	82,5	83,0
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	3,04	3,14	3,2	3,25	3,3
Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,60	76,65	77	78,00
Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

5.4. Agenda Pembangunan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur

Sebagai penterjemahan terhadap visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya Bapak Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan utama gubernur tersebut merupakan target kinerja dedicative pada akhir masa jabatan Gubernur/Wakil dalam mewujudkan visi Kaltim Berdaulat. Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedicative akhir masa jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;**
2. **Pemberian 6.500 beasiswa Tuntas per tahun (32.500 beasiswa dalam lima tahun);**
3. **Penciptaan 250.000 lapangan kerja;**
4. **Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;**
5. **Pembangunan 500 Km jalan produksi;**
6. **Penyaluran 100 Milyar modal usaha;**
7. **Pemberian bantuan Rumah Layak Huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit; dan**
8. **Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Selanjutnya berdasarkan Direktif/arahan utama Gubernur tersebut, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penterjemahan visi, misi, direktif/arahan utama gubernur dan agenda pembangunan dapat dilihat sebagaimana keterkaitannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.2
Keterkaitan Misi, Arahan Gubernur, dan Agenda Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

5.5. Arahan Target Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregrat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota. Benang merah setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kabupaten/kota diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur sehingga keberhasilan visi dan misi dapat dirasakan secara menyeluruh.

Salah satu upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah melihat bagaimana target indikator makro pembangunan yang merupakan rapor kinerja kepala daerah mampu selaras dan saling mendukung antar daerah. Target indikator makro yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019, adalah alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik pada aspek ekonomi, sosial maupun urusan pembangunan lainnya. Untuk lebih rinci dalam melihat arahan target pembangunan indikator makro, maka ditampilkan tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/ Kota	IPM			Angka Kemiskinan (%)			Angka Pengangguran (%)			Pertumbuhan Ekonomi (%)			Pendapatan per Kapita (Juta Rp)			Indeks Gini		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kabupaten Paser		73.65	74.13		8.00	7.89		3.45	3.17		4.32	5.01		180.77	198.84		0.30	0.29
2	Kabupaten Kutai Barat	71,50	71,75	72,00	13,33	13,29	13,47	5,87	5,08	4,86	2,00	2,40	2,70	180,0	186,00	190,00		0,30	0,29
3	Kabupaten Kutai Kartanegara		75.34	75.85		6.90	6.50		4.94	4.65		5.65	12.83		209.28	230.21		0.29	0.29
4	Kabupaten Kutai Timur		75.76	76.48		8.95	8.69		5.38	5.01		7.84	8.10		354.90	390.39		0.30	0.29
5	Kabupaten Berau	75,00	75,50	75,75	4,60	4,30	4,00	5,00	4,90	4,85	3,90	5,30	5,50	152,43	154,10	155,78	0,300	0,295	0,290
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	71,84	72,27	72,70	7,12	7,01	6,90	6,09	5,59	5,04	3,02	3,52	4,03	58,10	59,73	61,36	0,320	0,300	0,280
7	Kabupaten Mahakam Ulu		69.60	70.29		10.02	9.90		4.60	3.50		6.30	6.50		104.17	114.58		0.32	0.31
8	Kota Balikpapan	79,53	80,00	80,11	2,30	2,42	2,40	4,55	9,00	7,30	4,5-5,0	5,00	5,50-6,00	175,03	184,17	193,30	0,300	0,300	0,300
9	Kota Samarinda	80,34	81,44		4,50	4,31		3-3,5	5,41		2-4	1-2		75,6	81,59				
10	Kota Bontang	81,00	81,40	81,90	4,50	4,03	3,82	9,00	8,70	8,20	1,0-2,0	2,50	3,40	320,0	327,00	334,00	0,330	0,320	0,300
KALIMANTAN TIMUR		**76,75**	**77,25**	**77,75**	**6,05**	**6,00**	**5,90**	**6,81**	**6,75**	**6,50**	**-1,00**	**3,5±1**	**3,5±1**	**167,5**	**170,00**	**175,00**	**0,328**	**0,313**	**0,308**

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas daerah yang selanjutnya diterjemahkan kedalam program pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, serta analisis potensi dan hambatan internal dan lingkungan eksternal maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi sebagai berikut.

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS		
Tujuan 1: **Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia**		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan daya saing generasi muda	1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
		2. Peningkatan kualiatas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
		2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya
		4. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	1. Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa
		2. Penguatan kualiatas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
	Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja		2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN		
Tujuan 3: **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
		2. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	1. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		2. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor
		3. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Pengembangan industri unggulan provinsi	1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas
		2. Pengembangan Kawasan Peternakan
		3. Peningkatan status Kesehatan hewan
		4. Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ternak
	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		5. Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
		2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
		3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	1. Penguatan informasi potensi kawasan hutan 2. Pengeloaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu 3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan
		4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
		2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektornik
		3. Pemantauan komitmen perizinan
		4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		2. Pengembagan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital
		3. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata
		2. Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi
	Pengembangan ekonomi kreatif	3. Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, kriya, film, dan musik
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN		
Tujuan 4: **Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar**		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
	Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	1.Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	1. Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya
	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN
		2. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN		
Tujuan 5: **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		2. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK		
Tujuan 6: **Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik**		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		2. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
		2. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
		3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	1. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai **prioritas pembangunan** *(strategy focused organization)* lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah. Dengan mempedomani tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan di atas.

6.2. Tema Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tema pembangunan tahunan merupakan garis besar kebijakan yang spesifik guna menggambarkan puncak prioritas pembangunan tahunan. Arah kebijakan tahunan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tema pembangunan setiap tahun dirumuskan, dengan mengacu pada rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang di dalam gambar 6.1 berikut,

Gambar 6.1

**Tema Pembangunan Tahunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023**

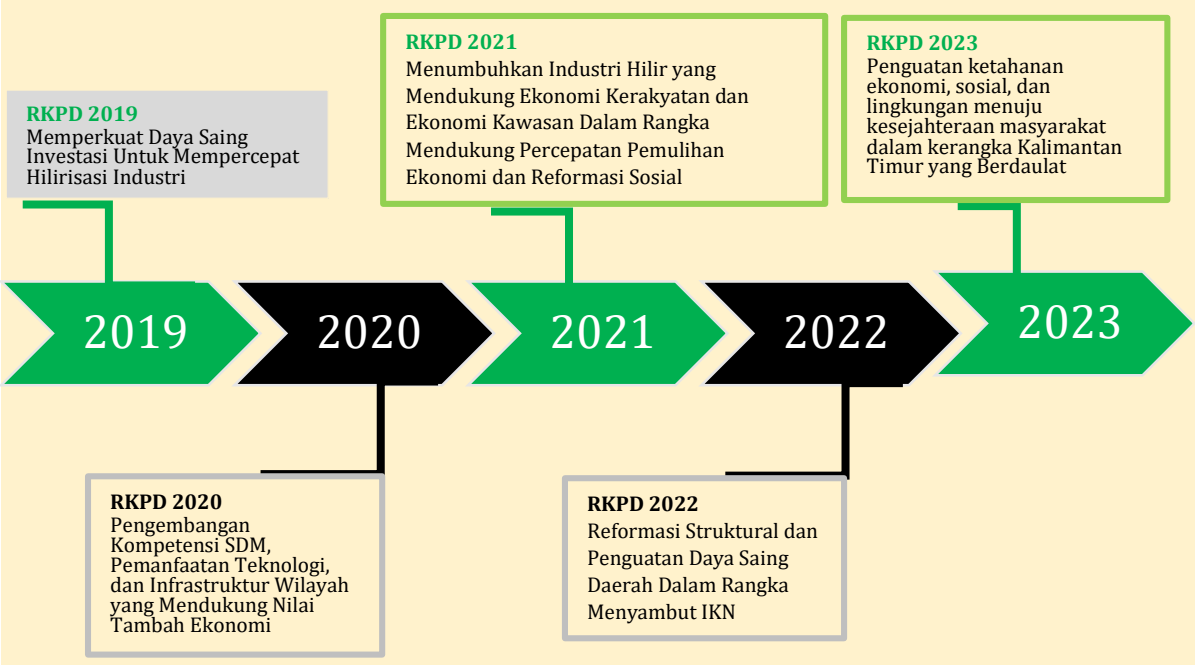

Selanjutnya dari tema pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan hasil analisis evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pertahun, identifikasi isu strategis, dan permasalahan dengan urgensitas tinggi baik di tingkat daerah maupuan tingkat nasional. Oleh karena itu, setiap tema RKPD memiliki fokus sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini.

a. **Tema RKPD Tahun 2019: *"Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri",*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

   1. Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
   2. Peningkatan kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
   3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berkelanjutan;
   4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas sentra produksi, kawasan industri dan outlet; dan

5. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan publik.

b. ***Tema RKPD* Tahun 2020, *"Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi",*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi;
3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan;
4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi;
5. Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah.

c. ***Tema* RKPD Tahun 2021, "Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial",** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut**:**

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19.

d. Tema RKPD Tahun 2022, *Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN"* dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM;
2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;
4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN; dan
5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

e. *Tema* RKPD Tahun 2023, "Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

6.3. Program Unggulan Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program unggulan RPJMD tahun 2019-2023 merupakan amanat gubernur terpilih sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas

pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama.
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat

18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)

36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah

37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan

38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Dalam mewujudkan seluruh program unggulan Gubernur Kalimantan Timur ini, maka dirumuskan program prioritas beserta *major project* daerah sebagai upaya percepatan pencapaian program unggulan Gubernur Kalimantan Timur. Dari strategi pembangunan yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah, maka dapat dijabarkan keterkaitan antara strategi pembangunan, program unggulan Gubernur, program prioritas pembangunan dan *major project* pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Keterkaitan Strategi, Program Unggulan Gubernur, Program Prioritas Pembangunan dan *Major Project* Daerag Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

STRATEGI PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR (DEDICATED)	PROGRAM PRIORITAS	MAJOR PROJECT
Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Bantuan Beasiswa kepada 32.500 siswa melalui KALTIM TUNTAS	Program pengelolaan Pendidikan	Beasiswa Kaltim Tuntas
		Program Pembinaan Perpustakaan	Sekolah Kejuruan …..
Peningkatan daya saing generasi muda	Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga yang telah terbangun
		Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pemberian Penghargaan bagi Atlet dan Pekerja Seni yang Berprestasi ditingkat Nasional dan Internasional
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Puskesmas Kecamatan Menjadi Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

STRATEGI PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR (DEDICATED)	PROGRAM PRIORITAS	MAJOR PROJECT
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
Optimalisasi pengarusutamaan gender	Pemberian 100 Milyar Modal Usaha	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
	Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial (Bukan Prioritas)	Pendirian UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
		Program Penataan Desa	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi (Bukan Prioritas)	Percepatan Pembangunan Perdesaan melalui Bedah IDM (Indeks Desa Membangun)
		Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bukan Prioritas)	
Perluasan kesempatan kerja	Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Bursa kerja Provinsi Kalimantan Timur
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	
		Program pengelolaan pendapatan daerah	

STRATEGI PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR (DEDICATED)	PROGRAM PRIORITAS	MAJOR PROJECT
Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	
Pengembangan industri unggulan provinsi	Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Food Estate
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Sumber Daya Air	
Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Miniranch
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan pada lahan Kritis
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kawasan Pengembangan Ikan Lokal Bernilai Ekonomi Tinggi di areal 3

STRATEGI PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR (DEDICATED)	PROGRAM PRIORITAS	MAJOR PROJECT
	sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata		Danau (Danau Jempang, Semayang, Melintang)
			Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Bernilai Ekonomi Tinggi
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	
Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan	Program Pengelolaan Hutan	
	Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas	Program pelayanan penanaman modal	Pelatihan Agen Perijinan Sektoral, ditujukan bagi penyuluh, Pendamping Sektoral
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	100 Miliar Modal Usaha	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Pengembangan UMKM	
Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII Pengembangan 3 Danau untuk Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Ekowisata di 3 Danau
Pengembangan ekonomi kreatif		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	

STRATEGI PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR (DEDICATED)	PROGRAM PRIORITAS	MAJOR PROJECT
Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan			
Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN			
Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Terpenuhinya kebutuhan air baku & air bersih untuk kota Balikapapan, Bontang, Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Bendungan dan SPAM Marang Kayu, SPAM Kalhol, SPAM Cendana, SPAM Teritip
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Pemberian bantuan Rumah Layak Huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit	Program Kawasan Permukiman	BSPS 1.500 unit per tahun di 10 kab/kota, Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, PPU
Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Penanganan Banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Penanganan Banjir di Kota Samarinda (Karang Mumus) dan Balikpapan (Sungai Ampal)
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal	Program pengelolaan energi terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid di Mahulu, Kukar, Kutim, Kubar, dan Berau
		Program pengelolaan ketenagalistrikan	
Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Revisi Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota
Peningkatan kualitas pengendalian		Program pengendalian pencemaran dan/atau	Implementasi program penurunan emisi
	Pengendalian lingkungan dalam		

STRATEGI PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR (DEDICATED)	PROGRAM PRIORITAS	MAJOR PROJECT
pencemaran dan kerusakan lingkungan	rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara	kerusakan lingkungan hidup	FCPF-CF di Balikpapan, Kukar, Kutim, Berau, Kubar, Mahulu, PPU dan Paser
Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana			
Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa	Program Penataan Organisasi	
Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah			
Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko			
Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

6.4. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan urutan waktu. Arah kebijakan juga menjadi instrumen untuk memetakan kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan agar tetap dalam koridor untuk memecahkan berbagai akar permasalahan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Di tingkat provinsi, di samping akan dioperasionalkan oleh perangkat daerah, arah kebijakan juga harus terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten/Kota.

1. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2019-2023) mendatang diarahkan untuk mendukung: (1) penguatan konektifitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah; (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah ; (3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 6.2

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1	Berau	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa/i
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	Pengembangan proses belajar mengajar berbasis IT
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	Peningkatan pembinaan kepemudaan dalam pembangunan
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan Peningkatan kuantitas dan kualitas Fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	
			Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	
		Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Peningkatan Kapasitas tenaga kerja berkualifikasi khusus
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Pengembangan kawasan alih fungsi lahan pertanian pangan
			Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas	
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Peningkatan kawasan peternakan
			Peningkatan status Kesehatan hewan	
			Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ternak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	
			Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga ditingkat petani
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	Pengembangan status kawasan perkebunan dan legalitas lahan

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan Laut Bernilai Ekonomi Tinggi
			Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
			Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan social (KUPS)
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan	
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Pengembangan UMKM dan Ekonomi kreatif dalam mendukung ekowisata dan agribisnis
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	Fasilitasi permodalan Koperasi dan UKM
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Pengembangan UMKM dan Ekonomi kreatif dalam mendukung ekowisata dan agribisnis
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	Fasilitasi permodalan Koperasi dan UKM
		Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata	
			Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
				penunjang destinasi parawisita
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan transportasi
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
		Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik Pembangunan PLTS Terpusat off-Grid
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pengendalian emisi gas rumah kaca
			Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan penanganan pencemaran air sungai
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi?	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	Peningkatan pelayanan publik berbasis IT
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
2	Kutai Timur	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja	Distribusi alumni STIPER dan STAIS untuk akselerasi desa tertinggal
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT	Mapping kualifikasi guru per daerah dan kebutuhan
			Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	Peningkatan angka melanjutkan SMP di sekolah Kutai Timur (melalui pendekatan persuasif)

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	Program beasiswa pendidikan spesialis dengan perjanjian untuk ditempatkan di wilayah Kutai Timur yang membutuhkan Pemberian insentif dan fasilitasi untuk dokter spesialis
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Memperbaiki kualitas sanitasi lingkungan
				Peningkatan pendekatan budaya untuk mencegah penularan penyakit HIVAIDS
				Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
		Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	
			Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	
			Pengembangan industri berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi	
			Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor	
			Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	
			Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Miniranch
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	Pengembangan Perkebunan Rakyat pada Komoditas Unggulan
			Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit	
			Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	
			Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan hutan yang ramah lingkungan
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan hutan yang ramah lingkungan
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan	
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
		Peningkatan daya saing destinasi unggulan	Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi	
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	
			Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi	
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	Pembangunan PAMSIMAS berbasis Masyarakat
		Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya	Pemanfaatan kondisi geografi dan topografi yang terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
		Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik Pembangunan PLTS Terpusat off-Grid
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	Implementasi program penurunan emisi FCPF-CF
			Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penyusunan RAD SDGs Kabupaten Kutai Timur; Pengelolaan dan Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	Implementasi Program Smart City
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
3	Paser	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja	
			Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	Penyediaan Lahan, penyelesaian permasalahan tanah, dan pengendalian pertanahan untuk fasilitas publik, khususnya bidang pendidikan
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT	Meningkatkan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah dan pemerataan Pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan.
			Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
			Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh	Fasilitasi sarana dan Prasarana pendidikan pembelajaran jarak jauh
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	pengadaan perpustakaan digital perpustakaan daerah
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	Fasilitasi kewirausahaan bagi pemuda dan difabel
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	Pembinaan bagi atlit atau pelatih dan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	Pendistribusian tenaga kesehatan secara merata
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat untuk pengendalian penyakit menular secara cepat
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	Pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Puskesmas dan RS
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	Penguatan sarana dan prasarana puskesmas dan RS sesuai standar
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Mendorong penguatan implementasi dan pengawasan kebijakan PHBS
		Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	
			Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Pengembangan Food Estate
			Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura	Bantuan prasarana pendukung pertanian
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelatihan pengelolaan kelambagaan dan keterampilan petani
		Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas	
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Miniranch
			Peningkatan status Kesehatan hewan	
			Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ternak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	Pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan
			Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan	
			Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
		Peningkatan produksi dan produktivitas	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan dan produksi perikanan tangkap dan budidaya
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	Pengembangan kelompok usaha perhutanan social (KUPS)
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	Penyiapan kajian teknis Penyediaan fasilitasi/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	Penyediaan dan penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur penanaman modal Secara Online
			Pemantauan komitmen perizinan	Pelaksanaan pemantauan komitmen perizinan
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	Mengoptimalkan kualitas pelayanan angkutan umum.
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana air baku	Meningkatkan penanganan, pengelolaan dan mengkonversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
		Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
		Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik Pembangunan PLTS Terpusat off-Grid
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah
			Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mengendalikan Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan pemanfaatan laboratorium LH
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
4	Kutai Kartanegara	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	
			Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas	
			Pengembangan Kawasan Peternakan	
			Peningkatan status Kesehatan hewan	
			Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ternak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	
			Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit	
			Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
		Peningkatan produksi dan produktivitas	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan	
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
		Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata	
			Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi	
		Penggembangan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, kriya, film, dan musik	
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana air baku	
			Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	
		Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN	
			Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
		Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	
			Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
5	Kutai Barat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
			Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT	
			Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
			Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh	
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	Peningkatan sarana perpustakaan berbasis IT
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	Peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	Peningkatan kualitas pemuda berprestasi dibidang olahraga

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	Peningkatan kapasitas aparatur sumber daya kesehatan
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan manusia, baik itu dari sisi medis (obat-obatan dan sarana prasaran penunjang kesehatan lainnya) ataupun dari sisi non medis (dari lingkungan masyarakat itu sendiri)
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penaganan wabah penyakit menular
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
		Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	
			Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	Peningkatan SDM aparatur kampung
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	meningkatnya kapasitas dan kopetensi tenaga kerja
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	Intensifikasi potensi pendapatan asli daerah sesuai dengan kewenangannya
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas	Peningkatan kapasitas produksi peternakan
			Pengembangan Kawasan Peternakan	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			Peningkatan status Kesehatan hewan	
			Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ternak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	Peningkatan kapasitas produksi perkebunan
			Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit	
			Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Peningkatan pengelolaan penangkapan ikan yang berkelanjutan
			Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	Peningkatan Pengembangan kawasan budidaya air tawar
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	Kebijakan satu kampung minimal 10 ha hutan adat
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	Penguatan akses masyarakat terhadap lahan dengan pengembangan hutan adat
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan	
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Peningkatan kualitas SDM koperasi dan pelaku UMKM
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	Peningkatan Mutu Produk UMKM

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	Pengembangan pola kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan koperasi dan UMKM Optimalisasi fungsi UPBD bergulir sebagai lembaga non perbankan dalam pembiayaan UMKM mempermudah akses permodalan UMKM
		Penggembangan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, kriya, film, dan musik	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis bahan lokal, pendidikan dan pelatihan kewirausahawan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penguatan implementasi RTR sebagai basis pembangunan daerah dan mendorong investasi di daerah
		Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	
			Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
6	Penajam Paser Utara	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung Perpustakaan (4 Kecamatan)
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda dalam pembangunan Pengembangan kewirausahaan dan

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
				keunggulan kompetitif usaha
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Pengembangan lingkungan sehat
		Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan	
		Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	Penguatan kelembagaan BUMDES
			Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Mengembangkan kebijakan perlindungan lahan dan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan
			Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura	Mewujudkan mekanisasi pertanian yang tangguh dan mandiri
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	Peningkatan produksi bibit dan benih ternak / pakan ternak berkualitas	
			Pengembangan Kawasan Peternakan	
			Peningkatan status Kesehatan hewan	
			Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ternak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	
			Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit	
			Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Peningkatan Kapasitas pelaku usaha bidang pertnian
			Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	Meningkatkan investasi di kawasan industri
			Pemantauan komitmen perizinan	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Penguatan kelembagaan koperasi
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	Peningkatan stimulan UMKM
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan Meningkatkan pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana jalan
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN	Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW
			Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim	
			Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menggalakkan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengawasan, pemulihan dan penegakan hukum dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
			Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
7	MAHAKAM ULU	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja	
			Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT	
			Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
			Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh	
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	
		Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa	
			Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan	
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan indutri hilir	
			Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	
			Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi	
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan dan peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
		Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi?	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
8	Balikpapan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	Mengembangkan Potensi dan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Memberikan Kemudahan Akses Layanan Kesehatan Seluruh Masyarakat
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja Meningkatkan Perluasan Lapangan Pekerjaan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	Mengoptimalkan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
			Pengembangan industri berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif
			Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor	
			Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	
			Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
		Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
			Pengelolaan dan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu	
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
			Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan	
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata	
			Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi	Revitalisasi Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Penggembangan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, kriya, film, dan musik	
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	Peningkatan Kualitas Keselamatan Perhubungan
			Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Pembangunan Jalan untuk mendukung fungsi Kawasan Strategis Pemeliharaan Jalan Provinsi di Kota Balikpapan
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	Penyiapan dan Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional
		Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
		Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya	Pengendalian Banjir melalui Peningkatan Saluran Drainase
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN	
			Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas rencana tata ruang kota
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	Memperkuat Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
9	Samarinda	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	Peningkatan minat baca masyarakat
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	Mengoptimalkan penggunaan fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif bagi atlet berprestasi
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Kesehatan
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	Peningkatan Promosi dan Prevensi kesehatan
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Peningkatan kualitas, produktivitas serta kesempatan kerja
				Menigkatkan kualitas hubungan industrial
				Meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	pendataan ulang dan verifikasi WP dan objek pajaknya
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan dan peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Melaksanakan Penumbuhan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
		Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata	
			Peningkatan layanan amenitas Destinasi Pariwisata Provinsi	Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan perbaikan sarpras, promosi wisata
		Penggembangan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kuliner, fashion, kriya, film, dan musik	
		Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan	Mewujudkan ketersediaan sistem-sistem jaringan angkutan umum dan sarana transportasi yang berkualitas
		Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan dan pemeliharaan jalan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	Penyediaan sarana jaringan air bersih

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat
				Mewujudkan ketersediaan prasarana pengendali banjir yang berkualitas
		Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN	
			Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
				Meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas ekonomi yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi?	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	Peningkatan kualitas data dan informasi berbasis IT
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	
10	Bontang	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	Pembebasan Biaya Pendidikan serta Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Belajar Siswa
			Pengembangan perpustakaan berbasis IT	Peningkatan layanan perpustakaan berbasis TI
		Peningkatan daya saing generasi muda	Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT	

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif dan fasilitasi digitalisasi ekonomi
				Peningkatan kualitas pembinaan pemuda dan atlit
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis	Penataan SDM Kesehatan
			Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pemantapan sarana dan prasarana layanan kesehatan
			Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya	Peningkatan akreditasi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)
			Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular	Peningkatan kesiapan layanan/penanganan wabah (new emerging diseases)
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penerapan PHBS
		Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan	
		Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Pengembangan jaringan pembinaan tenaga kerja terampil
			Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Peningkatan fasilitasi pelatihan keterampilan tenaga kerja
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	Penguatan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah
			Pengurangan potensi kebocoran pajak dari usaha/badan usaha yang harta dan penghasilannya dibawa keluar Kaltim	
		Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah	Pengembangan daya saing produk unggulan daerah
			Pengembangan industri berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi	
			Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor	Pembinaan IKM
			Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor	
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produktivitas pertanian perkotaan

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Peningkatan produktivitas perikanan tangkap
			Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	Peningkatan Produktivitas perikanan budidaya
			Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	
		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara	Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi
			Peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui pelaksanaan investasi berbasis elektronik	
			Pemantauan komitmen perizinan	
			peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal	
		Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM	Peningkatan dan pemulihan produktivitas IKM, Usaha Mikro dan koperasi
			Pengembangan platfom pasar koperasi dan UKM berbasis digital	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM	
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM	
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	
		Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Mengembangkan kerjasama kelembagaan kebencanaan
			Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	Mengembangkan kawasan permukiman dan masyarakat tangguh bencana
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT	Penguatan sarana dan prasarana layanan publik berbasis teknologi Informasi

No.	KABUPATEN /KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman	

6.5. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *missleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2016-2036, dan berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pengembangan kawasan untuk lima tahun kedepan pada Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Tabel 6.3

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

No.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industry pengolahan, pengembangan direct call terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.
2.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, *oleo chemical*, dan industri turunannya.
3.	Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir

6.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS								
	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia								
	Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK	77%	601.031.315.696	82%	661.134.447.265	85%	727.247.891.992	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Perpustakaan dan tenaga Perpustakaan sesuai standar serta pembudayaan kegemaran membaca	6,89%	2.253.800.000	9,19%	3.134.848.350	11,49%	483.685.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang mendapatkan medali	66,60%	104.683.770.000	72,20%	37.174.404.580	76,92%	41.330.542.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas	0,80%	2.296.260.000	1%	12.115.000.000	1,20%	16.720.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3 Kab/Kota	**1.790.115.000,-**	3 Kab/Kota	**400.000.000,-**	3 Kab/Kota	**1.800.000.000,-**	Dinas Kesehatan
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	6 Kab/Kota	89.592.878.967,- -	7 Kab/Kota	65.805.848.754,-	8 Kab/Kota	**92.000.000.000**	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi sesuai standar (%)	80%	17.510.851.650	80%	21.660.000.000	80%	23.826.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Minimal terakreditasi Utama	64%	3.000.000.000	96%	5.412.331.760	100%	457.710.000	Dinas Kesehatan
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	20%	**3.448.642.993**	30%	**3.566.007.930**	40%	**3.800.000.000**	Dinas Kesehatan
	Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Implementasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**	1 Kebijakan	999.325.201	1 Kebijakan	2.450.000.000	1 Kebijakan	2.900.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
	Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatkan Jumlah Bumdes yang Aktif (Bumdes)	30 Desa	3.019.466.000	**35 Desa**	3.076.446.000	**45 Desa**	3.076.446.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	JUMLAH DESA YANG MAMPU MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA SECARA OPTIMAL (DESA)	30 Kab	83.700.000	35 Kab	100.000.000	45 Kab	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
02.07.03			70%	749.867.742	20%	7.357.875.000	20%	7.357.875.000	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Yang telah dilatih	31%	124.000.000	31%	2.166.675.000	31%	2.166.675.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN								
	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas								
	Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah								
	KEUANGAN								
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	100%	1.145.950.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%) 2. Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	100%; 93.519 wajib pajak	10.043.125.000	100%; 108.243 wajib pajak	9.925.000.000	100%; 124.295 wajib pajak	9.925.000.000	Badan Pendapatan Daerah
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	80 persen	20.594.756.500	80 persen	20.594.756.500	80 persen	20.594.756.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	5%	955.984.000	5%	1.086.076.000	5%	1.236.027.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	2 industri	1.150.000.000	2 industri	1.322.500.000	2 industri	1.520.875.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)								

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan (Ha) 2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian (Unit)	7100/6 Ha/unit	6.189.757.500	8100/7 Ha/unit	6.020.500.000	8700/7 Ha/unit	6.020.500.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	271356 /273070 ton	24.520.588.200	279681/283592 ton	12.329.500.000	289846/292383 ton	12.329.500.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
03.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1) Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina 2) Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina	85/4 orang/Lembaga	6.149.929.725	120/4 orang/Lembaga	3.714.340.000	150/4 orang/Lembaga	3.032.426.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah miniranch yang teregister (unit)	24	9.385.337.500	49	5.500.000.000	30	5.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka kelahiran Sapi	20,05%	11.316.262.500	21%	9.925.000.000	22%	10.450.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	50%	3,695,680,000	60%	4,275,000,000	70%	4,850,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Penerapan system jaminan mutu dan kemanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) %	12		13		14		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079 Juta Ton CO2eq	1.219.000.000	4,067 Juta Ton CO2eq	1.220.000.000	4,044 Juta Ton CO2eq	1.737.265.000	Dinas Perkebunan
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30/1.425.580 Kelompok Tani/Ha	7.995.000.000	30/1.462.645 Kelompok Tani/Ha	7.368.900.000	30/1.500.674 Kelompok Tani/Ha	8.723.782.000	Dinas Perkebunan
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17136849,15 ton	6.005.000.000	18126490,20 ton	7.600.000.000	18313874,25 ton	8.000.000.000	Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
03.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	3.850.000.000	1 Lembaga	4.148.891.000	1 Lembaga	5.172.963.000	Dinas Perkebunan
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	784.000.000	35 Perusahaan	950.000.000	35 Perusahaan	1.290.066.000	Dinas Perkebunan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	289.048 Ha	3.629.995.000	297.805,90 Ha	4.757.100.000	297.805,90 Ha	4.757.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	158938 ton	21.616.945.000	162593 ton	9.756.575.000	166170 ton	9.756.575.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	161216 ton	5.280.000.000	164441 ton	5.057.800.000	167730 ton	5.057.800.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1) Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM) 2) Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan 5Pemasaran (IUP)	20 UKM 40 IUP	1.198.000.000	20 UKM 30 IUP	1.663.750.000	20 UKM 30 IUP	1.559.520.882	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	20.646.577.500	32000 Ha	20.646.577.500	32000 Ha	20.646.577.500	Dinas Kehutanan
03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu	4950000/7 M3/ton	241.551.647.450	5000000/7, 5 Juta /ton	241.551.647.450	5050000/8 Juta /ton	241.551.647.450	Dinas Kehutanan
	Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
		Waktu penyelesaian proses perizinan	12 Hari	1.830.000.000	11 Hari	1.830.000.000	10 Hari	1.830.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100%	2.000.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.570.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02.17.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1%	1.146.721.600	1%	1.206.721.600	1%	1.266.721.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2. Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	10	1.146.721.600	10	1.206.721.600	10	1.266.721.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	3	1.146.721.600	3	1.206.721.600	3	1.266.721.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan (destinasi)	2 destinasi	3.050.000.000	3 destinasi	3.050.000.000	3 destinasi	3.050.000.000	Dinas Pariwisata
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya target jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi (%)	90	1.600.000.000	95	1.600.000.000	97	1.600.000.000	Dinas Pariwisata
	MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN								
	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar								
	Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	85%	12.124.942.825	87%	5.005.777.515	88%	5.005.777.515	Dinas Perhubungan
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	512 kasus	15.524.035.275	427 kasus	8.855.489.545	342 kasus	8.855.489.545	Dinas Perhubungan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	63,46%	682.585.637.600	68,84%	607.000.000.000	72,62%	607.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64%	44.981.874.700	66,64%	70.254.928.975	68,64%	78.599.290.651	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73.69 %	256.652.331.562	76,00%	226.499.058.643	78.91 %	260.822.758.307	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	58128 Unit	42.628.242.045	53128 Unit	68.225.765.800	48128 Unit	130.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	0 meter	-	3020 meter	75.499.686.214	3455 meter	86.940.919.436	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	77,10%	30.199.834.486	87,00%	34.776.367.774	87,00%	34.776.367.774	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)	6,08%	2.219.129.000	7,34%	3.441.301.000	8,40%	3.441.301.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1135000 KK	46.921.080.638	1165000 KK	55.251.527.000	1200000 KK	55.251.527.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN								
	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup								
	Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Lahan (IKL)	58,03/83,66/83,61/79,81	4.840.000.000	58,13/83,76/83,71/79,86	5.462.000.000	58,23/83,86/83,81/79,91	4.825.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	4 desa/kelurahan	3.013.732.010	12 desa/kelurahan	4.270.920.000	13 desa/kelurahan	4.269.920.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Perangkat Daerah
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK								
	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik								
	Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas								
	SEKRETARIAT DAERAH								
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Prosentase Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik	71%	1.400.000.000	79%	1.357.460.000	89%	1.493.206.000	Sekretariat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien								
	SEKRETARIAT DAERAH								
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Prosentase Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	77%	1.947.315.881	79%	2.302.775.000	81%	2.533.052.500	Sekretariat Daerah
		Prosentase Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan	92%	946.684.167	95%	2.291.215.000	97%	2.520.336.500	Sekretariat Daerah
	Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel								
	SEKRETARIAT DAERAH								
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Prosentase Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
	INSPEKTORAT DAERAH								
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Reviu Laporan Keuangan daerah	64%	6.500.000.000	74%	10.104.090.400	100%	10.150.000.000	Inspektorat

BAB 7
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
		(Rp)	(Rp)
2	**BELANJA**	**10.669.670.000.000**	**10.683.921.000.000,00**
2.01	**Belanja Tidak Langsung**	**6.526.656.978.075**	**6.171.964.627.233,82**
2.01.01	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	1.922.832.701.353,82
2.01.02	Belanja Bunga	-	
2.01.03	Belanja Subsidi	-	
2.01.04	Belanja Hibah	765.270.838.400	223.050.003.062,00
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	16.070.550.000,00
2.01.06	Belanja Bagi Hasil	2.579.253.034.454	1.911.308.336.000,00
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	1.372.559.387.938	1.598.703.036.818,00
2.01.08	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	500.000.000.000,00
2.02	**Belanja Langsung**	**4.143.013.021.925**	**4.511.956.372.766**
2.02.01	Belanja Pegawai	292.637.422.329	323.879.356.195
2.02.02	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	2.870.659.107.195
2.02.03	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.317.417.909.377

Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021-2023

KODE REK.	URAIAN	PROYEKSI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5
5	**BELANJA**			
5.01	**BELANJA OPERASI**	**5.435.615.961.300**	**4.947.826.000.752**	**5.679.145.124.766**
5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962.318.109	2.208.496.026.836	2.436.440.051.011
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.706.329.353	2.463.786.933.774	2.938.722.593.993
5.01.05	Belanja Hibah	274.429.463.838	259.899.731.581	286.724.588.850
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.517.850.000	15.643.308.562	17.257.890.912
5.02	**BELANJA MODAL**	**1.984.395.175.358**	**1.619.893.056.651**	**1.649.975.004.390**
5.02.01	Belanja Modal Tanah	38.955.999.999		
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268.114.492		
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717.085.019		
5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	757.752.039.798		
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050		
5.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**251.933.363.342**	**251.933.363.342**	**200.000.000.000**
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342	251.933.363.342	200.000.000.000
5.04	**BELANJA TRANSFER**	**3.944.241.500.000**	**4.181.511.890.000**	**4.607.500.000.000**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.607.751.500.000	3.107.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000	1.573.760.390.000	1.500.000.000.000
	Jumlah Belanja	**11.616.186.000.000**	**11.001.164.310.745**	**12.136.620.129.156**

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5(lima) tahun kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan)

sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
    1. tenaga kerja;
    2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    3. pangan;
    4. pertanahan;
    5. lingkungan hidup;
    6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    9. perhubungan;
    10. komunikasi dan informatika;
    11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    12. penanaman modal;
    13. kepemudaan dan olah raga;
    14. statistik;
    15. persandian;
    16. kebudayaan;
    17. perpustakaan; dan
    18. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
    1. kelautan dan perikanan;
    2. pariwisata;
    3. pertanian;
    4. kehutanan;

5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 7.3 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1.01	Pendidikan				818,130,065,281		674,137,962,253		606,548,134,096		667,202,947,505		733,923,242,256	
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	159,436,053,840	82.67 %	196,953,031,600							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	18,063,965,280	6 unit	13,285,741,891							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	6,126,093,048	92%	4,119,832,576							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	78%	2,527,163,297	81%	1,838,014,380							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	60%	65%	13,020,210,600	70%	7,120,163,223							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	95%	96%	13,005,848,499	97%	5,125,563,951							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah	75%	77%	6,712,284,057	79%	7,529,788,151							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		dan khusus												
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi	791 Orang	6500 Orang	141,168,265,841	13000 Orang	161,416,709,554							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	635 Siswa	2500 Siswa	11,556,406,000	2500 Siswa	4,732,133,400							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68.23%	70%	224,800,740,471	73%	97,452,029,093							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK	68.23%	70%	184,856,281,605	73%	123,560,246,550							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulum Berbasis Agama	72 Sekolah	85 Sekolah	-	100 Sekolah	122,714,000							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	30 SMK	40 SMK	-	55 SMK	23,426,575							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh	0 persen	0 persen	-	90 persen	31,621,292,496							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80.26%	1,055,895,363	82.67 %	1,479,603,547							UPTD Taman Budaya
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat	6 unit	6 unit	630,134,458	6 unit	1,207,620,650							UPTD Taman Budaya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		waktu												
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	147,983,035	92%	94,465,420							UPTD Taman Budaya
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80.26%	807,180,429	82.67 %	881,134,815							UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	25,976,565,130	6 unit	15,012,029,733							UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	-	92%	562,420,649							UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	90%	91%	8,238,994,327	92%	-							UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)		0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK		0	0	0	0	77%	601,031,315,696	82%	661,134,447,265	85%	727,247,891,992	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat pengembangan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan		0	0	0	0	70%	5,516,818,400	86%	6,068,500,240	90%	6,675,350,264	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pendidikan Khusus												
1.02	Kesehatan				177,686,417,254		266,010,542,926		184,814,898,085		215,592,076,262		225,865,102,743	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	2,582,899,900	71%	2,845,186,098							Dinas Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,353,499,609	5 unit	1,329,030,030							Dinas Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25.64%	30%	1,131,774,773	40%	626,346,992							Dinas Kesehatan
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	67%	972,105,710	68%	606,273,800							Dinas Kesehatan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	98%	98.50%	2,765,224,803	99%	928,094,255							Dinas Kesehatan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	10%	30%	5,862,383,136	50%	3,571,465,294							Dinas Kesehatan
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	87.50%	87.50%	6,823,493,973	90%	33,096,521,658							Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	50%	60%	1,331,193,814	70%	519,451,296							Dinas Kesehatan
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	724,629,518	6 Kab/Kota	9,377,705,160							Dinas Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	6%	15%	2,102,086,948	43%	1,105,333,088							Dinas Kesehatan
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	60 Fasyankes	834,871,680	70 Fasyankes	9,750,966,037							Dinas Kesehatan
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	361,944,737	6 Kab/Kota	391,934,201							Dinas Kesehatan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100%	100%	-	100%	-							UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	1,289,684,303	70%	1,535,623,323							UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1,611,615,427	3 unit	1,384,026,635							UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100%	357,909,827	100%	304,643,600							UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	%	15%	4,945,673,670	0%	-							UPTD Balai Latihan Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	60 Fasyankes	813,467,000	70 Fasyankes	262,510,000							UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	3,656,898,874	80%	2,210,737,843							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	2,849,732,024	3 unit	1,355,344,810							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	65%	752,250,249	70%	249,255,773							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	98.50%	-	99%	-							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	5554 SPM	70 SPM	5,018,694,528	80 SPM	839,408,792							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	0%	50%	-	60%	-							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	0%	100%	-	100%	-							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat kepuasan pemangku	60%	65%	834,871,667	70%	1,179,532,657							UPTD Laboratorium

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Perkantoran	kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)												Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1,231,991,766	3 unit	5,685,575,600							UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	65%	317,863,660	70%	14,654,000							UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80%	82%	-	85%	-							UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	0%	100%	299,059,425	0%	-							UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	74%	100%	-	100%	-							UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	7,160,161,901	70%	4,290,767,815							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1,954,460,219	3 unit	2,270,151,583							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%	75%	1,945,720,769	80%	722,185,410							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	80%	82%	12,750,000	84%	667,740,396							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%	100%	-	100%	617,935,575							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%	80%	2,342,733,648	90%	228,120,878							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	1%	100%	8,540,000	100%	51,215,800							Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78%	80%	677,468,550	82%	785,234,500							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67%	69%	35,147,000	70%	242,721,887							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis	7%	6%	14,977,639,531	5%	5,496,335,906							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	75%	85%	21,835,153,513	90%	9,687,509,697							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	75%	85%	959,343,105	90%	6,023,577,930							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	sakit mata													
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	70%	80%	-	85%	145,297,476							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	75%	85%	-	90%	100,000,000							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit	76%	78%	-	80%	5,625,422,692							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.105	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	3.1	3.15	-	3.2	77,778,357							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.106	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	80%	82%	-	84%	230,255,050							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.107	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	65%	75%	-	78%	82,227,140							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A	100%	100%	-	100%	-							RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78.42%	78.60%	-	79%	429,250,000							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat	80 unit	80 unit	-	85 unit	1,057,514,000							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		waktu												Balikpapan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100%	-	100%	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%	72%	37,989,000	72.50 %	191,922,358							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%	100%	-	100%	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit	78%	80%	38,301,774,005	83%	77,410,325,936							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%	91%	-	92%	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan	0%	0%	-	40%	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan	78.42%	78.60%	-	79%	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian proper hijau	80 Sertifikat	80 Sertifikat	-	85 Sertifikat	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	76%	80%	15,543,841	85%	9,572,333,893							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	0 Instalasi / unit	18 Instalasi / unit	-	18 Instalasi / unit	-							RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70 Nilai	74 Nilai	8,104,772,867	77 Nilai	11,055,677,402							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	6 unit	-	7 unit	231,321,693							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	77%	825,322,249	81%	144,375,596							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	68%	106,397,350	71%	-							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	65%	70%	972,252,933	75%	37,625,000							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	40%	50%	366,922,805	60%	30,000,000							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	65%	70%	15,925,138,274	75%	6,837,462,578							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS Yang Berfungsi dengan Baik	90%	90%	86,573,200	90%	462,987,686							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	58%	66.67%	-	75%	347,830,000							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan	2000000000 Rupiah	2000000000 Rupiah	-	1000000000 Rupiah	23,981,400							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	83%	85%	-	90%	188,246,000							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	76%	80%	-	85%	253,646,000							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat`	0%	95%	-	95%	-							Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan						0%	23,295,744,740	0%	23,686,944,740	0%	26,473,892,240	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)						78%	54,400,965,844	79%	65,911,314,711	79%	69,913,614,711	Dinas Kesehatan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Kesehatan (RS AWS)						100%	5,764,357,950	100%	8,263,000,000	100%	9,019,000,000	Dinas Kesehatan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Kesehatan (RS Kanujoso)						79%	-	80%	-	80%	-	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi pelayanan rumah sakit, 2. Presentase kelengkapan sarana prasaran dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit, 3. Presentasi sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar, 4. Nilai standar pelayanan minimun rumah sakit		0	0	0	0	79%	-	80%	-	80%	-	Dinas Kesehatan
		1. Presentase Stunting, 2.Jumlah Kematian Ibu, 3. Jumlah Kematian Bayi		0 %/Jiwa /Jiwa	0	0 %/Jiwa /Jiwa	0	26,5/80/533 %/Jiwa /Jiwa	68,770,840,501	26/75/509 %/Jiwa/Jiwa	69,578,227,262	25,5/70/484 %/Jiwa /Jiwa	74,721,524,503	Dinas Kesehatan
		Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS ASW)		0	0	0	0	80%	17,510,851,650	80%	21,660,000,000	80%	23,826,000,000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanujoso).		0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	-	0 Sertifikat	-	1 Sertifikat	-	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		0.8	0	0.85	5625422692	90%	-	95%	-	100%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan		87.50 %	6823493973	0.9	33096521658	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Minimal terakreditasi Utama		0.15	2385297500	0.43	2500000000	44%	3,000,000,000	61%	5,412,331,760	78%	457,710,000	Dinas Kesehatan
		Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)		0	0	0	0	90%	44,500,000	91%	7,305,441,289	92%	7,263,141,289	Dinas Kesehatan
1.02. 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 (5 Tenaga Promotif dan Preventif, 4 Tenaga Kuratif) Tenaga Kesehatan		0.45	0	0.55	0	75%	-	60%	-	70%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya		0	0	0	0	20%	11,351,003,000	30%	11,720,591,500	40%	12,017,995,000	Dinas Kesehatan
		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		0.6	0	0.6	0	60%	-	60%	-	60%	-	Dinas Kesehatan
		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		0.6	0	0.6	0	60%	-	60%	-	60%	-	Dinas Kesehatan
		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (RS Kanujoso)		0.6	0	0.6	0	60%	-	60%	-	60.0%	-	Dinas Kesehatan
		Presentasi Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (Atma Husada)		0	0	0	0	85%	3,000,000	86%	1,274,225,000	86.5%	1,314,225,000	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)		0	0	0	0	85%	673,634,400	85%	700,000,000	85%	770,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial		0	0	0	0	90%	-	92%	-	94%	-	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melaksanakan PHBS		0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	3 Kab/Kota	-	3 Kab/Kota	-	3 Kab/Kota	-	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS		0 Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	3 Kab/Kota	-	3 Kab/Kota	-	3 Kab/Kota	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Capaian Pemenuhan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (RS AWS)		0	0	0	0	75%	-	80%	80,000,000	85%	88,000,000	Dinas Kesehatan
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				2,367,045,415,846		2,776,516,144,007		2,905,357,637,187		3,284,976,833,612		3,358,066,491,226	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	11,923,397,888	86%	14,907,004,190							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	7 unit	7 unit	4,985,333,802	7 unit	9,039,489,761							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	1,625,574,755	60%	1,613,961,640							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%	75%	806,995,030	79%	420,702,051							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	52.85%	54.30%	412,831,639,257	58.88 %	280,814,038,814							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	7922 L/detik	7922 L/detik	140,591,772,456	8322 L/detik	83,009,884,974							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan	60.23%	62.23%	203,554,488,949	65.23 %	266,845,708,139							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	20456 Orang	20846 Orang	3,180,923,691	24066 Orang	2,667,597,716							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	63.19%	64.87%	5,564,232,903	75.34 %	5,084,754,765							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	1,028,997,270	86%	2,467,873,339							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	6,223,444,575	3 unit	2,155,692,603							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	807,909,044	60%	562,353,805							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I	52%	52%	53,042,344,725	58%	51,749,903,976							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	955,239,959	86%	3,227,330,279							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	5,388,216,100	3 unit	5,894,447,073							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Wilayah II
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	847,710,403	60%	416,997,209							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II	52%	52%	54,830,290,039	58%	57,750,257,711							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	1,377,835,983	86%	3,162,615,371							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1,156,425,221	3 unit	1,590,313,418							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	834,482,777	60%	639,891,229							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III	52%	52%	31,381,176,800	58%	45,283,913,000							UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Sekretariat)						70%	86,011,476,604	75%	107,214,005,060	80%	114,315,956,114	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum I						100%	6,450,000,000	100%	7,880,000,000	100%	7,880,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum II						100%	5,913,000,000	100%	5,913,000,000	100%	5,913,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum III						100%	8,212,402,000	100%	6,430,402,000	100%	6,430,402,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum (Lab)						85%	3,588,169,860	90%	3,668,905,602	95%	3,803,358,403	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata		0.04	0	0.24	0	48%	158,494,198,698	84%	17,626,422,627	100%	20,358,314,225	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung Yang Tertata		0.2051	2.43949E+11	0.3974	3.34597E+11	65.38%	263,173,550,780	88.46 %	43,475,575,490	100%	50,033,892,258	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peluang Kerja Bagi Masyarakat Jasa Konstruksi						31.28%	5,335,166,000	33.72 %	5,367,701,984	35.92 %	5,423,423,595	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		0	21650709702	0	25665233156	77.10%	30,199,834,486	87.00 %	34,776,367,774	87.00 %	34,776,367,774	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi		0.543	994,570,504,517	0.5888	1,329,828,399,770	63.46%	2,029,191,334,197	68.84 %	2,661,831,219,624	72.62 %	2,661,831,219,624	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan		0.5459	15012400000	0.6264	30613325000	64.64%	44,981,874,700	66.64 %	70,254,928,975	68.64 %	78,599,290,651	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA		0	148,924,820,000	0	216,507,097,018	73.69 %	256,652,331,562	76.00 %	226,499,058,643	78.91 %	260,822,758,307	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak		0.8089	0	0.8135	0	82.26%	1,141,298,300	84.53 %	7,360,030,563	87.27 %	8,566,129,789	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik		0.6757	0	0.6784	0	68.38%	100,000,000	69.74 %	5,266,529,056	71.37 %	6,458,459,050	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik		0 meter	0	0 meter	0	0 meter	-	3020 meter	75,499,686,214	3455 meter	86,940,919,436	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum II						100%	5,913,000,000	100%	5,913,000,000	100%	5,913,000,000	Semua Perangkat Daerah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				94,506,432,033		101,925,867,049		46,619,618,700		110,109,225,370		178,000,000,000	
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	51722 unit	46722 unit	43,046,082,033	41722 unit	48,306,411,418							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman		0	0	0	0	14.29	134,706,700	0%	-	0%	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Rakyat
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		63728 Unit	16526491300	63128 Unit	29627666981	62028 Unit	42,628,242,045	61028 Unit	68,225,765,800	59928 Unit	130,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyelenggaraan SPM Perumahan		0	0	0.0333	639700450	3.33%	654,666,945	3.33%	893,960,000	3.33%	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU Permukiman		0.08	34933858700	0.0548	23352088200	3.09%	3,202,003,010	3.18%	40,989,499,570	3.29%	47,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				24,476,447,285		21,731,387,891		3,013,732,010		4,270,920,000		4,269,920,000	
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	3,687,840,657	85%	4,739,702,377							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	2,724,079,877	3 unit	695,508,992							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25.64%	30%	1,571,791,502	40%	444,677,765							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77.69%	78%	107,197,200	78.50 %	142,223,100							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	85%	1,225,463,096	%	339,056,200							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli	0%	80%	1,525,931,481	83%	497,488,269							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah	persen	80 persen	1,295,092,296	83 persen	247,962,800							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran	%	60%	1,012,114,787	70%	433,437,687							Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	58%	59%	802,922,347	60%	947,810,568							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 Unit	5 Unit	186,269,280	5 Unit	438,420,370							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	60%	1,119,718,843	60%	532,014,749							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	54.03%	56%	322,795,645	58%	692,935,580							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	507 Konflik	102 Konflik	668,093,038	102 Konflik	764,609,750							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	25%	5%	683,467,980	5%	739,158,400							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	72.86%	73.50%	2,604,075,677	74.50 %	1,234,663,000							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	587 Ormas	100 Ormas	769,061,683	120 Ormas	772,061,190							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,732,216,393	85%	2,265,461,030							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	4 Unit	4 Unit	240,535,600	4 Unit	1,468,255,750							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	17.39%	644,246,195	17.39 %	182,772,243							Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 Nilai	66 Nilai	459,784,000	68 Nilai	238,635,535							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	85 Persen	460,823,261	85 Persen	3,480,598,030							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana	12 Desa / Kelurahan	0 Desa / Kelurahan	329,044,200	8 Desa / Kelurahan	283,023,838							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 Persen	20 Persen	303,882,247	40 Persen	150,910,668							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan						0%	-	0%	-	0%	-	Semua Perangkat Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian penegakan Perda dan Pergub, Ganguan ketertiban umum ketentraman masyarakat serta Satlinmas yang terlatih dan Poskamling						0%	-	0%	-	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						0%	-	0%	-	0%	-	Semua Perangkat Daerah
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kualitas Hak-Hak Politik Masyarakat						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Daerah Rawan Bencana						0%	-	0%	-	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana						4 desa/keluharan	3,013,732,010	12 desa/keluharan	4,270,920,000	13 desa/keluharan	4,269,920,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dokumen Perencanaan yang tersusun						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kelancaran dan pelaksanaan dan tugas Satpol PP						0%	-	0%	-	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Badan Penanggulangan Bencana						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial				20,044,896,749		26,661,631,467		63,253,581,905		63,476,641,000		63,650,000,000	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	12%	12%	2,475,013,372	12%	3,249,797,394							Dinas Sosial
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	12 unit	1,114,826,683	12 unit	2,354,081,075							Dinas Sosial
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	12%	1,387,532,766	12%	1,697,190,402							Dinas Sosial
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	11%	224,598,800	11%	364,754,797							Dinas Sosial
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	45 Orang	315,471,000	80 Orang	69,049,100							Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	255 Orang	121,584,000	1275 Orang	158,108,200							Dinas Sosial
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	0 Orang	32 Orang	625,206,300	435 Orang	742,108,125							Dinas Sosial
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	0 Orang	45 Orang	391,501,800	120 Orang	182,985,800							Dinas Sosial
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menguatnya kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan keberfungsiannya	0 Lembaga	5 Lembaga	340,350,500	5 Lembaga	301,627,000							Dinas Sosial
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0 Orang	520 Orang	1,455,546,100	2250 Orang	1,163,642,072							Dinas Sosial
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	1518 Orang	300,834,200	2000 Orang	711,625,470							Dinas Sosial
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	0 unit	1 unit	162,095,360	1 unit	130,969,800							Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	795,368,385	100%	1,007,127,715							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	85 unit	381,859,957	87 unit	604,833,024							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	65,644,500	100%	194,281,420							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	2,166,724,528	1 Panti	3,497,503,285							UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	738,634,501	100%	969,284,377							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	unit	80 unit	727,818,347	80 unit	1,095,890,966							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	66,000,000	100%	163,224,202							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,210,853,207	1 Panti	1,627,761,648							UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	85%	760,013,026	100%	983,498,758							UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat	0 unit	80 unit	705,844,468	80 unit	684,913,128							UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		waktu												
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	116,830,399	100%	75,819,709							UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,476,678,461	1 Panti	1,569,311,373							UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100%	707,447,491	100%	1,088,160,227							UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	80 unit	337,562,498	80 unit	811,564,300							UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	69,099,400	100%	154,460,100							UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	0%	55%	803,956,700	95%	1,008,058,000							UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		0 Orang	0	0 Orang	0	1169 Orang	11,713,350,584	1169 Orang	11,713,350,584	1169 Orang	11,713,350,584	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		0 Orang	0	0 Orang	0	440 Orang	1,172,304,800	440 Orang	1,172,304,800	440 Orang	1,172,304,800	Dinas Sosial
1.06.08	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	TMP yang dikelola		0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	1 Lokasi	545,710,000	1 Lokasi	545,710,000	1 Lokasi	545,710,000	Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PAHLAWAN													
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Lembaga Sosial yang diberdayakan		0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	4 Lembaga	254,290,100	4 Lembaga	254,290,100	4 Lembaga	254,290,100	Dinas Sosial
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Sosial						90%	48,786,377,621	90%	49,009,436,716	90%	49,182,795,716	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang medapatkan perlindungan sosial						1518 Orang	781,548,800	1518 Orang	781,548,800	1518 Orang	781,548,800	Dinas Sosial
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2.01	Tenaga Kerja				21,028,435,412		18,653,480,677		52,579,139,069		81,037,608,943		76,207,076,943	
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86.70%	88%	3,444,939,784	88%	4,714,176,717							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	1,775,508,636	5 unit	3,393,366,961							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	1,562,849,729	85%	1,509,269,528							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	50.28%	65%	712,270,538	70%	814,193,590							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	80%	80%	6,619,526,900	80%	2,508,912,452							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	31%	2,366,996,250	31%	1,088,666,779							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%	100%	2,118,122,885	100%	1,102,602,000							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	0%	0%	-	30%	-							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi	120 Perusahaan	190 Perusahaan	2,428,220,690	325 Perusahaan	1,328,960,644							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya	80%	80%	-	80%	-							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan	70%	0%	-	80%	2,193,332,006							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		0	0	0	0	20%	1,375,437,984	20%	2,316,258,000	20%	2,316,548,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)		0	0	0	0	85%	2,390,672,395	85%	850,000,000	85%	900,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)		0	0	0	0	85%	2,036,148,964	85%	600,000,000	85%	675,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja		0	0	0	0	70%	749,867,742	20%	7,357,875,000	20%	7,357,875,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri		0 Kimtrans	0	0 Kimtrans	0	1 Kimtrans	200,000,000	1 Kimtrans	400,000,000	1 Kimtrans	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Penempatan Tenaga Kerja		0	0	0	0	31%	124,000,000	31%	2,166,675,000	31%	2,166,675,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Perusahaan yang dibina dan diawasi		0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	150 Perusahaan	520,000,000	250 Perusahaan	2,408,048,000	300 Perusahaan	2,480,048,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan)		0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	20 Perusahaan	210,000,000	20 Perusahaan	8,877,230,000	20 Perusahaan	2,480,048,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		0	0	0	0	70%	-	70%	350,000,000	70%	450,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						75%	40,723,533,464	80%	44,363,848,854	85%	44,853,848,854	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPTD BLKI Balikpapan)						0%	599,478,520	0%	1,197,674,089	0%	1,252,034,089	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPTD BLKI Bontang)						75%	3,500,000,000	80%	10,000,000,000	80%	10,525,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPTD Pengawasan)						75%	150,000,000	80%	150,000,000	80%	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10,379,153,364		4,961,956,655		16,221,239,375		18,713,064,050		10,535,000,000	
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	1,588,854,297	100%	1,825,409,181							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Perlindungan Anak
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial	100%	100%	1,806,544,210	100%	988,306,632							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100%	100%	533,256,370	100%	325,868,410							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100%	100%	212,073,114	100%	279,474,365							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	382,461,410	100%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	100%	70,901,969	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														dan Perlindungan Anak
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	%	90%	163,953,000	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	%	100%	722,367,387	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	34%	48%	140,202,200	62%	50,505,015							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	70%	76%	430,226,796	82%	58,775,148							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	%	100%	46,678,000	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														dan Perlindungan Anak
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nila-nilai luhur	kebijakan	1 kebijakan	288,920,500	kebijakan	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak	%	100%	307,122,945	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	0%	0%	3,685,591,166	0%	318,879,669							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0.07%	0.06%	-	0.05%	96,272,355							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	60%	-	70%	485,705,409							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														dan Perlindungan Anak
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	50%	60%	-	70%	386,547,079							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	Rasio KDRT	50%	60%	-	70%	146,213,392							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kebijakan terkait KLA		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	3 Kebijakan	225,000,000	3 Kebijakan	399,475,050	3 Kebijakan	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak		0.7	0	0.82	0	88%	-	90%	-	90%	-	Semua Perangkat Daerah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kebijakan Pengarusutamaan Gender		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	1 Kebijakan	999,325,201	1 Kebijakan	2,450,000,000	1 Kebijakan	2,900,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase Pelaku Ekonomi Perempuan		0.37	0	0.62	0	76%	-	87%	-	100%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak yg digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan		0	0	0	0	65%	500,000,000	70%	700,000,000	75%	750,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak		0	0	0	0	0.06%	-	0.05%	-	0.04%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	4 Kebijakan	-	4 Kebijakan	-	4 Kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak						100%	14,496,914,174	100%	15,163,589,000	100%	6,335,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03	Pangan				36,423,467,385		20,293,767,620		5,876,835,895		5,850,500,000		5,850,500,000	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	3,803,315,934	85%	2,369,799,708							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3,554,276,162	5 unit	1,236,430,368							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	3,709,825,508	85%	798,768,243							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 nilai AKIP	65 nilai AKIP	2,195,210,452	66 nilai AKIP	919,033,050							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	420 Desa	418 Desa	8,154,409,402	416 Desa	1,562,534,007							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.6 Skor	84.7 Skor	2,494,863,224	86.9 Skor	1,198,710,127							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	583,723,149	85%	915,948,029							UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	2,460,176,371	3 unit	277,898,475							UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	73,685,535	85%	247,304,539							UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	1,835,892,698	85%	1,310,102,216							UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	267,012,200	3 unit	509,965,550							UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	210,500,000	85%	71,048,750							UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	1,230,642,287	85%	1,530,185,241							UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	287,065,800	3 unit	562,520,500							UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	185,701,350	85%	175,531,500							UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	986,287,072	85%	1,254,819,117							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	182,901,242	3 unit	244,671,800							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	152,820,000	85%	265,282,600							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	693 Desa	696 Desa	4,055,158,999	711 Desa	4,843,213,800							UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan						39 Desa	1,389,094,624	45 Desa	1,390,500,000	50 Desa	1,390,500,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi pangan aman di kalimantan timur		0	0	0	0	90%	823,486,365	91%	1,016,000,000	92%	1,016,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi						91,5 skor	3,664,254,906	94,3 skor	3,444,000,000	97,2 skor	3,444,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian		0 skor	0	0 skor	0	80 skor	59,412,392,959	81 skor	67,544,278,906	82 skor	65,731,338,906	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.05	Lingkungan Hidup				15,918,699,296		11,244,410,404		32,285,035,000		37,991,831,460		35,569,215,106	
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	3,336,017,490	85%	4,441,721,683							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1,130,362,240	5 unit	688,656,230							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	880,642,978	85%	601,078,640							Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai AKIP	59 Nilai AKIP	1,290,903,398	60 Nilai AKIP	558,781,820							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	Persentase	65 Persentase	1,144,782,890	Persentase	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75 Indeks	1,816,964,887	Indeks	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	Dokumen	7 Dokumen	1,309,689,930	Dokumen	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.28	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	Persentase	100 Persentase	679,039,876	Persentase	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.29	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225	225 225	1,042,699,220	225	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	0 Indeks (Tercemar Sedang)	0 Indeks (Tercemar Sedang)	-	8 Indeks (Tercemar Sedang)	1,607,041,600							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	%	100%	429,719,400	%	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan	0 Perusahaan	15 Perusahaan	404,270,100	0 Perusahaan	-							Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		dan pengelolaan LH												
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	Penghargaan	4 Penghargaan	973,569,076	Penghargaan	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	10 Juta Ton CO2eq	996,060,532	Juta Ton CO2eq	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	Ribu Hektare	200 Ribu Hektare	483,977,279	Ribu Hektare	-							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	0%	-	100%	1,095,101,532							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	417 Kegiatan	0 Kegiatan	-	550 Kegiatan	1,479,788,159							Dinas Lingkungan Hidup
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	10%	0%	-	12%	772,240,740							Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup		0 Usaha	0	0 Usaha	0	100 Usaha	710,000,000	159 Usaha	710,000,000	167 Usaha	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		0	0	0	0	100%	730,000,000	100%	966,225,000	100%	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.08	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Rekomendasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD.		0	0	0	0	100%	500,000,000	100%	850,000,000	100%	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Dimanfaatkan		0	0	0	0	14%	1,280,000,000	15%	3,676,400,000	15%	1,320,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Dimanfaatkan		0	0	0	0	14%	1,400,000,000	15%	529,500,000	15%	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)		0 Indeks/ Indeks	0	0 Indeks /Indeks	0	64,61/ 87,57/ 79,81/ 87,77 Indeks /Indeks	4,840,000,000	64,71 /87,65/79, 86/87 ,85 Indeks/Indeks	6,767,500,000	64,81/ 87,73/ 79,91/ 87,93 Indeks /Indeks	4,825,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		0 Jenis	0	0 Jenis	0	1 Jenis	200,000,000	2 Jenis	1,000,000,000	2 Jenis	1,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Bimbingan Teknis, Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat terkait Lingkungan Hidup		0	0	0	0	52%	850,000,000	52%	850,000,000	52%	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengendalian Kebijakan Wilayah dan Sektor yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW, RZWP3K beserta rencana rinci, RPJMD dan RPJP)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1,370,100,000	3 Dokumen	1,332,020,000	3 Dokumen	1,426,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup						82%	20,304,935,000	83%	21,210,186,460	84%	22,523,215,106	Dinas Lingkungan Hidup
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				8,738,343,780		7,890,248,682		25,521,051,500		17,981,280,500		18,106,030,500	
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	1,796,312,621	75%	2,269,732,102							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	614,033,843	5 unit	669,909,955							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	30%	1,332,948,502	40%	935,826,061							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	66%	209,091,289	67%	215,087,543							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan Desa	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	456,201,035	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	546,234,016							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif	320 Bumdes	335 Bumdes	202,558,900	360 Bumdes	326,356,700							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%	80%	78,870,700	80%	79,959,000							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	310,824,346	1 Dokumen	270,803,875							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	0 Unit	18 Unit	342,995,690	18 Unit	154,721,500							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	0 PKK	150 PKK	1,693,472,347	165 PKK	942,497,800							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	24,280,000	1 Dokumen	2,000,000							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	323 Desa	338 Desa	1,130,920,843	363 Desa	1,016,068,943							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	289 Desa	304 Desa	545,833,664	329 Desa	287,071,187							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim	0 Desa	15 Desa	-	40 Desa	173,980,000							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal		0 Desa	0	0 Desa	0	30 Desa	1,699,649,500	30 Desa	1,929,584,500	30 Desa	1,929,584,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)		310 Bumdes	0	393 Bumdes	0	30 Bumdes	-	35 Bumdes	-	45 Bumdes	-	Semua Perangkat Daerah
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan		0 Desa	0	0 Desa	0	30 Desa	3,019,466,000	30 Desa	3,076,446,000	30 Desa	3,076,446,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Desa yang telah dilakukan Penataan		15 Kab	0	25 Kab	0	30 Kab	83,700,000	35 Kab	100,000,000	45 Kab	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal		308 Desa	0	132 Desa	0	448 Desa	-	413 Desa	-	368 Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)		308 Desa	0	132 Desa	0	448 Desa	-	413 Desa	-	368 Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)		368 Desa	0	393 Desa	0	30 Desa	-	35 Desa	-	45 Desa	-	Semua Perangkat Daerah
		Jumlah kampung/desa iklim+ (desa)		20 desa	0	22 desa	0	25 desa	-	27 desa	-	28 desa	-	Semua Perangkat Daerah
		Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa)		415 Desa	0	456 Desa	0	30 Desa	-	35 Desa	-	45 Desa	-	Semua Perangkat Daerah
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa berkembang		0 Desa	0	0 Desa	0	30 Desa	819,600,000	30 Desa	1,000,000,000	30 Desa	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa						0%	19,898,636,000	0%	11,875,250,000	0%	12,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				396,934,030		3,756,435,332		460,000,000		750,000,000		1,200,000,000	
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	%	100%	313,071,430	%	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	%	100%	-	%	-							
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	orang	100 orang	83,862,600	orang	-							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														dan Perlindungan Anak
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	50%	60%	-	70%	267,385,157							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.24	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	50%	60%	-	70%	3,489,050,175							Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	KEbijakan Terkait Pencatatan Sipil		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	6 Kebijakan	-	6 Kebijakan	-	6 Kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran Penduduk		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	6 Kebijakan	-	6 Kebijakan	-	6 Kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait Pengelolaan Infornasi administrasi kependudukan		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	5 Kebijakan	-	5 Kebijakan	-	5 Kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kebijakan Tentang Ketahanan Keluarga		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	1 Kebijakan	160,000,000	1 Kebijakan	250,000,000	1 Kebijakan	300,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kampung Keluarga Berencana (KB)		160 Desa	0	175 Desa	0	180 Desa	-	185 Desa	-	190 Desa	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase penguatan lembaga Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)		0	0	0	0	33%	150,000,000	53%	250,000,000	100%	600,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk		0 Kebijakan	0	0 Kebijakan	0	1 Kebijakan	150,000,000	1 Kebijakan	250,000,000	1 Kebijakan	300,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Perhubungan				55,447,278,224		88,109,800,204		121,000,000,000		116,431,496,708		98,000,000,000	
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	2,739,363,967	100%	6,006,416,282							Dinas Perhubungan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	2,317,632,154	4 unit	2,583,262,500							Dinas Perhubungan
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	25%	3,497,222,813	30%	1,835,361,366							Dinas Perhubungan
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%	70.50%	705,082,650	71%	1,390,503,686							Dinas Perhubungan
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854 Kasus	683 Kasus	4,624,644,961	598 Kasus	5,958,194,000							Dinas Perhubungan
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	83 Unit/%	83 Unit/%	2,498,922,280	85 Unit/%	617,900,036							Dinas Perhubungan
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	0 Simpul	1 Simpul	4,829,829,048	2 Simpul	1,228,638,629							Dinas Perhubungan
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	937,108,401	100%	1,323,324,305							UPTD Terminal
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	405,759,350	3 unit	732,216,800							UPTD Terminal
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	134,853,600	60%	94,175,000							UPTD Terminal
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	500000 Penumpang	650000 Penumpang	1,016,718,500	700000 Penum	89,807,600							UPTD Terminal

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Tipe B					pang								
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP		0.83	3037846500	0.85	30200000000	88%	40,609,330,000	90%	13,780,000,000	90.42 %	27,909,330,000	Dinas Perhubungan
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu		1	156010000	2	500000000	300%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	0%	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas		683 kasus	28546284000	598 kasus	35550000000	512 kasus	65,540,670,000	427 kasus	63,681,459,633	342 kasus	55,340,670,000	Dinas Perhubungan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Perhubungan I						100%	12,100,000,000	100%	32,970,037,075	100%	12,000,000,000	Dinas Perhubungan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Perhubungan II						100%	1,750,000,000	100%	5,000,000,000	100%	1,750,000,000	Dinas Perhubungan
2.1	Komunikasi dan Informatika				14,841,459,594		14,098,652,350		-		2,200,000,000		2,300,000,000	
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	3,812,495,575	75%	4,032,709,913							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit	1,565,883,791	3 unit	2,246,934,018							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	1,865,087,616	80%	799,169,183							Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	75%	128,735,400	77%	106,042,500							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	0 Persen	25 Persen	360,756,862	30 Persen	29,857,660							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	0 Lembaga	2 Lembaga	2,214,801,885	2 Lembaga	1,120,619,040							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	0%	80%	472,173,696	84%	1,104,271,150							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	0 Persen	80 Persen	471,129,577	84 Persen	236,581,550							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.4 Indeks	2,269,823,341	2.6 Indeks	2,202,349,552							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	0 Persen	70 Persen	1,472,457,435	75 Persen	2,220,117,784							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	208,114,416	100 Persen	-							Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks keamanan informasi						0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya implementasi e-goverment						0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik						0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya implementasi E-government						3,04 indeks	-	3,10 indeks	2,200,000,000	3,15 indeks	2,300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)						2 Indeks	-	2 Indeks	-	3 Indeks	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik						75%	-	77%	-	80%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah						100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				22,421,836,549		17,396,444,882		38,866,632,600		38,773,574,999		38,745,981,300	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,996,178,554	87%	4,024,922,212							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3,468,364,140	5 unit	2,391,972,222							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,561,081,214	55%	1,207,951,430							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72.01 Nilai AKIP	75 Nilai AKIP	933,379,830	76 Nilai AKIP	894,498,198							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	100 UKM	1,121,651,700	0 UKM	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	0 Wirausaha Baru	100 Wirausaha Baru	515,599,076	0 Wirausaha Baru	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	0 Koperasi	100 Koperasi	4,326,123,237	0 Koperasi	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Menengah
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	0 UKM	-	200 UKM	3,592,606,555							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah koperasi berkualitas	0 Koperasi	0 Koperasi	-	100 Koperasi	-							
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,090,481,850	87%	1,280,582,172							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	357,177,400	3 unit	575,007,419							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	307,320,460	45%	305,815,628							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,181,493,098	87%	1,343,326,400							UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,081,885,830	3 unit	777,555,019							UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	742,076,600	45%	303,641,397							UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih	300 Orang	300 Orang	1,739,023,560	300 Orang	698,566,230							UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas		0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	10 Koperasi	1,146,721,600	10 Koperasi	849,610,000	10 Koperasi	1,083,402,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas		0	0	0	0	1%	1,146,721,600	1%	946,405,900	1%	1,008,402,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih		0 Koperasi dan UKM	0	0 Koperasi dan UKM	0	300 Koperasi dan UKM	1,453,553,000	300 Koperasi dan UKM	1,529,847,298	300 Koperasi dan UKM	1,642,883,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat		0	0	0	0	10%	1,146,721,600	10%	676,519,240	10%	1,625,103,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital		0	0	0	0	3%	1,146,721,600	3%	1,326,724,100	3%	541,701,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an		0	0	0	0	5000%	1,146,721,600	5000 %	234,348,760	0%	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM						88%	31,679,471,600	89%	33,210,119,701	90%	32,844,489,800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.12	Penanaman Modal				10,171,209,667		11,544,714,936		27,414,169,760		31,679,377,470		36,085,315,217	
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2,798,980,062	72%	3,580,927,986							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	6 unit	1,658,060,052	6 unit	1,564,741,900							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	90%	3,548,226,478	92%	3,011,591,750							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	31.06 Nilai AKIP	51 Nilai AKIP	272,615,000	61 Nilai AKIP	202,022,500							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	0 Hari	0 Hari	189,448,200	13 Hari	334,935,000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	0 perusahaan industri baru	25 perusahaan industri baru	478,219,000	7 perusahaan industri baru	288,939,000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	531,570,000	2 Kebijakan	1,449,615,000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	%	100%	95,597,500	100%	399,780,000							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU	2 MoU	598,493,375	3 MoU	712,161,800							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan		0 Hari	0	0 Hari	0	12 Hari	1,830,000,000	11 Hari	3,700,000,000	10 Hari	3,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	550,000,000	5 Kegiatan	900,000,000	5 Kegiatan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1,700,000,000	2 Dokumen	1,880,000,000	2 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM		0	0	0	0	100%	2,000,000,000	100%	1,500,000,000	100%	2,250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi		0 Laporan	0	0 Laporan	0	10 Laporan	1,410,000,000	10 Laporan	2,700,000,000	11 Laporan	3,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal						85%	19,924,169,760	85%	20,999,377,470	86%	22,835,315,217	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				51,308,065,048		23,847,217,570		142,415,899,232		90,294,946,580		102,795,542,000	
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	3,870,519,011	89.55 %	3,982,333,061							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1,554,390,360	5 unit	3,089,832,712							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	2,984,910,791	92%	1,122,318,001							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58.38%	58.40%	492,275,566	58.60 %	208,207,402							Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas Tenaga Sumberdaya Pemuda, Iptek dan Imtaq serta Kreativitas Pemuda	Persen	0.03 Persen	1,173,641,583	0.16 Persen	925,884,362							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda Kader Kepanduan, Kepeloporan, Keterlibatan dalam Pembinaan Sosial, Politik, Ekonomi, Kewirausahaan, Budaya dan Hukum	0%	0.06%	1,880,148,250	0.13%	1,700,390,690							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	0%	14.15%	10,739,731,189	14.94 %	599,667,112							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	0%	10%	3,683,607,290	14.44 %	1,856,519,226							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha	0.03 Persen	0.09 Persen	-	0.15 Persen	333,215,723							Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPT (SKM)	76.80%	80.26%	16,093,653,007	89.55 %	7,739,043,340							UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	3,283,553,801	1 Unit	1,590,432,549							UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya	0 Event	25 Event	5,551,634,200	30 Event	699,373,392							UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan		0	0	0	0	66.60%	104,683,770,000	72.20 %	37,174,404,580	76.92 %	41,330,542,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		0	0	0	0	0.80%	2,296,260,000	1%	12,115,000,000	1.20%	16,720,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan		0	0	0	0	6.15%	1,500,000,000	6.30%	1,700,000,000	6.45%	2,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Pemuda dan Keolahragaan						80%	22,426,406,232	82%	25,805,542,000	85%	28,245,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Pemuda dan Keolahragaan (UPTD PKSUM)						80%	11,509,463,000	82%	13,500,000,000	85%	14,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.14	Statistik				-		193,618,500		953,675,000		1,200,000,000		1,500,000,000	
2.14.16	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan	0 Buku	0 Buku	-	1 Buku	193,618,500							Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrakstruktur						50%	953,675,000	60%	1,200,000,000	70%	1,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	Kebudayaan				11,766,774,113		5,842,514,957		9,081,159,570		10,039,275,527		11,103,203,079	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya loka	17 Sekolah	90 Sekolah	9,999,465,104	150 Sekolah	4,017,657,417							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	100 Orang	100 Orang	1,767,309,009	130 Orang	1,824,857,540							UPTD Taman Budaya
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola		0	0	0	0	45%	3,841,375,000	55%	4,225,512,500	65%	4,648,063,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina		0	0	0	0	70%	1,188,704,200	75%	1,307,574,620	80%	1,438,332,082	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dilindungi		0	0	0	0	25%	500,000,000	45%	600,000,000	65%	720,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan		0	0	0	0	80%	996,277,170	85%	1,095,904,887	88%	1,205,495,375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan		0	0	0	0	60%	2,554,803,200	65%	2,810,283,520	70%	3,091,311,872	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.17	Perpustakaan				6,240,576,584		4,471,883,460		26,301,573,000		27,200,825,108		25,799,653,808	
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	1,912,103,706	82.67 %	2,168,858,617							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	555,555,983	6 unit	904,682,932							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	974,976,229	92%	682,728,607							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	94%	95%	85,643,293	95.50 %	38,325,300							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	.Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan	0 Pemustaka	205000 Pemustaka	1,681,852,140	205700 Pemustaka	438,330,840							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	.Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	0 Judul	3000 Judul	344,667,588	3550 Judul	135,993,664							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.26	Program Pegembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	.Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	685,777,645	20 Perpustakaan	102,963,500							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi		0	0	0	0	6.89%	2,253,800,000	9.19%	3,134,848,350	11.49 %	483,685,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Perpustakaan						100%	24,047,773,000	100%	24,065,976,758	100%	25,315,968,108	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.18	Kearsipan				465,213,242		245,649,321		900,000,000		1,352,000,000		2,000,000,000	
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	.Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik	1100 berkas	1100 berkas	127,997,504	1100 berkas	95,969,121							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	.Jumlah lembaga instansi yang dibina	50 Lembaga/Intansi	50 Lembaga/Intansi	337,215,738	50 Lembaga/Intansi	149,680,200							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dalam rangka tertib arsip		0 OPD	0	0 OPD	0	5 OPD	859,891,300	5 OPD	1,252,000,000	5 OPD	1,850,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik		0 OPD	0	0 OPD	0	1 OPD	40,108,700	1 OPD	100,000,000	1 OPD	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Urusan Pilihan													
3.01	Kelautan dan Perikanan				42,923,837,121		24,438,003,654		80,927,997,000		83,194,936,649		82,957,907,386	
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	4,461,018,527	81%	7,420,628,623							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3,084,727,034	5 unit	2,022,538,805							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	2,223,352,745	20%	1,166,620,865							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	60 Nilai	1,543,307,561	63 Nilai	921,859,567							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	149039 Ton	152027 Ton	15,416,842,418	155516 Ton	2,926,020,901							Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	151918 Ton	154956 Ton	4,055,988,037	158055 Ton	1,876,455,707							Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Angka Konsumsi Ikan	48 Kg/Kapita	50 Kg/Kapita	-	52 Kg/Kapita	-							
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0 Kawasan yang di restorasi	1 Kawasan yang di restorasi	2,965,431,511	1 Kawasan yang di restorasi	1,236,487,890							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	33.6 Persen	35.28 Persen	1,942,425,300	37.07 Persen	1,083,730,757							Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tngkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	455,339,336	81%	530,271,290							UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	114,071,861	3 Unit	102,515,632							UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	137,721,850	20%	175,509,520							UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	253 Sampel	200 Sampel	304,710,500	210 Sampel	133,693,800							UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tngkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	588,929,795	81%	662,085,849							UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Laut Manggar
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	275,973,663	3 Unit	182,439,142							UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	167,005,000	20%	352,895,920							UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Windu/Ikan Air Laut	2500000000 Ekor	2600000000 Ekor	3,442,205,426	2700000000 Ekor	1,996,472,000							UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tngkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	571,835,067	81%	776,222,211							UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	138,090,850	3 Unit	353,108,775							UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	196,710,000	20%	208,880,400							UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Tawar	60000 Ekor	65000 Ekor	838,150,640	0 Ekor	-							UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah /Ikan Air Laut	0 Ekor	0 Ekor	-	70000 Ekor	309,566,000							UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		0	0	0	0	41%	3,300,000,000	45%	3,925,750,000	47%	3,925,750,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif		0 Ha	0	0 Ha	0	289.048 Ha	3,629,995,000	297.805,90 Ha	4,757,100,000	297.805,90 Ha	4,757,100,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut		0 Milyar Ekor	0	0 Milyar Ekor	0	2,8 Milyar Ekor	4,637,000,000	2,9 Milyar Ekor	5,510,425,000	3 Milyar Ekor	4,530,425,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut		0 Ekor	0	0 Ekor	0	75000 Ekor	838,360,000	80000 Ekor	752,046,680	85000 Ekor	1,091,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		0 ton	0	0 ton	0	161216 ton	5,280,000,000	164441 ton	5,456,947,000	167730 ton	5,057,800,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		0 ton	0	0 ton	0	158938 ton	21,616,945,000	162593 ton	9,756,575,000	166170 ton	9,756,575,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1)Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi 2) Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)		0 UMKM /IUP	0	0 UMKM /IUP	0	20/40 UMKM /IUP	1,198,000,000	20/30 UMKM/IUP	1,663,750,000	20/30 UMKM /IUP	1,663,750,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan		0 Sampel	0	0 Sampel	0	220 Sampel	211,000,000	230 Sampel	357,000,000	240 Sampel	445,039,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pemeriksaan												
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan						82%	40,216,697,000	83%	51,015,342,969	84%	51,730,468,386	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.02	Pariwisata				12,244,880,442		10,245,983,375		25,076,256,000		35,749,837,051		34,564,631,806	
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	90%	2,177,088,457	90%	2,579,968,383							Dinas Pariwisata
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,615,836,600	5 unit	799,943,760							Dinas Pariwisata
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,531,025,563	55%	551,764,509							Dinas Pariwisata
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.18 nilai AKIP	70 nilai AKIP	896,583,300	75 nilai AKIP	567,666,100							Dinas Pariwisata
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	2 Destinasi	7 Destinasi	953,880,700	0 Destinasi	-							Dinas Pariwisata
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan	2 Kawasan	1,859,353,523	2 Kawasan	1,464,059,810							Dinas Pariwisata
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	0 Destinasi	0 Destinasi	-	8 Destinasi	1,601,019,260							Dinas Pariwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	0 Orang	0 Orang	-	520 Orang	1,197,495,453							Dinas Pariwisata
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	0 orang	-	270 orang	1,484,066,100							Dinas Pariwisata
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	0 Orang	406 Orang	939,253,999	0 Jenis Usaha	-							Dinas Pariwisata
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah Jenis Pelaku Ekraf yang difasilitasi dan ditingkatkan SDM nya	2 Jenis	4 Jenis	1,271,858,300	0 Jenis	-							Dinas Pariwisata
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	270 orang	-	0 orang	-							
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)		0 Orang	0	0 Orang	0	2.015.000 Orang	1,550,000,000	2.005.000 Orang	3,260,000,000	2.310.000 Orang	2,850,000,000	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan		0 Destinasi	0	0 Destinasi	0	2 Destinasi	3,050,000,000	3 Destinasi	7,602,445,000	3 Destinasi	6,610,000,000	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan		0 Sub Sektor Ekraf	0	0 Sub Sektor Ekraf	0	4 Sub Sektor Ekraf	1,550,000,000	4 Sub Sektor Ekraf	2,794,999,500	4 Sub Sektor Ekraf	2,150,000,000	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya target jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi		0	0	0	0	90%	1,600,000,000	95%	4,020,000,000	97%	3,800,000,000	Dinas Pariwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata						95%	17,326,256,000	95%	18,072,392,551	95%	19,154,631,806	Dinas Pariwisata
3.03	Pertanian				108,892,753,494		66,815,928,433		214,259,737,105		187,803,548,053		183,413,491,187	
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	226017 Ton	233020 Ton	6,037,998,500	240245 Ton	2,103,265,300							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	383958 Ton	403000 Ton	21,489,016,460	423000 Ton	9,320,835,041							Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	150 Ha	150 Ha	613,326,511	165 Ha	376,316,830							UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Serangan OPT	6192 Ha	6165 Ha	5,578,702,197	6139 Ha	517,647,180							UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	75%	80%	4,551,792,010	81%	1,485,274,000							UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,518,335,693	83%	2,863,542,336							Dinas Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,077,538,499	5 unit	1,879,619,679							Dinas Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	2,160,545,920	20%	1,369,690,146							Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai	62 Nilai	761,064,974	68 Nilai	1,066,364,262							Dinas Perkebunan
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	0 Ton	70533 Ton	13,586,851,900	74060 Ton	8,602,374,400							Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	0 ton	15197504 ton	-	16717254 ton	-							
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	0 ton	3006 ton	-	3307 ton	-							
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	0 ton	5317 ton	-	5849 ton	-							
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	0 Ton	12105 Ton	-	12468 Ton	-							
		Produksi komoditas perkebunan	Ton	15288465 Ton	-	16812938 Ton	-							
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	%	20%	138,693,780	%	-							Dinas Perkebunan
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	%	30%	1,023,424,269	%	-							Dinas Perkebunan
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi	5 Komoditi	198,103,550	0 Komoditi	-							Dinas Perkebunan
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi	5 Komoditi	385,982,223	0 Komoditi	-							Dinas Perkebunan
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	221,709,300	Kelompok Tani	-							Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	1.87 Juta ton CO2eq	4.79 Juta ton CO2eq	263,047,000	4.08 Juta ton CO2eq	464,349,800							Dinas Perkebunan
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	%	50%	241,406,900	%	-							Dinas Perkebunan
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan	Orang	25 Orang	308,165,900	Orang	-							Dinas Perkebunan
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	Gapoktan	5 Gapoktan	311,943,300	Gapoktan	-							Dinas Perkebunan
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	98 Perusahaan	32 Perusahaan	526,185,650	35 Perusahaan	472,311,200							Dinas Perkebunan
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	Kelompok	20 Kelompok	294,194,700	Kelompok	-							Dinas Perkebunan
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	Komoditi	5 Komoditi	343,599,806	Komoditi	-							Dinas Perkebunan
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	%	40%	259,085,330	%	-							Dinas Perkebunan
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	0%	75%	1,334,604,850	85%	-							Dinas Perkebunan
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	0 Produk	0 Produk	-	2 Produk	830,746,200							Dinas Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	311,831,432	83%	369,307,046							UPTD Pengawasan Benih Pekebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	454,744,226	3 unit	1,091,329,500							UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	366,844,850	20%	165,071,900							UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih illegal	0 Kasus	6 Kasus	607,515,100	0 Kasus	-							UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih	5000000 Benih	398,387,750	0 Benih	-							UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2825176 Benih	0 Benih	-	2905176 Benih	339,673,600							UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	415,664,606	83%	528,809,522							UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	387,271,865	3 unit	350,438,092							UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	264,099,519	20%	185,513,320							UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	25 Kelompok	25 Kelompok	441,927,196	0 Kelompok	-							UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	2500 KG	5000 KG	419,858,951	0 KG	-							UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	500 Liter	500 Liter	-	Liter	-							
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	2085338000 Rupiah	Rupiah	-	1087534440 Rupiah	668,396,892							UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	0%	-	83%	411,179,839							UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	0 unit	-	3 unit	439,589,552							UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	0%	-	20%	141,023,650							UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	0%	-	85%	1,388,963,500							UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	2,564,713,665	81%	3,078,610,001							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1,385,403,826	5 unit	3,225,418,132							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase ASN yang memiliki standar	10%	11%	1,462,453,079	12%	1,298,458,212							Dinas Peternakan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Kelembagaan Pemerintah Daerah	kompetensi												dan Kesehatan Hewan
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.86 Nilai	78.36 Nilai	1,217,341,393	78.86 Nilai	1,363,823,590							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10%	10%	1,229,001,900	11%	1,412,743,894							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	123.1 Konstanta	118 Konstanta	5,032,573,987	118.5 Konstanta	4,181,130,744							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Miniranch yang terregister	Unit	5 Unit	-	35 Unit	-							
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	0 Unit	5 Unit	1,300,256,451	35 Unit	2,299,196,554							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	19%	20%	6,459,693,075	20%	6,069,277,363							Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Calving Interval	19 Bulan	18 Bulan	-	18 Bulan	-							
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	1,953,450,380	81%	1,482,963,285							UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,842,894,532	3 unit	503,369,048							UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	542,242,796	12%	335,899,736							UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak	10%	10%	10,410,614,094	10%	1,397,178,357							UPTD Pembibitan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase produksi bibit ternak berkualitas	10%	10%	-	11%	-							dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	1,532,444,051	81%	975,320,072							UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	496,859,863	3 unit	419,881,528							UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	419,080,622	12%	315,469,655							UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan	11%	11%	1,750,265,064	12%	1,025,555,475							UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Penanganan OPT DPI		0 ha	0	0 ha	0	15000 ha	848,540,921	20000 ha	1,200,000,000	30000 ha	1,200,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	80,203,000	1 unit	513,766,446	1 unit	513,766,446	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi / Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura		0 Ha/unit	0	0 Ha/unit	0	7100/6 Ha/unit	6,189,757,500	8000/7 Ha/unit	4,716,890,000	8500/7 Ha/unit	4,716,890,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura		0 ton	0	0 ton	0	271356/273070 ton	24,520,588,200	279681/283592 ton	25,533,110,000	289846/292383 ton	14,715,122,948	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi		0 jumlah	0	0 jumlah	0	193 jumlah	1,370,000,000	219 jumlah	1,283,114,948	249 jumlah	1,500,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk		0 kali	0	0 kali	0	30 kali	224,178,500	40 kali	275,000,000	50 kali	275,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat / Jumlah Legalitas Benih TPH yang Terawasi dan Tersertifikasi		0 %/unit	0	0 %/unit	0	82/193 %/unit	1,647,020,300	82/222 %/unit	1,654,550,000	82/252 %/unit	1,654,550,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina / Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina		0 orang/Lembaga	0	0 orang/Lembaga	0	85/4 orang/Lembaga	6,149,929,725	330/4 orang/Lembaga	3,693,331,700	441/4 orang/Lembaga	3,693,331,700	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)		0	0	0	0	12%	-	13%	-	14%	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular		0	0	0	0	50%	3,504,390,000	60%	2,825,000,000	70%	4,850,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister		0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	9,385,337,500	49 Unit	10,087,388,200	30 Unit	3,141,390,120	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi		0	0	0	0	20.5 %	11,316,262,500	21%	7,387,968,000	22%	10,450,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak		0	0	0	0	43%	1,915,000,000	44%	690,000,000	45%	1,400,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha		0	0	0	0	25%	475,300,000	50%	770,000,000	75%	1,200,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		0 Juta Ton CO2eq	0	0 Juta Ton CO2eq	0	4,079 Juta Ton CO2eq	1,219,000,000	4,067 Juta Ton CO2eq	1,120,000,000	4,044 Juta Ton CO2eq	1,120,000,000	Dinas Perkebunan
		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT		0 Rp	0	0 Rp	0	10471 38860 Rp	1,219,000,000	91664 8000 Rp	1,252,428,400	77494 0000 Rp	1,252,428,400	Dinas Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun		0/0 Kelompok Tani/Ha	0	0/0 Kelompok Tani/Ha	0	30/1.425.580 Kelompok Tani/Ha	7,995,000,000	30/1.462.645 Kelompok Tani/Ha	6,722,948,500	30/1.500.674 Kelompok Tani/Ha	6,722,948,500	Dinas Perkebunan
		Jumlah Prasarana		0	0	0	0	200%	2,342,196,000	0%	-	0%	-	Dinas

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Kantor yang Tersedia												Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar		0 benih	0	0 benih	0	60000000 benih	934,000,000	60000000 benih	1,036,170,300	60000000 benih	1,036,170,300	Dinas Perkebunan
		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		0	0	0	0	75.00%	3,630,000,000	80.00 %	1,418,342,408	85.00 %	1,418,342,408	Dinas Perkebunan
		Produksi komoditas perkebunan (ton)		0 ton	0	0 ton	0	17.136.849,15 ton	6,005,000,000	18.126.490,20 ton	6,465,557,600	18.313.874,25 ton	6,465,557,600	Dinas Perkebunan
3.27.08	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk		0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	3,850,000,000	1 lembaga	3,734,806,900	1 lembaga	4,234,806,900	Dinas Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	35 Perusahaan	784,000,000	35 Perusahaan	750,000,000	35 Perusahaan	750,000,000	Dinas Perkebunan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian						80 skor	59,412,392,959	81 skor	59,588,801,711	82 skor	60,612,598,257	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan						80%	32,696,365,000	81%	15,285,000,000	82%	16,330,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan						86%	26,546,275,000	89%	29,799,372,940	92%	34,160,587,608	Dinas Perkebunan
3.04	Kehutanan				173,111,627,816		258,965,635,685		461,438,216,750		471,834,288,043		486,245,653,072	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap	50%	80%	2,781,619,305	85%	3,197,056,497							Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		pelayanan PD (SKM)												
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,343,805,727	5 unit	2,066,527,016							Dinas Kehutanan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	2,630,303,410	85%	1,837,238,731							Dinas Kehutanan
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70.73 Nilai AKIP	70 Nilai AKIP	1,810,176,725	70 Nilai AKIP	809,226,300							Dinas Kehutanan
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	167 Milyar Rupiah	160 Milyar Rupiah	3,171,296,740	165 Milyar Rupiah	1,772,539,118							Dinas Kehutanan
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13.98%	13.98%	1,034,914,742	13.98 %	551,795,300							Dinas Kehutanan
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	2%	2%	604,448,224	1.75%	187,789,150							Dinas Kehutanan
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	118000 Ha	32000 Ha	2,173,134,475	32000 Ha	600,958,183							Dinas Kehutanan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11 Unit Usaha	5 Unit Usaha	1,593,713,617	5 Unit Usaha	2,473,860,744							Dinas Kehutanan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	35 Jumlah Usulan	1,245,626,251	35 Jumlah Usulan	2,830,215,561							Dinas Kehutanan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	9,872,434,375	0.25%	4,328,193,090							Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	9 kasus Tindak Pidana	39 kasus Tindak Pidana	1,444,892,620	39 kasus Tindak Pidana	1,544,229,500							Dinas Kehutanan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	4,455,703,465	350 Hektar	8,099,286,970							Dinas Kehutanan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	4 SK/Sertifikat	27 SK/Sertifikat	1,026,420,562	37 SK/Sertifikat	1,755,630,761							Dinas Kehutanan
		Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	-	60000 Bibit	-							
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat	0%	0%	-	25%	573,310,038							Dinas Kehutanan
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0 Ha	0 Ha	-	50 Ha	-							Dinas Kehutanan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	748,337,998	85%	936,330,554							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	704,357,518	3 Unit	419,612,039							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	209,969,560	85%	9,412,500							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha	4 Unit Usaha	247,863,763	4 Unit Usaha	209,875,621							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1,192,793,745	5 Jumlah Usulan	774,732,746							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	9,638,357,929	0.25%	9,529,691,893							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	1,318,134,280	2 kasus Tindak Pidana	1,521,398,632							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	86 Hektar	91,422,651	86 Hektar	5,109,645,705							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	100000 Bibit	970,000	0 Bibit	-							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	0 Hektar	150 Hektar	281,327,880	150 Hektar	108,086,461							UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	577,653,532	85%	924,598,957							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	532,585,732	3 Unit	1,251,450,095							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	222,817,487	85%	278,772,852							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	497,825,534							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	4 Jumlah Usulan	660,241,122	4 Jumlah Usulan	856,832,685							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	6,061,479,543	0.25%	17,892,152,180							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	1,285,799,364	5 kasus Tindak Pidana	2,253,726,513							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	200 Hektar	68,108,550	200 Hektar	456,641,251							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	8 SK/Sertifikat	180,714,600	8 SK/Sertifikat	1,558,981,074							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Jumlah Bibit	0 Bibit	25000 Bibit	-	25000 Bibit	-							
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	722,500,603	8 Unit Usaha	9,917,140,412							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat kepuasan pemangku	50%	80%	993,472,883	85%	1,389,827,642							UPTD Kesatuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Perkantoran	kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)												Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	669,433,430	3 Unit	525,214,298							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	223,698,733	85%	113,615,500							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	110,610,700	2 Unit Usaha	391,280,634							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3 Jumlah Usulan	455,772,891	3 Jumlah Usulan	198,200,353							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	9,642,375,202	0.25%	13,875,153,870							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana	6 kasus Tindak Pidana	196,078,000	6 kasus Tindak Pidana	1,141,741,585							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 hektar	100 hektar	2,103,112,516	100 hektar	4,054,656,440							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	0 SK/Sertifikat	-	1 SK/Sertifikat	476,425,397							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	-	10000 Bibit	-							
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	541,952,443	2 Unit Usaha	3,297,517,401							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	620,333,927	85%	618,558,646							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	543,888,290	3 Unit	438,884,815							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	460,508,064	85%	124,642,600							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	404,059,105	5 Unit Usaha	271,990,148							UPTD Kesatuan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pada KTH												Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	558,663,237	2 Jumlah Usulan	350,436,710							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	8,670,994,167	0.25%	3,966,069,258							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	6 kasus Tindak Pidana	741,780,850	6 kasus Tindak Pidana	1,000,345,715							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	100 Hektar	1,578,340,372	100 Hektar	6,387,711,300							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	1 SK/Sertifikat	521,026,863	1 SK/Sertifikat	330,495,200							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
		Jumlah Bibit	0 Bibit	10000 Bibit	-	10000 Bibit	-							
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	428,562,100	2 Unit Usaha	4,435,170,872							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	650,549,465	85%	960,021,845							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	1,209,358,629	3 Unit	860,280,714							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	314,330,134	85%	186,221,750							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	293,625,200	4 Unit Usaha	1,042,369,791							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	5,535,619,372	10 Jumlah Usulan	835,361,680							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	7,862,213,951	0.25%	6,872,958,516							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	1 kasus Tindak Pidana	660,604,000	1 kasus Tindak Pidana	1,560,604,219							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	100 Hektar	56,420,400	100 Hektar	1,854,073,063							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	25000 Bibit	145,818,400	25000 Bibit	116,578,800							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	6 Unit Usaha	332,892,725	6 Unit Usaha	6,395,167,118							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	579,229,946	85%	977,814,702							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	170,871,000	3 Unit	960,940,248							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	448,758,110	85%	142,464,000							UPTD Kesatuan Pengelolaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pemerintah Daerah													Hutan Produksi Santan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	0%	0%	590,224,000	0%	835,190,600							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	-	3 Unit Usaha	-							
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	0%	0%	557,870,710	0%	408,115,900							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	-	10 Jumlah Usulan	-							
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	0%	0%	10,731,191,485	0%	9,781,546,689							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	-	0.25%	-							
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	359,410,500	2 kasus Tindak Pidana	1,229,027,200							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	3,962,302,400	350 Hektar	3,701,456,100							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	82,107,900	200000 Bibit	269,099,300							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan	0%	2%	1,806,063,680	1.95%	5,589,970,493							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	1,124,210,216	85%	1,623,442,879							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	471,541,156	3 Unit	123,659,516							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	221,644,952	85%	107,654,800							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	804,877,900	2 Unit Usaha	874,574,625							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	625,912,200	5 Jumlah Usulan	2,230,198,900							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	8,820,416,457	0.25%	8,337,756,048							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	479,045,675	5 kasus Tindak Pidana	569,249,000							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	340 Hektar	17,604,400	340 Hektar	2,121,529,300							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	100000 Bibit	27,056,600	100000 Bibit	435,605,100							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	464,161,229	4 Unit Usaha	5,061,223,213							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	597,515,888	85%	1,031,466,392							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat	3 Unit	3 Unit	570,196,300	3 Unit	642,627,037							UPTD Kesatuan Pengelolaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		waktu												Hutan Produksi Bengalon
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	454,403,900	85%	225,482,100							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	506,003,849							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	466,163,854	2 Jumlah Usulan	462,888,767							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	7,496,445,723	0.25%	4,922,508,814							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	4 kasus Tindak Pidana	462,260,100	4 kasus Tindak Pidana	474,129,418							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	600 Hektar	10,701,366,188	600 Hektar	10,852,086,648							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	50000 Bibit	332,081,008	50000 Bibit	621,358,954							UPTD Kesatuan Pengelolaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Hutan Produksi Bengalon
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	517,177,125	2 Unit Usaha	6,808,705,980							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	699,578,829	85%	1,775,596,388							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	723,174,300	3 Unit	1,170,310,253							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	552,887,457	85%	590,944,701							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	1,541,123,494							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1,113,046,757	5 Jumlah Usulan	1,433,177,892							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	6,502,022,715	0.25%	14,872,449,634							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	10 kasus Tindak Pidana	1,359,706,176	10 kasus Tindak Pidana	3,578,719,654							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	250 Hektar	162,032,836	250 Hektar	578,450,570							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	9 Unit Usaha	597,046,000	9 Unit Usaha	10,290,745,984							UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	0%	2%	-	1.95%	-							
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan						<1.5 %	10,498,588,600	<1,25 %	10,498,588,600	<1 %	10,498,588,600	Dinas Kehutanan
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)						32000 Ha	20,646,577,500	32000 Ha	20,646,577,500	32000 Ha	20,646,577,500	Dinas Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN	Persentase Tutupan Lahan Meningkat						13.98%	1,010,850,000	13.98 %	1,010,850,000	13.98 %	1,010,850,000	Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	SUNGAI (DAS)													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu						4950000/7 Juta M3/ton	241,551,647,450	5000000/7,5 Juta M3/ton	241,551,647,450	5050000/8 Juta M3/ton	241,551,647,450	Dinas Kehutanan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan						82%	187,730,553,200	83%	198,126,624,493	84%	212,537,989,522	Dinas Kehutanan
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				18,739,370,468		32,187,936,730		74,445,383,946		85,715,092,846		87,908,019,241	
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,855,442,569	85%	3,474,597,418							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3,864,727,092	5 unit	1,297,582,208							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,302,345,551	85%	594,503,584							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.68 Nilai AKIP	67 Nilai AKIP	1,434,903,357	68 Nilai AKIP	857,618,725							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	4.48%	2,057,720,316	0%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	945607 KK	965607 KK	1,655,386,437	989607 KK	1,507,976,221							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	%	3%	1,097,308,282	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	%	30%	155,129,800	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	Perusahaan	80 Perusahaan	3,158,175,649	Perusahaan	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	%	95%	1,158,231,415	%	-							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	60%	0%	-	67%	876,205,829							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	38 Perusahaan	0 Perusahaan	-	45 Perusahaan	1,739,141,569							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	0%	-	4.82%	21,840,311,176							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Perusahaan yang Mengikuti Kaidah Perhitungan Sumberdaya dan Cadangan		0	0	0	0	74%	1,950,000,000	74%	1,713,862,000	74%	2,493,862,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT (%)		0	0	0	0	6.08%	2,287,496,140	7.34%	2,920,731,000	8.40%	3,160,127,332	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik		0 KK	0	0 KK	0	1135000 KK	45,062,992,806	1165000 KK	54,200,364,300	1200000 KK	54,551,527,800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB		0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	50 Perusahaan	2,265,000,000	55 Perusahaan	2,503,970,000	60 Perusahaan	1,413,720,008	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						82%	22,879,895,000	83%	24,376,165,546	84%	26,288,782,101	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.06	Perdagangan				6,473,117,905		3,389,099,128		9,959,664,000		8,443,966,332		9,009,257,000	
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0%	29%	1,855,363,111	5%	950,864,500							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar U$dollar	1.43 milyar U$dollar	710,218,000	0 milyar U$dollar	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	bulan	3 bulan	920,099,800	bulan	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	3 Pelaku usaha/ nilai transaksi	1,039,014,500	0 Pelaku usaha/ nilai transaksi	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar U$dollar	0 milyar U$dollar	-	1.43 milyar U$dollar	1,553,841,680							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	0%	5%	1,948,422,494	10%	884,392,948							UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara		0	0	0	0	5%	955,984,000	5%	1,097,068,680	5%	1,736,027,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.08	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran		0 Produk	0	0 Produk	0	5 Produk	712,400,000	5 Produk	1,000,000,000	5 Produk	995,820,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA		0 Eksportir	0	0 Eksportir	0	250 Eksportir	712,400,000	255 Eksportir	252,931,320	260 Eksportir	862,010,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Legalitas Perijinan Perusahan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)		0/0 Perusahaan/IKK	0	0/0 Perusahaan/IKK	0	10/54,3 Perusahaan/IKK	2,000,000,000	10/57 Perusahaan/IKK	241,042,500	10/60 Perusahaan/IKK	1,650,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan Bapokting; Disparitas harga antar wilayah		0/0 %/%	0	0/0 %/%	0	300/20 %/%	986,130,000	300/19 %/%	1,338,776,000	300/19 %/%	1,315,400,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi		0	0	0	0	15%	2,000,000,000	15%	2,235,675,000	15%	1,650,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen		0	0	0	0	85%	2,592,750,000	90%	2,278,472,832	100%	800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.07	Perindustrian				3,013,925,417		2,215,092,165		4,692,000,000		4,695,810,000		6,005,926,591	
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Volume usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) MBTK	miliar rupiah	100 miliar rupiah	572,891,667	miliar rupiah	-							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	0.23%	1%	2,441,033,750	1%	2,215,092,165							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya		0 Industri	0	0 Industri	0	10 Industri	632,500,000	15 Industri	627,380,000	20 Industri	943,439,586	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata.		0	0	0	0	5%	2,909,500,000	5%	845,930,000	5%	2,078,142,632	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri		0 industri	0	0 industri	0	2 industri	1,150,000,000	2 industri	3,222,500,000	2 industri	2,984,344,373	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.08	Transmigrasi				1,231,433,380		413,977,686		875,000,000		1,560,625,000		1,625,625,000	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0 Kimtrans	4 Kimtrans	1,231,433,380	4 Kimtrans	413,977,686							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri		0 Kimtrans	0	0 Kimtrans	0	1 Kimtrans	200,000,000	1 Kimtrans	400,000,000	1 Kimtrans	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain		0 Kimtrans	0	0 Kimtrans	0	1 Kimtrans	600,000,000	1 Kimtrans	580,312,500	1 Kimtrans	512,812,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi		0 Kimtrans	0	0 Kimtrans	0	1 Kimtrans	75,000,000	1 Kimtrans	580,312,500	1 Kimtrans	512,812,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang													
4.01	Kesekretariatan Daerah				330,471,769,143		142,788,250,691		4,294,000,048		5,951,450,000		6,546,595,000	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	19,998,897,891	75%	-							Biro Umum
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	61,551,208,779	2 unit	-							Biro Umum
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	60%	29,428,914,670	65%	-							Biro Umum
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	724,945,300	73%	-							Biro Umum
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum	bulan	12 bulan	1,769,504,785	bulan	-							Biro Umum
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana	jumlah sarana dan prasarana untuk	0 buah	190 buah	4,516,178,598	200 buah	-							Biro Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Rumah Tangga Setda	pelayanan rumah tangga												
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85%	1,425,037,961	90%	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	521,371,080	3 unit	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	1,632,407,337	85%	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%	73%	31,194,000	74%	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Persentase Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti	Persen	85 Persen	2,067,839,745	90 Persen	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Persentase Penurunan Berita Negatif	Persen	5 Persen	11,422,939,311	5 Persen	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan	0%	90%	1,849,196,674	90%	-							Biro Hubungan Masyarakat
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	453,616,500	80%	530,341,422							Biro Hukum
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	227,583,000	3 unit	10,860,000							Biro Hukum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,001,816,555	60%	284,715,472							Biro Hukum
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	1,663,000	73%	4,000,000							Biro Hukum
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda)	0 perda	10 perda	1,016,392,926	10 perda	447,152,775							Biro Hukum
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pergub)	0 pergub	5 pergub	665,543,226	7 pergub	651,304,911							Biro Hukum
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%)	0%	60%	285,314,084	65%	308,195,416							Biro Hukum
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0 peraturan	250 peraturan	1,832,316,701	255 peraturan	1,247,040,601							Biro Hukum
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	0%	90%	1,647,430,744	90%	1,204,503,793							Biro Hukum
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM	0%	80%	523,968,957	85%	388,793,400							Biro Hukum
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda)	0 perda	10 perda	-	15 perda	-							Biro Hukum
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85%	435,185,500	90%	457,338,864							Biro Organisasi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja	1 unit	2 unit	230,336,490	3 unit	207,709,900							Biro Organisasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Aparatur	pelayanan tepat waktu												
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	857,858,720	85%	850,814,450							Biro Organisasi
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0%	50%	847,923,559	61%	520,865,100							Biro Organisasi
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%	100%	119,603,800	100%	146,772,300							Biro Organisasi
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	68.93 Skor	69.5 Skor	2,356,579,230	70.5 Skor	1,077,718,700							Biro Organisasi
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	71.05%	73%	2,167,276,205	75%	772,488,050							Biro Organisasi
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	0%	87%	1,604,339,293	90%	1,378,063,550							Biro Organisasi
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	52.63%	60.53%	265,008,900	68.42 %	204,749,400							Biro Organisasi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	1,137,716,750	80%	894,723,420							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	222,064,000	2 unit	24,200,000							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Daerah
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	866,435,471	55%	527,904,274							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	73%	2,346,000	75%	3,370,000							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan KDH Sesuai SOP	0%	100%	621,173,520	100%	351,117,100							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Tapal Batas Wilayah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	0%	100%	1,381,133,204	100%	506,732,773							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100%	1,254,619,702	100%	2,960,175,215							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	0%	100%	1,120,675,150	100%	1,493,544,434							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0%	100%	681,263,017	100%	585,566,456							Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Sesuai Ketentuan												
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Predikat LPPD "ST"	0%	50%	-	60%	-							
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	602,330,225	75%	735,951,818							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	408,979,232	2 unit	530,279,367							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	757,596,811	45%	477,933,680							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	13,356,700	73%	13,744,650							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	0 Persen	80 Persen	2,077,134,583	85 Persen	1,013,042,303							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan, Kebudayaan,	0 Persen	80 Persen	1,281,837,594	85 Persen	864,648,260							Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga												
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0 Persen	80 Persen	1,030,245,150	85 Persen	672,749,300							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bansos yang tepat sasaran	0%	100%	2,722,402,370	100%	2,485,768,300							Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	463,039,500	80%	606,689,499							Biro Perekonomian
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	203,243,870	2 unit	17,777,000							Biro Perekonomian
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	865,216,376	55%	390,549,219							Biro Perekonomian
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	-	73%	-							Biro Perekonomian

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase kebijakan pengembangan bidang produksi daerah yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	100%	720,438,698	100%	360,535,915							Biro Perekonomian
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	100%	1,290,039,526	100%	391,057,201							Biro Perekonomian
4.01.50	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa yang Ditindaklanjuti/Terlaksana	100 Persen	100 Persen	905,463,543	100 Persen	435,430,326							Biro Perekonomian
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,141,664,482	85%	1,323,338,175							Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	846,585,898	2 unit	961,479,694							Biro Administrasi Pembangunan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	1,109,716,926	80%	347,054,750							Biro Administrasi Pembangunan
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	499,898,932	73%	6,093,400							Biro Administrasi Pembangunan
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	2,061,783,196	100 Persen	1,127,982,315							Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase permasalahan program/kegiatan yang ditindaklanjuti	0%	70%	1,641,374,446	75%	1,463,241,185							Biro Administrasi Pembangunan
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Persentase rencana kerja anggaran sesuai ketentuan	0%	100%	3,408,690,403	100%	2,274,506,657							Biro Administrasi Pembangunan
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	398,798,000	80%	-							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	83,300,660	2 unit	-							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,053,473,783	60%	-							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana	90%	75%	835,074,754	80%	-							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/ terlaksana	100%	75%	850,403,693	80%	-							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/terlaksana	90%	75%	876,218,662	80%	-							Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	13,801,711,657	76%	24,884,443,389							Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	31,629,938,252	1 unit	17,931,503,830							Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	70%	20,192,706,711	72%	7,204,677,023							Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	1,867,991,844	72%	1,756,804,054							Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	%	75%	54,992,877,675	77%	46,705,049,805							Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2,368,242,542	75%	4,090,079,223							Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	11,376,739,460	2 unit	2,938,210,688							Badan Penghubung Provinsi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	45%	1,188,223,903	50%	777,961,253							Badan Penghubung Provinsi
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	56,953,330	73%	141,926,985							Badan Penghubung Provinsi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pemerintahan													
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII	0 Orang	24000 Orang	456,187,200	24500 Orang	227,472,900							Badan Penghubung Provinsi
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	0%	80%	774,685,165	85%	312,783,751							Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	-	2 unit	-							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	30%	-	40%	-							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	-	73%	-							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.41	Program Peningkatan Ekonomi dan Sosial Bagi ASN/Anggota KORPRI dan Keluarga	Prosentase Kesejahteraan ASN / Anggota KORPRI dan Keluarganya	5%	15%	2,850,383,057	15%	1,276,723,000							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		0	0	0	0	0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Infrastruktur Fisik, Administrasi Perencanaan Daerah dan Pengambangan Kawasan		0.7	0	0.75	0	80%	-	85%	-	90%	-	Sekretariat Daerah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung		0	0	0	0	0%	-	0%	-	0%	-	Badan Penghubung Provinsi
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PEMERINTAHAN DAERAH		0	0	0	0	80%	-	83%	-	85%	-	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)						71%	1,400,000,000	79%	1,357,460,000	89%	1,493,206,000	Sekretariat Daerah
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Survey Kepuasan						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat DPRD
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah						100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah						100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)						77%	1,947,315,881	79%	2,302,775,000	81%	2,533,052,500	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)						92%	946,684,167	95%	2,291,215,000	97%	2,520,336,500	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks kelembagaan dan nilai rata rata unit pelayanan						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik						80%	-	83%	-	85%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Adbang						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Hukum						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Infrastruktur						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	penunjang Biro Kesejahteraan rakyat						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Organisasai dan tata laksana						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Perekonomian						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Biro Umum						0%	-	0%	-	0%	-	Semua Perangkat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Kelancaran Pelaksanaan dan Tugas Sekretariat DPRD						0%	-	0%	-	0%	-	Sekretariat DPRD
4.02	Pengawasan				17,141,848,659		15,973,554,586		6,500,000,000		10,104,090,400		10,150,000,000	
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,419,538,765	85%	1,655,914,278							Inspektorat
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	1,728,804,939	2 unit	1,732,363,335							Inspektorat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,762,513,290	85%	1,016,899,430							Inspektorat
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75.39 Skor	76 Skor	381,435,950	78 Skor	125,842,800							Inspektorat
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik	27 PD	28 PD	1,596,557,450	30 PD	169,176,500							Inspektorat
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	0 PD	17 PD	3,437,630,765	17 PD	147,089,800							Inspektorat
4.02.99	Program pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60 Nilai	65 Nilai	2,315,367,500	70 Nilai	1,094,155,279							Inspektorat
4.02.100	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (orang)	35 Orang	50 Orang	-	55 Orang	1,206,056,377							Inspektorat
4.02.101	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	10 Kegiatan	2,681,400,137							Inspektorat
4.02.102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	1,144,656,650							Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		0.3158	4500000000	0.5158	5000000000	64%	6,500,000,000	74%	10,104,090,400	100%	10,150,000,000	Inspektorat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatkan pencegahan KKN						0%	-	0%	-	0%	-	Inspektorat
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah						100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan biro umum						75%	-	75%	-	75%	-	Sekretariat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah						0%	-	0%	-	0%	-	Inspektorat
4.03	Perencanaan				49,919,883,860		29,206,644,330		-		-		-	
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.30%	85%	7,485,646,066	86%	6,144,064,878							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	13,398,870,968	3 unit	6,262,069,858							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana	13.80%	15%	6,819,249,909	17%	1,818,170,000							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77.69%	78%	568,572,788	78.50 %	3,970,373,696							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53.23 Persen	60 Persen	3,595,317,603	65 Persen	1,414,150,567							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	45.68%	50%	3,773,641,767	60%	1,982,289,650							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38.6 Persen	50 Persen	2,849,758,416	60 Persen	2,083,944,240							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	45.2 Persen	55 Persen	3,316,078,717	65 Persen	2,215,592,087							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78.53%	80%	8,112,747,625	85%	2,261,831,875							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.49	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82.30%	85%	-	87%	-							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	76%	-	78%	1,054,157,480							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran						85%	-	90%	-	95%	-	Semua Perangkat Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal						86.88%	-	87.00 %	-	88.00 %	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran						85%	-	90%	-	95%	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04	Keuangan				90,961,181,980		84,669,317,295		322,649,592,152		3,876,153,680,121		4,251,041,504,633	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	3,800,601,683	87%	4,613,798,258							Badan Pendapatan Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	3,440,259,524	5 unit	10,822,120,205							Badan Pendapatan Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	61%	3,419,382,682	63%	3,310,022,370							Badan Pendapatan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65 nilai AKIP	68 nilai AKIP	741,752,147	68 nilai AKIP	574,881,300							Badan Pendapatan Daerah
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	%	100%	3,642,725,160	%	-							Badan Pendapatan Daerah
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	0%	100%	4,580,898,573	100%	3,469,254,107							Badan Pendapatan Daerah
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	0%	100%	1,934,811,484	100%	747,610,724							Badan Pendapatan Daerah
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	0 Dokumen	18 Dokumen	840,323,131	18 Dokumen	546,305,600							Badan Pendapatan Daerah
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	%	100%	-	%	-							Badan Pendapatan Daerah
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	0 Obyek	0 Obyek	-	4 Obyek	2,549,600,699							Badan Pendapatan Daerah
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,594,807,163	87%	3,357,285,793							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Samarinda
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,110,345,142	3 unit	1,283,099,708							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	226,779,993	45%	133,701,864							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	0%	100%	421,935,866	100%	246,397,658							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,459,431,055	87%	3,013,438,062							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,062,348,146	3 unit	896,514,562							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	279,287,240	45%	143,168,500							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	0%	100%	709,318,330	100%	303,892,100							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,143,656,460	87%	1,279,612,869							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,268,258,260	3 unit	766,551,122							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	266,120,015	45%	218,794,896							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	0%	100%	610,581,260	100%	223,031,088							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,563,817,947	87%	1,612,481,327							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	207,816,824	3 unit	478,216,850							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	343,829,468	45%	214,770,680							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	0%	100%	430,874,969	100%	142,266,700							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,251,677,723	87%	2,462,223,331							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	722,620,121	3 unit	1,241,714,515							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	297,116,447	45%	252,935,166							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	0%	100%	547,266,324	100%	141,751,900							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	991,005,482	87%	1,138,135,829							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	306,108,800	3 unit	963,836,170							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	331,193,188	45%	324,981,355							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	0%	80%	287,296,189	80%	209,309,036							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	986,075,091	87%	1,175,383,579							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	811,112,182	3 unit	827,646,981							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	284,005,942	45%	290,242,739							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	0%	100%	346,790,407	100%	192,924,514							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	860,422,194	87%	1,169,620,397							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,128,125,065	3 unit	1,130,908,391							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	443,355,611	45%	254,993,155							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di	0%	100%	572,604,712	100%	205,948,199							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pendapatan Lain - Lain	UPTB Paser												
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	984,299,082	87%	1,094,610,909							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	553,022,820	3 unit	832,565,094							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	340,172,650	45%	330,067,843							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	0%	100%	357,002,757	100%	155,726,848							UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	6,667,918,967	80%	6,113,139,364							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	15 unit	3,216,693,429	20 unit	2,169,524,743							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	97,444,500	60%	2,067,859,863							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan yang sesuai dengan	%	80%	14,973,975,185	85%	14,537,190,383							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		dokumen rencana pembangunan daerah												
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi	0%	80%	1,407,289,967	85%	836,980,050							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	0%	80%	14,096,624,624	85%	3,602,279,899							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya		0	0	0	0	100%	1,145,950,000	100; %	1,633,400,000	100%	1,633,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)		0 %; wajib pajak	0	0 %; wajib pajak	0	100;93.519 %; wajib pajak	10,043,125,000	100;108.243 %; wajib pajak	11,471,100,000	100;124.295 %; wajib pajak	11,471,100,000	Badan Pendapatan Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan						80 persen	27,393,463,652	80 persen	3,595,808,138,060	80 persen	3,954,330,915,516	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan						88%	215,250,297,000	89%	198,424,285,561	90%	214,789,332,617	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Ditetapkan Tepat Waktu						80 persen	20,594,756,500	80 persen	20,594,756,500	80 persen	20,594,756,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Opini WTP dari BPK						80 persen	16,074,000,000	80 persen	16,074,000,000	80 persen	16,074,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Opini WTP dari BPK						80 persen	16,074,000,000	80 persen	16,074,000,000	80 persen	16,074,000,000	Semua Perangkat Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Opini WTP dari BPK						80 persen	16,074,000,000	80 persen	16,074,000,000	80 persen	16,074,000,000	Semua Perangkat Daerah
4.05	Kepegawaian				19,880,733,568		1,326,981,560		46,568,661,000		43,376,057,840		43,775,410,840	
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	84%	2,044,300,769	85%	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	1,798,910,382	5 unit	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	10%	1,404,166,409	11%	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 Nilai	75 Nilai	472,137,933	76 Nilai	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description	0%	0%	-	89%	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	0%	0%	-	75%	-							Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik	0%	0%	-	82%	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan	0%	0%	-	94%	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural	0%	97%	12,782,092,905	0%	-							Badan Kepegawaian Daerah
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	1,379,125,170	80%	1,326,981,560							Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Skor Sistem Merit		0 skor	0	0 skor	0	265 skor	19,924,814,205	270 skor	18,160,000,000	277 skor	18,463,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Kepegawaian						90%	23,929,377,027	91%	22,316,057,840	92%	22,312,410,840	Badan Kepegawaian Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Kepegawaian (UPTD PKP)						90%	2,714,469,768	91%	2,900,000,000	92%	3,000,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				23,580,807,152		13,725,273,526		44,364,570,000		43,817,013,712		43,817,013,712	
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,108,859,841		3,394,983,704							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	3,547,255,143	4 unit	4,726,867,284							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	726,672,046	92%	279,892,217							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	78 Nilai	425,651,135	81 Nilai	69,042,500							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	60%	70%	1,381,389,269	75%	800,398,175							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	5%	10%	3,284,817,500	15%	1,866,898,501							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan serta bagi jabatan fungsional	45%	50%	10,106,162,218	60%	2,587,191,145							Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang Pendidikan dan pelatihan						100%	26,022,204,276	100%	26,259,477,212	100%	26,259,477,212	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	meningkatnya pemenuhan hak ASN untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 jam						20%	18,342,365,724	25%	17,557,536,500	30%	17,557,536,500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		pelajaran per tahun												
4.07	Penelitian dan Pengembangan				4,373,907,399		4,990,242,453		323,808,533		831,094,398		1,696,641,597	
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,238,204,841	85%	1,268,803,028							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit	459,164,742	3 unit	799,236,203							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,025,852,957	81%	1,417,914,943							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 BB	78 BB	170,516,200	79 BB	24,817,400							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	80%	113,710,350	80%	206,157,500							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	0%	70%	419,061,341	80%	446,535,500							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	518,027,239	80%	417,223,900							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				Relisasi	Realisasi (Rp)	target	Realisasi (Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	0%	70%	429,369,729	80%	409,553,979							Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)		0	0	0	0	30%	323,808,533	50%	831,094,398	85%	1,696,641,597	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yg disampaikan ke perangkat daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan Persentase hasil penelitian yg disampaikan ke perangkat daerah dalam mendukung pembangunan IKN						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Balitbangda						0%	-	0%	-	0%	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	JUMLAH				**4,670,398,198,540**		**4,790,886,252,441**		**5,605,858,898,518**		**9,686,355,915,539**		**10,278,329,951,243**	

BAB 8
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat. tepat. dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Disamping itu. penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan. sebagai berikut:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
   a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
   b. Kesejahteraan sosial
2. **Aspek Pelayanan Umum**
   a. Pelayanan Urusan Wajib
   b. Pelayanan Urusan Pilihan
   c. Pelayanan urusan penunjang

3. **Aspek Daya Saing Daerah**
   a. Kemampuan Ekonomi;
   b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

8.1. Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.61	76.24	76.75	77.25	77.75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6.1	7.09	6.05	6.00	5.90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.09	6.88	6.81	6.75	6.50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.77	-5.46	-1.00	0.00	0.50
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175.65	n/a	167.5	170	175
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	5.35	-1.56	1.5	2	2.5
7	Nilai Tukar Petani	94.63	-	101	103	105
8	Indeks Gini	0.330	0.328	0.313	0.313	0.308
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78.81	75.95	75.95	81.61	82.52
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70.50)	B (71.50)	B (71.50)	B (72.50)	B (74.50)

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimanatan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	-	15.07	4.50	4.60	4.70	4.80	**4.80**
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0.93	1.02	0.97	0.99	1.01	1.03	**1.03**
1.3	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	-	14.93	15.23	15.68	**15.68**
1.4	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	-	7.46	8.24	9.44	9.64	9.86	**9.86**
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55	0.56	0,63	0,64	0,65	0,65	**0,65**
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,31	0.33	0,36	0,36	0,37	0.37	**0.37**
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,34	4,33	4,94	5	5,2	5,3	**5,3**
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,48	1,52	1,67	1,68	1,7	1,72	**1,72**
1.9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1.18	1.12	1.13	1.06	1.07	1.08	**1.08**
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**							
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.36	9.7	9.77	9.60	9.70	9.80	**9.80**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.49	13.69	13.72	14.34	14.73	14.96	**14.96**
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73.96	74.22	74.33	73.76	73.78	73.8	**73.8**
3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**							
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal (%)	17	77	150	233	233	233	**233**
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0.36	10	35	40	55	60	**60**
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
A	**Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1	Pendidikan							
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	72	25	150	233	233	233	**233**
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	30	25	55	70	86	86	**86**
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	68.23	69	73	77	82	85	**85**
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	95	96	98	99	100	100	**100**
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	791	2178	13000	19500	26000	31709	**31709**
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	635	6952	2500	2500	2500	2500	**2500**
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem	0	25	90	95	97	100	**100**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pendidikan jarak jauh (%)							
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	60	65	70	75	80	85	**85**
2	Kesehatan							
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif. 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	34	45	55	75	85	100	**100**
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	76	80	85	90	95	100	**100**
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	23.50	23.50	68	91	100	**100**
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87.50	87.50	90	100	100	100	**100**
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	7.922	-	-	-	-	**-**
3.2	Persentase Capaian Layanan SDA	-	-	-	73.69	76.00	78.91	**78.91**
3.3	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	50,00	54,59	62,64	64,64	66,64	68,64	**68,64**
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51.722	63.728	63.128	62.028	61.028	59.928	**59.928**
3.5	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	63.19	66.46	75.34	-	-	-	**-**
3.6	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	77.10%	87%	87%	**87%**
4	Ketentraman. Ketertiban Umum. Dan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perlindungan Masyarakat							
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	67.18	61.38	50	70	71	72	**72**
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	60	61.33	80	90.67	100	**100**
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85	75	80	89	90	91	**91**
5	Sosial							
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	300	385	405	2500	3000	3500	**3500**
b	**Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	50	**29,00**	**-0,27**	**33,14**	**35,00**	40,00	**40,00**
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	80	80	80	80	80	**80**
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	NA	0.09	30	35	40	45	**45**
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56.64	65.65	56.71	**65,63**	**65,64**	**65,70**	**65,70**
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	70	82	88	**90**	**90**	**90**
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	34	37	62	76	87	100	**100**
2.4	Rasio KDRT	0.066	18.16	27.2	0.048	0.042	0.038	**0.038**
2.5	Kampung KB	154	160	175	180	185	190	**190**
3	Lingkungan Hidup							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	5.6	25.18	50.72	27.75	28.5	29.33	**29.33**
3.2	Indeks Kualitas Air Sungai	-	77.09	53.7	58.03	58.13	58.23	**58.23**
3.3	Indeks Kualitas Udara	-	89.42	89.06	83.66	83.76	83.86	**83.86**
3.4	Indeks Kualitas Air Laut	-	-	83.51	83.61	83.71	83.81	**83.81**
3.5	Indeks Kualitas Lahan	-	72.12	79.76	79.81	79.86	79.91	**79.91**
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	308	132	448	413	368	**368**
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	302	310	393	30	35	**45**	**45**
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	289	415	456	30	35	**45**	**45**
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	63	368	393	**30**	35	**45**	**45**
4.5	Jumlah kampung/desa Iklim +	28	20	22	25	27	28	**28**
5	Perhubungan							
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000	**8.100.000**
5.2	Jumlah barang (ton)	325.051.663	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000	**370.000.000**
5.3	Peningkatan Fasilatas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (84%)	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (85%)	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (87%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)	**10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)**
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	864 Kasus	570 Kasus	488 Kasus	512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus	**342 Kasus**
6	Komunikasi dan Informatika							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	3.04	3.14	3.2	3.25	3.3	**3.3**
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
7.1	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	-	-	-	1	1	1	**1**
7.2	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	-	-	-	10	10	10	**10**
7.3	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	-	-	-	3	3	3	**3**
8	Kepemudaan dan Olahraga							
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	56.33	56.74	57.23	57.82	58.27	58.86	**58.86**
9	Kebudayaan	17	90	150	233	0	0	**0**
10	Perpustakaan							
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	244.7	145.731	77.884	577.1	639.3	703.23	**703.23**
c	**Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan**							
1	Pariwisata							
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2	3	2.00	2.00	2.00	2.00	**2.00**
1.2	Persentase tercapainya target jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi (%)	-	-	-	90	95	97	**97**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pertanian							
2.1	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi	-	-	-	7.100 Ha	8.100 Ha	8.700 Ha	**8.700 Ha**
2.2	Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura	-	-	-	6 unit	7 unit	7 unit	**7 unit**
2.3	Jumlah produksi padi	262.773 ton	253.820 ton	262430 ton	271.356 ton	279.681 ton	289.846 ton	**289.846 ton**
2.4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	-	-	-	273.070 ton	283.592 ton	292.383 ton	**292.383 ton**
2.5	Jumlah Aparatur. Non Aparatur yang dibina	-	-	-	85 orang	330 Orang	441 Orang	**441 Orang**
2.6	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina	-	-	-	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	**4 Lembaga**
2.7	Jumlah Miniranchyang teregister	-	5 unit	12 unit	24 unit	25 unit	30 unit	**120 unit**
2.8	Angka Kelahiran Sapi	19%	17.49%	20.10%	20.25%	21.00%	22.00%	**22%**
2.9	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	-	-	-	50%	60%	70%	**70%**
2.10	Peningkatan penerapan system jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	-	-	-	12%	13%	14%	**14%**
2.11	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	-	-	2,916 juta ton CO2eq	4,079 Juta Ton CO2eq	4,067 Juta Ton CO2eq	4,044 Juta Ton CO2eq	**4,044 Juta Ton CO2eq**
2.12	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	-	-	-	30 Kelompok Tani	30 Kelompok Tani	30 Kelompok Tani	**120 Kelompok Tani**
2.13	Luas Kebun yang dibangun	1.357.946 Ha	1.389.845 Ha	1.389.078 Ha	1.425.580 Ha	1.462.645 Ha	1.500.674 Ha	**1.500.674 Ha**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14	Produksi komoditas perkebunan (ton)	13,478,443	18,416,921	16.809.560 ton	17.136.849,15 ton	18.126.490,20 ton	18.313.874,25 ton	**18.313.874,25 ton**
2.15	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	**3 Lembaga**
2.16	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	-	-	18 Perusahaan	35 Perusahaan	35 Perusahaan	35 Perusahaan	**105 Produk**
3	Kehutanan							
3.1	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	118000	31368	32000	32000	32000	32000	**32000**
3.2	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	-	5221923.52	4808965.74	4950000	5000000	5050000	**5050000**
3.3	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	-	1428.65	864.9	7	7.5	8	**8**
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3.13	4.40	4.80	6.08	7.34	8.40	**8.40**
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945.607	1,032,475	1,105,227	1,135,000	1,165,000	1,200,000	**1,200,000**
5	Perdagangan							
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	-	11.76	12.877	1.57	1.72	1.89	**1.89**
5.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	-	-	-	5	5	5	**5**
6	Perindustrian							
6.1	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non	-	-	-	2	2	2	**2**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)							
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	151.918	148.197	155.000	161.216	164.441	167.730	**167,730**
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	149039	176.049	158.709	158,938	162,593	166170	**166170**
7.3	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	-	-	-	289.048 Ha	297.805,90 Ha	297.805,90 Ha	**297.805,90 Ha**
7.4	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	-	-	-	20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	**60 UMKM**
7.5	Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	-	-	-	40 IUP	30 IUP	30 IUP	**100 IUP**
d	**Fokus : Urusan Penunjang**							
1	**Perencanaan**							
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi. Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82.3	89.42	87	91	94	96	**96**
2	**Keuangan**							
2.1	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	-	11,775	10,132	9,590	11,001	12,122	**12,122**
2.2	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	-	-	-	100	100	100	**100**
2.3	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	-	-	-	100	100	100	**100**
2.4	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di	-	-	-	93,519	108,243	124,295	**124,295**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kalimantan Timur (wajib pajak)							
3	Pengawasan							
3.1	Hasil Penilaian Integritas	60	65	66.67	75	80	85	**85**
4	Umum/Sekretariat							
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71.05	73.68	74	77	79	81	**81**
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma. standar prosedur dan kriteria (%)	86	84	87	92	95	97	**97**
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	13.16	61	71	79	89	**89**
4.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52.63	60.53	60.53	78.95	89.47	92	**92**
C	**ASPEK DAYA SAING**							
1	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**							
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	61,45	69,77	66,53	68,53	72,62	**72,62**
1.2	Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan)	2	2	2	4	5	7	**7**
1.3	Capaian akses Air Minum Layak (%)	52,59	56.84	64,53	66,53	68,53	70,53	**70,53**
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618.5	13,728.50	13,878.50	14,028.50	14,278.50	14,778.50	**14,778.50**
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	641	477	420	374	329	**329**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673.42	1485,89	1248, 22	1198,22	1.148, 22	1.098,0 0	**1.098,0 0**
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73.18	66.46	66.46	75.94	76.74	83.1	**83.1**
1.8	Rasio elektrifikasi (%)	84.21	88.93	90.21	91.50	93.00	95.00	**95.00**
2	**Fokus iklim berinvestasi**							
2.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25.53	35.62	10.51	34.73	36.47	38.29	**38.29**
2.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8.16	3.84	2.38	3.84	3.84	3.84	**3.84**
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	15	14	13	12	11	10	**10**
2.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7.2	25.18	26.89	27.75	28.5	29.33	**29.33**
2.5	Indeks Resiko Bencana	155.49	154.49	153.49	152.49	151.49	150.49	**150.49**
3	**Fokus Sumber Daya Manusia**							
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76.55	76.55	76.60	76.65	77	78	**78**
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.22	81.5	82	82.3	82.50	83	**83**
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	**Level 4**

BIDANG PERENCANAAN PEGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044, https://bappeda.kaltimprov.go.id,